



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMIMPIN DAERAH SEBAGAI AGEN
(DRAMATURGI DALAM KOMUNIKASI POLITIK
WALIKOTA SOLO JOKO WIDODO)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Komunikasi

OLEH: CAHYADI INDRANANTO

NPM: 1006744471

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi
Kekhususan Manajemen Komunikasi

Jakarta

Juni 2012

PERNYATAAN ORISINALITAS

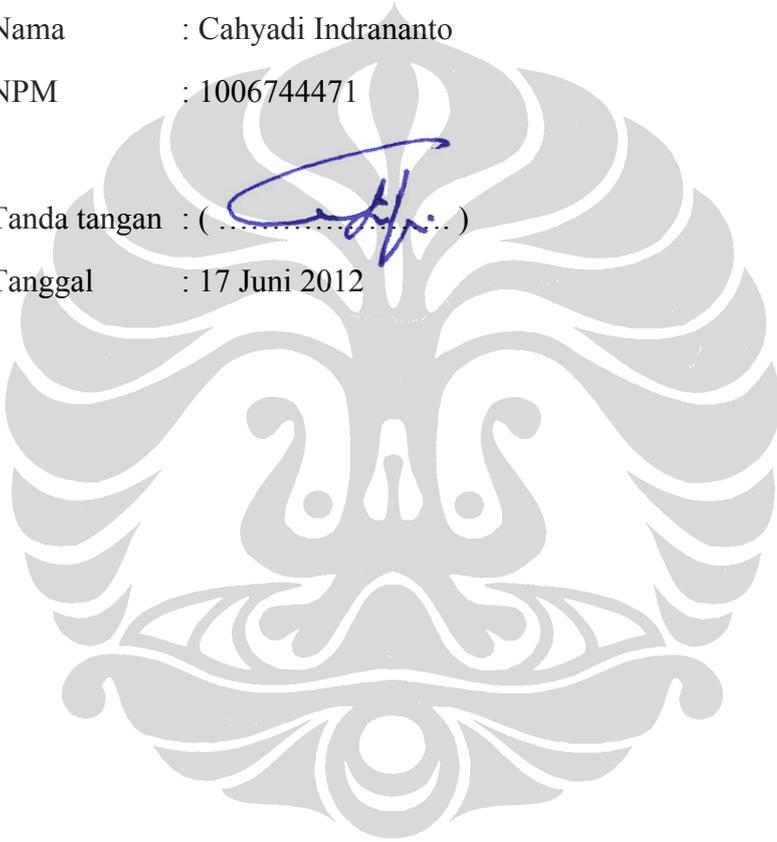
Tesis yang berjudul *“Pemimpin Daerah Sebagai Agen: Dramaturgi Dalam Komunikasi Politik Walikota Solo Joko Widodo”* ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Cahyadi Indrananto

NPM : 1006744471

Tanda tangan : ()

Tanggal : 17 Juni 2012



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahyadi Indrananto

NPM : 1006744471

Program Studi : Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Kekhususan Manajemen
Komunikasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia hak bebas royalti non-eksklusif (*non-exclusive, royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul ***“Pemimpin Daerah Sebagai Agen: Dramaturgi Dalam Komunikasi Politik Walikota Solo Joko Widodo.”***

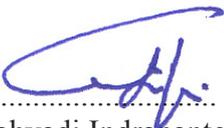
Dengan hak ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih-media, mengalih-formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya untuk keperluan akademis dan non-komersil, selama tetap menyantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Juni 2012

Yang menyatakan,


(.....)
Cahyadi Indrananto

PERSETUJUAN TESIS

Judul : *“Pemimpin Daerah Sebagai Agen: Dramaturgi Dalam
Komunikasi Politik Walikota Solo Joko Widodo”*

Peneliti : Cahyadi Indrananto

NPM : 1006744471

Program Studi : Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Kekhususan Manajemen
Komunikasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui di : Jakarta

Tanggal : 18 Juni 2012

Pembimbing:



(.....)
Drs. Eep Saefulloh Fatah, MA.

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Cahyadi Indrananto

NPM : 1006744471

Judul : ***“Pemimpin Daerah Sebagai Agen: Dramaturgi Dalam Komunikasi Politik Walikota Solo Joko Widodo”***

Tesis ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji, dan diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang:

Prof. Dr. Zulhasril Nasir, M.S.


(.....)

Pembimbing:

Drs. Eep Saefulloh Fatah, M.A.


(.....)

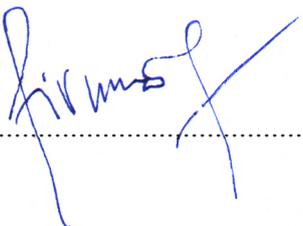
Penguji Ahli:

Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti


(.....)

Sekretaris Sidang:

Ir. Firman Kurniawan Sujono, M.Si.


(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Selepas menyerahkan salinan tesis ini kepada pihak Sekretariat Universitas Indonesia, saya langsung menghela nafas lega. Betapa tidak? Meskipun perjalanan karir telah membentuk diri sebagai seorang praktisi komunikasi lintas sektoral, namun untuk menganalisis dunia tersebut dari kacamata akademik adalah satu tantangan besar. Apalagi saya berkecimpung dalam kancah komunikasi politik melalui proses pembelajaran di lapangan tanpa bekal khusus ilmu komunikasi. Tak pelak, saya bersyukur tesis ini dapat tergenapi melalui usaha terbaik saya.

Sejak awal penyusunan tesis ini, bahkan ketika topiknya belum tegas terumuskan, saya telah bertekad untuk menghasilkan sebuah karya yang dapat membawa manfaat sosial, dan – semoga – memberi sekelumit nilai tambah untuk memahami kancah komunikasi politik Indonesia. Niat inilah yang menyemangati saya untuk menyusun bangunan konsep dari bongkahan teori yang sebelumnya tidak saya ketahui, menimba informasi di tengah jagat bernama Solo yang nyaris tak pernah saya kunjungi, dan memilah kata per kata yang menguntai logika tesis ini.

Semangat ini tak lekang karena dukungan mereka yang mengelilingi saya. Oleh karenanya, atas tunainya tesis ini, dengan rendah hati saya mengucapkan terima kasih kepada:

- ♠ Bapak Joko Widodo selaku walikota Solo dan figur sentral dalam tesis ini – yang di balik kebersahajaannya, selalu mantap pikiran dan tindakannya untuk sepenuhnya memberikan pelayanan pada masyarakat, dan telah menjadi inspirator bagi para abdi negara;
- ♠ Bapak Eep Saefulloh Fatah selaku pembimbing tesis dan mentor – yang lugas memberi asupan ide dalam diskusi, membuka cakrawala, dan mengokohkan optimisme saya akan masa depan Indonesia;
- ♠ Para staf Walikota Solo, khususnya mereka di Rumah Dinas Walikota Loji Gandrung: tim ajudan andal Devid Agus Yunanto dan Hango Henry,

serta sekretaris Lusya – yang teramat suportif dan memberikan akses yang luar biasa pada saya selama penelitian berlangsung;

- ♠ Teman-teman di kelas Pascasarjana Manajemen Komunikasi angkatan 2010, khususnya para anggota Kelas A – yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, namun sosok-sosoknya hadir dalam diskusi di kelas dan lorong kampus, sesi dialektika di kedai kopi, maupun momen senandung massal di ruang karaoke, serta menjadikan persahabatan yang jauh lebih mahal nilainya dari biaya kuliah kita;
- ♠ Orang tua saya, Bapak Djoko Purwono yang telah purna tugas duniawinya, dan Ibu Dwi Kustini Winarti – yang cinta dan dukungannya pada saya telah melampaui tuturan kata;
- ♠ Kedua kakak Ary Indrajanto dan Budiana Indrastuti, serta sang bintang kecil Aria Gaung Gentajiwa – yang selalu ada dan sepenuh hati percaya pada setiap langkah saya;
- ♠ Galuh Shinta Wardhani – yang kehadirannya membuat saya makin mendalami makna “*ada alasan di balik setiap kejadian.*”

Semoga harapan saya terwujud, yaitu bahwa lembar-lembar tesis yang Anda baca ini tidak terlalu sering terkatup berkalang debu di rak buku UI. Saya bermimpi, bahwa proses pemahaman yang dipaparkan di dalamnya akan menjadi rujukan bagi deliberasi lanjutan tentang komunikasi politik di negeri ini, serta menggugah inspirasi kita semua agar terus berkontribusi – dengan caranya masing-masing – untuk mewujudkan Ibu Pertiwi yang menyentosakan anak-anaknya.

Jakarta, 17 Juni 2012

Peneliti

ABSTRAK

Nama : Cahyadi Indrananto
NPM : 1006744471
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Kekhususan Manajemen
Komunikasi
Judul : ***“Pemimpin Daerah Sebagai Agen: Dramaturgi Dalam
Komunikasi Politik Walikota Solo Joko Widodo”***

204+xiv halaman, 4 gambar, 3 tabel, 85 buku dan rujukan lain

Desentralisasi di Indonesia, yang tumbuh seiring gelombang demokratisasi, telah mengubah langgam hubungan pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya, karena kini rakyat berwenang penuh untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Namun bersamaan dengan kehadiran wewenang tersebut, timbul permasalahan ketidakseimbangan informasi, yang diakibatkan oleh ketidak-tahuan masyarakat tentang kompetensi dan preferensi kebijakan pemimpin mereka. Hal ini menegaskan pentingnya seorang pemimpin daerah untuk menciptakan hubungan interaktif dengan masyarakatnya dan membangun kepercayaan mereka.

Untuk memahami hubungan tersebut, Peneliti melakukan pengamatan berperan-serta terhadap Walikota Surakarta (Solo) Joko Widodo (“Jokowi”) menggunakan bingkai teori dramaturgi Erving Goffman, yang memanfaatkan metafor teater untuk menganalisis perilaku manusia (Mulyana, 2010:106). Pemahaman tersebut lalu ditelaah menggunakan Teori Keagenan yang mempelajari tentang hubungan prinsipal-agen dan masalah-masalah di dalamnya (Eisenhardt, 1989:58). Peneliti mendapati bahwa melalui sikap yang tidak selamanya konsisten dengan pemahaman dramaturgi, Jokowi melaksanakan berbagai strategi komunikasi politik untuk memitigasi ketidak-seimbangan informasi di Kota Solo.

Kata kunci: *dramaturgi, hubungan prinsipal dan agen, komunikasi politik, pemimpin daerah, teori keagenan*

ABSTRACT

Name : Cahyadi Indrananto
Student's No. : 1006744471
Program : Postgraduate Study, Communications Science majoring in
Communications Management
Title : ***“Local Leaders as Agents: Dramaturgy on Political
Communications of City Mayor Joko Widodo of Solo”***

204+xiv pages, 4 diagrams, 3 tables, 85 books and other references

Decentralisation in Indonesia has changed the nature of relationship between the country's local leaders and their respective people, as the latter has now the sole discretion to elect their own leaders. This role naturally raises the information asymmetry, due to people's unawareness of the chosen leader's competence and policy preference. Such asymmetry underscores the importance for local leaders to develop an interactional relationship with its people to induce their faith on her/him.

For the purpose of this thesis, city mayor Joko Widodo (“Jokowi”) of Surakarta (Solo) was observed using the framework of Erving Goffman's Theory of Dramaturgy, which employs the metaphor of theatre to analyse human's behavior (Mulyana, 2010:106). The outcomes were then examined in the context of Agency Theory that studies principal-agency relationship and its underlying problems (Eisenhardt, 1989:58). Through this analysis, the thesis elicits Jokowi's political communications strategy that is not consistently aligned with the dramaturgical assumptions, and ways such strategy mitigate information asymmetry as the chief issue of the Agency Theory.

Keywords: *agency theory, dramaturgy theory, local leaders, political communications, principal and agent relationship*

DAFTAR ISI

<i>Pernyataan Orisinalitas</i>	II
<i>Pernyataan Persetujuan Publikasi Tesis Untuk Kepentingan Akademis</i>	III
<i>Persetujuan Tesis</i>	IV
<i>Pengesahan Tesis</i>	V
<i>Kata Pengantar</i>	VI
<i>Abstrak</i>	VIII
<i>Abstract</i>	IX
<i>Daftar Isi</i>	X
<i>Daftar Gambar</i>	XIII
<i>Daftar Tabel</i>	XIV
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.1.1. <i>Desentralisasi dan Dampaknya di Indonesia</i>	1
1.1.2. <i>Peran Pemimpin Daerah di Era Desentralisasi</i>	3
1.1.3. <i>Hubungan Pemimpin Daerah dan Masyarakat</i>	6
1.3. TUJUAN PENELITIAN	13
1.4. ASUMSI PENELITIAN	13
1.5. KEGUNAAN PENELITIAN	14
1.5.1. <i>Signifikansi Akademis</i>	14
1.5.2. <i>Signifikansi Praktis</i>	15
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN	15
 BAB 2. KONSEPTUALISASI	
2.1. POLITISI SEBAGAI PEMIMPIN POLITIK	18
2.2. KOMUNIKASI POLITIK	18
2.3. TEORI KEAGENAN	21
2.3.1. <i>Adverse Selection</i>	22
2.3.2. <i>Moral Hazard</i>	22
2.3.3. <i>Keagenan Politik</i>	23
2.4. PENDEKATAN DRAMATURGI	29
2.4.1. <i>Pertunjukan: Panggung Depan dan Panggung Belakang</i>	32

2.4.2. <i>Kontrol Terhadap Informasi</i>	36
2.4.4. <i>Manajemen Impresi</i>	38
2.4.5. <i>Dramaturgi dalam Politik</i>	40

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. METODE PENELITIAN	43
3.2. SUBYEK PENELITIAN DAN UNIT ANALISIS	44
3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	45
3.3.1 <i>Pengamatan Berperan-Serta</i>	45
3.3.2 <i>Wawancara</i>	47
3.3.3 <i>Analisis Dokumen</i>	49
3.4. PROSEDUR ANALISIS DATA	50
3.5. UJI KEABSAHAN DATA	51
3.6. PERIODE DAN LOKASI PENELITIAN	51

BAB 4. DRAMATURGI DALAM KOMUNIKASI POLITIK JOKOWI

4.1. KOTA SOLO: LOKASI AKSI JOKOWI.....	53
4.1.1. <i>Latar Belakang Kota Solo</i>	53
4.1.1.1. Geografi, Administrasi, dan Demografi Kota Solo.....	53
4.1.1.2. Sejarah dan Landasan Dinamika Sosial Politik Kota Solo	55
4.1.1.3. Pluralisme Politik Kota Solo.....	57
4.1.1.4. Kota Solo Sebagai Indikator Politik Nasional	59
4.1.2. <i>Latar Belakang Hubungan Jokowi dengan Warga Solo</i>	60
4.1.3. <i>Permasalahan Perkotaan Solo di Awal Pemerintahan Jokowi</i>	63
4.2. PENDEKATAN DRAMATURGI DALAM KOMUNIKASI POLITIK JOKOWI	66
4.2.1. <i>Panggung Depan Jokowi</i>	66
4.2.1.1. Proses Penciptaan Panggung Depan	66
4.2.1.2. Setting dan Personal Front Jokowi di Panggung Depan	73
4.2.2. <i>Panggung Belakang Jokowi</i>	78
4.2.2.1. Loji Gandrung: Kekaburan Panggung Depan dan Belakang Jokowi	78
4.2.2.2. Perilaku Jokowi di Panggung Depan dan Belakang	80
4.2.3. <i>Kontrol Jokowi Terhadap Informasi</i>	84

4.2.4. <i>Manajemen Impresi Jokowi</i>	88
4.2.4.1. Manajemen Impresi Melalui Sikap Konsisten	88
4.2.4.2. Manajemen Impresi yang Membangun Kepercayaan.....	91
BAB 5. KOMUNIKASI POLITIK JOKOWI DALAM TEORI KEAGENAN	
5.1. HUBUNGAN KEAGENAN JOKOWI DAN WARGA SOLO DI PILKADA 2010	97
5.2. STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK JOKOWI DALAM MENYEIMBANGKAN INFORMASI	99
5.2.1. <i>Jokowi Menyediakan Informasi Mengenai Diri dan Tindakannya</i> ...	100
5.2.1.1. Membuka Akses Informasi Bagi Masyarakat	100
5.2.1.2. Melibatkan Publik dalam Memecahkan Masalah Publik.....	102
5.2.1.3. Mendekati Pihak-pihak Ketiga.....	105
5.2.1.4. Mendekati Masalah Tanpa Perantaraan Birokrasi	109
5.2.2. <i>Tampak Selarasnya Kepentingan Jokowi dengan Kepentingan Masyarakat Solo</i>	112
5.2.2.1. Berupaya Bebas dari Konflik Kepentingan.....	112
5.2.2.2. Menghindari Glorifikasi Diri	115
5.2.2.3. Terjaganya Kepercayaan yang Telah Diberikan	118
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. KESIMPULAN PENELITIAN	121
6.2. IMPLIKASI PENELITIAN.....	131
6.2.1. <i>Implikasi Akademis</i>	131
6.2.2. <i>Implikasi Praktis</i>	133
6.3. KEKURANGAN PENELITIAN.....	134
6.4. SARAN-SARAN PENGEMBANGAN PENELITIAN	139
DAFTAR REFERENSI	141
LAMPIRAN 1: REKAPITULASI HASIL PENELITIAN BERPERAN-SERTA DALAM KEGIATAN HARIAN JOKOWI	147
LAMPIRAN 2: TRANSKRIP WAWANCARA JOKOWI	182

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Konseptual Tesis	17
Gambar 2. Model Keagenan Politik (diadaptasi dari perspektif Teori Keagenan Berliant dan Duggan, 2008)	23
Gambar 3. Model Pendekatan Dramaturgi Erving Goffman (diadaptasi dari Hare dan Blumberg, 1988:7).....	32
Gambar 4. Model Pendekatan Dramaturgi Dalam Aplikasinya.....	95



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Pilkada Solo 2005 (Arief, 2011:61-62).....	62
Tabel 2. Perbandingan jumlah undangan ke acara seremonial/formal kepada Jokowi, yang didisposisi dan yang dihadiri sendiri	69
Tabel 3. Hasil Pilkada Solo 2010 (Rejeki dan Sinombor, 2010).....	99



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

1.1.1. Desentralisasi dan Dampaknya di Indonesia

Sejak medio 1970, dunia mengalami pertumbuhan demokrasi yang sangat tinggi. Diamond (1997:2) mencatat bahwa dari tahun 1974 sampai 1996, jumlah negara yang dapat dikategorikan sebagai negara demokratis bertambah dari sekitar 40 negara menjadi 76 sampai 117 negara, tergantung bagaimana cara seseorang mendefinisikan makna “demokratisasi.” Samuel Huntington menyebut fenomena pertumbuhan negara demokrasi di periode ini sebagai “*Demokratisasi Gelombang Ketiga*” (Huntington, 1991:3), yang kemudian dipopulerkan oleh para peneliti sesudahnya. Sebagaimana dikutip Diamond, Huntington mendefinisikan periode ini sebagai “*sekelompok transisi dari rezim non-demokratis menjadi rezim demokratis pada suatu periode yang spesifik, yang secara signifikan lebih banyak daripada transisi berlawanan di periode yang sama*” (1997:2).

Demokratisasi Gelombang Ketiga ini berkaitan erat dengan konsep desentralisasi kekuasaan. Diamond berargumen bahwa norma-norma yang ada di dalam suatu negara demokratis mampu mendorong tumbuhnya mekanisme penyelesaian konflik masyarakat di dalam negara tersebut, dan salah satu mekanisme ini adalah “*otonomi regional yang diiringi dengan devolusi kekuasaan yang sesungguhnya*” (1997:4). Hal ini sejalan dengan pandangan Bergh (2004:781) bahwa devolusi kekuasaan adalah salah satu bentuk dari desentralisasi, sebagaimana definisi yang ia kutip dari Litvack *et al.* sebagai berikut:

“Devolusi adalah suatu penyerahan otoritas dari pemerintah pusat menyerahkan otoritas pengambilan keputusan, alokasi keuangan, serta manajemen kepada pemerintah lokal yang semi-otonom, termasuk di antaranya adalah wewenang untuk memilih pemimpin dan anggota Dewan Perwakilannya, mengatur tingkat pendapatannya, dan memiliki otoritas yang menentukan kebijakan investasi di daerahnya” (dalam Bergh, 2004:781).

Ide dasar desentralisasi, menurut Knight dan Johnson (2011:51) adalah bahwa pemerintah akan semakin responsif dengan keinginan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan juga semakin dapat dipertanggung-jawabkan. Hal ini dapat terjadi apabila pengambilan keputusan tersebut dibawa sedekat mungkin dengan setiap warga masyarakat yang akan terimbas oleh keputusan tersebut.

Di Indonesia, desentralisasi terjadi seiring dengan lajunya proses demokratisasi di Indonesia yang ditandai dengan gelombang reformasi tahun 1998. Setahun kemudian dibentuk dasar hukum desentralisasi, yaitu UU No. 22 tahun 1999, yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 32 tahun 2004, mengenai Pemerintahan Lokal, yang pada esensinya memindahkan sebagian kewenangan dari ranah pemerintahan nasional (pemerintah pusat) kepada pemerintah di tingkat kabupaten dan kota.

Munculnya sistem desentralisasi di Indonesia telah membawa berbagai hal positif. Zuhro *et al.* (2009:7) berargumen bahwa desentralisasi di negara ini telah meningkatkan kesadaran politik masyarakat meningkat. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat, baik dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif, pemilu presiden, maupun pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian Zuhro *et al.* menunjukkan bahwa proses desentralisasi telah menghasilkan

beberapa pencapaian positif, dengan meningkatnya partisipasi warga dalam hal pengembangan transparansi dan akuntabilitas publik. Hal ini selaras dengan pendapat Bergh (2004:781) yang menjelaskan bahwa salah satu keuntungan desentralisasi adalah semakin tersedianya kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Di sisi lain, desentralisasi juga mendatangkan berbagai eksese negatif di Indonesia. Bergh (2004:782) mengingatkan bahwa apabila pemerintah di daerah tidak memiliki kemampuan teknis dan administratif yang kuat, pelayanan publik justru akan makin tidak efisien dan efektif dibandingkan masa sebelum desentralisasi. Sementara itu, Zuhro (2009:10) menengarai bahwa desentralisasi dapat memunculkan berbagai peraturan daerah yang bermasalah. Satu kelemahan penting lain menurut Vedi Hadiz adalah bahwa saat ini tengah terjadi kecenderungan reorganisasi kekuasaan oleh kelompok oligarki di tingkat daerah, yang memunculkan “raja-raja kecil,” yaitu pemerintah daerah yang seolah-olah memiliki kekuasaan tanpa batas di daerah, yang berujung pada fenomena korupsi dan nepotisme di tingkat lokal (Zuhro *et al*, 2009:10).

1.1.2. Peran Pemimpin Daerah di Era Desentralisasi

Paparan di atas menunjukkan bahwa salah satu komponen penting yang menentukan kesuksesan atau kegagalan desentralisasi di daerah adalah para aktor demokrasi, karena merekalah yang menentukan arah dan dinamika demokrasi di tingkat tersebut. Zuhro (2009:2) menjelaskan setidaknya ada dua alasan penting untuk mengkaji peran aktor dalam proses demokrasi lokal. **Pertama**, dalam konteks budaya politik lokal, aktor adalah agen budaya. Sebagai agen budaya, aktor merupakan penerus nilai-nilai budaya politik yang tumbuh dan berkembang

di ranah lokal. Pada saat yang sama aktor juga pencipta (produsen) budaya, sehingga perilaku politik sang aktor dapat memengaruhi perubahan dan kesinambungan nilai-nilai budaya politik lokal.

Kedua, pentingnya peran aktor politik adalah resultan dari proses demokrasi itu sendiri. Proses transisi politik yang terjadi di Indonesia pasca-Reformasi 1998 telah menempatkan aktor politik di Indonesia dalam posisi yang jauh lebih strategis daripada masa sebelum Reformasi. Ini karena pada masa ini, tercipta suatu dinamika hubungan antara aktor politik di tingkat lokal dan di tingkat nasional. Berbagai kebijakan, seperti pengejawantahan konsep desentralisasi dan tata aturan hukum, ditetapkan di tingkat nasional, namun dilaksanakan dan berpengaruh di tingkat lokal (Zuhro, 2009:3).

Selain itu, para aktor lokal juga harus memegang kendali atas dinamika pemerintahan gaya baru yang timbul sebagai konsekuensi logis dari desentralisasi itu sendiri. Dalam penelitian ke beberapa daerah di Indonesia, Zuhro *et al.* menemukan telah terjadi pergeseran peran birokrasi di tingkat daerah, yaitu dari *bureaucratic authoritarian* menjadi *bureaucratic pluralism* (2009:4). Struktur birokrasi saat ini bukanlah lagi satu konstruksi eksklusif dan tertutup yang tidak terjamah oleh pihak luar, namun telah bertransformasi menjadi makin terbuka terhadap tekanan dari berbagai kekuatan sosial lain (*societal forces*) di masyarakat. Kekuatan sosial semacam ini adalah dampak dari adanya sistem multipartai dan terciptanya proses pergantian kepemimpinan yang didasarkan pada kompetisi melalui pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Konsekuensi lain dari *bureaucratic pluralism* adalah bahwa tak satupun kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah terbebas dari pantauan masyarakat (Zuhro *et al*, 2009:5). Di era pasca Reformasi, beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) mendapatkan tekanan dari elemen-elemen masyarakat terkait perbedaan pandangan terhadap substansi RUU tersebut, dan mengakibatkan RUU tersebut direvisi, ditunda, atau dibatalkan seluruhnya. Hal tersebut menandakan bahwa seiring dengan makin kokohnya semangat desentralisasi, partisipasi warga juga makin meningkat dalam proses demokrasi di ranah lokal. Semangat partisipatoris tersebut juga telah terbakukan menjadi aturan legal-formal di beberapa tempat. Penelitian *5th Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA)*, menunjukkan banyaknya peraturan daerah yang mendorong transparansi pemerintah lokal dan keterlibatan masyarakat.¹ Tingginya tingkat partisipasi warga juga terlihat dari makin berkembangnya kelompok masyarakat madani (*civil society organizations*) di tingkat lokal yang turut berperan dalam mendorong partisipasi warga untuk ambil bagian dalam praktek demokratisasi lokal (Antlov sebagaimana dikutip Zuhro *et al*, 2009:7). Keterlibatan masyarakat yang demikian aktif dimetaforkan oleh Zuhro sebagai “...Kotak Pandora yang terbuka (dan) membuat berbagai keragaman serta ke-bhinneka-an yang tertekan dan terpendam di masa kekuasaan otoritarian Orde Baru mendapat salurannya” (2009:11).

¹ Metodologi yang dipergunakan oleh IRDA adalah *appraisal method*, yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data “informal,” antara lain wawancara semi-terstruktur, *focus group discussions* oleh para periset yang memahami konteks lokal, dan analisis data sekunder menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif.

Penjelasan di atas juga menunjukkan bahwa keterlibatan publik selaku pemangku kepentingan telah memungkinkan terjadinya proses renegotiasi batas-batas dalam menjalankan proses kenegaraan. Zuhro memandang hal ini pada gilirannya menyebabkan *“relasi kuasa antara negara, kekuatan pasar, dan masyarakat ataupun antara pusat dan daerah dipertanyakan kembali”* (2009:11). Padahal dalam proses renegotiasi batas dan kepentingan, konflik adalah satu keniscayaan. Oleh karena itu, tak pelak diperlukan adanya aktor yang mampu menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, agar dapat mengelola konflik tersebut dengan baik pula.

1.1.3. Hubungan Pemimpin Daerah dan Masyarakat

Hubungan antara aktor dan pemangku kepentingan di tingkat lokal diatur oleh UU No. 32 tahun 2004, yang menyatakan bahwa masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk memilih pemimpin daerahnya sendiri melalui sebuah pemilihan lokal. Ini adalah perubahan signifikan dari peraturan yang sebelumnya, yaitu UU No. 22 tahun 1999, yang mengatur bahwa pihak legislatif (lembaga perwakilan rakyat) yang memiliki wewenang untuk memilih kepala daerah.

Dengan adanya undang-undang yang menyerahkan kewenangan kepada masyarakat lokal semacam itu, dapat dipahami bahwa secara yuridis masyarakat lokal memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding pemimpin daerahnya. Lewat sebuah mekanisme pemilihan secara langsung, masyarakat kemudian mendelegasikan kewenangan yang dimilikinya kepada orang yang mereka pilih, dengan tujuan untuk menjadikan orang tersebut wakil atau agen yang

menjalankan kepentingan mereka. Proses pemilihan semacam itu disebut sebagai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilangsungkan sekali setiap lima tahun.

Adanya keterkaitan antara pemberi wewenang dan penerima wewenang semacam ini menunjukkan bahwa pemimpin daerah perlu melakukan pekerjaan untuk meyakinkan masyarakat agar mempercayai dirinya untuk menjadi wakil mereka. Dalam perspektif ini, masyarakat adalah “konsumen” yang perlu dipersuasi untuk memberikan dukungan kepada calon pemimpin daerah di hari pemilihan (Swanson, 2004:46-47). Kondisi semacam ini menjadikan terciptanya satu pasar politik yang mengharuskan politisi yang berkeinginan untuk menjadi pemimpin daerah untuk memiliki pemahaman mengenai pemilih, dan “pasar” tempat para pemilih berada (Kotler dan Kotler, 1999).

Hubungan relasional semacam ini juga menunjukkan, bahwa pasar politik tidak hanya terjadi pada waktu pemilihan, namun berkelanjutan selama periode wewenang itu diberikan hingga tiba masanya pemilihan yang berikutnya. Hal ini karena dukungan masyarakat sebagai pemilik wewenang politik harus terus ditumbuhkan dan dijaga melalui komunikasi yang berkesinambungan (Swanson, 2004:45). Dengan kata lain, proses kampanye sebenarnya juga terjadi di rentang periode di antara dua pilkada. Dalam rentang periode ini, pemimpin dituntut untuk mewujudkan berbagai janji kampanye yang telah ia tawarkan di masa kampanye pilkada sebelumnya, dalam wujud berbagai kebijakan dan program kerja.

Proses komunikasi di antara kedua pemilihan ini, sebagaimana disimpulkan oleh Arief (2011:14), dapat dilakukan melalui apa yang disebut Blumenthal sebagai sebuah proses *permanent campaign*, yaitu sebuah upaya pemimpin untuk terus

merawat para pemilihnya dengan menggerakkan birokrasi pemerintahnya untuk melaksanakan program yang berorientasi rakyat, serta meraih popularitas melalui pemberitaan media secara berkesinambungan. Dalam *permanent campaign*, seorang kandidat tidak menghentikan aktivitas kampanyenya ketika ia sudah terpilih untuk menduduki jabatannya, tetapi justru melanjutkan proses kampanye tersebut dengan mewujudkan berbagai janji yang ia sampaikan sepanjang saat kampanye. Pada gilirannya, publik membandingkan dan mengevaluasi, apakah terdapat kesesuaian antara janji seorang kandidat dan pelaksanaan program saat ia sudah memerintah (Blumenthal dalam Arief, 2011: 22).

Kenyataannya, secara umum fakta-fakta yang ada di Indonesia mengarah pada kondisi masih jauh dari idealisme *permanent campaign* di atas. Sebagai contoh, Astuti (2009:180-181) mencatat bahwa akuntabilitas para pemegang jabatan politik kepada rakyat saat ini relatif masih rendah. Ia juga melihat bahwa dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, kepentingan penguasa selalu menjadi kriteria yang dominan dan seringkali menggosur kepentingan masyarakat banyak manakala keduanya tidak seiring.

Di sisi lain, telah muncul indikasi beberapa pemimpin daerah yang berhasil menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat pemilihnya, dan ini dibuktikan dengan dukungan mereka secara signifikan di periode kedua pemerintahan sang pemimpin. Sebagai contoh, di tahun 2010 pasangan Herman Deru dan Kholid Mawardi mampu memenangi Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan untuk kedua kalinya dengan meraup 94,56% suara. Perolehan suara ini tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah pilkada di Indonesia. Arief (2011:4) berkesimpulan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras Heru

untuk merebut hati rakyat OKU di masa kepemimpinan periode pertamanya, antara lain melalui upaya mentransformasi OKU menjadi lumbung beras bagi provinsi Sumatera Selatan.

Contoh lain adalah dr. Herman Sutrisno, yang pada tahun 2008 terpilih menjadi Walikota Banjar, Jawa Barat untuk kedua kalinya dengan perolehan suara 92,17%. Kemenangan dengan perolehan suara signifikan ini terkait dengan upaya Herman memberikan layanan sebaik mungkin pada warga Banjar sejak menjadi walikotanya yang pertama, antara lain melalui perbaikan besar-besaran pada layanan kesehatan (Budiarti dan Achmad, 2011:122).

Di Jawa Tengah, Joko Widodo (yang mempopulerkan dirinya dengan panggilan “Jokowi”) juga memenangi pemilihan Walikota Surakarta (Solo) di tahun 2010 untuk kedua kalinya dengan suara 90,09%. Perolehan suara yang tinggi tersebut adalah imbal balik masyarakat Solo dari keberhasilan Jokowi untuk membenahi kota tersebut dalam waktu relatif singkat, khususnya untuk masalah di bidang pelayanan kemasyarakatan, kesehatan dan penataan kota (Riyadi, 2011:104).

Keberhasilan Jokowi secara khusus dianggap merupakan keunggulan tersendiri dibanding para pemimpin daerah lain. Sebagaimana diidentifikasi oleh Arief (2011:14), Jokowi antara lain dihadapkan pada keunikan demografis dan sosiokultural Kota Solo. Dengan penduduk lebih dari setengah juta jiwa, Solo termasuk salah satu kota besar di Jawa dengan berbagai persoalannya yang kompleks. Masyarakat Kota Solo juga relatif memiliki tingkat edukasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan Kabupaten OKU maupun Kota Banjar, sehingga mereka dikenal sangat kritis. Selain itu, Kota Solo dikenal sebagai kota dengan

tingkat keragaman sosial dan politik masyarakat tinggi dan menjadi pusat berbagai gerakan radikal, baik berbasis nasionalisme maupun religius.

Keberhasilan Jokowi mengelola daerah dengan tingkat kompleksitas tinggi seperti Kota Solo berujung pada diberikannya berbagai penghargaan atas prestasinya, antara lain terpilihnya Kota Solo di peringkat pertama sebagai daerah berprestasi tingkat nasional versi Kementerian Dalam Negeri RI (Lugito, 2011:8), serta dinobatkannya Jokowi sebagai *Tokoh Pilihan Tempo 2008* (“Program,” 2008:54-57) dan *Tokoh Perubahan Republika 2010* (Utomo, 2011:187-195). Keberhasilan Jokowi di Kota Solo bahkan menjadi sorotan nasional dan membuat namanya dipertimbangkan dalam kancah politik yang lebih tinggi. Ini terbukti antara lain dalam hasil riset Laboratorium Psikologi Politik UI dan The Cyrus Network (2011) yang menyurvei 100 pakar dan *opinion leaders*. Dalam survei ini, Jokowi mendapatkan suara terbanyak sebagai tokoh yang layak untuk dinominasikan sebagai calon gubernur DKI Jakarta.² Fenomena ini merupakan hal yang baru, khususnya karena sepanjang catatan Peneliti, belum pernah ada kepala daerah tingkat kota dan kabupaten di Indonesia yang secara serius diperhitungkan untuk langsung memimpin ibukota negara tanpa melewati “jenjang jabatan perantara” sebagai kepala daerah tingkat provinsi.

Sedangkan di kalangan akademis, prestasi Jokowi telah menjadi subyek berbagai kajian terkait aspek-aspek kepemimpinannya sebagai Walikota Solo, antara lain oleh Arief (2011), Enggarani (2006), Martono (2006) dan Nurbarani (2009). Arief

² Riset LPP-UI dan The Cyrus Network ini dilakukan dalam dua tahap: Tahap pertama adalah *focus group discussions* dengan para pakar yang relevan untuk merumuskan berbagai persoalan di Jakarta, mengualifikasi calon pemimpin yang tepat, dan menominasikan nama-nama potensial; Tahap kedua adalah survei terhadap 100 *opinion leaders* yang mewakili 10 kelompok masyarakat, untuk mencari konsensus atas nama-nama yang dinominasikan tersebut.

secara khusus menyebut berbagai pencapaian Jokowi tersebut menjadikannya sebagai “*market leader* dalam teori *political marketing*” (2011:14).

Berangkat dari latar belakang ini, Peneliti secara mendalam meneliti Jokowi yang dianggap sukses dalam menerapkan *permanent campaign* sehingga mampu membangun figur diri yang positif dan menjaga kepercayaan publik, khususnya untuk mengetahui teknik-tekniknya dalam mengomunikasikan diri dan kebijakannya secara efektif kepada masyarakat pemilihnya.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Secara hirarkis, hubungan delegasi wewenang dari masyarakat langsung kepada pemimpin politik dapat dijelaskan dalam konsep delegasi wewenang. Pendelegasian terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang (yang selanjutnya disebut prinsipal atau *principal*) memilih orang atau kelompok lain (agen atau *agent*) untuk bertindak sesuai kepentingan prinsipal (Lupia dan McCubbins, 2000). Hal ini adalah pembahasan utama dalam **teori keagenan** (*agency theory*), yang juga menjelaskan bahwa seiring proses delegasi tersebut, timbul masalah-masalah keagenan (*agency problems*).

Dalam upaya pemenuhan kepentingan prinsipal tersebut, seorang agen perlu melaksanakan proses komunikasi dengan prinsipal. Agen tersebut juga harus menempatkan dirinya sedemikian rupa, sehingga prinsipal memiliki pemahaman bahwa ia telah bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Oleh karena itu, proses komunikasi yang dilakukan oleh agen tersebut kaya atas upaya pembentukan citra-dirinya yang stabil, agar dapat dimaknai oleh prinsipal sesuai dengan citra-diri agen tersebut.

Kegiatan membangun citra-diri ini ditelaah secara mendalam oleh Erving Goffman dalam **pendekatan dramaturgi** (*dramaturgical approach*). Melalui analisis tentang pembentukan citra-diri, kajian dramaturgi memfokuskan diri pada penciptaan, penjagaan dan penghancuran pemahaman bersama tentang realita, oleh orang-orang yang bekerja baik sendiri atau bersama-sama, untuk memunculkan satu pandangan atau gambaran yang tunggal dan selaras terhadap realita tersebut (Kivisto dan Pittman, 2007:272). Maka menurut pandangan dramaturgi, kehidupan sosial adalah tak ubahnya sebagai serangkaian pertunjukan drama di panggung. Berangkat dari pandangan ini, kajian dramaturgi mengasumsikan bahwa ketika orang-orang berinteraksi, orang-orang tersebut “mengelola” impresi yang ia berikan kepada orang lain (Goffman, 1956:3).

Dengan pemahaman terhadap teori keagenan dan perspektif dramaturgi, serta menjadikan Walikota Solo Jokowi sebagai subyek penelitian, maka dalam tesis ini Peneliti meneliti tentang **“Pemimpin Daerah Sebagai Agen”** dengan melakukan studi mengenai **“Dramaturgi dalam Komunikasi Politik Walikota Solo Joko Widodo.”** Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sejauh ini, Peneliti merumuskan dua pertanyaan utama sebagai masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Jokowi untuk mengelola hubungan dengan masyarakat Solo dilihat dari perspektif dramaturgi?
2. Bagaimanakah Jokowi memanfaatkan strategi komunikasi politiknya untuk menjaga keseimbangan informasi dalam hubungannya dirinya selaku agen dan masyarakat Solo selaku prinsipal dalam hubungan keagenan?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berlandaskan rumusan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka Peneliti merumuskan tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Jokowi dalam mengelola hubungan dengan masyarakat Solo, dilihat dari bingkai pendekatan dramaturgi Erving Goffman;
2. Untuk mengetahui bagaimana Jokowi menggunakan strategi komunikasi politik tersebut dalam menjaga hubungannya selaku Walikota Solo dengan masyarakat Solo sebagai pihak yang mendelegasikan wewenang kepadanya.

1.4. ASUMSI PENELITIAN

Mengacu pada rumusan di atas, Peneliti membangun asumsi-asumsi sementara bagi penelitian ini sebagai berikut:

1. Munculnya desentralisasi di Indonesia telah menciptakan sebuah hubungan keagenan antara pemimpin politik dengan masyarakat, dan pada gilirannya telah menimbulkan berbagai masalah keagenan. Dalam menjalankan perannya sebagai walikota Solo dan berinteraksi dengan masyarakat Solo, Jokowi setidaknya secara konseptual menyadari eksistensi masalah keagenan ini.
2. Dalam komunikasi politiknya ke masyarakat baik secara langsung maupun melalui perantara media, Jokowi melakukan langkah-langkah yang konsisten dengan perspektif dramaturgi Erving Goffman, termasuk ketika

ia memanfaatkan panggung depan dan panggung belakang, melakukan kontrol terhadap informasi, serta menjalankan manajemen impresi.

3. Langkah-langkah yang dipilih Jokowi dalam memainkan perannya sebagai aktor ia pergunakan untuk mengurangi permasalahan keagenan yang timbul antara dirinya dan masyarakat Solo.

Patut Peneliti cantumkan di sini, bahwa penelitian ini sama sekali tidak berpretensi untuk dapat digeneralisasikan ke subyek penelitian lain, seperti pemimpin daerah selain Jokowi, maupun kepada obyek lain, seperti interaksi Jokowi di luar Kota Solo.

1.5. KEGUNAAN PENELITIAN

1.5.1. Signifikansi Akademis

Seiring perkembangan demokrasi Indonesia yang makin dinamis dan partisipatif, makin banyak pula penelitian di Indonesia yang mengkaji mengenai aspek komunikasi para pemangku-kepentingan di ranah politik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Berdasarkan pengamatan Peneliti, setidaknya ada satu penelitian mengenai komunikasi elit politik tingkat nasional dilihat dari kacamata pendekatan dramaturgi, yaitu yang dilakukan oleh Lely Arriane (2010) dan telah diterbitkan menjadi buku berjudul *“Komunikasi Politik, Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik.”* Namun Peneliti belum mendapati penelitian yang berupaya memahami proses komunikasi politik di tingkat daerah (baik provinsi, ataupun kota dan kabupaten) menggunakan pendekatan dramaturgi untuk memahami komunikasi politik dan konflik keagenan pemimpin daerah. Oleh karena itu, tesis ini diharapkan dapat memperkaya khazanah penelitian komunikasi politik Indonesia, dengan menjadi literatur yang secara khusus mendalami panggung

politik kepala daerah. Untuk alasan yang sama, penelitian ini diharap mampu memicu studi lanjutan dengan teori dan metodologi serupa di kota dan kabupaten lain di Indonesia, sehingga memungkinkan analisis komparatif terhadap strategi komunikasi politik para pemimpin daerah.

1.5.2. Signifikansi Praktis

Tesis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para aktor di tingkat pemerintahan lokal khususnya bagi para pemimpin daerah, mengenai pengelolaan komunikasi politik di tingkat pemerintahan lokal, dan sekaligus menjadi bahan kajian untuk mengidentifikasi komponen yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi tersebut.

Dalam lingkup yang lebih luas lagi, analisis dan kesimpulan yang dicapai dalam tesis ini diharapkan dapat makin mempertegas kesadaran di masyarakat, bahwa dalam proses hubungan keagenan pada tingkat tata kelola pemerintahan, masyarakat adalah prinsipal yang memiliki wewenang untuk menentukan agen yang sesuai dengan kepentingan mereka. Dengan mengambil subyek analisis Jokowi yang telah dikenal luas dan kinerjanya selaku walikota mendapatkan berbagai pengakuan positif, diharapkan tesis ini dapat menjadi cikal-bakal munculnya literatur dan dialektika lebih banyak yang mampu menggugah optimisme publik serta mendorong peran aktif mereka dalam mengawal pemerintahan di daerah.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini terdiri atas enam bagian. Bagian pertama berisi pendahuluan, yang menjabarkan latar belakang permasalahan, serta merumuskan permasalahan,

tujuan penelitian, asumsi penelitian, dan kegunaan penelitian baik secara akademis maupun praktis.

Bagian kedua berisi kerangka pemikiran bagi terbangunnya tesis ini, yaitu konseptualisasi terhadap politisi sebagai pemimpin politik, komunikasi politik, Teori Keagenan, dan Perspektif Dramaturgi.

Bagian ketiga dari tesis ini merupakan paparan mengenai metodologi penelitian, yang terdiri atas metode penelitian yang digunakan, subyek penelitian dan unit analisis, teknik pengumpulan data, prosedur analisis data, uji keabsahan data, serta periode dan lokasi penelitian ini.

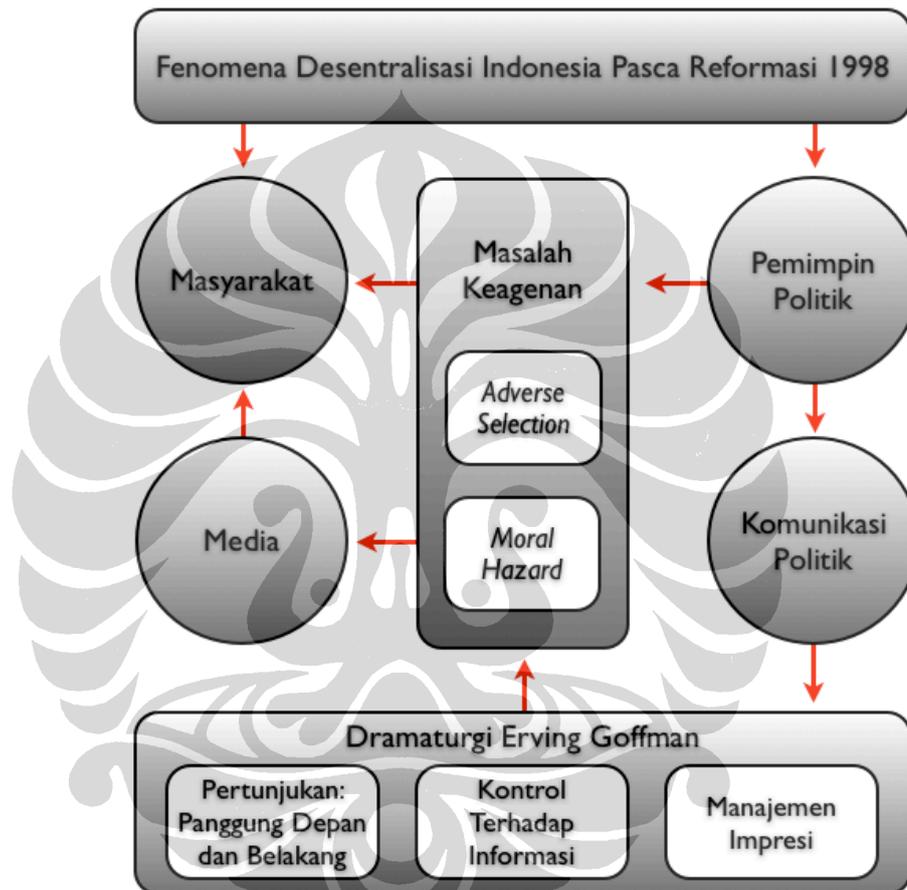
Dimulai pada bagian keempat tesis ini, Peneliti melakukan telaah mendalam terhadap hasil penelitian. Bagian ini dimulai dengan penjelasan mengenai Kota Solo sebagai panggung dramaturgi Jokowi dan situasi keagenan seputar Pilkada 2005. Setelah itu Peneliti menganalisis komunikasi politik Jokowi dengan pendekatan dramaturgi yang terfokus pada komponen Pertunjukan (Panggung Depan dan Belakang), Kontrol Terhadap Informasi, serta Manajemen Impresi.

Pada bagian kelima, Peneliti menjabarkan situasi hubungan keagenan terakhir di Solo berdasarkan hasil Pilkada 2010. Peneliti kemudian melakukan pendalaman mengenai bagaimana komunikasi politik Jokowi berperan dalam upayanya menangani pelbagai permasalahan keagenan sebagaimana terkandung dalam Teori Keagenan.

Terakhir, pada bagian keenam Peneliti merumuskan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini, kajian Peneliti terhadap implikasi akademis dan praktis tesis ini, serta kelemahan dan peluang pengembangan penelitian. * * *

BAB 2. KONSEPTUALISASI

Berdasarkan pemahaman terhadap permasalahan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Peneliti mengurai pokok-pokok pembahasan tesis ini dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Model Konseptual Tesis

Mengacu pada kerangka konseptual di atas, berikut ini dibahas konsep dari politisi sebagai pemimpin politik, komunikasi politik, Teori Keagenan, dan Pendekatan Dramaturgi.

2.1. POLITISI SEBAGAI PEMIMPIN POLITIK

Menurut definisi Nimmo (1989:32), politisi adalah orang yang memegang jabatan pemerintah, maupun orang yang bercita-cita untuk itu. Oleh karena itu, Nimmo juga mempertukarkan istilah “politisi” dengan “pemimpin politik.” Secara umum, Kartono (2010:38) mendefinisikan “pemimpin” sebagai seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, sehingga mampu memengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Sehingga dalam konteks politik, “pemimpin politik” dapat dipahami sebagai seseorang yang memengaruhi orang-orang lain untuk mencapai satu atau beberapa tujuan politik.

Menurut Alfian (2011:45-46), seorang pemimpin perlu untuk memengaruhi orang-orang lain, karena dalam suatu masyarakat yang kompleks, manusia harus hidup bersama dan bekerja sama dalam suasana yang tertib, tidak menyendiri, serta terbimbing oleh seorang pemimpin. Panduan pemimpin agar tercipta kerja yang kooperatif amatlah diperlukan, demi efisiensi kerja untuk mencapai tujuan bersama. Nimmo (1989:71) melihat bahwa di dalam politik, orang yang meraih posisi kepemimpinan tersebut adalah orang-orang yang mengambil bagian dalam komunikasi politik secara tetap, terus menerus, dan dipancarkan secara luas.

2.2. KOMUNIKASI POLITIK

Mengutip definisi McNair (2003:4), komunikasi politik adalah segala bentuk komunikasi yang diniatkan tentang politik. Hal ini mencakup: *“berbagai bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi dan aktor politik lainnya untuk mencapai satu tujuan.”* Selain itu, komunikasi politik juga meliputi *“komunikasi yang ditujukan kepada para aktor oleh non-politisi, seperti pemilih dan media.”*

Definisi di atas dirumuskan oleh McNair dalam konteks komunikasi politik pada situasi demokratis, yaitu situasi dalam masyarakat yang pemerintahnya memimpin bukanlah karena paksaan, namun karena persetujuan; pemimpinnya memiliki legitimasi dari masyarakat; dan suara masyarakat – baik yang tersalurkan melalui kotak suara Pemilu, maupun medium komunikasi lainnya – memiliki makna. Pemahaman seperti ini memberikan implikasi bahwa, meskipun demokrasi memusatkan perhatian pada pentingnya peran setiap individu, proses politik yang berlaku mensyaratkan bahwa setiap individu bertindak secara kolektif untuk menentukan siapa yang berhak memimpin mereka. Hal ini selaras dengan konsep Jürgen Habermas mengenai “ruang publik” (*public sphere*), yang ia definisikan sebagai:

“Suatu ranah dalam kehidupan sosial kita yang memungkinkan hal-hal terkait opini publik dapat terbentuk... Masyarakat berperilaku sebagai badan publik apabila dapat bertukar pikiran tanpa dibatasi, sebagaimana dijamin oleh kebebasan untuk berkumpul dan berasosiasi, serta kebebasan untuk mengekspresikan dan menyatakan opini mereka.” (dalam McNair, 2003:19)

Bagi seorang pemimpin politik, berkomunikasi merupakan cara untuk menjaga kelangsungan kepemimpinannya. Nimmo (1989:33) melihat politisi mencari pengaruh melalui komunikasi, karena bahwa pada akhirnya tujuannya adalah mempengaruhi opini orang lain. Lilleker (2006:1) juga berpendapat bahwa komunikasi antara pihak yang berkuasa dan masyarakat adalah suatu keniscayaan dan hal yang tak terpisahkan dalam proses politik apapun. Namun khususnya dalam pemerintahan yang demokratis, komunikasi politik amatlah krusial untuk membangun sebuah masyarakat, yang baik pemerintah maupun rakyatnya perlu

merasa bahwa mereka terhubung satu sama lain. Sehingga, para pemimpin politik itu memang harus berkomunikasi tentang politik.

Nimmo, sebagaimana dikutip oleh Arrianie (2010:18), menelaah tentang perilaku komunikasi politik, dan makna yang diberikan terhadap perilaku itu. Nimmo mencatat ada berbagai perspektif mengenai komunikasi politik, yaitu:

1. **Perspektif aksi diri:** Bahwa di dalam diri manusia terdapat kekuatan berupa motif, sikap, dorongan, rangsangan, maupun kapasitas, yang menentukan perbuatannya.
2. **Perspektif interaksi:** Bahwa terdapat berbagai kekuatan di luar manusia yang menentukan kelakuan manusia tersebut, yang mengimbangkan sesuatu dengan yang lain, dan terjadinya hubungan sebab-akibat. Kekuatan tersebut antara lain adalah kedudukan sosial dan ekonomi, peran sosial, tuntutan kelompok, ketentuan larangan budaya, kebiasaan, dan hukum.
3. **Perspektif transaksi:** Bahwa untuk memahami perbuatan manusia, dapat dipandang dari makna yang diberikan manusia terhadap hal-hal fisik. Hal ini karena makna diturunkan melalui transaksi yang dimiliki manusia dengan sesamanya.

Berdasarkan paparan perspektif di atas, maka Peneliti setuju dengan Arrianie (2010:18-19), bahwa diperlukan suatu pemahaman terhadap hal-hal yang dilakukan oleh para komunikator politik dalam melakukan peran politiknya di panggung depan dan panggung belakang kehidupan politik, lengkap dengan

segala atribut yang melekat padanya sebagai konsekuensi peran politik yang diembannya.

2.3. TEORI KEAGENAN

Hubungan antara pemimpin politik dengan masyarakatnya dapat dilihat menggunakan bingkai pemahaman Hubungan Keagenan. Eisenhardt (1989:58) menyatakan bahwa **Teori Keagenan** (*Agency Theory*, atau “Teori Prinsipal-Agen”) dapat dipergunakan dipakai untuk menjelaskan hubungan ini, yaitu ketika satu pihak (prinsipal/*principal*) mendelegasikan pekerjaan ke pihak lain (agen/*agent*). Dengan adanya pendelegasian semacam itu, ada dua permasalahan yang dapat timbul, yaitu di saat terjadi pertentangan tujuan yang ingin dicapai di antara prinsipal dan agen; atau di saat prinsipal kesulitan untuk memastikan bahwa agen telah bekerja sesuai dengan yang ia harapkan karena tingginya biaya (atau sulitnya secara teknis) untuk melakukan hal tersebut.

Akibat sulitnya memastikan bahwa agen bekerja sesuai dengan tujuan dan harapan prinsipal, maka dapat diasumsikan bahwa agen bisa saja mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh prinsipal dan menyembunyikannya untuk kepentingan pribadi, yang dilihat oleh Lane (2000:60) sebagai “insentif untuk mengabaikan tanggung jawab (*shirk*).” Fox menilai bahwa pada hubungan antara pemimpin politik dan masyarakat, hal ini mungkin saja terjadi, sebagaimana penelitiannya yang menunjukkan bahwa para pemimpin politik yang sedang berkuasa cenderung membuat kebijakan terkait kepentingan pribadinya, dan bukan kebijakan yang didasari oleh kepentingan publik (2007:3).

Adanya peluang bahwa seorang agen menyembunyikan informasi adalah penyebab terjadinya ketidak-seimbangan informasi (*asymmetric information*) dalam hubungan antara prinsipal dan agen. Hal ini pada gilirannya berimplikasi pada timbulnya permasalahan pada saat perumusan dan pelaksanaan kontrak antara kedua pihak tersebut, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*.

2.3.1. Adverse Selection

Adverse selection terjadi apabila prinsipal tidak yakin apakah ia telah memilih agen yang tepat untuk memenuhi tujuan dan harapannya (Halim dan Abdullah, 2006:55). Karena situasi ini umumnya terjadi pada prinsipal sebelum pemilihan agen terjadi, maka *adverse selection* disebut juga sebagai “oportunisme pra-kontrak.” Situasi ini terjadi karena ketidak-mampuan prinsipal untuk membedakan antara agen yang tepat dan agen yang tidak tepat untuk mencapai tujuan yang ditentukan prinsipal. Oleh karenanya, *adverse selection* juga dapat dipahami sebagai situasi dengan “informasi yang tersembunyi.”

Dalam konteks politik dan perspektif yang dipergunakan dalam tesis ini, Peneliti menggunakan definisi Berliant dan Duggan, bahwa *adverse selection* umumnya terjadi apabila pemilih tidak mengetahui kompetensi pemimpin dan kebijakan yang akan dipilih oleh pemimpin politik, namun hanya mampu melihat konsekuensi dari kompetensi dan kebijakan tersebut (2008:2).

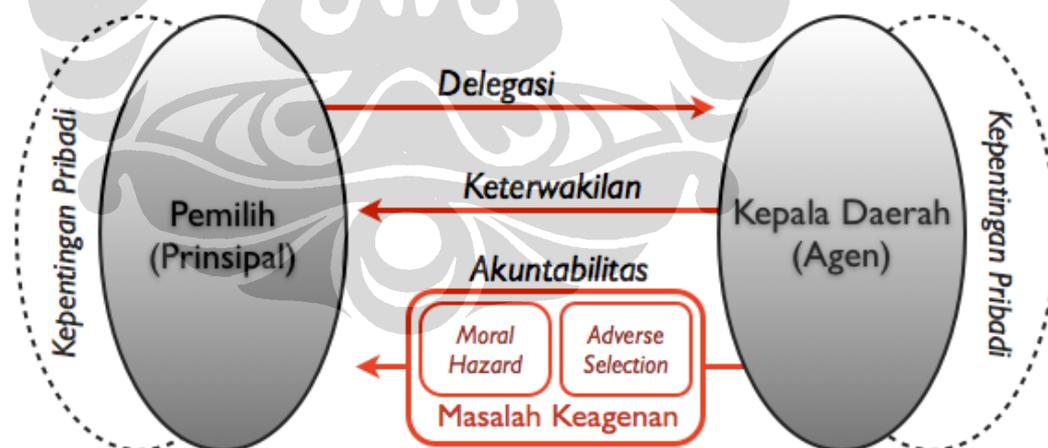
2.3.2. Moral Hazard

Moral hazard terjadi adalah apabila ada kemungkinan bagi agen untuk mengabaikan atau tidak sepenuhnya berupaya untuk memenuhi tujuan dan harapan prinsipal (Halim dan Abdullah, 2006:55). Karena situasi ini umumnya

terjadi pada prinsipal setelah agen terpilih, maka *moral hazard* dapat juga disebut sebagai “oportunisme pasca-kontrak.” Situasi ini terjadi karena prinsipal tidak mampu untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan agen adalah tindakan yang terbaik bagi pemenuhan kepentingan prinsipal. Oleh karenanya, *moral hazard* juga dapat dipahami sebagai situasi dengan “aksi yang tersembunyi.”

Dalam konteks politik untuk keperluan pembahasan dalam tesis ini, Peneliti menggunakan perspektif Berliant dan Duggan, bahwa *moral hazard* umumnya terjadi apabila pemilih tidak mampu mengobservasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin politik, namun hanya mampu melihat konsekuensi dari kegiatan tersebut (2008:2).

Peneliti secara sederhana menggambarkan konsep dasar hubungan keagenan dalam konteks politik dalam model berikut:



Gambar 2. Model Keagenan Politik
(diadaptasi dari perspektif Teori Keagenan Berliant dan Duggan, 2008)

2.3.3. Keagenan Politik

Peneliti mengutip beberapa penelitian yang dikhususkan untuk mempertajam pengaplikasian Teori Keagenan pada ranah politik, karena teori ini awalnya

dikembangkan untuk menjelaskan hubungan organisasi yang terikat dengan konsep-konsep ekonomi (Eisenhardt, 1989:58). Pertama-tama, Lane menjelaskan bahwa teori keagenan dapat pula diberlakukan pada institusi publik yang pada dasarnya memiliki permasalahan yang umum terjadi dalam hubungan prinsipal-agen. Hal ini karena masyarakat sejatinya mengharapkan adanya pelayanan publik dari institusi publik, sehingga terjadilah interaksi antara publik dan institusi publik yang dimediasi oleh para pejabat publik. Dengan kata lain, para pejabat publik ini merupakan wakil dari masyarakat untuk menjalankan institusi tersebut. Hubungan antara pejabat publik dan masyarakat itulah yang ingin dijelaskan dalam konsep teori keagenan ini (Lane, 2000:192).

Dalam konteks serupa, Lemon (2005) mengajukan perspektif yang lebih luas, dengan memandang bahwa rakyat di negara demokrasi dapat diandaikan sebagai pihak yang “menyewa jasa politisi” untuk menjalankan pemerintahan. Rakyat di sini bertindak sebagai prinsipal dan menggunakan politisi sebagai agen, yang pada gilirannya bertanggung jawab untuk membuat keputusan politik. Inilah apa yang disebut Ferejohn sebagai **keagenan politik** atau *political agency* (Lemon, 2005:i).

Meskipun demikian, terdapat sejumlah perbedaan antara penerapan teori ini di ranah ekonomi dengan ranah politik. Banks dan Sundaram (1993:296) menyoroti bahwa pada hubungan keagenan di ekonomi, salah satu mekanisme untuk mengurangi ketidak-seimbangan informasi adalah melalui sebuah sistem kontrak antara prinsipal dan agen, yang antara lain menjabarkan struktur kontra-prestasi atau imbalan. Kontra-prestasi ini menurut Eisenhardt (1989:63) dapat berbentuk mekanisme penghargaan sesuai hukum ekonomi, antara lain berupa gaji dan insentif. Kontrak semacam ini bertujuan untuk dapat mengurangi permasalahan

keagean dengan memotivasi agen untuk tidak menyembunyikan informasi dari prinsipal.

Di hubungan keagenan politik, kontrak berbasis hukum ekonomi semacam ini tidaklah ada. Satu-satunya instrumen yang dimiliki prinsipal adalah suara yang dapat mereka berikan pada saat pemilihan umum untuk kembali memilih agen tersebut, atau memilih yang lain. Oleh karena itu, Banks dan Sundaram (1993:296) menganggap suara pemilih dalam konteks teori keagenan di politik adalah *condicio sine qua non* (“elemen esensial yang tak tergantikan”). Bahkan lebih jauh lagi, Lemon menyatakan bahwa pemilihan umum itulah kontrak di dalam hubungan keagenan (2005:i).

Namun “kontrak politik” inipun pada prakteknya tidak mudah diterapkan, karena jumlah elektorat yang besar dan konflik kepentingan di antara para elektorat sendiri menyebabkan hampir tidak mungkin menciptakan satu mekanisme insentif yang optimal (Berliant dan Duggan, 2008:2). Jumlah elektorat yang besar menyebabkan hilangnya garis konsekuensi yang jelas dari hubungan prinsipal-agen, sehingga dapat menyebabkan hubungan tersebut berujung tidak optimal. Hal ini karena meskipun seorang agen telah berusaha seoptimal mungkin untuk menghilangkan ketidak-seimbangan informasi, ia masih dapat diganjar dengan suara prinsipal yang tidak berpihak kepadanya, khususnya apabila konflik kepentingan yang menentanginya lebih kuat dari kepentingan yang mendukungnya. Shapiro menyebut hal ini sebagai “masalah keputusan kolektif” (*collective action problem*), yaitu adanya lebih dari satu prinsipal dengan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga berpotensi menyebabkan agen menerima bermacam

instruksi yang mungkin saja bertentangan antara satu prinsipal dengan yang lain (2005:267).

Selain itu, Shapiro juga mencatat sulitnya menyeimbangkan kepentingan antara agen dan prinsipal apabila tidak menggunakan mekanisme finansial (2005:272). Hal ini dapat berakibat agen di dunia politik tidak dapat merasakan konsekuensi apabila tindakannya tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal; Di sisi lain, keberagaman prinsipal di atas cenderung menyebabkan kontrol untuk perilaku keagenan di ranah politik jauh lebih longgar dibanding di ranah ekonomi (Waterman dan Meier, 1998, sebagaimana dikutip oleh Shapiro, 2005:272).

Terlepas dari kerumitan khas keagenan politik di atas, penelitian dalam ilmu pendelegasian secara umum menawarkan beberapa alternatif solusi non-finansial terkait munculnya ketidak-seimbangan informasi. Lupia dan McCubbins (sebagaimana dikutip Lupia, 2001:4) berargumen bahwa ada dua situasi yang membuat kesenjangan informasi mengecil. Yang pertama adalah pada saat prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang sama, sehingga dapat diharapkan tindakan agen selaras dengan apa yang diharapkan prinsipal. Sebagai contoh ideal, seorang walikota yang memiliki akar pandangan Islam konservatif memiliki insentif lebih besar untuk mendukung peraturan-peraturan yang diinginkan oleh warga kota yang berpaham Islam konservatif, namun pada saat yang sama memiliki insentif lebih sedikit untuk mendorong berbagai peraturan yang diinginkan oleh warga kota yang berpaham nasionalis liberal.

Peneliti juga mengamati bahwa seringkali muncul berbagai isu terkait penyelarasan kepentingan semacam ini menjelang pemilihan kepala daerah.

Dorongan untuk memilih pemimpin yang turun-temurun hidup di daerah pemilihan – yang diistilahkan sebagai *putra daerah* – dipandang Peneliti sebagai salah satu ekspresi yang berangkat dari keinginan untuk menjembatani kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan, dengan pemikiran bahwa seorang putra daerah lebih memiliki pengetahuan mengenai wilayah yang akan dipimpinya. Besarnya keinginan untuk memilih putra daerah sebagai pemimpin ini tercermin antara lain dari temuan Lembaga Survei Indonesia (2007:13-15), bahwa antara 46-47% responden yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia menginginkan gubernur/walikota/bupati berasal dari putra daerah.³ Hasil survei terbaru Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Politik Lokal juga memperkuat pandangan ini, yaitu bahwa 61,25% responden di Kota Tanjungpinang mengharuskan calon walikota mereka adalah putra daerah, dan hanya 26,07% yang tidak mengharuskan demikian (Suwadha, 2012).

Situasi kedua yang dapat membuat ketidak-seimbangan informasi tersebut mengecil adalah pada saat prinsipal memiliki pengetahuan mengenai konsekuensi dari kegiatan agen. Dengan kata lain, prinsipal mengetahui cukup banyak informasi mengenai tindakan-tindakan yang diambil agen, dan oleh karenanya mampu memutuskan apakah agen tersebut telah melaksanakan kepentingan prinsipal (Lupia, 2001:4). Salah satu contoh berkurangnya ketidak-seimbangan informasi adalah ketika warga mampu mendapatkan akses kepada informasi

³ Hasil survei Lembaga Survei Indonesia ini berasal dari hasil wawancara tatap muka yang dilakukan tanggal 5-15 Maret 2007 pada 1,240 responden yang tersebar di 33 provinsi dan diambil secara proporsional sesuai dengan jumlah penduduk di masing-masing provinsi, menggunakan metodologi *multi-stage random sampling* dengan *margin of error* $\pm 3\%$ dan tingkat kepercayaan 95%.

mengenai kebijakan yang akan diambil oleh pemimpin daerah, beserta kronologis latar belakang dan alasan pengambilan kebijakan tersebut.

Aspek penyebaran informasi inilah yang menurut Peneliti menjadi alasan perlunya banyak dilakukan kegiatan konsultasi publik, khususnya terkait anggaran dan perumusan kebijakan. Pada kenyatannya, umumnya konsultasi publik tidak dilakukan secara meluas dan cenderung formalitas. Mengenai hal ini, disertasi Ibrahim yang dilakukan empat kota dan kabupaten di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan bahwa sebagian besar masyarakat tidak pernah diikuti-sertakan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Lebih jauh lagi, bagi mereka yang pernah diikuti-sertakan dalam pembahasan Raperda, terdapat gejala ketidak-jelasan apakah masukan mereka diakomodasikan dalam Perda yang bersangkutan (2008:305-308). Ibrahim menilai hal ini merupakan indikasi rendahnya partisipasi publik dalam pembahasan Raperda, yang gilirannya mengakibatkan banyak munculnya Perda yang bermasalah dan tidak aspiratif (2008:8). Dari perspektif penelitian ini, Peneliti melihat hal tersebut juga menunjukkan masih kurangnya semangat pemimpin di daerah untuk membangun saluran informasi yang baik kepada masyarakat.

Peneliti juga melihat bahwa selain dapat menjadi saluran informasi bagi publik, konsultasi publik semacam itu membuka kesempatan bagi terjadinya tawar-menawar, negosiasi, dan koalisi antara masyarakat dengan pemimpinnya. Tercapainya kesepakatan dari ketiga proses ini dapat berujung pada keselarasan kepentingan antara masyarakat dan pemimpin daerah, sehingga merupakan salah satu cara untuk mengurangi terjadinya *moral hazard* dalam keagenan politik, seperti yang disebutkan juga oleh Eisenhardt (1989:63).

2.4. PENDEKATAN DRAMATURGI

Pendekatan dramaturgi (*Dramaturgical approach*) adalah sebuah mazhab yang dikembangkan oleh sosiolog Erving Goffman (1922-1982). Pendekatan ini berangkat dari pemahamannya mengenai berbagai aspek kajian sosiologi, antropologi, dan komunikasi, terutama yang dirintis oleh George Mead dan Herbert Blumer.

Pemahaman mengenai pendekatan dramaturgi Goffman dilandasi oleh konsepsi Mead mengenai makna, bahasa dan pemikiran, yang kemudian dirumuskan oleh Blumer menjadi apa yang ia sebut sebagai **interaksionisme simbolik** (Griffin, 2000:54). Salah satu premis interaksionisme simbolik adalah bahwa makna muncul dari interaksi sosial yang merupakan proses interpretif dua-arah, dan fokusnya adalah efek dari interpretasi terhadap orang yang tindakannya sedang diinterpretasikan (Griffin, 2000:55). Oleh karena itu, selain tindakan seseorang adalah produk dari cara mereka menafsirkan perilaku orang lain, interpretasi ini memberikan pengaruh kepada individu yang tindakannya diinterpretasikan tersebut (Mulyana, 2010:105).

Dalam hal ini, perhatian Goffman dicurahkan kepada “urutan interaksi” (*interaction order*) yang melibatkan komponen struktur, proses dan produk interaksi sosial. Goffman secara khusus memberikan penekanan kepada sifat simbolik interaksi manusia dan pertukaran makna di antara orang-orang melalui simbol (1956:1). Dalam hal ini, Goffman berpandangan bahwa di dalam diri yang sama, terdapat gejala pertentangan antara diri manusia yang spontan dan tuntutan sosialnya. Pertentangan semacam ini menuntut manusia untuk tidak ragu-ragu dalam melakukan apa yang diharapkan pada kita (1956:10). Untuk

memelihara tampilan yang yakin dan tidak ragu, maka manusia dituntut untuk melakukan sebuah “pertunjukan” (*performance*) di hadapan khalayak (Goffman, 1956:2). Inilah apa yang menjadi fokus Goffman tatkala mengeksplorasi konsepnya menggunakan metafor **dramaturgi**: pandangan atas kehidupan sosial sebagai serangkaian pertunjukan yang mirip dengan pementasan drama di panggung (Mulyana, 2010:106).

Inti dari dramaturgi bukanlah menghubungkan perilaku dengan penyebabnya, namun menghubungkan tindakan dengan maknanya. Goffman berpendapat bahwa makna dalam pendekatan dramaturgi bukanlah warisan budaya, sosialisasi/tatatan kelembagaan, atau perwujudan dari potensi psikologis maupun biologis. Namun, makna di sini adalah pencapaian problematik interaksi manusia yang penuh dengan perubahan, kebaruan dan kebingungan. Makna bersifat behavioral, berubah secara berkelanjutan, arbitrer dan merupakan ramuan dari interaksi manusia (Mulyana, 2010:107).

Penjelasan mengenai makna tersebut terkait dengan pandangan dramaturgi mengenai konsep **diri** (*self*) yang memberi makna, yaitu diri yang tersituasikan secara sosial, berkembang, serta mengatur berbagai interaksi spesifik. Oleh karena itu, diri lebih bersifat sosial daripada psikologis (Mulyana, 2010:109). Sebagaimana dijelaskan oleh Goffman:

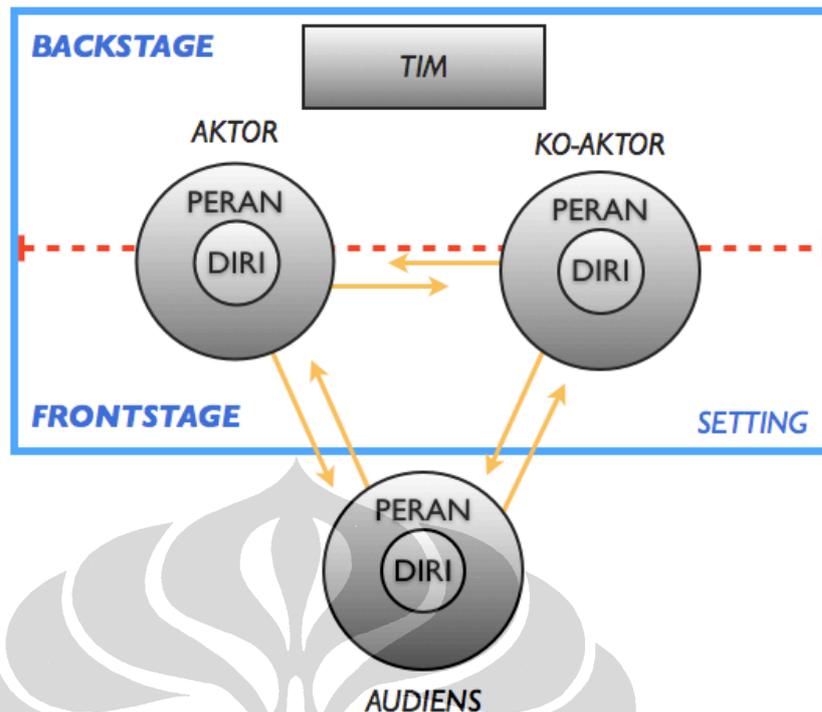
“Diri bukanlah keturunan dari pemiliknya, tapi dari keseluruhan tindakannya... diri tersebut bukanlah penyebab, namun produk dari satu kejadian yang muncul. Oleh karenanya, diri selaku karakter yang melakukan pertunjukan bukanlah satu benda organik dengan lokasi tertentu... . Seorang individu dan tubuhnya hanyalah perangkat bagi tempat terjadinya suatu proses kolaboratif (collaborative manufacture).

Sehingga, penyebab pembentukan dan pemupukan diri tidaklah berada dalam perangkat tersebut.” (dalam Kivisto dan Pittman, 2007:273)

Untuk menjelaskan interaksi sosial, Goffman dalam bukunya *The Presentation of Self in Everyday Life* (1959) mengibaratkan kehidupan layaknya teater, dengan interaksi sosial yang mirip dengan pertunjukan di atas panggung dan menampilkan berbagai peran yang ditampilkan para aktor. Dalam memainkan perannya, aktor harus memusatkan perhatiannya dan menjaga kendali diri agar dapat mengekspresikan peran yang sesuai dengan situasi.

Maka sebagaimana diungkapkan oleh Mulyana, fokus pendekatan dramaturgi bukanlah kepada apa yang orang lakukan, apa yang ingin mereka lakukan, ataupun mengapa mereka melakukannya, melainkan bagaimana mereka melakukannya. Dramaturgi menekankan dimensi ekspresif manusia, yakni bahwa makna kegiatan manusia terdapat dalam cara mereka mengekspresikan diri dalam interaksi dengan orang lain yang juga ekspresif. Berkat daya ekspresifnya tersebut, manusia mampu menegosiasikan makna dengan orang lain yang juga ekspresif dalam satu situasi. Oleh karena itu, tindakan manusia tidak dipandang sebagai akibat dari berbagai kekuatan luar yang mempengaruhi mereka, tetapi “*sebagai tuan dari nasibnya sendiri*” (Mulyana, 2010:107).

Keterkaitan elemen-elemen dalam panggung dramaturgi Goffman secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3. Model Pendekatan Dramaturgi Erving Goffman
(diadaptasi dari Hare dan Blumberg, 1988:7)**

Dalam tesis ini, Peneliti menggunakan tiga aspek utama yang melandasi pendekatan dramaturgi, sebagaimana diadaptasi dari penjabaran Medlin (2008) Mulyana (2010), dan Arriane (2010), yaitu:

1. Panggung Depan dan Panggung Belakang
2. Kontrol Terhadap Informasi
3. Manajemen Impresi

2.4.1. Pertunjukan: Panggung Depan dan Panggung Belakang

Bagi Goffman, kehidupan ini ibarat teater, dengan interaksi sosial yang mirip dengan pertunjukan di atas panggung, dan berisi peran-peran yang dimainkan oleh para aktor (Mulyana, 2010:114).

Untuk memulai sebuah pertunjukan, Medlin (2008) melihat bahwa perlu adanya sebuah ide yang bersumber dari satu gambaran atau panduan yang kemudian

dapat dielaborasi lebih lanjut menjadi serangkaian tindakan; atau satu skrip utuh yang terperinci. Goffman juga menunjukkan bahwa panduan lain dapat dipergunakan, seperti tema (arahan mengenai gerakan maupun perangkat yang harus ada) serta plot (peran dan indikasi mengenai langkah-langkah yang harus dituju untuk mencapai tujuannya) (Medlin, 2008: 35).

Komponen lain yang juga penting di tahap awal adalah penciptaan lokasi aksi atau panggung, yang oleh Goffman didefinisikan sebagai “satu area yang terbatas oleh bentukan persepsi tertentu” (1956:66). Pemilihan panggung juga merupakan tahap yang krusial bagi kesuksesan sebuah pertunjukan dramaturgi, karena lokasi yang tercipta memberikan indikasi mengenai waktu serta suasana pertunjukan (Medlin, 2008:36).

Goffman (1956:69) membagi wilayah pertunjukan untuk interaksi sosial menjadi **panggung depan** (atau *frontstage*) dan **panggung belakang** (atau *backstage*). *Frontstage* merujuk pada peristiwa sosial yang memungkinkan individu bergaya atau menampilkan peran formalnya, sebagaimana mereka sedang memainkan satu peran di atas panggung. Sedangkan *backstage* merujuk pada tempat atau peristiwa yang memungkinkan aktor melakukan persiapan peran untuk *frontstage* (Mulyana, 2010:114). Bila dikaitkan dengan aspek-aspek pertunjukan sang aktor, maka aspek yang ditonjolkan dan tidak disembunyikan oleh aktor disebut Goffman sebagai *frontstage*, sedangkan aspek yang ingin disembunyikan ia sebut *backstage*. Dengan kata lain, *backstage* dapat didefinisikan sebagai kawasan yang tidak menyembunyikan impresi yang dimunculkan oleh aktor, tetapi justru menampilkannya secara terbuka (Medlin, 2008:43).

Dalam *frontstage*, Goffman lebih spesifik membaginya menjadi set panggung (*setting*) dan perangkat pribadi (*personal front*). *Setting* adalah atribut fisik atau suasana panggung yang harus ada bagi aktor untuk melakukan pertunjukan. Sedangkan *personal front* merujuk kepada perangkat ekspresif yang membuat audiens mampu mengidentifikasi aktor, seperti peralatan dan pakaian. *Personal front* juga merujuk kepada hal-hal terkait penampilan, seperti kewajiban sosial dan prestasi sang aktor; dan tingkah laku, yaitu perilaku yang disampaikan aktor kepada audiens, misalnya derajat kesopanan, tata krama dan sejenisnya (Mulyana, 2010:114-115). Contoh *setting* dan *personal front* ini adalah seperti yang ditemukan oleh Arrianie, yaitu bahwa hampir semua individu politisi di DPR RI menggunakan kelengkapan simbol fisik yang nyaris seragam (2010:92). Termasuk di antara kelengkapan simbol-simbol ini adalah jas lengkap berdasi atau pakaian safari harian, serta pin tanda keanggotaan DPR yang hampir tidak pernah lepas dikenakan oleh para anggota dewan, meskipun di hari libur (2010:35&87).

Satu hal terpenting dari pendekatan dramaturgi adalah bahwa para aktor umumnya ingin menyajikan diri mereka dalam rupa yang ideal. Oleh karena, aktor cenderung merasa perlu untuk menyembunyikan sebagian aspek dari diri mereka dari audiens saat pertunjukkan berlangsung, atau apa yang Peneliti sebut sebagai “sisi lain aktor,” yaitu sisi yang hanya muncul saat berada di *backstage*. Peneliti mengutip beberapa aspek yang dipandang relevan untuk penelitian ini, sebagaimana dipaparkan oleh Mulyana (2010:116), yaitu bahwa aktor mungkin ingin menyembunyikan kesenangannya di masa lalu yang tidak kompatibel dengan perannya saat ini, atau menyembunyikan kesalahan yang terjadi pada saat

persiapan pertunjukan, atau menutupi proses penciptaan pertunjukan yang mereka lakukan dan hanya menunjukkan hasil akhirnya saja.

Mulyana mencatat setidaknya ada dua metode idealisasi dalam dramaturgi terkait dengan teknik pertunjukan. Metode yang pertama adalah berupaya menyampaikan kesan bahwa mereka punya hubungan yang lebih baik daripada yang sebenarnya kepada audiens, dan menunjukkan bahwa pertunjukan ini adalah satu-satunya atau yang terbaik yang para aktor pernah tampilkan. Dalam politik, ini dilakukan antara lain dengan menonjolkan aspek kehidupan atau latar belakang aktor yang relevan dengan audiens yang dituju. Misalnya, calon walikota atau bupati di sebuah daerah cenderung berkampanye di depan para pemilihnya dengan menekankan masa kecilnya selama tinggal di daerah tersebut, padahal mungkin ia tumbuh dewasa di tempat lain. Dengan melakukan hal-hal yang menunjukkan kedekatan semacam itu, para aktor berupaya mencapai satu tujuan yang menguntungkan mereka (2010:116-118).

Yang kedua yang menjadi teknik idealisasi dalam dramaturgi adalah saat aktor juga menciptakan **mistifikasi**. Dengan metode ini, aktor menciptakan “jarak sosial” untuk memancing rasa kekaguman atau keterpesonaan dari audiens, yang pada gilirannya membuat audiens tidak lagi meragukan pertunjukan sang aktor (Mulyana, 2010: 119). Mulyana mengambil contoh Presiden Soeharto yang telah melakukan mistifikasi untuk menjaga karismanya semasa menjabat, dengan sangat membatasi wawancara oleh wartawan. Contoh mistifikasi lainnya adalah sebagaimana yang ditemukan Arriane pada para politisi di DPR RI yang memegang status panitia seleksi untuk posisi-posisi penting, seperti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hakim agung di Mahkamah Agung.

Status semacam ini membuat mereka seolah menjadi orang yang lebih tahu, lebih hebat, dan lebih berkuasa (2010:77).

Dalam penampilan seorang aktor di panggung, fokus perhatian Goffman sesungguhnya bukan hanya individu, namun juga sejumlah individu lain yang bekerja sama dalam mementaskan satu rutinitas (Arrianie, 2010:36). Selain membawakan peran dan karakter secara individu, aktor sosial juga berupaya mengelola kesan orang lain terhadap kelompoknya, dan kesemuanya ini pada gilirannya menjadi apa yang disebut Goffman sebagai **tim dalam pertunjukan** (*performance team*) yang mendramatisasi satu aktivitas. Mulyana melihat bahwa tim inilah yang harus mempersiapkan pertunjukan dan jalannya pertunjukan dengan matang, serta saling mendukung satu sama lain agar pertunjukan berjalan mulus (2010:122-124).

2.4.2. Kontrol Terhadap Informasi

Medlin (2008:47) berpendapat bahwa tujuan utama dari setiap pertunjukan adalah untuk menjaga agar tiap pertunjukan berlangsung sebagaimana aktor mendefinisikannya. Untuk mencapai hal tersebut, maka aktor umumnya melakukan kontrol terhadap *frontstage*, dan menyembunyikan berbagai elemen yang merusak dari audiens. Elemen yang merusak ini menurut Goffman antara lain adalah pada saat aktor “*terlalu banyak mengomunikasikan fakta tertentu, dan kurang mengomunikasikan fakta yang lain.*” Oleh karena itu, kontrol terhadap informasi adalah salah satu cara untuk mencegah munculnya elemen yang merusak tersebut (Medlin, 2008:47).

Namun pada kenyataannya, kontrol informasi tidaklah mudah, antara lain karena audiens memahami bahwa mereka tidak memiliki akses kepada *backstage*, sehingga mereka menyadari adanya impresi yang disalurkan dan upaya penyembunyian informasi tertentu (Medlin, 2008:49). Hal ini menimbulkan adanya sudut pandang yang berkembang selama pertunjukan, yang tidak jarang berwujud satu peran tersendiri menjadi apa yang disebut Goffman sebagai “peran sempalan” (*discrepant roles*). Medlin (2008:50-51) mengutip beberapa peran sempalan yang dicontohkan Goffman:

1. **Informan** (*informer*), yaitu orang-orang yang bertindak sebagai aktor untuk mendapatkan kepercayaan dari tim dan memperoleh akses ke *backstage*. Aktor “gadungan” ini lalu mengabarkan informasi yang diperolehnya kepada audiens dengan tujuan untuk mengusik pertunjukan.
2. Sebaliknya, ada pula **rekanan** (*shill*), yaitu orang yang berada di tengah-tengah audiens, namun sebenarnya memiliki hubungan dengan para aktor. Peran rekanan di sini antara lain untuk memancing aksi audiens sebagaimana diinginkan oleh aktor, atau menyediakan reaksi yang diperlukan untuk mengembangkan satu adegan tertentu dalam pertunjukan.
3. **Mediator** adalah orang-orang yang menjadi perantara dan memiliki kesetiaan baik kepada aktor dan audiens. Mediator ini mampu mendapatkan keyakinan dan informasi rahasia baik dari aktor dari audiens, dan dapat menjamin bahwa informasi tersebut tidak akan bocor ke pihak yang lain.

2.4.4. Manajemen Impresi

Dalam perspektif dramaturgi, Goffman sebagaimana dikutip Medlin (2008:55-57) mendefinisikan seni manajemen impresi sebagai tindakan menjaga munculnya hal-hal yang tidak diharapkan, yang dapat berujung pada rasa malu atau pertengkaran. Ada empat macam tindakan yang dapat terjadi di luar rencana, yang oleh Goffman disebut sebagai **insiden dramaturgi**, dan dirinci oleh Medlin (2008:55-57) sebagai berikut:

1. **Gerakan yang tidak diniatkan** (*unintended gestures*), yaitu saat aktor melakukan gerak-gerik yang tidak diniatkan sebelumnya namun ternyata mendiskreditkan jalannya pertunjukan. Ini terjadi misalnya ketika Gubernur DKI Fauzi Bowo tertangkap kamera sedang mengacungkan jari tengahnya pada sebuah acara, dan kemudian menuai kritik dari publik dan media (Kurniawan, 2012);
2. **Intrusi yang tidak pantas** (*inappropriate intrusion*), yaitu ketika audiens memasuki *backstage* dan memergoki aktor dalam situasi yang tidak selaras dengan kesan yang ingin aktor tampilkan di *frontstage*; Contohnya adalah ketika Sekretaris Daerah Kota Semarang tertangkap tangan oleh penyidik KPK sedang melakukan penyyuapan dua anggota DPRD Kota Semarang (Pakpahan, 2011).
3. **Kecerobohan** (*faux pas*), yaitu informasi tentang kehidupan aktor yang apabila terungkap kepada audiens, akan mengganggu atau melemahkan impresi yang disalurkan melalui pertunjukan, misalnya mengenai isu video porno yang menimpa sejumlah politisi DPR RI (Munawwaroh, Guslina, dan Kristanti: 2012);

4. **Kejadian** (*scene*), yaitu ketika seorang aktor individu mendiskreditkan pertunjukan secara umum. Meskipun upaya pendiskreditan ini mungkin saja tidak sengaja terjadi, hasilnya akan nampak dan tetap menimbulkan konflik. Misalnya, Disertasi Arrianie (2010) secara khusus menelaah berbagai kejadian di DPR RI, ketika dua atau lebih politisi melakukan perkelahian verbal di rapat-rapat Dewan, padahal kegiatan tersebut umumnya diliput oleh wartawan media cetak dan elektronik. Di sisi lain, mungkin pula salah satu audiens merasa tidak mampu menolerir pertunjukan yang sedang dimainkan, dan mengkonfrontir aktor dengan ucapan atau tindakan ekspresif yang tidak dapat diterima. Ada pula kemungkinan di mana aktor begitu yakin dengan apa yang ia pertunjukkan, namun ternyata hal tersebut ditolak oleh audiens, dan ini menyebabkan aktor tidak mampu meralat apa yang telah ia lakukan sehingga berujung pada rasa malu.

Untuk mencegah terjadinya insiden semacam itu, Goffman memandang perlunya para aktor menguasai dan mampu menerapkan berbagai teknik untuk menyelamatkan pertunjukan. Ia menjabarkan beberapa teknik tersebut sebagai berikut (seperti dikutip Medlin, 2008:58-61) :

1. **Pendekatan defensif**, yaitu aktor melakukan persiapan yang matang terhadap pertunjukannya. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan loyalitas tim; memastikan tim berkonsentrasi penuh dan memegang teguh bagian yang telah ditetapkan; serta melakukan antisipasi terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi;

2. **Pendekatan protektif**, yaitu audiens menerapkan kehati-hatian agar tidak memasuki wilayah *backstage*. Dalam hal ini, audiens memiliki berbagai pertimbangan sebelum melakukan ucapan atau tindakan ekspresif terhadap aktor atas dasar pertimbangan etika sebagai audiens, misalnya dengan pura-pura abai akan beberapa hal yang dilakukan aktor;
3. **Pendekatan timbal-balik**, yaitu aktor bersikap reseptif terhadap petunjuk yang mungkin diberikan oleh audiens mengenai hal-hal yang tidak sesuai yang baru dilakukan oleh sang aktor. Selain itu, apabila sang aktor harus berbohong maupun memutar-balikkan fakta yang ada, ia harus melakukannya dengan cara yang dapat diterima oleh audiens.

2.4.5. Dramaturgi dalam Politik

Meskipun teori dramaturgi dikembangkan dalam ranah sosiologi (Goffman, 1956:“Preface”) dan memiliki akar antropologis yang mendalam (Mulyana, 2010:105), Merelman memandang adanya keterkaitan antara konsep dramaturgi dengan proses politik, terutama karena dalam politik, politisi acap kali memanfaatkan teknik-teknik dramatis (1969:216). Merelman berargumen bahwa hampir seluruh komponen dramaturgi, khususnya manajemen impresi, sesungguhnya dipinjam dari aspek-aspek kehidupan dalam politik, karena seluruh politisi berupaya untuk membangun impresi orang lain melalui sikap dan perilaku mereka (1969:217).

Lebih spesifik lagi, Merelman (1969:216) mengutip bahwa Goffman menyatakan beberapa status sosial seperti peserta lomba dan dokter bedah amatlah menonjolkan berbagai elemen esensial dalam dramaturgi, antara lain penampilan di depan audiens yang banyak; adanya peran yang sangat signifikan, terkadang

menentukan hidup dan mati; serta adanya konflik atau pertentangan kepentingan. Merelman berargumen bahwa elemen-elemen tersebut hadir pula dalam situasi politik. Pertama, politisi tentu diharapkan tampil dan menunjukkan kemampuan dirinya di depan banyak audiens. Kedua, politisi dalam tingkat yang tinggi juga memiliki peranan penting dalam menentukan hajat hidup orang banyak, yang terkadang bersinggungan pula antara hidup atau matinya warga mereka, misalnya isu terkait kebijakan kesehatan nasional sebagaimana dianalisis oleh Thomas (2008). Dan ketiga, politik sarat dengan berbagai konflik, karena proses politik itu sendiri merupakan cara untuk memecahkan konflik-konflik dalam nilai-nilai sosial. Hal-hal inilah yang membuat Merelman meyakini bahwa politik dapat dipahami dengan menggunakan komponen dramaturgi (1969:218).

Merelman secara tegas menyatakan ia tidak mengklaim bahwa proses politik dapat sepenuhnya disandingkan dengan proses dramaturgi (1969:216). Namun demikian, ia percaya bahwa penting untuk mengetahui berbagai prinsip dramaturgi agar dapat memahami konteks politik secara utuh, dan bahwa prinsip-prinsip tersebut harus menjadi bagian dari konsep-konsep tradisional lain yang telah banyak dipergunakan untuk menganalisis politik (1969:216). Atas dasar pemikiran Merelman tersebut, serta mempertimbangkan pola pemanfaatan prinsip-prinsip dramaturgi dalam beberapa penelitian politik terkini (antara lain Thomas, 2008, dan Arrianie, 2010), maka dalam tesis ini Peneliti memanfaatkan pendekatan dramaturgi sebagai alat untuk memahami konsep hubungan keagenan antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya.

Selain itu, dalam melakukan analisis dramaturgi politik, faktor penting yang harus diperhitungkan adalah peran media. Menyadari keterbatasan dirinya dalam

menemui setiap orang, serta mengingat jangkauan media yang demikian luas, pemimpin politik secara sadar memanfaatkan media untuk menyampaikan pesan dan citra-diri yang diinginkannya. Di sisi lain, media yang menyadari niatan pemimpin politik tersebut, juga berupaya mengungkap hal-hal yang tersembunyi, mendiskreditkan tindakan sang pemimpin, serta menciptakan konflik dan kontroversi (Hall, 2005:371). Berlandaskan pemikiran tersebut, maka Peneliti menjadikan media sebagai salah satu komponen yang dianalisis, sebagaimana Peneliti menganalisis audiens dalam hubungan dramaturgi di tesis ini. * * *



BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. METODE PENELITIAN

Untuk mengungkap realitas sosial seperti proses komunikasi politik secara apa adanya, maka Peneliti memanfaatkan metode penelitian kualitatif, dan menggunakan pendekatan etnografis dengan teknik primer berupa pengamatan berperan-serta (*participant-observation*) untuk mengetahui proses komunikasi keseharian yang melibatkan Walikota Solo Joko Widodo.

Penelitian kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana dideskripsikan oleh Kuswarno (2009:6) sebagai penelitian yang bersifat menggali nilai-nilai dalam pengalaman dan kehidupan manusia, dengan terfokus pada keseluruhannya, dan bertujuan untuk menemukan makna dan hakikat dari pengamatan, serta memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang orang pertama. Mulyana (2010:150) lebih jauh membedakan metode penelitian kualitatif dari penelitian kuantitatif, dalam arti bahwa metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, metode statistik, maupun prinsip angka, namun memanfaatkan pembicaraan yang sebenarnya, isyarat, dan tindakan sosial lainnya.

Peneliti memandang bahwa metode kualitatif adalah metode yang sesuai bagi penelitian ini, karena penelitian terfokus pada proses, interaksi subyek penelitian, dan perilaku yang ditampilkannya secara apa adanya (*verstehen*), termasuk di dalamnya mendeskripsikan bagaimana subyek tersebut berinteraksi dengan sekelilingnya (Idrus, 2009:24-25). Atas dasar ini pula, maka penilaian terhadap

subyek penelitian dilandaskan pada tafsir dan nilai etis, dan bukan sekedar analisis formal terhadap data dan angka (Mulyana, 2010:147).

Sedangkan terkait pendekatan etnografi yang merupakan bagian dari metode penelitian kualitatif, Frey *et al.* menyatakan bahwa penelitian etnografi dipergunakan untuk meneliti perilaku manusia dalam lingkungan spesifik yang alamiah. Penelitian ini berupaya menangkap cara orang menggunakan simbol-simbol dalam konteks yang spesifik, berdasarkan perspektif orang yang diteliti (Mulyana, 2010:161). Etnografi juga kerap dimaknai sebagai usaha mendeskripsikan kebudayaan dan aspek-aspeknya, dengan meletakkan dan mempertimbangkan latar belakang permasalahan secara menyeluruh (Idrus, 2009:60). Di sini Peneliti menyakini perlunya memfokuskan diri kepada pendekatan etnografi, karena memberikan peluang bagi Peneliti untuk melakukan penggalian fenomena sosial yang khusus secara lebih mendalam, dan berkesempatan menangkap makna di balik fenomena tersebut.

3.2. SUBYEK PENELITIAN DAN UNIT ANALISIS

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Walikota Solo Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan unit analisis dalam penelitian ini adalah sikap dan tindakan Jokowi dalam melakukan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, sekaligus hal-hal yang terkait dengan proses komunikasi itu sendiri, dengan masyarakat Solo.

3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

3.3.1 Pengamatan Berperan-Serta

Pengamatan berperan-serta (*participant-observation*) adalah upaya Peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara menjadi bagian atau terasosiasikan dengan subyek penelitian. Melalui teknik ini, Peneliti berkesempatan untuk tidak hanya sekedar mengamati, namun juga dapat menggali – dan dalam beberapa kesempatan bahkan mengadaptasi – perspektif dari subyek penelitian dalam situasi naturalnya (Frankfort-Nachmias dan Nachmias, dalam Medlin, 2008:66).

Howard Becker, sebagaimana dikutip Mulyana (2010:162) mengajukan satu definisi praktis bahwa pengamatan berperan-serta adalah teknik yang dilakukan sambil sedikit banyak turut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diteliti. Dalam hal ini, pengamat mengikuti subyek penelitiannya dalam kehidupan sehari-hari mereka, untuk melihat hal-hal apa yang mereka lakukan, kapan, dengan siapa, dalam keadaan apa, serta menanyai mereka mengenai tindakan mereka (Mulyana, 2010:163).

Karena berbasis logika penemuan (*logic of discovery*), maka teknik pengamatan berperan-serta memiliki kelebihan apabila dipergunakan untuk meneliti pola manusia berperilaku serta memandang realitas kehidupan mereka dalam lingkungan yang biasa dan rutin. Ini dikarenakan perilaku manusia tidak cocok diteliti dalam sebuah lingkungan buatan, yang diyakini akan membuat mereka berperilaku tidak alamiah (Mulyana, 2010:167).

Secara lebih spesifik, Idrus (2009:102) mengutip Guba dan Lincoln yang meyakini ada beberapa keunggulan dari pengamatan berperan serta, antara lain

bahwa teknik ini memungkinkan Peneliti melihat dan mengamati sendiri, lalu mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya, sekaligus memungkinkan Peneliti memahami situasi-situasi yang rumit. Namun karena sifatnya yang terkesan tidak memiliki nilai keilmiahan seperti yang dituntut dalam proses penelitian, Jehoda *et al.* (sebagaimana dikutip Idrus, 2009:102) menyarankan perlunya Peneliti mengikuti kaidah-kaidah berikut agar teknik ini tetap berada dalam koridor ilmiah, yaitu:

1. Untuk terus mengabdikan kepada tujuan penelitian yang telah dirumuskan;
2. Merencanakan pengamatan berperan-serta secara sistematis, dan bukan terjadi secara tidak teratur;
3. Tercatat dan dihubungkan dengan proposisi yang lebih umum, dan tidak hanya dilakukan untuk memenuhi rasa ingin tahu belaka;
4. Dapat dicek dan dikontrol validitas dan reliabilitas ketelitiannya sebagaimana data ilmiah lainnya.

Mulyana (2010:168) juga menggaris-bawahi bahwa tantangan bagi teknik pengamatan berperan-serta adalah sifatnya yang mencakup berbagai metode dan cara penelitian, sehingga membuatnya sulit dibakukan oleh komunitas ilmuwan sosial. Namun ia sependapat dengan Louise Kidder, yang berargumen bahwa yang menjadikan penelitian kualitatif menjadi sistematis justru bukanlah standarisasinya, melainkan analisis kasus negatif. Maka, apabila Peneliti memunculkan satu kasus yang menegasikan hipotesisnya, Peneliti merevisi hipotesisnya tersebut agar mengakomodasi bukti baru, dan hal ini dilakukan terus-menerus hingga tidak ada lagi diskonfirmasi (Mulyana, 2010:169). Ini konsisten dengan apa yang dikonsepsikan oleh Bogdan dan Biklen (sebagaimana dikutip

Idrus, 2009:256) sebagai “kejenuhan data” (“*data saturation*”). Dari sini dapat disimpulkan bahwa arah penelitian berperan-serta adalah induktif, yaitu bahwa data dipergunakan untuk merumuskan satu hipotesis atau teori.

3.3.2. Wawancara

Teknik pengamatan berperan-serta juga mencakup teknik wawancara. Kombinasi antara wawancara dan pengamatan berperan-serta adalah konsisten dengan metode logis yang memberi peluang Peneliti untuk mengawinkan sifat-sifat tertutup tindakan sosial dengan sifat-sifatnya yang terbuka dan dapat diamati. Pada akhirnya, gambaran yang komprehensif tentang subyek penelitian dapat dicapai melalui perbandingan antara apa yang dikatakan subyek tersebut dengan apa yang dilakukannya ketika berada pada situasi tertentu (Mulyana, 2010:163).

Terkait penelitian ini, wawancara yang dilakukan Peneliti adalah wawancara yang tidak berstruktur, atau apa yang disebut Idrus sebagai wawancara tak berencana namun selalu terpusat pada satu pokok masalah tertentu (Idrus, 2009:104). Moleong menyebutkan bahwa wawancara jenis ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku, lebih menekankan kekecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal (dalam Arief, 2010: 61). Peneliti juga mendapati bahwa dalam konteks penelitian berperan-serta ini, wawancara tak terstruktur memberi peluang bagi diskusi yang lebih terbuka antara Peneliti dan subyek penelitian. Hal ini membuka peluang untuk memunculkan fakta dan data yang tidak terpikirkan oleh Peneliti sebelumnya, dan pada gilirannya memperkaya pemahaman Peneliti terhadap situasi yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, Peneliti memanfaatkan wawancara langsung dan tidak langsung. Untuk wawancara langsung, Peneliti melakukannya terhadap tiga orang, yaitu:

1. **Walikota Solo Jokowi.** Wawancara dengannya tidak dilakukan pada waktu-waktu yang ditentukan secara khusus dan terstruktur, tetapi pada situasi yang memungkinkan dan secara spontan di sela-sela proses pengamatan berperan-serta.
2. **“Ani”** (nama disamarkan dan transkrip tidak dilampirkan dalam tesis ini sesuai kesepakatan), penasehat informal komunikasi politik Jokowi. Pada saat penelitian berlangsung, ia adalah konsultan komunikasi lepas di beberapa organisasi. Peneliti menganggap ia adalah responden yang penting, karena terlibat dalam pembentukan strategi komunikasi Jokowi di awal tugasnya sebagai pemimpin daerah, dan sampai saat penelitian berlangsung masih memberikan pengaruh terhadap komunikasi politik Jokowi. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Februari dan 9 Maret 2012.
3. **“Hoe”** (nama disamarkan dan transkrip tidak dilampirkan dalam tesis ini sesuai kesepakatan), mantan anggota tim perumus kebijakan Jokowi pada Pilkada 2005. Pada saat penelitian dilangsungkan, ia menjabat sebagai pemimpin utama di salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Solo. Meskipun ia tidak berkecimpung dalam aspek komunikasi politik Jokowi secara langsung, namun ia termasuk pihak yang membantu Jokowi merancang kebijakan dari sebuah konsep menjadi tindakan riil, sehingga Peneliti menganggap pentingnya menyertakan sudut pandanginya ke dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Maret 2012.

Selain melakukan wawancara secara langsung, Peneliti juga mendapatkan informasi melalui wawancara tidak langsung, yaitu yang dilakukan oleh pihak-pihak lain seperti kelompok wartawan dan para tamu yang berdiskusi dengan Jokowi dan disaksikan oleh Peneliti. Hal ini merupakan manfaat lain dari pengamatan berperan-serta yang Peneliti rasakan, yaitu mendapatkan akses informasi yang sebenarnya tidak secara langsung digali oleh Peneliti, namun dilakukan oleh pihak ketiga. Secara ilmiah, teknik ini merupakan bagian dari kegiatan pengamatan berperan-serta yang disebut dengan “mencuri-dengar” (*eavesdropping*), yaitu mendengarkan suara yang tidak diminta. Hal ini diyakini Schatzman dan Strauss (dalam Mulyana, 2010:178) memiliki fungsi sama dengan menyaksikan adegan kegiatan yang sedang berlangsung.

3.3.3. Analisis Dokumen

Di dalam penelitian ini, Peneliti juga menggunakan teknik analisis dokumen, yakni mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur kepustakaan. Dokumen-dokumen yang menjadi rujukan terkait subyek penelitian antara lain:

1. Dua tesis yang telah ditulis sebelumnya yang bertemakan Jokowi dan Pemerintah Kota Solo;
2. Dua buku populer tentang Jokowi;
3. Sekurang-kurangnya 23 artikel surat kabar mengenai Jokowi, aspek-aspek kepemimpinannya, dan hal-hal terkait lainnya;
4. Profil Kota terbitan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solo;
5. Sekurang-kurangnya 10 brosur/pamflet terbitan Dinas Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Solo;
6. Buku agenda kegiatan harian Jokowi;

7. Tulisan Jokowi sendiri yang pernah dipublikasikan.

Hasil analisis terhadap dokumen-dokumen di atas kemudian dijadikan sebagai data penunjang untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan baik melalui penelitian berperan-serta dan wawancara mendalam.

Peneliti melihat pentingnya analisis dokumen dalam penelitian ini, karena hal tersebut memberi konteks dan latar belakang rasional bagi Peneliti untuk memahami hasil penelitian berperan-serta yang dilakukan dalam periode yang relatif terbatas. Hal ini didukung oleh pendapat Schatzman dan Strauss, bahwa sebuah penelitian diperkenankan untuk menelaah dokumen historis dan sumber-sumber sekunder lainnya, karena kebanyakan situasi yang dikaji mempunyai sejarah dan dokumen-dokumen yang ada sering dapat menjelaskan sebagian aspek situasi tersebut (Mulyana, 2010:196).

3.4. PROSEDUR ANALISIS DATA

Dalam menganalisis data, Peneliti memanfaatkan model analisis Miles dan Huberman berupa *model interaktif* (Idrus, 2009:148). Model ini terdiri atas tiga kegiatan utama yang jalin-menjalin sebelum, selama, dan sesudah proses pengumpulan data, dan semuanya diperlakukan secara sejar untuk membantun wawasan umum yang disebut analisis. Ketiga kegiatan tersebut adalah:

1. Proses reduksi data dengan melakukan proses pemilihan terhadap data-data yang terkumpul dan memusatkan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar;
2. Proses penyajian data melalui penyusunan data yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan;

3. Penarikan kesimpulan itu sendiri.

3.5. UJI KEABSAHAN DATA

Dalam melakukan validasi data, Peneliti menggunakan langkah kredibilitas temuan dan interpretasi yang disarankan oleh Moleong (1994, sebagaimana dikutip Idrus, 2009:145), yaitu mengupayakan temuan dan penafsiran yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan disetujui oleh subyek penelitian. Pada saat penelitian, hal tersebut Peneliti terapkan umumnya dengan mengungkapkan kembali informasi yang baru Peneliti dapatkan kepada Jokowi untuk mendapatkan responsnya mengenai informasi tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi memberikan responsnya tanpa diminta, dan hal ini Peneliti terima pula sebagai bentuk validasi data.

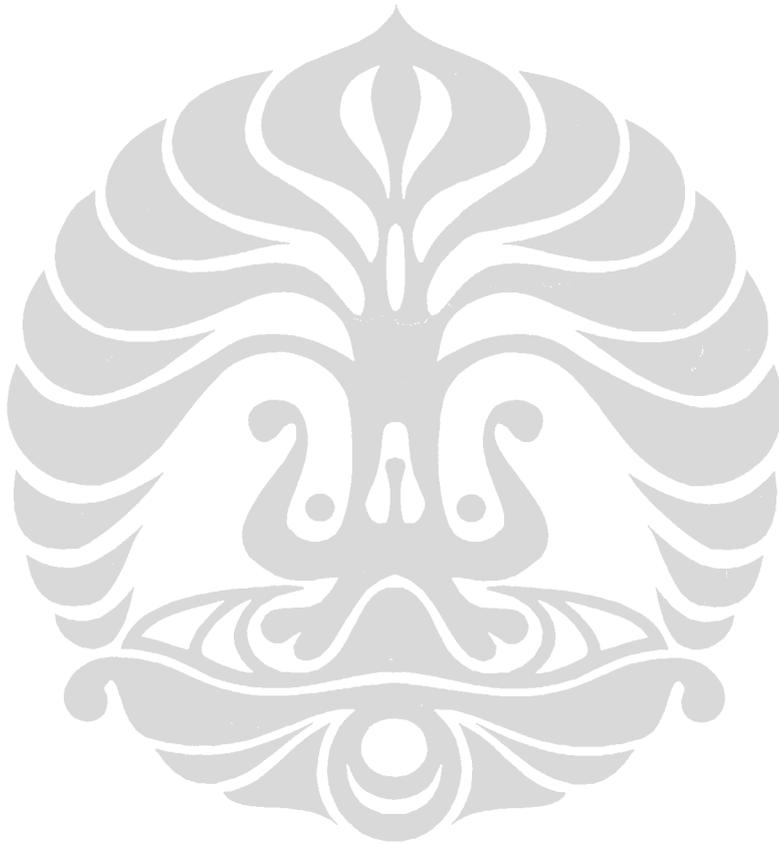
Peneliti juga melakukan *teknik triangulasi data* untuk memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas data, dengan merujuk kepada dua dari empat teknik yang diusulkan oleh Denzin (1978, sebagaimana dikutip Idrus, 2009:145), yaitu:

1. Peneliti menggunakan lebih dari satu sumber informasi, yaitu dengan berusaha mendapatkan rujukan pendukung bagi setiap informasi yang Peneliti peroleh.
2. Peneliti menggunakan lebih dari satu teknik penelitian, yaitu dengan menggunakan kombinasi antara pengamatan berperan-serta, wawancara, dan analisis dokumen.

3.6. PERIODE DAN LOKASI PENELITIAN

Pengamatan berperan-serta dilakukan selama empat minggu, yaitu antara 13 Februari dan 11 Maret 2012.

Lokasi penelitian ini pada umumnya adalah Kota Solo. Selain itu, sebagai konsekuensi logis dari metode ini, Peneliti juga melakukan pengamatan berperanserta terhadap Jokowi ketika sedang berada di Jakarta (25-28 Februari 2012) dan Semarang (29 Februari 2012). * * *



BAB 4. DRAMATURGI DALAM KOMUNIKASI POLITIK JOKOWI

4.1. KOTA SOLO: LOKASI AKSI JOKOWI

Kotamadya Surakarta (Kota Solo) adalah wilayah administratif di bawah Pemerintah Kota Solo, yang sejak 2005 dipimpin oleh walikota terpilih Joko Widodo (Jokowi). Di wilayah inilah banyak terjadi interaksi antara Jokowi sebagai aktor dramaturgi dengan masyarakat Kota Solo sebagai audiens. Sehingga, Kota Solo dalam penelitian ini memenuhi kriteria sebagai tempat terbentuknya lokasi aksi atau panggung bagi Jokowi, sebagaimana didefinisikan oleh Erving Goffman (1956:66) sebagai *“satu area yang dibatasi dengan bentukan persepsi tertentu.”* Oleh karena itu, Peneliti perlu memaparkan latar belakang dan dinamika Kota Solo untuk memberi konteks bagi pemahaman komunikasi politik Jokowi.

4.1.1. Latar Belakang Kota Solo

4.1.1.1. Geografi, Administrasi, dan Demografi Kota Solo

Kota Solo, yang terletak di antara 110°45'15" dan 110°45'35" Bujur Timur serta 7°36'00" dan 7°56'00" Lintang Selatan, merupakan bagian dari Propinsi Jawa Tengah, Republik Indonesia. Dengan luas wilayah 43,44 km², Kota Solo berbatasan langsung dengan tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Boyolali (di sebelah utara), Kabupaten Karanganyar (sebelah utara, barat dan selatan), dan Kabupaten Sukoharjo (sebelah barat, selatan dan timur).

Secara administratif, Kota Solo terbagi menjadi lima kecamatan, yaitu Banjarsari, Jebres, Laweyan, Pasarkliwon, dan Serengan, serta terdiri atas 51 kelurahan yang

mencakup 595 rukun warga (RW), 2.669 rukun tetangga (RT), dan 130.440 kepala keluarga (KK). Berdasar data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solo per 31 Desember 2011, total jumlah penduduk Solo adalah 536.492 jiwa. Kondisi ini menyebabkan tingkat kepadatan Kota Solo mencapai 11.996,41 jiwa/km², dan merupakan kota terpadat di di Jawa Tengah (rata-rata kepadatan tingkat propinsi: 1.009,85 jiwa/km²). Arief (2011:48) menilai bahwa situasi ini membuat lahan di Solo bernilai ekonomis tinggi. Di sisi lain, hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Solo untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan prasarana fisik seperti pemukiman, fasilitas umum berupa sarana transportasi dan ruang terbuka hijau, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Pemerintah kota juga perlu menangani berbagai masalah sosial terkait tingkat kepadatan penduduk seperti semakin ketatnya persaingan untuk mendapat pekerjaan dan meningkatnya angka kriminalitas (Arief, 2011:49).

Selain itu, total populasi Solo terdiri atas usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 386.860 jiwa atau 72,11% dari total populasi, sementara usia anak (14 tahun ke bawah) sebanyak 115.593 jiwa, dan usia lanjut (65 tahun ke atas) sebanyak 34.045 jiwa. Data yang sama menunjukkan bahwa dibanding tahun 2010, jumlah kelompok anak mengalami peningkatan sebesar 9,66%, sedangkan kelompok lanjut usia mengalami penurunan sebesar 13,34%. Meningkatnya jumlah populasi usia anak ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas fasilitas pendidikan, serta fasilitas pendukung seperti taman publik dan tempat bermain anak.

Ditinjau dari aspek ketenagakerjaan, data Badan Pusat Statistik Kota Solo menunjukkan bahwa dari total 235.998 orang tenaga kerja, sejumlah 99.300 orang

atau 42,08% di antaranya bekerja di sektor perdagangan (baik besar maupun ritel), rumah makan dan hotel. BPS Kota Solo juga mencatat sektor ini selalu menjadi penyerap tenaga kerja kota terbesar sejak 2007, dengan tingkat penyerapan lebih dari 40%. Situasi ini menunjukkan pentingnya bagi Pemerintah Kota untuk memberikan perhatian khusus bagi sektor ini, baik dari segi kebijakan yang berpihak kepada industri perdagangan, rumah makan dan hotel, maupun dengan mendorong tumbuhnya sektor inti seperti pariwisata dan *meetings, incentives, conventions, and exhibitions* (MICE), yang memungkinkan berkembangnya industri tersebut.

4.1.1.2. Sejarah dan Landasan Dinamika Sosial Politik Kota Solo

Solo dikenal sebagai salah satu kota dengan dinamika sosial politik yang menonjol di Indonesia. Ini terkait dengan catatan historis kota Solo yang menjadi tempat munculnya berbagai konflik politik feodal, kolonial, dan pergerakan rakyat, yang digambarkan secara eksplisit oleh Trinugraha (2011:1) bahwa "*Solo seolah-olah memiliki tradisi radikalisme.*"

Priatmodjo (2009:1) mencatat bahwa Kerajaan Surakarta berawal dari Desa Solo yang berlokasi strategis karena berada di sisi sungai besar (*bengawan*) yang menjadi jalur transportasi utama Jawa bagian tengah dan Timur. Antara lain atas pertimbangan ini, pada tahun 1745 Raden Mas Probosuyoso atau Pakubuwono II memindahkan Kerajaan Kartasura yang saat itu telah hancur diserbu pemberontak ke Desa Solo, menjadikannya Kerajaan Surakarta pada 1745. Hanya sepuluh tahun sejak berdirinya, yaitu pada 1755, Kota Solo terdera internal konflik yang menyebabkan Pakubuwono II harus menyerahkan sebagian tanah kerajaannya

kepada pamannya Pangeran Mangkubumi, yang lalu mendirikan Kesultanan Yogyakarta dan menggelari dirinya sebagai Hamengkubuwono.

Pada 1757 atau dua tahun kemudian, Kerajaan Surakarta terpecah lagi saat Pakubuwono II menyerahkan kawasan utara Solo kepada sepupunya Raden Mas Said, yang lalu menjadikannya kawasan Mangkunegoro. Ini menciptakan apa yang disebut Priatmodjo (2009:1) sebagai "*kota dua kerajaan yang saling berkompetisi,*" yaitu Keraton ("*kerajaan*") Surakarta di bagian selatan dan Pura ("*puri*") Mangkunegara di bagian utara, serta hanya dipisahkan secara artifisial oleh sebuah jalan besar (yang kini menjadi jalan protokol Slamet Riyadi). Priatmodjo (2009:2) lebih lanjut mencatat bahwa persaingan antara dua kekuasaan tersebut terus berlangsung selama dua abad. Pemerintah kolonial Belanda memiliki andil besar dalam menjaga keseimbangan antara dua kekuatan politik tersebut, antara lain dengan mengontrol marka batas dan mendirikan benteng Fort Vastenburg yang kurang lebih berlokasi di antara dua wilayah.

Berdasar atas latar belakang tersebut, Penulis melihat bahwa dinamika kekuatan politik kolonial dan feodal di Kota Solo telah menjadi bagian integral dari sistem kekuasaan kota ini sejak awal pendiriannya. Loyalitas feodal yang tercipta di Solo tidaklah sentralistis dan terpusatkan pada kekuatan tunggal, sebagaimana misalnya yang Peneliti lihat cenderung terjadi pada Kerajaan Yogyakarta. Takashi Siraishi (dalam Trinugraha, 2011:2) menyiratkan bahwa situasi tersebut memengaruhi perkembangan struktur sosial dan tata politik di Kota Solo dan memberi ruang bagi tumbuhnya beragam faksi sosial politik dalam masyarakatnya. "Modal dasar" tersebut, ditambah dengan munculnya Politik Etis Belanda di awal abad 20 yang mentransformasi masyarakat Solo menjadi komunitas terpelajar

yang kritis, dilihat Siraishi sebagai tulang punggung bagi gerakan nasionalis yang terwujud dalam Sarekat Islam, Insulinde, dan Partai Komunis Indonesia (Trinugraha, 2011:2-3).

4.1.1.3. Pluralisme Politik Kota Solo

Spektrum politik Solo yang demikian diversif di masa lampau tetap menjadi ciri bagi Solo di masa kini. Sebagai dinyatakan oleh “Ani:” *“Semua aliran ada di Solo; Dari yang kiri sampai yang kanan, lengkap”* (Wawancara “Ani,” 8 Februari 2012). Jokowi juga mengungkapkan hal yang sama: *“Di Kota Solo ini komplit. Ada fundamentalis Kristen, fundamentalis Islam, fundamentalis Kejawen, bahkan fundamentalis Komunis masih ada”* (Zaenuddin, 2012:67). Mengonfirmasi kedua pernyataan tersebut, penelitian Arief (2011:55) menunjukkan bahwa menjelang dan pasca berakhirnya jaman Orde Baru 1998, Solo dan wilayah sekitarnya menjadi salah satu episentrum pertumbuhan gerakan radikal. Gerakan radikal yang bermazhab nasionalis dan memiliki basis massa signifikan di Solo antara lain adalah Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SMID). Salah satu penyebab kuatnya kedua organisasi tersebut adalah karena keduanya memiliki jejaring aktivis yang solid di Universitas Muhammadiyah Solo (UMS) dan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo.

Di sisi lain, gerakan fundamentalis berbasis keagamaan juga tumbuh subur di Solo dan sekitarnya. Gerakan ini antara lain adalah Brigade Hizbullah, Front Pemuda Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, Jamaah Anshorut Tauhid, Laskar Hamas, Laskar Hawariyyun, Laskar Hizbullah Sunan Bonang, dan Majelis Mujahiddin Indonesia. Thayrun mencatat pernyataan Jokowi bahwa di Solo terdapat 33 laskar berbasis keagamaan (2012:185). Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan

Solo adalah tempat keberadaan Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngruki yang terafiliasi oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir yang menjadi sorotan internasional karena didakwa terkait dengan jaringan terorisme. Beberapa terpidana aksi kejahatan terorisme di Indonesia juga merupakan lulusan dari pondok pesantren ini, antara lain Ali Ghufron (alias Mukhlas), Amrozi Nurhasyim, dan Asmar Latin Sani (Sebagaimana dipaparkan antara lain oleh Arief, 2011:50-52).

Solo juga tercatat merupakan salah satu kota di Indonesia yang banyak dilanda kerusuhan. Karena kerentanan sebagai tempat terjadinya konflik, Solo terkadang disebut sebagai "*wilayah bersumbu pendek*" (antara lain oleh *Tempo* ["Peredam," 2009:34] dan Thayrun, 2012:159). Zaenuddin mencatat dalam sejarah Solo, kota ini telah dilanda kerusuhan setidaknya 11 kali (2012:67). Kerusuhan terakhir adalah tahun 1999, saat terjadi pembakaran gedung Balaikota Solo oleh massa yang kecewa dengan kekalahan Megawati Soekarnoputri dalam Pemilihan Presiden di Sidang MPR. Sedangkan kerusuhan terbesar dalam periode ini adalah kerusuhan 1998, yaitu saat terjadi pembakaran toko dan rumah milik warga keturunan Tionghoa. *Harian Kompas* mencatat bahwa kerusuhan tersebut menghancurkan hasil pembangunan selama 30 tahun dan menimbulkan kerugian materiil sebanyak Rp 600 milyar (Arief, 2011:50-52). Selain itu, Thayrun juga mencatat kejadian tahun 2001 yang kemudian dikenal sebagai "Serangan 11 September," yaitu ketika kelompok Laskar Islam Surakarta melancarkan aksi penyisiran warga negara asing yang tinggal di Solo (2012:160).

4.1.1.4. Kota Solo Sebagai Indikator Politik Nasional

Faktor sejarah panjang pergerakan, kekerapan adanya kerusuhan dan konflik, serta kuatnya akar radikalisme Solo, menjadikan berbagai aktivitas di kota ini selalu berimbas secara nasional. Mengenai fenomena ini, Nur Sardini sebagaimana dikutip Arief (2011:56) menawarkan penjelasan mengapa gerakan di Solo kerap diikuti oleh berbagai aksi destruktif, seperti yang terjadi pada kerusuhan 1998. Menurutnya, di Solo terdapat berbagai target amuk massa yang menyimbolkan kekuasaan Orde Baru, sehingga dipandang sebagai “pihak yang harus dihancurkan,” antara lain Astana Giri Bangun, Astana Mangadeg, dan Ndalem Kalitan. Hal ini konsisten dengan teori konflik *Blaming Factor* dari Ralf Dahrendorf. Selain itu, Sardini juga berargumen bahwa Solo memiliki pergerakan mahasiswa yang konsisten, dengan derajat dan kualitas radikalisme yang memadai, sehingga memiliki tiga masalah dasar dalam gerakan mahasiswa, yaitu: basis massa, basis ideologi dan tematik, serta kematangan dalam organisasi, strategi, dan taktik pergerakan kemahasiswaan dan kerakyatan (Arief, 2011:56).

Pandangan Sardini ini sekaligus memberi alasan munculnya persepsi bahwa Solo adalah barometer politik nasional. Persepsi semacam ini pada gilirannya rentan dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan politik nasional, antara lain dengan membuka peluang untuk memprovokasi pergerakan di Solo agar tereskalasi menjadi konflik (sebagaimana diindikasikan terjadi pada kerusuhan 1998 dan 1999 oleh Arief [2011:57-58]). Oleh karenanya, potensi konflik vertikal dan horizontal Solo masih tetap ada, dan menjadi tantangan tersendiri bagi pemimpin daerah di kota ini.

4.1.2. Latar Belakang Hubungan Jokowi dengan Warga Solo

Sebagaimana kota dan kabupaten lain di Indonesia, Kota Solo dihadapkan pada tantangan desentralisasi dalam kaitannya dengan masyarakat yang kini memegang wewenang untuk menentukan pemimpin secara langsung. Dalam konteks formal, tantangan tersebut bagi Kota Solo dimulai saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Solo pada tanggal 27 Juni 2005, yaitu ketika warga Kota Solo harus menentukan sendiri pasangan walikota dan wakil walikota mereka.

Munculnya tantangan desentralisasi tersebut menyebabkan masyarakat Solo dihadapkan pada permasalahan keagenan yang telah Peneliti paparkan pada Bab 2 dari penelitian ini. Dengan menggunakan definisi Keagenan Politik sebagaimana diajukan Berliant dan Duggan (2008:2), dan dikaitkan dengan topik penelitian, Peneliti membagi permasalahan keagenan masyarakat Solo menjadi dua. **Yang pertama**, masyarakat Solo dihadapkan pada permasalahan *adverse selection*, yaitu tidak mengetahui kompetensi Joko Widodo (Jokowi). Dengan kata lain, warga Solo tidak mengetahui apakah Jokowi orang yang tepat untuk menjadi walikota mereka. **Yang kedua**, masyarakat Solo juga dihadapkan pada permasalahan *moral hazard*, yaitu bahwa mereka tidak mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Jokowi, namun hanya dapat mengetahui konsekuensi dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat tidak mengetahui apakah kegiatan Jokowi sudah sejalan dengan tujuan pemenuhan kepentingan masyarakat Solo, atau tidak berkorelasi dan justru menegasikan tujuan tersebut.

Sebagai upaya untuk semakin memahami keunikan Solo dalam konteks kedua permasalahan keagenan tersebut, Peneliti melihat setidaknya ada dua hal yang relevan untuk menjadi catatan dalam penelitian ini. **Pertama**, hubungan antara

masyarakat dan walikota Solo sebelum Jokowi tidaklah terbangun dengan baik, antara lain karena saluran komunikasi yang tidak ada. Thayrun (2012:41) mencatat bahwa walikota sebelum Jokowi begitu tertutup, sehingga tidak pernah membuka pintu gerbang Balaikota, dan setiap orang yang hendak bertamu hanya bisa masuk melalui pintu belakang. Walikota tersebut juga tertutup terhadap wartawan menolak diwawancarai tanpa penjadwalan dan persiapan khusus (Thayrun, 2012:40).

Kedua, menjelang Pilkada langsung yang pertama di 2005, Kota Solo secara politis terbagi menjadi beberapa kelompok massa yang mendukung kandidat yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan dukungan kepada Jokowi tidaklah mutlak. Arief (2011:62) mencatat pada Pilkada Solo 2005, selain pasangan Jokowi dan F.X. Hadi Rudyatmo (Jokowi-Rudy) terdapat pula pasangan Achmad Purnomo dan Istar Yuliadi (Purnomo-Istar), pasangan Hardono dan G.P.H. Dipokusumo (Hardono-Dipo), serta pasangan Slamet Suryanto dan Hengky Narto Sabdo (Slamet-Hengky). Perlu dicatat bahwa Slamet Suryanto adalah petahana (*incumbent*), yang sebelumnya didukung oleh partai yang saat itu mengusung Jokowi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), sehingga situasi ini disinyalir memecah suara partai tersebut.

Perolehan suara pasangan kandidat walikota Solo dan wakilnya di Pilkada 2005 serta gambaran proporsi partai-partai pendukungnya di legislatif dipaparkan pada Tabel 1 di bawah ini:

Nama Pasangan	Perolehan Suara (%)	Partai Pendukung	Total Perolehan Suara Partai Pendukung saat Pileg 2004 (%)
Jokowi – Rudy	36,62	PDI-P, PKB	38,70
Purnomo – Istar	29,08	PAN, PBR, PBB, PPP	19,93
Hardono – Dipo	29,01	Demokrat, Golkar, PKS	29,36
Slamet – Hengky	5,29	PDS, 13 partai kecil	12,01

Tabel 1. Hasil Pilkada Solo 2005 (Arief, 2011:61-62)

Data di Tabel 1 menunjukkan, bahwa meskipun akhirnya pasangan Jokowi-Rudy memenangi Pilkada dengan perolehan suara 36,62%, angka ini lebih kecil dari jumlah perolehan suara partai pendukung Jokowi-Rudy di Pemilu Legislatif 2004, yaitu 38,7% (terdiri atas perolehan suara PDI-P sebesar 35,86% dan Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 2,21%). Angka tersebut juga lebih kecil dari hasil survei yang memprediksi perolehan Jokowi-Rudy sekurang-kurangnya 46% (Arief, 2011:62-63). Sementara itu, pasangan yang berada urutan kedua adalah Purnomo-Istar, yang memperoleh suara sebesar 29,08%. Meskipun berselisih jauh dari perolehan suara pasangan Jokowi-Rudy, pasangan Purnomo-Istar merupakan satu-satunya pasangan yang memperoleh suara lebih tinggi dari total jumlah suara partai pendukung mereka pada saat Pemilu Legislatif yang hanya 19,93% (Arief, 2011:63). Hal tersebut menjadi sinyalemen bahwa massa partai pendukung Jokowi-Rudy tidak secara solid mendukung pasangan tersebut, dan bahwa mereka diduga mengalihkan dukungan pada pihak lain, baik Purnomo-Istar ataupun pasangan yang berasal dari partai yang sama yaitu Slamet-Hengky.

Analisis di atas didukung oleh pernyataan “Ani” sebagai berikut:

“Waktu itu [saat Pilkada 2005 – Pen.] PDIP nggak sepenuhnya solid, karena mantan incumbent-nya kan dari PDIP, (yaitu) Pak Slamet

Suryanto itu. Beliau maju lagi setelah sebelumnya pemilihannya (sebagai walikota) lewat DPRD. Nah (sehingga) dulu ada kelompoknya Pak Slamet Suryanto, nah seperti itu (kondisi) pertarungannya. Ya walaupun kita (akhirnya) menang, tapi nggak cukup untuk menjadikan Pak Jokowi (di posisi yang kuat), karena sebelumnya kan orang-orang [pemilih – Pen.] juga nggak yakin. Selain itu kan juga bagi mereka itu format baru. (Mereka berpikir), ‘Pengusaha kok jadi walikota.’” (Wawancara “Ani,” 9 Maret 2012)

Analisis di atas menjadi landasan argumentasi Peneliti bahwa pada saat itu telah terdapat ketidak-seimbangan informasi (*information asymmetry*) yang cukup besar di kalangan masyarakat Solo terhadap figur Jokowi. Dukungan terhadap Jokowi yang kurang dari setengah dari total pemilih Solo, serta berkurangnya massa dari partai pendukung Jokowi mencirikan telah terjadinya *adverse selection*, sebagai akibat dari ketidak-tahuan masyarakat Solo saat itu mengenai kompetensi Jokowi, dan mengenai kebijakan yang akan diambilnya apabila terpilih menjadi walikota.

4.1.3. Permasalahan Perkotaan Solo di Awal Pemerintahan Jokowi

Pada saat Jokowi menerima jabatan walikota Solo, ia juga menerima berbagai macam persoalan yang ada di kota ini dari pemimpin daerah sebelumnya. Sebagaimana dirangkum oleh Jokowi: “*Saya itu selalu diberi persoalan-persoalan, warisan-warisan nggak jelas*” (Wawancara 13 Februari 2012). Yang paling mendasar adalah bahwa Jokowi mendapati citra Kota Solo telah rusak akibat kerusuhan massa 1998 dan 1999, serta isu terorisme yang membuat kota ini dianggap rawan oleh para investor (Arief, 2011:64).

Selain hutang Pemerintah Kota sebesar Rp 34 milyar dan defisit anggaran Rp 18,65 milyar, permasalahan ekonomi lain yang melanda Kota Solo di tahun 2005 antara lain adalah tingginya angka kemiskinan. Berdasarkan data BKKBN di tahun tersebut, di Kota Solo terdapat 41.191 keluarga miskin, dengan 18.891 keluarga di antaranya berada di tingkat pra-sejahtera. Pengangguran juga menjadi masalah serius. Pada tahun 2005, jumlah pencari kerja berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja Solo mencapai 9.983 orang, padahal kesempatan kerja yang tersedia saat itu hanya 4.220 (Arief 2011:66).

Solo juga menghadapi permasalahan tata kota yang kompleks. Di berbagai tempat, banyak ruang hijau kota dan bantaran sungai dihuni secara liar, khususnya oleh para pendatang dari daerah di luar Solo. Tercatat ada sekitar 6.000 pemukiman liar yang tersebar di berbagai wilayah di Solo, beberapa di antaranya sudah ada selama 40 tahun dan tidak mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota. Selain merusak peruntukan lahan hijau kota, pemukiman liar semacam ini juga telah menjadi sumber berbagai penyakit sosial seperti premanisme dan prostitusi, seperti yang terjadi pada di Taman Balekambang (Wawancara Jokowi, 13 Februari 2012).

Kondisi buruk juga dialami oleh pasar-pasar tradisional Solo. Akibat keterbatasan ruang pasar dan nihilnya penataan, pasar-pasar di kota Solo menjadi kotor, kumuh, dan tidak nyaman. Melonjaknya jumlah pedagang melebihi kapasitas yang ada mendorong mereka untuk membuka lapak dagangan secara sembarangan, yang kemudian memunculkan pedagang kaki lima (PKL) liar. Para PKL liar tersebut membuka kiosnya secara sembarangan di berbagai lokasi, termasuk di kawasan taman, alun-alun, dan di trotoar jalan, yang pada gilirannya menimbulkan

kemacetan dan menjadikan fasilitas umum tersebut tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya (Wawancara Jokowi, 13 Februari 2012). Selain itu, karena statusnya yang tidak terdaftar secara resmi, para pedagang ini juga tidak memberikan kontribusi kepada anggaran pendapatan kota.

Ditinjau dari aspek birokrasi, Pemerintah Kota Solo menawarkan pelayanan publik yang berkualitas rendah. Masyarakat merasakan bahwa birokrasi yang ada terlalu lamban dan berbelit-belit Arief (2011:71). Hal ini dapat dilihat dari terlalu lamanya waktu untuk mendapatkan KTP atau mengurus proses perizinan usaha. Saat itu, tidak pernah ada kepastian berapa lama sebuah izin usaha bisa diselesaikan, dan berapa lama biaya yang harus dikeluarkan, akibat banyaknya pungutan di luar biaya resmi (Nurbarani, 2009:102-103).

Berbagai ekspresi atas kekecewaan masyarakat ini dialami secara langsung oleh Jokowi di awal kepemimpinannya. Ia mencatat bahwa di bulan pertama menjabat, setiap hari pintu gerbang Balaikota di Jalan Sudirman selalu penuh oleh rombongan pengunjung rasa yang menyatakan ketidak-puasannya terhadap berbagai hal. Selain para demonstran, ada sekitar 30 sampai 40 orang yang datang ke kantor dan rumah dinas Jokowi per harinya untuk meminta pertolongan bagi kebutuhan mereka masing-masing yang mendesak. Permintaan ini umumnya timbul akibat tidak mampunya Pemerintah Kota sebelumnya untuk menjawab permasalahan masyarakat, seperti tidak adanya layanan kesehatan yang memadai, dan retribusi dan pungutan pasar yang terlalu tinggi yang justru mengancam kelangsungan usaha para pedagang di pasar tersebut (Wawancara Jokowi, 14 Februari 2012). Kemudian, pada saat pertama kali diadakan acara *rembug* (musyawarah) kota, semua perwakilan warga masyarakat yang berbicara

mengungkapkan protes dan rasa kecewa kepada pemerintahan sebelumnya, dan seluruhnya disampaikan dengan cara emosional seperti marah dan berteriak (Wawancara Jokowi, 14 Februari 2012).

4.2. PENDEKATAN DRAMATURGI DALAM KOMUNIKASI POLITIK

JOKOWI

Pada bagian ini, Peneliti akan menelaah komunikasi politik yang dilakukan oleh Jokowi selama periode penelitian, berdasarkan elemen-elemen dramaturgi Erving Goffman yaitu: panggung, kontrol terhadap informasi, dan manajemen impresi.

4.2.1. Panggung Depan Jokowi

4.2.1.1. Proses Penciptaan Panggung Depan

Menurut Goffman, pertunjukan dalam dramaturgi adalah setiap interaksi sosial yang terjadi. Penciptaan panggung merupakan komponen penting di tahap awal, karena memberikan indikasi mengenai waktu serta suasana selama interaksi sosial itu berlangsung (Medlin, 2008:36). Berlandaskan pemahaman tersebut, maka Peneliti melihat setiap tindakan Jokowi yang melibatkan masyarakat Solo, baik secara langsung maupun melalui perantaraan media, adalah panggung depan bagi pertunjukan dramaturgi. Hal ini menyebabkan panggung dramaturgi Jokowi dapat tercipta melalui dua hal, yaitu: **Pertama**, kapasitas tugas formalnya selaku walikota membuatnya kerap terlibat dalam aktivitas yang mewajibkan dirinya berinteraksi dengan masyarakat; Dan **kedua**, dorongan motivasi internal Jokowi untuk selalu ingin lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Baginya, permasalahan utama adalah berada di tengah masyarakat, dan hal ini lebih menjadi prioritas utamanya daripada terikat dengan jadwal formal, sebagaimana penuturannya:

“Jadwal saya ada di sini [menunjukkan komputer tabletnya – Pen.]. Tapi setelah dijadwal, kalau kira-kira (saya) ada agenda lain, bisa saya delegasikan. Karena yang saya butuhkan adalah mendekati persoalan, mendekati problem, mendekati masalah yang ada di masyarakat. Kalau masalah (yang bersifat) administrasi, sudah saya delegasikan ke Kepala Dinas (dan) ke Sekda.” (Wawancara Jokowi, 13 Februari 2012)

Untuk keperluan penelitian ini, Peneliti mengelompokkan panggung Jokowi menjadi tiga jenis berdasarkan metode penciptaannya apabila dipandang dari perspektif Jokowi, yaitu:

- I. Penciptaan panggung yang terantisipasi dan terjadwal;
- II. Penciptaan panggung yang terantisipasi dan spontan;
- III. Penciptaan panggung yang tidak terantisipasi dan spontan.

Metode pertama (Metode I) adalah **penciptaan panggung terantisipasi dan terjadwal**, yaitu ketika sebuah interaksi berlangsung karena sudah dijadwalkan sebelumnya, sehingga baik Jokowi maupun audiens telah memiliki informasi pendahuluan mengenai interaksi tersebut. Kondisi ini memungkinkan kedua belah pihak melakukan persiapan yang memadai untuk memulai interaksi, misalnya tema acara dan plot (Medlin, 2008:35).

Interaksi yang tercipta dengan Metode I lebih lanjut dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah **kegiatan seremonial**, yang memosisikan Jokowi selaku bagian dari sebuah interaksi dengan audiens yang relatif banyak dan memiliki struktur serta alur interaksi formal yang sudah direncanakan sebelumnya. Contoh dari kegiatan seremonial antara lain adalah ketika Jokowi menghadiri acara peluncuran buku (18 Februari 2012). Yang kedua adalah **kegiatan**

pertemuan, yang memosisikan Jokowi sebagai bagian dari sebuah interaksi yang dengan jumlah audiens yang relatif lebih terbatas sehingga membuka peluang bagi interaksi yang lebih intens dan informal, serta memiliki struktur dan alur interaksi yang terencana namun relatif lebih cair dan akomodatif terhadap perubahan situasional. Contoh dari kegiatan pertemuan ini aktivitas-aktivitas audiensi Jokowi, misalnya ketika ia diwawancara rombongan siswa SMA 1 Solo untuk keperluan peliputan majalah sekolah (14 Februari 2012). Kedua kelompok kegiatan yang terantisipasi dan terjadwal ini umumnya merupakan bagian dari kegiatan resmi Jokowi selaku walikota dan telah diagendakan sesuai prosedur, baik oleh kantor protokol walikota di Balaikota maupun kantor sekretariat Jokowi yang terletak di samping Rumah Dinas.

Untuk interaksi publik Jokowi yang proses penciptaannya masuk ke dalam Metode I, Peneliti mendapati bahwa jumlah interaksi yang sesungguhnya terlaksana jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah undangan kepada Jokowi untuk mengadakan interaksi dengan pola ini. Dokumen berisikan jadwal acara harian walikota yang diperoleh Peneliti menunjukkan bahwa Jokowi sendiri berperan untuk memperkecil jumlah interaksi formal semacam ini, dengan mendisposisi berbagai undangan kegiatan seremonial kepada Sekretaris Daerah maupun kepala-kepala dinas terkait.

Perbandingan antara undangan yang diterima oleh Jokowi, yang dihadiri sendiri, dan yang didisposisikan ke pihak-pihak lain dirangkum dalam Tabel 2 di bawah ini:

Periode Pengamatan (Senin-Minggu)	Jumlah Undangan pada Jokowi ke Kegiatan Seremonial	Didisposisikan ke Sekda/Kadis Terkait		Dihadiri sendiri		Total Undangan yang Disetujui
		Jumlah	%	Jumlah	%	
13 Feb – 19 Feb	43	15	35%	9	21%	24
20 Feb – 26 Feb	34	16	47%	5	15%	21
27 Feb – 4 Mar	46	17	37%	5	11%	22
5 Mar – 11 Mar	33	10	30%	10	30%	20
TOTAL	156	58	37%	29	18%	87

Tabel 2. Perbandingan jumlah undangan ke acara seremonial/formal kepada Jokowi, yang didisposisi dan yang dihadiri sendiri

Dari Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa selama periode penelitian, sebagian besar undangan kegiatan-kegiatan seremonial dan formal yang disetujui untuk dihadiri, selanjutnya didelegasikan kepada jajaran Pemerintah Kota di bawahnya. Selama 28 hari tersebut, Jokowi sendiri hanya menghadiri 29 acara formal, atau 18% dari seluruh undangan seremonial yang ditujukan kepadanya. Ini menunjukkan Jokowi umumnya hanya menghadiri satu acara formal dan/atau seremonial per harinya. Data ini mengindikasikan bahwa aktivitas seremonial Jokowi tidaklah terlalu banyak, dan konsisten dengan keinginan Jokowi yang tidak ingin disibukkan dengan hal-hal yang bersifat seremonial dan administratif, namun lebih memilih untuk mendelegasikannya pada jajaran di bawahnya (wawancara Jokowi, 13 Februari 2012).

Metode penciptaan panggung yang kedua (Metode II) adalah **penciptaan panggung yang terantisipasi dan spontan**, yaitu ketika sebuah interaksi diputuskan secara langsung dan sepihak oleh Jokowi. Dalam hal ini, “langsung dan sepihak” berarti kegiatan diputuskan hanya beberapa saat sebelum interaksi terjadi dan tanpa kabar pendahuluan yang memadai kepada audiens. Karena

kegiatan ini diinisiasi oleh Jokowi, maka adanya interaksi ini sudah dapat diantisipasi oleh Jokowi, namun persiapannya hanya diketahui hanya oleh Jokowi. Sedangkan bagi pihak audiens yang tidak mendapatkan informasi sebelumnya, interaksi dengan Jokowi di sini merupakan hal yang tidak diduga-duga. Panggung semacam ini terjadi antara lain saat Jokowi mengunjungi salah satu kantor kecamatan untuk mengecek proses penerbitan KTP dan surat ijin (15 Februari 2012), dan mengunjungi kantor *Solopos* untuk berbincang dengan jajaran redaktur (14 Februari 2012).

Analisis Peneliti menunjukkan bahwa Jokowi cenderung untuk memilih penciptaan panggung Metode II daripada Metode I, karena ia menganggap Metode II ini efektif dalam membangun masyarakat dan birokrasi yang senantiasa merasa mendapatkan perhatian dari pemimpinnya. Jokowi juga memandang pada pola penciptaan panggung dengan Metode II memiliki dampak komunikasi yang meluas di masyarakat. Menurut pendapatnya:

“...Hal itu [Dialog langsung – Pen.] memang (kegiatan yang) mikro sekali, tapi ya harus kita kerjakan, gimana kalau tidak. Tapi (bila saya turun dan berdialog langsung) seperti itu suaranya (menyebar) ke mana-mana. (Bila masyarakat berkata,) ‘Wah, kemarin (saya) ditegur sama Pak Walikota,’ itu suaranya ke mana-mana, jangan main-main... Yang lain juga jadi berpikir, ‘Wah, nanti saya (berarti ada kesempatan) ditegur, didatangi.’ Masyarakatnya (merasa) on, karyawan juga (merasa) on. Ya (dari) masalah sepele-sepele (seperti) itu.” (Wawancara Jokowi, 14 Februari 2012)

Metode yang ketiga (Metode III) adalah **penciptaan panggung yang tidak terantisipasi dan spontan**, yaitu ketika sebuah interaksi terjadi karena diinisiasi

oleh audiens yang mendatangi Jokowi secara langsung dan tanpa perjanjian atau membuat jadwal terlebih dahulu. Dari sudut pandang Jokowi, hal ini merupakan hal yang tidak dapat diduga-duga, karena tidak diagendakan sebelumnya, pun tidak ia antisipasi. Contoh interaksi yang terbentuk dengan metode III adalah pada saat Jokowi didatangi warga miskin yang meminta bantuannya (14 Februari 2012), atau dihentikan para demonstran dan wartawan di saat *Car-Free Day* (4 Maret 2012).

Proses pembentukan panggung menggunakan Metode III adalah hal baru dalam hubungan antara pemimpin Solo dan masyarakatnya, karena selama ini model kepemimpinan di Solo cenderung membatasi interaksi secara spontan antara kedua belah pihak. Sebagai contoh, para walikota yang memimpin Solo di periode sebelumnya cenderung tertutup kepada media, dan hanya memberikan wawancara setelah ada surat permohonan resmi dari wartawan yang bersangkutan dengan disertai daftar pertanyaan (Thayrun, 2012:41). Hambatan saluran komunikasi di masa lalu juga diakui oleh Jokowi, bahwa: “...*(Dulu) Balaikota Solo dibakar karena problem-problem tidak diselesaikan... (Hal ini) karena nggak ada saluran komunikasinya*” (Wawancara Jokowi, 16 Februari 2012).

Di masa kepemimpinannya, Jokowi membiarkan masyarakat menemuinya dengan bebas, dan seringkali tanpa perlu melewati perantara aturan protokoler. Sebagai contoh, Peneliti mengamati bahwa bagi warga masyarakat yang hendak menemui Jokowi, mereka hanya perlu datang ke Balaikota, untuk kemudian dipersilakan menunggu dan ditemui Jokowi apabila tiba, sebagaimana yang terjadi terhadap seorang warga kota miskin yang meminta bantuan Jokowi (14 Februari 2012). Bahkan apabila Jokowi terbentur dengan jadwalnya yang sudah terbentuk dengan

Metode I, ia akan mencari cara untuk dapat bertemu dengan masyarakat. Hal ini terjadi pada tanggal 1 Maret 2012, saat Jokowi ditunggu oleh beberapa kelompok masyarakat sekaligus di Balaikota, padahal di waktu yang sama ia telah dijadwalkan untuk meresmikan cabang baru dari sebuah bank. Menghadapi situasi tersebut, Jokowi menemui kelompok masyarakat tersebut di ruang tamu Balaikota, meminta mereka untuk menunggu, dan menjanjikan akan segera kembali untuk menemui mereka sekembalinya ia dari acara peresmian.

Berdasarkan paparan di atas, nampak bahwa unsur spontanitas adalah komponen penting yang terdapat dalam Metode II dan Metode III. Pada penciptaan panggung dengan Metode II, tuntutan untuk bertindak spontan berada pada audiens yang dijumpai Jokowi; Sedangkan pada penciptaan panggung dengan Metode III, tuntutan spontanitas berada pada Jokowi selaku aktor. Peneliti memahami bahwa spontanitas semacam ini adalah hal yang diharapkan oleh Jokowi dalam interaksinya, karena spontanitas memperkecil peluang terjadinya manipulasi pesan yang terjadi (wawancara Jokowi, 14 Februari 2012).

Penciptaan panggung secara spontan sebagaimana tercermin dari Metode II dan III di atas konsisten dengan pandangan Goffman mengenai fungsi spontanitas dalam panggung dramaturgi. Sebagaimana dikutip oleh Barnhart (1994), Goffman menganggap bahwa melalui spontanitas, aktor berupaya menciptakan panggung depan yang tidak terlihat bagaikan rekayasa, dengan cara mendorong perwujudan diri yang seasli mungkin. Peneliti juga melihat bahwa sebagai prasyarat untuk melakukan sebuah interaksi spontan yang baik, seorang aktor perlu senantiasa memiliki penguasaan terhadap materi agar ia mampu bereaksi dengan tepat terhadap setiap kejadian selama interaksi berlangsung.

4.2.1.2. Setting dan Personal Front Jokowi di Panggung Depan

Goffman membagi kawasan depan menjadi set panggung (*setting*) dan perangkat pribadi (*personal front*). Bila diaplikasikan dalam konteks Jokowi, maka *setting* yang melekat padanya adalah situasi yang mendukung perannya sebagai walikota, antara lain Balaikota, Rumah Dinas Loji Gandrung, serta lokasi-lokasi lain yang telah disiapkan baginya, seperti kursi di baris terdepan yang direservasi untuk walikota pada acara-acara seremonial. Sedangkan *personal front* adalah perangkat yang dianggap audiens dapat menunjukkan status Jokowi sebagai walikota, baik dalam bentuk fisik maupun sikap. Perangkat pribadi Jokowi yang berbentuk fisik antara lain adalah seragam dinas, mobil dinas, serta rombongan protokol dan pengawal, sedangkan sikap adalah perilaku dan pembawaannya sebagai walikota.

Berdasar pengamatan Peneliti, Jokowi memahami adanya *setting* dan *personal front* dirinya sebagai walikota, dan berhati-hati dalam menanganinya. Setidaknya ada tiga hal yang mengindikasikan perilaku tersebut. Yang pertama, Jokowi sengaja memilih tempat-tempat yang sederhana untuk menjamu para tamunya. Peneliti mencatat beberapa kali Jokowi menjamu pejabat yang berkunjung ke Solo di warung-warung kaki lima, seperti Warung Gule Kambing Bu Bejo saat menjamu seorang direktur jenderal (14 Februari 2012) dan Warung Sate Mbok Galak saat menjamu seorang menteri (16 Februari 2012). Karena terkadang jamuan tersebut juga mengajak wartawan, maka warung-warung tersebut dapat juga menjadi tempat bagi terlaksananya konferensi pers dengan pejabat tersebut (sebagaimana yang terjadi pada tanggal 16 Februari). Alasan pemilihan warung sebagai lokasi untuk menjamu para pejabat tinggi diutarakan Jokowi sebagai berikut:

“Ketemu *dirjen*, ketemu *menteri*, ya ngajaknya makan di (*warung*) *soto*, di (*warung*) *sate*, (*warung*) *kelas-kelas PKL* [pedagang kaki lima – Pen.]. Nggak pernah kita ajak ke restoran, karena kita ingin menyampaikan kesan, keberpihakan kita ke mana. Ini harus tersampaikan dalam tindakan-tindakan seperti itu. ...(*Staf para pejabat dari*) provinsi (*dan*) pusat itu sering mau ngajak pindah ke restoran, katanya nggak menghargai (*pejabat yang dijamu*), (*padahal*) *mindset-nya itu yang perlu dibenahi*. Lha wong orang yang punya restoran sudah kaya-kaya, mau dibikin kaya terus! Kapan yang kecil-kecil jadi kaya, jadi sejahtera. Pola pikir dan sikap seperti itu harus diubah. Tunjukkan pada menteri, pada pejabat, bahwa banyak yang mesti disuntik [diberi dukungan – Pen.] agar mereka bisa lebih baik.” (Wawancara Jokowi, 14 Februari 2012)

Penyataan di atas menunjukkan bahwa melalui pemilihan warung kaki lima sebagai tempat menjamu para tamunya, Jokowi ingin mengirimkan isyarat keberpihakannya kepada masyarakat, baik para pengunjung yang menyaksikan langsung maupun warga Solo yang membaca berita tersebut melalui media yang meliput. Pemilihan warung ini juga menunjukkan bahwa Jokowi menyadari *setting* yang tepat bagi dirinya untuk tampil di publik, dengan cara mengubah *setting* yang jamak diasosiasikan publik terhadap pejabat (yaitu restoran) menjadi *setting* yang diasosiasikan lebih dekat dengan masyarakat kebanyakan (yaitu warung kaki lima).

Hal kedua yang mengindikasikan kehati-hatian Jokowi dalam mengatur *setting* adalah kecenderungannya untuk menghindar dari *setting* yang telah diciptakan untuknya. Indikasi tersebut Peneliti dapat setelah mengamati tindakan Jokowi di dalam acara-acara formal yang memilih duduk di lokasi yang tidak menyolok, dan bukan di kursi yang telah dipeservasi oleh penyelenggara acara untuk rombongan

walikota. Contohnya adalah pada saat peresmian Hutan Kota Balekambang (24 Februari 2012), Jokowi memilih untuk duduk di kursi taman yang berada di samping panggung, padahal kursi untuknya telah disiapkan di baris terdepan panggung. Hal serupa juga terjadi ketika Jokowi menonton pertunjukan wayang orang di *amphiteater* terbuka Balekambang (11 Maret 2012). Di acara tersebut, Panitia telah menyiapkan area khusus di barisan kursi penonton, yang dilengkapi dengan meja kecil tempat diletakkannya makanan ringan dan minuman kemasan. Namun ketika tiba di lokasi, Jokowi memilih untuk duduk di baris belakang bersama penonton lain, lalu berjalan berkeliling di daerah penonton untuk melihat pertunjukan dari berbagai arah. Indikasi lain diperoleh pada saat *roadshow* Esemka di Jakarta (25 dan 26 Februari). Pada kegiatan itu, Jokowi beserta istri memilih melakukan *roadshow* berkeliling Jakarta dengan menumpang bis yang diperuntukkan bagi rombongan wartawan dan tim logistik. Padahal, dalam rombongan *roadshow* tersebut terdapat pula beberapa mobil sedan yang lebih nyaman dan layak untuk ditumpangi seorang walikota. Kebiasaan di atas juga dicatat oleh Thayrun, yang mengutip wawancaranya dengan David Wijaya, seorang sahabat Jokowi:

“Pak Jokowi itu kalau njagong [menghadiri acara – Pen.] nggak mau duduk di depan, tapi seringnya duduk di belakang, bahkan kadang lewat samping. Jokowi sekarang bersedia di depan, ya cuma karena peraturan protokolernya sebagai walikota (mengharuskan demikian).” (dalam Thayrun, 2012:34)

Jokowi juga terindikasi berhati-hati dalam dalam mengendalikan *personal front* dirinya. Hal ini dapat dilihat dari pandangannya tentang sistem protokoler, yang

merupakan bagian dari *personal front* seorang walikota. Sebagaimana ia ungkapkan kepada Peneliti:

“Kepala daerah itu (kalau berpergian) ke mana-mana, di depan (mobilnya) pasti ada Patwal [motor patroli pengawalan – Pen.], di belakangnya ada kepala dinas ikut (mengiringi dengan) 20 mobil... Saya tujuh tahun jadi walikota nggak pernah (melakukan hal) kayak gitu. Semau saya aja, kalau pas ada hal yang penting, (dan) perlu protokol, ya oke. Tapi kalau enggak (perlu), ya enggak (pakai protokol), ngapain.”
(Wawancara Jokowi, 13 Februari 2012).

Pernyataan Jokowi tersebut konsisten dengan hasil pengamatan Peneliti. Selama periode penelitian, Jokowi hampir selalu berpergian dalam satu mobil tanpa keikut-sertaan kendaraan lain, baik berupa pengawalan maupun rombongan dinas.⁴ Dalam proses perpindahannya dari satu lokasi ke lokasi lain di Solo, rombongan Jokowi hanya terdiri atas Jokowi, satu ajudan, serta satu supir, dan ketiganya berada dalam mobil yang sama. Dalam berbagai kegiatan resmi yang menuntut kehadiran Sekretaris Daerah maupun kepala-kepala dinas terkait, seperti pada saat penyambutan Menteri (16 Februari 2012) dan berbagai kegiatan kemasyarakatan, Jokowi akan langsung datang sendiri bersama kedua stafnya tersebut ke tempat acara, sedangkan Sekretaris Daerah maupun kepala dinas hadir secara terpisah ke lokasi acara. Ini berbeda dengan aktivitas yang biasa dilakukan oleh pemimpin daerah di tempat lain yang umumnya datang ke tempat acara bersama-sama rombongan.

⁴ Satu-satunya pengecualian adalah pada *roadshow* mobil Esemka (Jakarta, 25-26 Februari 2012), yaitu saat Jokowi menjadi bagian dari rombongan konvoi yang berkeliling dari satu kantor media ke kantor media lain. Peneliti mengecualikan data ini, karena adanya konvoi merupakan bagian dari tujuan *roadshow*, yaitu menciptakan arak-arakan ramai agar menarik perhatian publik terhadap mobil Esemka.

Kecenderungan Jokowi untuk menghindari protokol juga nampak ketika ia terindikasi sebisa mungkin meninggalkan tempat acara tanpa bergabung dengan rombongan protokol pejabat yang umumnya menggunakan pasukan pengawalan. Jokowi terlihat sengaja memilih untuk meninggalkan tempat acara lebih lambat dengan membiarkan rombongan pejabat pergi terlebih dahulu, agar dapat leluasa menghindar dari rombongan protokol.

Satu peristiwa yang memperkuat indikasi kehati-hatian dalam hal penggunaan *personal front* dan *setting* ini dapat dilihat sesuai Jokowi menjamu makan siang seorang pejabat tinggi dari sebuah kementerian, yang hadir bersama sekitar 15 orang pejabat dinas terkait di tingkat Kota Solo dan Provinsi Jawa Tengah, diiringi beberapa motor patroli pengawalan. Kali ini mobil dinas Jokowi ikut berada dalam konvoi rombongan, karena meninggalkan lokasi pada waktu yang bersamaan dan melalui rute yang sama pula. Saat rombongan tiba di persimpangan, lampu lalu-lintas menandakan merah, sehingga motor patroli pengawalan menghentikan lalu-lintas yang bersilangan agar rombongan dapat terus melaju tanpa hambatan. Menyaksikan hal ini, Jokowi dengan cepat menginstruksikan kepada supirnya, "*Ora usah melu kuwi! (Tidak usah mengikuti rombongan itu!)*" Maka supir Jokowi seketika menghentikan mobil dinas yang kebetulan berada di posisi paling akhir dari konvoi, agar berhenti sebelum lampu lalu-lintas serta membiarkan mobil tersebut terpisah dari rombongan.

Peneliti yang menyaksikan kejadian di atas menilai bahwa reaksi spontan Jokowi dipicu oleh kesadaran bahwa ia sedang menggunakan simbol *personal front* walikota (yaitu mobil dinas bernomor AD-1) dan berada dalam *setting* seorang pejabat (yaitu konvoi dengan pengawalan motor), namun justru tidak ingin

menonjolkan kedua hal tersebut, terlebih untuk hal-hal yang dapat dipersepsi negatif oleh masyarakat (seperti melanggar lampu lalu-lintas dan mengambil hak pengguna jalan lain dari arah yang bersilangan). Kejadian ini memperkuat indikasi bahwa Jokowi menyadari bahwa persepsi masyarakat selaku audiens dapat dibangun melalui *setting* dan *personal front*, dan oleh karenanya mengontrolnya agar tidak mencederai peran yang ingin ia tunjukkan.

4.2.2. Panggung Belakang Jokowi

Dalam pengertian Goffman, *backstage* adalah suatu kawasan pribadi aktor yang memungkinkannya menampilkan situasi yang informal dan familiar, serta memberi kesempatan untuk melakukan persiapan untuk pertunjukan mereka (Medlin, 2008:43,44,85). Berdasarkan pengamatan Peneliti, *backstage* bagi Jokowi adalah setiap kawasan atau lokasi yang memberi ruang bagi dirinya dan para anggota timnya mengekspresikan secara terbuka untuk mengenai berbagai hal, termasuk berdiskusi tentang hal-hal yang akan dilakukan pada saat berinteraksi dengan masyarakat.

4.2.2.1. Loji Gandrung: Kekaburan Panggung Depan dan Belakang Jokowi

Selama periode penelitian, Peneliti melihat ada satu lokasi penting yang dapat dikategorikan sebagai *backstage* bagi Jokowi, yaitu sebagian kawasan di Rumah Dinas Loji Gandrung di Jalan Slamet Riyadi 261, Solo.

Loji Gandrung merupakan sekelompok bangunan dari abad ke-19 yang menjadi rumah dinas kepala pemerintahan Kota Solo (Thayrun, 2012:124-125). Di sini terdapat empat bangunan utama: satu bangunan induk di sebelah utara; Dua bangunan pendukung, yaitu kantor staf pendukung walikota di sebelah barat, dan

tempat tinggal keluarga walikota di sebelah timur; Serta sebuah pendapa bagian Selatan yang biasanya diperuntukan bagi kegiatan publik seperti seminar dan *rembug* (musyawarah). Keempat bangunan ini terhubung dengan sebuah taman di tengahnya.

Bangunan induk Loji Gandrung sendiri terdiri atas teras depan, satu ruang tamu, satu ruang rapat, satu ruang makan beserta dapur, satu ruang penghubung di tengah, dua kamar tidur (yang salah satunya difungsikan sebagai kamar tidur pribadi Jokowi), dan teras belakang. Pada umumnya Jokowi menerima tamunya baik di ruang tamu maupun ruang rapat. Di kedua ruangan inilah tempat interaksi yang memungkinkan aktor menampilkan peran formalnya, sebagaimana gambaran Goffman tentang *frontstage* (Mulyana, 2010:114).

Khusus untuk teras belakang, di tempat ini juga terdapat meja kerja Jokowi, yang dipergunakan olehnya untuk membaca, menanda-tangani, dan menyimpan surat-surat kedinasan. Di kawasan ini pula ia menerima orang-orang terdekatnya seperti wakil walikota, sekretaris, dan ajudan untuk membahas berbagai hal. Dalam perspektif dramaturgi, wilayah ini adalah *backstage* bagi Jokowi, karena di kawasan inilah ia selaku aktor menjalin hubungan yang intens dengan timnya, dan berekspresi apa adanya (Medlin, 2008:44).

Namun berdasarkan pengamatan Peneliti, ada indikasi telah terjadi pengaburan batas antara *frontstage* dan *backstage* di Loji Gandrung. Hal ini karena masyarakat dan wartawan seolah bebas untuk keluar masuk di berbagai area di Loji Gandrung tanpa halangan protokoler yang berarti, dengan pengecualian kamar tidur Jokowi di bangunan utama dan tempat kediaman keluarga Jokowi

pada bangunan pendukung bagian timur. Meskipun secara formal para tamu diterima di kawasan ruang tamu maupun ruang rapat, namun pada kenyataannya setelah itu mereka dapat dengan bebas berkeliling ke seluruh penjuru bangunan. Masyarakat Solo juga dapat dengan bebas masuk ke halaman Loji Gandrung dan berbincang dengan Jokowi apabila ia kebetulan sedang berada di situ, seperti yang terjadi pada tanggal 18 Februari dan 5 Maret 2012. Pada beberapa kesempatan, wartawan bahkan melakukan wawancara *doorstop* di teras belakang, antara lain pada tanggal 18 Februari dan 10 Maret 2012. Padahal di teras belakang ini terdapat meja kerja Jokowi yang di atasnya terdapat berbagai dokumen penting. Thayrun juga mengamati hal serupa:

“Di Loji Gandrung tidak ada yang disembunyikan. Bahkan meja kerja Jokowi yang terletak di teras belakang bisa dilihat dan diketahui siapa saja. Meja itu penuh dengan surat-surat yang akan ditanda-tanganinya... Semua serba terbuka, tapi memiliki batas dan hanya Jokowi yang tahu ada di mana batas itu.” (Thayrun, 2012:133)

4.2.2.2. Perilaku Jokowi di Panggung Depan dan Belakang

Pengaburan antara *frontstage* dan *backstage* Jokowi tidak hanya terbatas pada lokasi, namun juga nampak pada perilaku Jokowi selaku aktor. Penulis mengamati bahwa pada beberapa kesempatan, Jokowi melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya hanya dilakukan di *backstage*, namun ia pertunjukkan di depan para audiens yang pada umumnya hanya memiliki akses ke *frontstage*. Hal ini terjadi antara lain pada saat Jokowi dengan rileks berganti kostum untuk acara karnaval wayang orang di teras belakang Loji Gandrung, meskipun saat itu sedang ada beberapa wartawan di lokasi yang sama (18 Februari). Pada kesempatan lain dan masih di teras belakang Loji Gandrung, ia melakukan

wawancara sambil membuka sepatu dan melipat kedua kakinya di atas kursi (10 Maret). Hal-hal semacam ini tentunya bukanlah pemahaman yang biasa dilihat secara terbuka terhadap figur seorang walikota.

Indikasi kekaburan secara khusus ditunjukkan pada saat panggung Jokowi tercipta secara spontan, baik menggunakan penciptaan panggung Metode II maupun Metode III. Pada kesempatan *door-stop interview* oleh wartawan, terkadang ditanyakan hal-hal yang jawabannya terlalu sensitif untuk diungkapkan pada saat itu. Dalam merespons hal tersebut, Jokowi secara terbuka mengatakan bahwa ia belum bisa menjawab karena topik tersebut masih sensitif dan sedang dalam pembahasan (22 Februari 2012). Hal serupa juga terjadi saat Jokowi menerima pertanyaan terkait suatu isu sensitif, sehingga jawabannya perlu dipikirkan secara matang (10 Februari 2012). Pada saat itu, ia secara terbuka berkata kepada penanya yang duduk di depannya, *“Opo yo jawabane? Sik, tak pikire sik.”* (*“Apa ya jawabannya? Sebentar, saya pikirkan terlebih dahulu.”*). Setelah terdiam selama sekitar lima menit, ia lalu memberikan jawabannya. Pada kesempatan lain, ia mengatakan secara jujur bahwa ia belum mengetahui jawaban akan permasalahan tersebut, namun menjanjikan akan menjawabnya di sore hari (16 Februari 2012).

Penulis mendapati bahwa sikap Jokowi yang terbuka tersebut memang telah disadari olehnya, sebagaimana terungkap dalam pernyataannya:

“...Kalau (saya) salah ucap, ya (saya meralatnya dengan) bilang, ‘Wah salah ucap, gitu aja,’ ha ha ha... Nggak usahlah kita terlalu kaku. Kalau kita (melakukan hal yang) salah, ya ngaku aja kita salah, (lalu) minta maaf. Kalau kemarin (saya) salah ucap, ya bilang saja, ‘Salah ucap, ralat

lho ya?’ Gitu aja. Nggak *usah ada beban*, nggak *usah terlalu serius*. Kalau kita kebebanan [terbebani –Pen.], jadi *repot*, (*melakukan*) *apa-apa (jadi) salah*. Santai aja.” (Wawancara Jokowi, 14 Februari 2012)

Lebih jauh, Peneliti mendapati bahwa sikap Jokowi yang apa adanya dan tidak berpretensi untuk mengetahui segalanya ini adalah justru bagian dari metode komunikasi yang dijalaninya. Hal ini seperti yang diungkapkan “Ani” sebagai berikut:

“Beliau kan *orangnya apa adanya*. Lalu tidak memperbesar fakta yang ada. Kalau istilah orang Solo, itu (*disebut*) *rendah hati*. Terus, tidak jaim... Kalau beliau keliatan *bingung*, ya nggak *apa-apa*. Jangan keliatan perfect, (*karena*) *itu bukan manusia*.” (Wawancara “Ani,” 9 Maret 2012)

Sikap semacam itu sesungguhnya tidak konsisten dengan pemahaman konsep dramaturgi pada umumnya. Sebagaimana dikutip Mulyana (2010:116), Goffman berargumen bahwa dalam menjalankan perannya, aktor akan berusaha menyajikan “diri yang diidealisasikan” di *frontstage*. Karena alasan inilah, aktor merasa perlu melaksanakan berbagai teknik untuk menyembunyikan hal-hal yang dapat mengurangi idealisasi diri tersebut. Teknik ini antara lain adalah dengan menyembunyikan kesenangan-kesenangan aktor yang tidak kompatibel dengan perannya saat ini (misalnya dengan tidak tampil secara informal pada saat wawancara), atau menyembunyikan kesalahan yang dibuat aktor di dalam persiapan pertunjukan (misalnya dengan menyembunyikan fakta bahwa ia tidak tahu jawaban akan sebuah pertanyaan). Lebih jauh Medlin (2008:43) meyakini bahwa perilaku-perilaku semacam itu hanya dapat terungkap di *backstage*, satu-satunya tempat yang memungkinkan diekspresikannya sisi lain aktor secara

terbuka. Dengan kata lain, aktor akan berupaya sebisa mungkin untuk menjaga terpisahnya panggung depan dan panggung belakang. Kegagalan aktor untuk memisahkan *frontstage* dan *backstage* dapat berakibat pada terganggunya atau bahkan gagalnya peran yang sedang ia mainkan.

Alih-alih menimbulkan gangguan atau kegagalan peran, pengaburan batas antara *frontstage* dan *backstage* dalam panggung dramaturgi Jokowi memberikan efek yang berbeda. Dengan hilangnya batasan yang jelas antara kedua sisi panggung ini, audiens mampu memiliki akses ke area yang dipersepsikan sebagai *backstage* dan berkesempatan melihat perilaku-perilaku Jokowi yang umumnya hanya ditampilkan di *backstage*. Melalui akses semacam ini, Peneliti mendapati indikasi bahwa audiens dapat membandingkan sikap Jokowi di *frontstage* dan di *backstage*, dan merasa telah mendapati figur Jokowi yang otentik serta tidak berupaya menyembunyikan hal-hal tertentu. Adanya persepsi semacam ini dimungkinkan dalam dramaturgi, sebagaimana Goffman menyatakan bahwa mungkin saja aktor memiliki persepsi terhadap apa yang ada di seluruh bagian panggung dengan maupun tanpa akses ke sana (Medlin, 2008:42).

Analisis yang menunjukkan bahwa segala kekurangan Jokowi ini justru berbalik menjadi kekuatannya, divalidasi oleh pendapat “Hoe” sebagai berikut:

“Kadang-kadang kelemahan beliau [Jokowi – Pen.] jadi kelebihan. Pilihan kata beliau terbatas. Spektrum (kata-kata)nya sangat sempit karena (beliau) bukan orang politik. Di bisnispun juga tidak pandai bicara (karena) beliau itu tipikalnya orang pekerja... (Namun) kekurangan beliau... justru dilihat publik sebagai kelebihan. Tokoh yang terlihat tidak tricky, tidak berbelit, tidak njelimet [rumit – Pen.], kalau menjelaskan apa adanya. Beberapa kali hal tersebut sempat menjadi

kekurangan, tapi pesonanya (justru) seperti itu.” (Wawancara “Hoe,” 7 Maret 2012)

Di sisi lain, pengaburan batas antara *frontstage* dan *backstage* semacam ini memberikan manfaat pada kepemimpinan Jokowi. Goffman menyatakan bahwa karena hal-hal yang disembunyikan sebagaimana disebut Peneliti di atas, maka aktor biasanya menegakkan batasan-batasan antara sisi panggung yang berbeda (Medlin, 2008:42). Namun berdasar pengamatan Peneliti, karena batasan ini tidak diciptakan baik oleh Jokowi maupun orang-orang di sekitarnya (dalam hal ini, pihak protokol Walikota), maka audiens tidak terlihat canggung atau memiliki batasan sikap pada saat berinteraksi dengan Jokowi. Peneliti melihat bahwa perilaku semacam ini pada gilirannya memberikan keleluasaan bagi audiens untuk membicarakan apapun secara terbuka, tanpa terlihat ada rasa kekhawatiran akan konsekuensi negatif akibat membicarakan hal tersebut. Kejujuran sikap dari audiens seperti itu memberi Jokowi perspektif yang otentik terhadap situasi yang sedang terjadi di masyarakat. Pandangan Peneliti ini didukung oleh pernyataan Jokowi sendiri, yang dalam berbagai kesempatan merumuskan titik permasalahan berdasarkan informasi yang tersampaikan pada dirinya melalui berbagai saluran yang berbeda-beda, namun memiliki isi pesan yang sama (Wawancara Jokowi, 14 Februari).

4.2.3. Kontrol Jokowi Terhadap Informasi

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, agar pertunjukan dramaturgi berlangsung sejalan dengan definisi yang telah ditetapkan aktor, ia melakukan kontrol terhadap informasi yang terpapar di *frontstage*. Hal ini dilakukan antara

lain dengan mengomunikasikan informasi tertentu pada audiens secara lebih mendalam (Medlin, 2008:47).

Dalam menjalankan interaksi dengan masyarakat Solo sebagai audiensnya, Jokowi terindikasi sebisa mungkin memasukkan elemen spontanitas dalam interaksi tersebut. Hal ini Peneliti lihat sebagai bentuk konsistensi terhadap preferensi Jokowi terhadap metode penciptaan panggung yang spontan dan tidak terduga. Namun lebih jauh lagi, Peneliti melihat bahwa meskipun sebuah acara sesungguhnya tercipta dengan Metode I (terantisipasi dan terjadwal), namun bagi audiens kebanyakan, hal itu dapat terlihat sebagai panggung yang tercipta dengan Metode II dan bahkan Metode III, yaitu panggung yang spontan dan natural.

Indikasi ini Peneliti peroleh antara lain ketika Jokowi berpartisipasi dalam Festival Wayang Orang (18 Februari 2012). Dalam kegiatan ini, Jokowi dijadwalkan untuk bersama-sama dengan para pimpinan daerah lainnya, para kepala dinas, staf Pemerintah Kota, dan komunitas seniman melakukan parade sepanjang jalan protokol Slamet Riyadi dengan kostum wayang orang. Khusus untuk Jokowi dan para pimpinan daerah, mereka direncanakan akan melakukan parade dengan berkuda. Pada saat pelaksanaannya, setelah sekitar 30 meter Jokowi berkuda, ia secara mendadak memutuskan untuk turun dari kuda dan berjalan kaki sepanjang sisa parade. Peneliti melihat bahwa dengan berjalan kaki tersebut, ia lebih leluasa untuk menyapa dan menyalami satu persatu warga yang berbaris di pinggir jalan, dan terkadang berbincang dengan warga secara singkat. Ini adalah hal yang nyaris tidak dapat Jokowi lakukan apabila ia tetap berada di atas kuda. Kejadian tersebut memperkuat dugaan Peneliti bahwa Jokowi sangat mengutamakan aspek interaksi dalam setiap kegiatannya. Selain itu, Peneliti

menilai Jokowi telah memasukkan unsur spontanitas dalam kegiatan yang sebenarnya sudah terencana tersebut, dan membuatnya menjadi aktivitas interaktif yang lebih menarik bagi warga Solo, karena bisa bersalaman dan berfoto dengan Jokowi.

Satu kejadian lain yang mengonfirmasi indikasi terhadap injeksi spontanitas dari Jokowi ini adalah pada saat Esemka hasil rakitan anak-anak SMK tidak lolos uji emisi. Seketika setelah mendengar kabar tersebut melalui laporan stafnya per telepon (1 Maret 2012, siang hari), ia memutuskan untuk keesokan harinya akan mengunjungi salah satu SMK yang turut merakit Esemka dan memberikan dukungan motivasi kepada para siswa SMK tersebut. Keinginan ini ia sampaikan pada ajudan saat itu, dan pada direktur PT. Solo Manufaktur Kreasi (perusahaan yang didirikan untuk mengelola aspek bisnis Esemka) di sore harinya, namun tidak kepada orang lain. Keesokan paginya (2 Maret 2012) ketika Jokowi tiba di SMK 2 Solo, ternyata di lokasi tersebut telah penuh oleh wartawan yang hendak meliput peristiwa tersebut dan mewawancarai Jokowi. Berdasarkan perbincangan Peneliti dengan beberapa wartawan, mereka mengatakan bahwa tidak ada undangan resmi pada mereka untuk hadir ke acara tersebut, namun informasi kedatangan Jokowi ke SMK tersebut telah menyebar di kalangan wartawan, tanpa diketahui sumber pastinya.

Meskipun tidak adanya kepastian bagaimana informasi kunjungan semacam itu dapat tersampaikan kepada wartawan, namun Peneliti menduga bahwa informasi tersebut tersalurkan secara informal, dalam hal ini oleh oleh ajudan dan/atau direktur PT Solo Manufaktur Kreasi. Asumsi tersebut dibangun berdasar beberapa kejadian yang berbeda, yang menunjukkan bahwa wartawan seringkali berusaha

menggali informasi mengenai kegiatan Jokowi yang tidak diumumkan secara langsung, dari orang-orang di sekitar Jokowi, khususnya ajudan. Dan apabila memang acara itu adalah acara yang direncanakan sebagai acara terbuka, maka ajudan akan menjawab kurang lebih dengan, “Nanti *kemungkinan Bapak akan melakukan... dst.*” atau “Besok Bapak *dijadwalkan* tindak (*pergi*) ke... *dst.*”

Kemungkinan bahwa Jokowi melakukan penyebaran informasi secara informal melalui orang-orang di sekelilingnya telah dinyatakan sendiri oleh Jokowi, sebagai berikut:

“Sekarang yang ditunggu dari Pemerintah (adalah) tindakan (di) lapangan. (Sebaiknya Pemerintah) tahu-tahu sudah (hadir) di desa mana, tidur di tempat (terjadinya) masalah, (tapi) nggak usah ngomong (ke siapapun). Nanti yang memberitakan kan media. Kadang-kadang saya juga pakai orang ketiga untuk menghubungi media, (misalnya untuk memberitahu mereka bahwa) nanti malam saya mau tidur di pasar, atau jam 3 ada di bantaran (sungai). Saya ke sana ngecek sendiri betulan [benar melakukan pengecekan – Pen.], (tapi) waktu di sana ketemu media kan alami jadinya, he he he...” (Wawancara Jokowi, 14 Februari 2012)

Kejadian, asumsi, dan pernyataan dari Jokowi di atas mengonfirmasi bahwa ia memiliki apa yang disebut Goffman sebagai **rekanan** (*shill*), yaitu orang-orang yang berada di tengah-tengah audiens, namun sebenarnya memiliki hubungan dengan para aktor (Medlin, 2008:50). Dalam contoh di atas, rekanan di sini antara lain adalah ajudan walikota yang berperan untuk membangkitkan reaksi wartawan selaku audiens sebagaimana diinginkan oleh Jokowi, yaitu hadir meliput kegiatan Jokowi tanpa menimbulkan kesan bahwa kegiatan tersebut telah dirancang sebelumnya. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Jokowi melakukan kontrol

terhadap informasi dalam rangka mengatur jalannya pertunjukan sebagaimana telah ia rancang. Selain itu, dapat dinyatakan bahwa tindakan kontrol yang dilakukan Jokowi difokuskan pada upaya menjadikan informasi tersebut tersalurkan secara natural kepada audiens.

4.2.4. Manajemen Impresi Jokowi

Berdasarkan penjabaran di atas, Peneliti melihat kecenderungan bahwa Jokowi melakukan pengelolaan impresi dalam berinteraksi dengan audiensnya, yaitu masyarakat Solo baik secara langsung maupun melalui media. Lebih lanjut, apabila dilihat dari perspektif tiga komponen dramaturgi (penciptaan panggung, pengaburan batasan panggung, dan pengontrolan terhadap informasi), Peneliti menduga bahwa Jokowi mengelola impresinya agar selaras dengan karakter yang ingin ditampilkannya, antara lain sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat; pemimpin yang mendahulukan kepentingan masyarakat; serta pemimpin yang tanggap merespons permasalahan masyarakat.

4.2.4.1. Manajemen Impresi Melalui Sikap Konsisten

Satu elemen yang Peneliti lihat menjadi benang merah dari berbagai impresi yang ingin dibangun oleh Jokowi di atas adalah konsistensi perilaku. Berdasarkan pengamatan Peneliti, Jokowi berhasil menciptakan perilaku yang senantiasa sama untuk mendukung ketiga pesan yang Peneliti nilai hendak ia tampilkan di atas. Konsistensi perilaku ini menjadi penting, karena Goffman berargumen bahwa, *“adanya setting, penampilan, dan sikap yang konsisten merepresentasikan sebuah tipe ideal yang membangkitkan perhatian dan ketertarikan terhadap suatu harapan”* (dalam Medlin, 2008:38). Dengan kata lain, sikap yang konsisten dari seorang aktor memungkinkan tersampainya citra-diri tertentu tentang aktor

tersebut. Ini sejalan dengan pandangan tentang konsistensi yang umum diterapkan dalam studi mengenai pemasaran politik. Misalnya, Sears dan Funk menyetujui apa yang disebut sebagai Pendekatan Politik Simbol, yang menyatakan bahwa reaksi afektif seseorang terhadap simbol-simbol dalam politik dan hal-hal lain dibangun antara lain melalui konsistensi kognitif (dalam Newman dan Perloff, 2004:29).

Sepanjang periode pengamatan, Peneliti melihat bahwa Jokowi menjaga konsistensi sikapnya, baik dengan siapapun yang ia hadapi. Setiap orang yang ia temui, diajaknya berdialog dengan cara yang simpatik dan menghormati lawan bicara, namun di saat yang sama tidak berlebihan dan tidak bersikap terlalu dekat. Pun tidak ada pengecualian apabila pihak yang dihadapinya adalah pejabat dengan posisi yang lebih tinggi darinya. Pada satu acara yang menghadirkan pejabat tinggi, masyarakat, dan media, Peneliti melihat bahwa Jokowi menyikapi ketiga kelompok audiens ini dengan cara yang sama. Apabila Jokowi terlebih dahulu diwawancarai oleh media, maka ia akan menyelesaikan wawancara itu, kemudian bertemu dengan pejabat yang sudah menunggu di sampingnya. Pada kesempatan yang lain, beberapa pejabat lain harus mengantri untuk menyalami Jokowi yang sedang diajak berfoto oleh masyarakat (14 Februari 2012).

Konsistensi serupa juga nampak dari proses yang harus dilalui dalam rangka menciptakan kesempatan interaksi dengan Jokowi. Dalam hal ini, Peneliti melihat bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap Jokowi. Pendapat ini didukung dari analisis minimnya tingkatan birokrasi prosedural yang harus dijalani untuk dapat berinteraksi dengan Jokowi. Untuk membuat janji, setiap orang akan diminta untuk mengirimkan sebuah surat tertulis, yang kemudian

dikirimkan baik secara fisik maupun melalui email ke staf walikota. Pada kenyataannya, Peneliti mengamati bahwa siapapun dapat datang ke Balaikota atau Loji Gandrung dan menunggu kehadiran Jokowi. Apabila Jokowi datang ke tempat tersebut dan tidak memiliki kegiatan lain yang telah diagendakan, orang tersebut pasti akan ditemuinya (sebagaimana yang terjadi pada 14 Februari, 4 Maret, dan 9 Maret 2012). Akses yang demikian terbuka bagi siapapun terhadap Jokowi juga dicatat oleh Thayrun (2012:127-128). Jokowi sendiri telah mengonfirmasi hal ini pada Peneliti, dengan menyatakan bahwa apabila waktunya memungkinkan, ia pasti akan menemui siapapun yang ingin menjumpai dirinya (Wawancara Jokowi, 14 Februari 2012).

Berdasarkan hasil pengamatan di atas, Peneliti meyakini bahwa konsistensi perilaku Jokowi semacam ini menjadi salah satu latar belakang bagi keberaniannya memberikan akses *backstage* kepada audiens. Dalam situasi normal dramaturgi, membiarkan audiens masuk ke area *backstage* dapat mengungkap hal-hal yang dirahasiakan aktor dari audiens, dan pada gilirannya dapat mengganggu atau bahkan menggagalkan jalannya pertunjukan (Medlin, 2008:43). Dalam konteks dramaturgi Jokowi, karena perilaku yang ia lakukan di *frontstage* adalah konsisten dengan perilakunya di *backstage*, kekhawatiran bahwa rahasia dirinya akan terungkap dapat diminimalisir. Keyakinan Peneliti ini telah divalidasi oleh pernyataan Jokowi ketika Peneliti meminta izin untuk dapat diberi akses yang seluasnya untuk mengamati dirinya, dan diijinkan karena menurutnya tidak ada bagian dirinya yang dia sembunyikan, karena dia selalu berperilaku sama di manapun ia berada (Wawancara Jokowi, 13 Februari 2012).

Perilaku konsisten Jokowi semacam ini pada gilirannya mereduksi peluang terjadinya **insiden dramaturgi** dalam proses interaksi dengan audiens. Dari hasil paparan di atas, dapat diketahui bahwa Jokowi tidak berupaya menyembunyikan hal-hal tertentu dari kehidupan masa lalunya. Jokowi tidak memendam berbagai aspek kesenangan pribadinya seperti uraian Goffman, namun ia justru membiarkan publik mengetahui hal-hal tersebut, misalnya kecintaannya pada musik *heavy metal* serta masa mudanya sebagai “anak nakal berambut gondrong” (sebagaimana ia ungkapkan dalam wawancara dengan seorang wartawan tanggal 14 Februari 2012). Hal-hal tersebut, meskipun bukan sesuatu yang lazim bagi walikota, tidaklah ia tutup-tutupi, sehingga ia meminimalisir terjadinya *faux pas* atau kecerobohan yang terjadi dengan terungkapnya kesenangan pribadi aktor. Selain itu, konsistensi perilaku Jokowi di kedua sisi panggung memperkecil kemungkinan audiens memergoki Jokowi melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas baik di *frontstage* maupun di *backstage*. Ini mereduksi peluang munculnya **gerakan yang tidak diniatkan** (*unintended gestures*) oleh Jokowi, ataupun terjadinya **intrusi yang tidak pantas** (*inappropriate intrusion*) oleh audiens.

4.2.4.2. Manajemen Impresi yang Membangun Kepercayaan

Berdasarkan hasil pengamatan dan paparan Peneliti sebelumnya mengenai *setting* dan *personal front* Jokowi, Peneliti menilai bahwa Jokowi tidak melakukan **mistifikasi** menurut definisi Goffman, yaitu suatu metode untuk membangun kekaguman audiens melalui penciptaan jarak antara aktor dan audiens (Mulyana, 2010:119). Absennya aspek mistifikasi ini lebih lanjut mengindikasikan bahwa dalam melakukan pengelolaan impresi audiens terhadap dirinya, Jokowi tidak

melakukannya melalui penonjolan atribut-atribut fisik dan sosialnya yang istimewa (Mulyana, 2010:121).

Di saat yang bersamaan, Peneliti berargumen bahwa telah terjadi pengelolaan impresi dalam arti yang lebih luas, yaitu pengelolaan impresi yang membawa keuntungan bagi hubungan antara aktor dan audiens. Pada saat berinteraksi dengan perwakilan pedagang Sriwedari (16 Februari 2012), Peneliti mendapati bahwa Jokowi membangun kesan bahwa dirinya terburu-buru dan waktunya terbatas, namun tetap meluangkan waktu untuk menemui para perwakilan pedagang, sehingga mengirimkan sinyal kepedulian kepada para pedagang tersebut.

Pada pertemuan yang sama (16 Februari 2012), para pedagang Sriwedari mengajukan empat permintaan kepada Jokowi. Dari keempat permintaan ini yang diajukan, Jokowi langsung mengabulkan dua permintaan pertama, menjanjikan akan mendiskusikan permintaan ketiga dengan DPRD namun dengan jaminan keberpihakan pada pedagang, serta menyatakan akan mempertimbangkan permintaan keempat setelah melakukan pengecekan ke lapangan. Sepanjang acara, Peneliti menyaksikan ekspresi kepuasan dari para pedagang akan jalannya pertemuan tersebut, yang terpancar melalui tepuk tangan, komentar verbal yang menisyratkan dukungan terhadap ucapan Jokowi, serta selingan dialog dan humor ringan yang terjadi.

Berdasarkan wawancara dengan Jokowi pascapertemuan tersebut, Peneliti mendapati bahwa Jokowi sebenarnya telah mengetahui keempat permintaan para pedagang sebelum pertemuan dilangsungkan, dan telah memiliki jawabannya.

Pada saat pertemuan, ia langsung mengabulkan sebagian dari permintaan tersebut begitu dimintakan oleh para pedagang. Hal ini menurutnya perlu, agar para perwakilan merasa negosiasi mereka berhasil dalam dialog tersebut (Wawancara Jokowi, 13 Februari 2012). Peneliti melihat hal ini pada gilirannya berpotensi membangun impresi yang positif dari para pedagang Sriwedari terhadap keberpihakan Jokowi pada mereka. Pada saat yang bersamaan, Jokowi sengaja untuk tidak serta-merta mengabulkan seluruh permintaan mereka, agar *“prosesnya tidak terlihat terlalu mudah”* (Wawancara Jokowi, 13 Februari 2012). Hal ini Peneliti lihat sebagai upaya Jokowi untuk mempertahankan impresi positif yang sudah terbangun dari pertemuan saat itu, agar tetap berada di level yang sama pada pertemuan selanjutnya, ketika Jokowi kemudian membawa kabar baik untuk mereka.

Hal tersebut konsisten dengan perilaku Jokowi di masa lampau yang kemudian menjadi salah satu faktor penting dalam mengangkat namanya ke skala nasional, yaitu proses pemindahan pedagang barang bekas di kawasan Banjarsari. Tercatat Jokowi melakukan 54 kali proses dialog tatap muka dengan para para pedagang, sebelum akhirnya mereka bersedia merelokasi ke tempat baru di kawasan Semanggi melalui proses swadaya yang damai (Sudarmadi dan Nugroho, 2012:42, dan Arief, 2011:99-100). Ulasan Majalah *Tempo* (“Joko,” 2008:54-55) dan penjabaran Jokowi sendiri (wawancara Jokowi, 14 Februari 2012) mengenai rangkaian pertemuan ini menunjukkan bahwa proses pembangunan kepercayaan dilakukan secara perlahan dan gradual oleh Jokowi: Pada pertemuan pertama, para pedagang hadir didampingi lembaga swadaya masyarakat, dan membuat Jokowi menahan diri untuk tidak membahas isu relokasi. Hal ini Peneliti lihat

sebagai refleksi belum adanya rasa percaya dari para pedagang terhadap Jokowi. Sedangkan pada pertemuan ke-54, Jokowi dapat berbicara mengenai relokasi tanpa mendapatkan resistensi dari para pedagang. Keberhasilan Jokowi untuk mengomunikasikan rencana relokasi dengan damai seperti ini dipandang Peneliti sebagai indikasi lain dari kemampuan Jokowi untuk secara konsisten menumbuhkan impresi positif terhadap dirinya melalui 54 kali pertemuan tersebut, agar mendapatkan kepercayaan dari para pedagang.

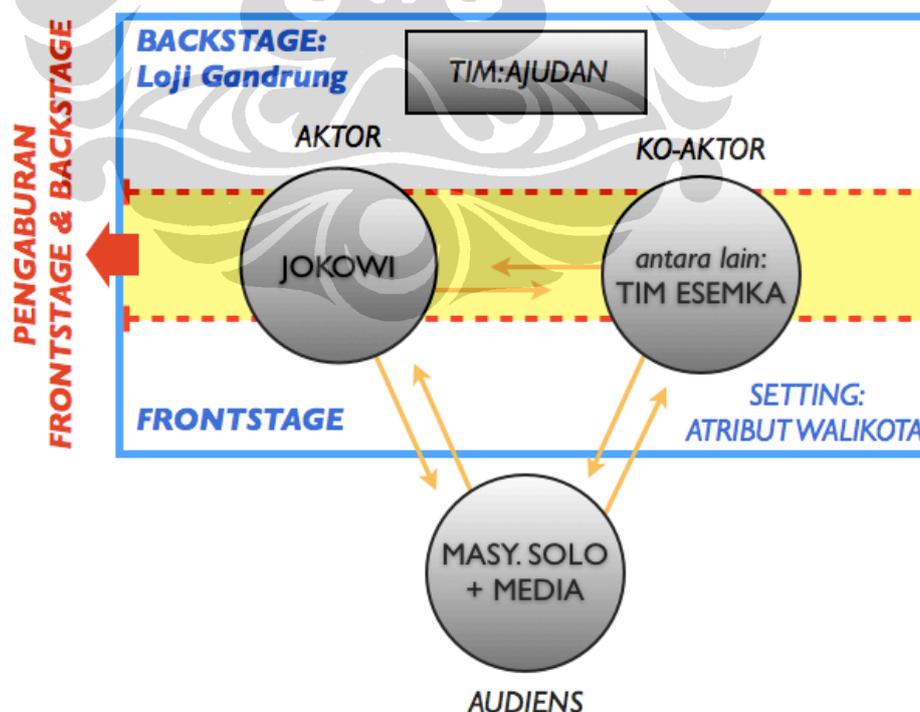
Strategi menjalin dialog secara terus-menerus untuk membangun kepercayaan berikut alasannya telah diungkapkan langsung oleh Jokowi sebagai berikut:

“(Kalau ada warga yang salah, beritahu bahwa tindakan) dia itu keliru ... (Kita) beritahu dia, bahwa dia itu keliru ... Tapi ya bukan cuma sekali (atau) dua kali dialog, tapi (bisa sampai) berpuluh kali, (bahkan bisa) sampai 54 kali (dialog) seperti yang pertama dulu itu [saat pemindahan pedagang di kawasan Banjarsari – Pen.]. (Semua itu tujuannya) untuk mendapatkan trust dan kepercayaan. (Awalnya susah, tapi) sesudah dapet, gampang sekali mindahin ini dan itu. Tiga (atau) empat kali (berdialog) sudah ketemu (solusinya).” (Wawancara Jokowi, 13 Februari 2012)

Hasil pengamatan, kejadian historis, dan pernyataan Jokowi tersebut Peneliti lihat sebagai beberapa indikator yang menunjukkan bahwa Jokowi memanfaatkan dialog dan komunikasi langsung untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Dalam setiap proses dialog dan komunikasi, Jokowi mengedepankan sikap dan perilaku yang menunjukkan kedekatan dengan permasalahan masyarakat di lapangan, menjaga keterbukaan komunikasi dengan masyarakat, serta bersama masyarakat berusaha memecahkan permasalahan tersebut. Hal ini ia lakukan tidak secara parsial, namun secara kontinyu dan konsisten sepanjang masa

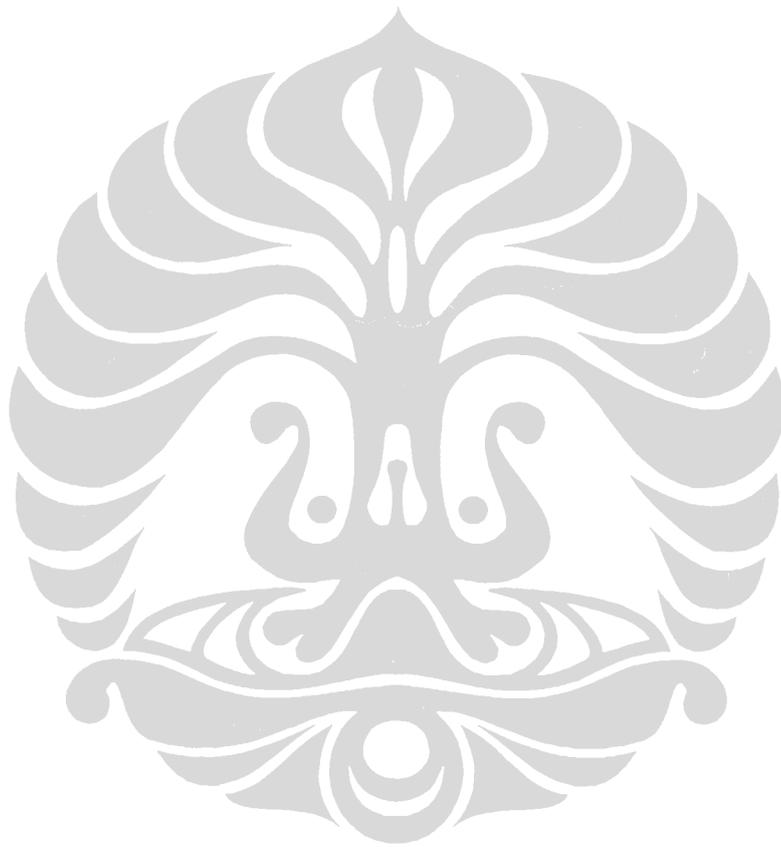
kepemimpinannya, sebagai bagian dari apa yang disebut Blumenthal sebagai *permanent campaign* (Arief, 2011:128). Dialog dan komunikasi semacam itu dijalankan dengan tujuan untuk membangun impresi positif masyarakat Solo terhadap Jokowi, yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk melanggengkan apa yang menjadi misi Jokowi.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang diperoleh selama pengamatan-terlibat dan dari sumber-sumber lain, Peneliti percaya bahwa di dalam komunikasi politiknya, Jokowi telah memainkan peran untuk membangun impresi positif untuk membangun kepercayaan audiens kepada dirinya, selaras dengan komponen-komponen dramaturgi Erving Goffman. Hasil pemahaman Peneliti dapat diaplikasikan dalam Model Pendekatan Dramaturgi yang telah dipaparkan di Bab 2 penelitian ini, menjadi seperti di bawah ini:



Gambar 4. Model Pendekatan Dramaturgi Dalam Aplikasinya

Selanjutnya pada Bab 5, Peneliti akan memaparkan langkah-langkah Jokowi mengintegrasikan perannya tersebut dalam komunikasi politiknya untuk menjawab permasalahan keagenan di Kota Solo. * * *



BAB 5. KOMUNIKASI POLITIK JOKOWI DALAM TEORI KEAGENAN

5.1. HUBUNGAN KEAGENAN JOKOWI DAN WARGA SOLO DI PILKADA 2010

Sebagai awal kajian terhadap strategi Joko Widodo (Jokowi) dalam menjaga keseimbangan informasi melalui komunikasi politiknya, perlu adanya latar belakang situasi obyektif sebagai pembanding situasi saat pertama kali diindikasikan adanya ketidak-seimbangan informasi antara Jokowi dan warga Solo (sebagaimana dipaparkan pada Sub-Bab 4.1.2). Data obyektif terkini adalah Pilkada 2010, yaitu Pilkada kedua dan terakhir yang diikuti oleh Jokowi di Solo.

Setidaknya terdapat dua hal yang dapat dianalisis dalam Pilkada 2010 terkait dengan topik bahasan tesis ini. **Pertama**, pada Pilkada 2010, Jokowi telah memiliki kesempatan dari 2005 sampai 2010 untuk meningkatkan kepercayaan warga Solo kepada dirinya. Hal ini menjadi topik bahasan khusus bagi Arief (2011) yang mengkaji kebijakan Jokowi pada periode lima tahun pertamanya dalam tesis berjudul *“Permanent Campaign: Strategi Marketing Politik, Studi Kemenangan Jokowi Pada Pemilukada Kota Surakarta Tahun 2010.”* Arief menyimpulkan bahwa selama periode tersebut, Jokowi melaksanakan berbagai program yang berkorelasi langsung dengan peningkatan kepuasan masyarakat

(2011:122). Arief juga mengutip hasil diskusi swadaya masyarakat di Solo di akhir 2009, yang mengidentifikasi bahwa selain mampu membangun sektor tata kota, kesehatan, pendidikan dan ekonomi, Jokowi dinilai berhasil mendorong keterbukaan dengan para pemangku-kepentingan (2011:123). Lebih jauh, Aidul Fitriadi menyatakan bahwa kemampuan Jokowi mentransformasi berbagai kebijakan tanpa ketegangan sosial, dinilai warga Solo sebagai sesuatu yang luar biasa (dalam Arief, 2011:123).

Kedua, apa yang dilakukan oleh Jokowi pada periode pertama di atas mencirikan adanya pelaksanaan *permanent campaign*, yakni pemerintahan yang dikelola sedemikian rupa untuk melayani kepentingan para pemilih, dengan target untuk menjaga level elektabilitasnya (Arief, 2011:128). Tingkat elektabilitas Jokowi yang tinggi dikonfirmasi oleh hasil beberapa survei di 2010, yang mendapati bahwa pasangan Jokowi-Rudy berpeluang sangat besar untuk memenangi Pilkada 2010 (Thayrun, 2012:100). Demikian tingginya tingkat elektabilitas tersebut, sehingga Didik Suharto berhipotesis bahwa andaikata tidak berkampanyepun, Jokowi-Rudy akan tetap mampu memenangi Pilkada tersebut (Gunawan, 2010:1).

Tingginya tingkat elektabilitas pasangan Jokowi-Rudy pula yang diduga mempengaruhi minimnya lawan politik mereka dalam Pilkada ini. Periode kekosongan pesaing bagi Jokowi ini sempat menjadi perhatian khusus Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Solo, karena aturan yang ada tidak memungkinkan calon tunggal dalam pemilihan (dalam Arief, 2011:6). Kekhawatiran tersebut pada akhirnya tidak terjadi, karena muncul pasangan Eddy Wirabhumi-Supradi Kertamenawi (Eddy-Supradi) sebagai penantang pasangan petahana. Meski demikian, pasangan tersebut tidak muncul sebagai penantang

yang kuat bagi pasangan petahana, antara lain karena Eddy Wirabhumi diduga tidak memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang Solo (wawancara “Hoe,” 7 Maret 2012). Pilkada 2010 berlangsung pada 26 April 2010, diikuti oleh 71,80% dari seluruh pemilih tetap dan dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Rudy dengan perolehan suara 90,09% (Rejeki dan Sinombor, 2010).

Hasil Pilkada 2010 di Solo dirangkum dalam Tabel 3 berikut:

Nama Pasangan	Perolehan Suara (%)	Partai Pendukung
Jokowi – Rudy	90,09	PDI-P, PAN, PKS
Eddy – Supradi	9,91	Demokrat, Golkar, koalisi 24 partai

Tabel 3. Hasil Pilkada Solo 2010 (Rejeki dan Sinombor, 2010)

Analisis di atas menjadi sinyalemen telah terjadinya perubahan besar dalam kepercayaan masyarakat Solo terhadap Jokowi, sebagaimana terlihat dari peningkatan suara sangat signifikan yang diperoleh pasangan Jokowi dan Rudy, dari 36,62% pada Pilkada 2005 menjadi 90,09% pada Pilkada 2010. Arief mengonfirmasi hal ini dalam penelitiannya, yaitu bahwa pembangunan Solo yang dampak positifnya dirasakan oleh masyarakat dapat berlangsung, karena Jokowi berhasil menanamkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat (2011:124). Proses penanaman kepercayaan inilah, sebagai bagian dari keseimbangan informasi, yang akan Peneliti eksplorasi lebih dalam pada paparan selanjutnya.

5.2. STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK JOKOWI DALAM MENYEIMBANGKAN INFORMASI

Berdasarkan kajian terhadap data yang dihimpun baik melalui proses penelitian berperan-serta, wawancara, maupun analisis dokumen, Peneliti menilai bahwa

sikap dan tindakan Jokowi yang konsisten dengan pemahaman dramaturgi Erving Goffman merupakan bagian dari strategi komunikasi politiknya untuk menjaga keseimbangan informasi. Analisis yang mendasari penilaian tersebut akan Peneliti paparkan dalam dua kategori yang merupakan prasyarat bagi tereduksinya kesenjangan informasi dalam hubungan prinsipal-agen, sebagaimana dirumuskan oleh Lupia dan McCubbins (dalam Lupia, 2001:4), yaitu:

1. Tersedianya informasi mengenai agen dan tindakannya, dan
2. Selarasnya kepentingan agen dan kepentingan prinsipal.

5.2.1. Jokowi Menyediakan Informasi Mengenai Diri dan Tindakannya

5.2.1.1. Membuka Akses Informasi Bagi Masyarakat

Sejak menjelang Pilkada 2005, Jokowi telah melaksanakan tindakan-tindakan yang menurut Teori Keagenan dapat meredusir terjadinya ketimpangan informasi. Thayrun mencatat bahwa dalam membangun strategi kampanye pada Pilkada Solo 2005, Jokowi dan timnya menyerap informasi karakter pemimpin yang diinginkan masyarakat, dan berdasarkan hal tersebut, lalu merumuskan hal-hal apa yang bisa mereka sampaikan pada masyarakat. Proses penyerapan ini dilakukan dengan menciptakan banyak panggung interaksi yang berbungkus budaya masyarakat Solo, yaitu *SLJJ* yang terdiri atas: *Sonjo* (mengunjungi), *Layat* (takziah kepada yang ditimpa musibah), *Jagong* (menghadiri resepsi pernikahan dan pesta rakyat), serta *Jagongan* (duduk-duduk dan berbincang). Inilah penciptaan panggung berlandaskan pendekatan budaya yang menjadi trik Jokowi untuk meraih simpati para konstituennya (Thayrun, 2012:89-91).

Dalam sudut pandang dramaturgi, apa yang dilakukan Jokowi di atas melalui “Teknik SLJJ” konsisten dengan penciptaan panggung, khususnya Panggung

yang tercipta dengan Metode II, yaitu metode yang terantisipasi dan spontan. Dengan penciptaan panggung metode ini, aktor sebisa mungkin tampil tanpa terlihat unsur rekayasa sehingga mendorong perwujudan diri seasli mungkin (Barnhart, 1994). Dengan menampilkan dirinya yang asli tanpa rekayasa, Jokowi memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengetahui sifat dan sikap Jokowi yang sesungguhnya, yang pada gilirannya akan mengurangi keraguan masyarakat terhadap figur Jokowi akibat ketidak-tahuan mereka. Oleh karenanya apabila ditinjau dari aspek hubungan keagenan, proses interaksi “Teknik SLJJ” yang mengedepankan dialog secara langsung juga menguntungkan baik masyarakat Solo sebagai prinsipal maupun Jokowi selaku agen, karena pada kesempatan-kesempatan semacam itu kedua belah pihak dapat mengumpulkan informasi tentang satu sama lain (Shapiro, 2005:269).

Lebih lanjut lagi, data yang dikumpulkan Peneliti menunjukkan bahwa Jokowi konsisten membuka akses masyarakat informasi tentang diri dan tindakannya sepanjang masa jabatannya. Sebagaimana telah diungkap pada bab sebelumnya, akibat telah terjadinya pengaburan batas antara *frontstage* dan *backstage* Jokowi, masyarakat dan wartawan memiliki kebebasan luar biasa untuk menemui Jokowi dan berinteraksi dengannya. Secara khusus, Peneliti mencatat bahwa karena tingginya tingkat kebebasan wartawan untuk mengakses Jokowi, interaksi dengannya dapat terjadi di berbagai tempat yang tidak umum, seperti di teras belakang Loji Gandrung (18 Februari dan 10 Maret 2012), di garasi mobil Loji Gandrung (2 Maret 2012), maupun di tengah jalan protokol Slamet Riyadi saat *Car-Free Day* (4 Maret 2012). Hal ini juga dikonfirmasi oleh data yang diperoleh Thayrun (2012:44), bahwa Jokowi adalah figur yang tidak tertutup dan mudah

dimintai waktu untuk wawancara. Hal-hal tersebut makin memperkuat indikasi sikap Jokowi yang konsisten memberikan akses publik kepada dirinya, yang pada gilirannya bermanfaat untuk menjembatani ketimpangan informasi (Lupia, 2001:4).

5.2.1.2. Melibatkan Publik dalam Memecahkan Masalah Publik

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, salah satu kendala untuk menerapkan “kontrak” antara prinsipal dan agen di aras keagenan politik adalah jumlah prinsipal yang banyak dengan beragam kepentingan, sehingga sulit bagi mereka untuk mengerucutkan tujuan dan menghasilkan satu mekanisme insentif yang optimal (Berliant dan Duggan, 2008:2). Hal ini sejalan dengan apa yang disebut oleh Adams (sebagaimana dikutip oleh Shapiro, 2005:267) sebagai “faktor Hidra,” yaitu situasi yang menyulitkan agen untuk merekonsiliasi tugas yang diberikan berdasarkan pesan, instruksi, dan insentif yang beragam dari para prinsipal.

Hasil dari pengamatan berperan-serta yang dilakukan Peneliti memunculkan pemahaman bahwa Jokowi memanfaatkan kesempatan di panggung depan interaksinya untuk menyosialisasikan gagasan dan ide-ide baru kepada audiensnya. Melalui sosialisasi semacam ini, Peneliti melihat bahwa Jokowi sekaligus dapat mengetahui animo publik terhadap ide dan gagasan tersebut.

Satu kejadian di masa pengamatan berperan-serta yang menyokong asumsi di atas adalah ketika Jokowi melakukan kunjungan ke *Solopos* (14 Februari 2012). Di forum yang spontan ini, Jokowi secara bebas menjawab seluruh pertanyaan jajaran redaksi senior yang menemuinya, termasuk dua hal yang Peneliti pahami

merupakan isu yang masih teramat sensitif. Isu yang pertama adalah peninjauan pembangunan taman hiburan Trans Studio yang sedang dilakukan pihak swasta di Solo, sedangkan yang kedua adalah mengenai regenerasi pascakepemimpinan Jokowi di Solo. Dari hasil perumusan data-data di lapangan dan beberapa kesempatan dialog dengan Jokowi, Peneliti mendapati bahwa isu pembangunan Trans Studio saat itu masih sensitif karena adanya kekhawatiran keberadaan taman hiburan berskala besar semacam itu akan memicu tingkat konsumerisme masyarakat serta membawa eksese sosial lainnya seperti kemacetan. Sedangkan isu regenerasi menjadi pembahasan yang sensitif, karena waktu pilkada selanjutnya masih relatif lama (2015), sehingga diskusi terlalu dini mengenai calon-calon kandidat dikhawatirkan akan menimbulkan segmentasi massa terlalu dini dan mengganggu stabilitas pemerintahan saat ini.

Jokowi memberikan argumentasi terhadap keputusannya untuk memaparkan hal-hal yang umumnya bisa dianggap sensitif seperti di atas, sebagai berikut:

“Ya nggak papa (isu-isu sensitif dibicarakan), biar mereka [masyarakat – Pen.] tau. Itu biar menjadi isu di masyarakat, tapi isu di bawah meja... Publik harus diajak untuk tahu bahwa ada problem, masalah, ya kan? Ada persiapan untuk kaderisasi, regenerasi, ya (publik) diajak (diskusi). Saya selalu mewacanakan (hal-hal) seperti itu... (Dengan cara) saya lempar langsung, (saya jadi tahu apakah) ada penolakan tidak. Kalau ada penolakan, jauh-jauh hari saya harus nyiapin dulu, apakah saya perlu komunikasi dengan orang-orang yang di lokasi sana [lokasi pembangunan TransStudio di Solo – Pen.], (dan) dengan masyarakat. Kalau ada (penolakan semakin keras), ya sudah, nggak jadi... Jadi lebih bagus sebuah program itu diwacanakan dulu, diukur penerimaan masyarakat seperti apa, (dan apakah) sesuai dengan kultur kita atau tidak... Jangan

pemimpin itu senengnya ‘semau gue.’” (Wawancara Jokowi, 14 Februari 2012)

Kejadian di atas mencirikan kecenderungan Jokowi untuk melibatkan publik dalam memecahkan masalah publik. Hal tersebut konsisten dengan apa yang dilakukan Jokowi tiap tahunnya melalui *rembug* (secara harfiah berarti “perembukan” atau “perundingan”), yaitu pertemuan antara Jokowi dan warga Solo, yang memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi dengan Jokowi secara langsung. Dalam kegiatan *rembug* ini, dibicarakanlah isu-isu yang mengemuka di masyarakat, sekaligus solusi yang disepakati antara pemerintah kota dan masyarakat. Arief menjelaskan berbagai tingkatan *rembug* yang terdapat di Solo sebagai berikut:

“Secara berjenjang ada forum yang dinamakan rembug kelurahan, rembug kecamatan dan rembug kota. Dalam rembug kelurahan, para warga bersama dengan aparat kelurahan duduk bersama membahas berbagai persoalan yang mereka hadapi dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Dengan begitu warga dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan di tempat mereka tinggal. Setelah itu berbagai persoalan di kelurahan itu dibawa dalam rembug kecamatan. Sementara forum yang lebih tinggi adalah rembug kota. Dalam forum tersebut warga bebas bersuara, melancarkan kritik, memberikan penilaian dan mengusulkan program pembangunan.” (Arief, 2011:81)

Semangat keterbukaan yang ada di dalam kegiatan *rembug*, yang memungkinkan penyampaian segala hal yang dirasakan masyarakat tanpa halangan, juga ditegaskan oleh Jokowi sebagai berikut:

“Saya tiap tahun ada rembug kota, setahun sekali. Di kecamatan (juga) ada rembug warga. (Di acara itu, warga) bebas mau ngomong apa saja,

800 orang (boleh ngomong apa saja) sama saya, setahun sekali juga. Jangan sampai ada yang buntet [tersumbat – Pen.], harus semuanya lancar.” (Wawancara Jokowi, 14 Februari 2012)

Dari hasil analisis di atas, Peneliti memahami bahwa dengan menciptakan panggung interaksi sebanyak dan seterbuka mungkin bagi audiensnya, ia berkesempatan untuk menyerap apa yang menjadi fokus perhatian mereka dan memetakannya secara utuh. Bermodalkan peta pemahaman ini, Jokowi kemudian dapat mengidentifikasi berbagai titik permasalahan yang bersinggungan, sehingga memberi peluang untuk merumuskan tindakan yang patut menjadi prioritas pemerintahannya. Hal semacam ini pada gilirannya mampu menjawab tantangan yang timbul dalam hubungan keagenan Jokowi yang diakibatkan oleh banyaknya prinsipal dan keragaman kepentingan mereka.

5.2.1.3. Mendekati Pihak-pihak Ketiga

Dalam aksi dramaturgi Jokowi yang telah dipaparkan pada Bab 4, ia pada umumnya tidak melakukan seleksi secara khusus untuk penciptaan panggung depannya. Hal ini antara lain karena akses ke panggung Jokowi sangatlah terbuka, sehingga siapapun dapat datang ke Balaikota atau Loji Gandrung dan menemuinya, atau menghentikannya di jalan dan berbincang dengannya. Bila dipandang dari sisi Jokowi, Peneliti mendapati bahwa ia juga tidak memiliki pola yang konsisten dalam menciptakan panggungnya. Pada beberapa kesempatan ketika Jokowi melakukan penciptaan panggung dengan Metode II (Terantisipasi dan Spontan), ia telah memiliki latar belakang informasi yang mendorongnya melakukan penciptaan tersebut. Hal ini antara lain terjadi ketika ia berdialog dengan masyarakat yang sedang mengantri di kios Layanan PKMS di Balaikota (1

Maret 2012), yang menurutnya ia lakukan karena menerima SMS pengaduan bahwa durasi pelayanan tidaklah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 10 menit (Wawancara Jokowi, 1 Maret 2012). Namun pada kesempatan lain, Peneliti mendapati bahwa panggung Jokowi tercipta secara spontan dalam arti sebenarnya, yaitu karena Jokowi sekedar ingin mengetahui situasi terkini. Hal ini terjadi antara lain ketika Jokowi singgah di sebuah warung kaki lima di kawasan Taman Balekambang untuk sekedar berbincang dengan pemiliknya (11 Maret 2012), atau berhenti di pinggir jalan untuk menyapa para tukang parkir (13 Februari 2012).

Terlepas dari hal tersebut, Peneliti mendapati bahwa pada beberapa kesempatan, Jokowi melakukan penciptaan panggung untuk audiens yang ia pilih secara selektif, karena adanya peran khusus audiens tersebut dalam hubungan keagenan Jokowi dengan masyarakat Solo. Hal ini sejalan dengan pandangan Shapiro, yang mengungkapkan bahwa terdapat peran aktif dari apa yang ia sebut *Pihak Ketiga*, yaitu pihak yang berada di luar hubungan prinsipal-agen. Peran Pihak Ketiga tersebut antara lain adalah sebagai pihak yang mengubah perimbangan informasi, memunculkan atau menghilangkan insentif tertentu, serta mempermudah atau mempersulit peluang agen untuk bersikap oportunistik. Contoh konkrit dari Pihak Ketiga ini umumnya ditemui di hubungan keagenan politik, antara lain kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) dan para pesaing politik (2005:269).

Selama penelitian, setidaknya ada dua Pihak Ketiga yang dilibatkan sebagai audiens selektif dalam panggung dramaturgi Jokowi. Yang pertama adalah saat Jokowi datang ke kantor *Solopos* dan berbincang tanpa agenda dengan para redaktur seniornya (14 Februari 2012). Sedangkan yang kedua adalah ketika ia

mengunjungi pengusaha Sukiyat, seorang pengusaha yang memiliki peran penting di balik proses persiapan Mobil Esemka (10 Maret 2012). Meskipun dilakukan secara mendadak dan tanpa penjadwalan khusus, namun Peneliti meyakini kedua kunjungan itu dilakukan bukan tanpa pertimbangan khusus dari Jokowi. Berdasarkan hasil perumusan dari pengamatan selama di lapangan dan beberapa kesempatan dialog dengan Jokowi, Peneliti memahami bahwa Sukiyat berjasa dalam pembuatan Mobil Esemka, khususnya pada tahap finalisasi. Namun menjelang masa akhir penelitian (minggu pertama dan kedua Maret 2012), Peneliti mencatat Sukiyat beberapa kali justru membuat berbagai pernyataan terbuka yang berpotensi menafikan usaha penggalangan dukungan terhadap Mobil Esemka. Sedangkan *Solopos* dipahami Peneliti sebagai media lokal yang seringkali menentang berbagai kebijakan Jokowi dan memosisikan diri sebagai pihak antagonis terhadap Jokowi, meskipun hal tersebut terkadang menentang tren berita mayoritas. Hal ini antara lain nampak pada tajuk rencana surat kabar tersebut pada tanggal 4 Maret 2012 berjudul “*Esemka Comot Onderdil Mobil Lain*” (Soe’oed dan Rynanthie, 2012:1), yang terbit justru ketika euforia media-media lain sedang teramat tinggi terhadap popularitas Mobil Esemka di ranah nasional. Dalam hal ini, Peneliti menganggap baik Sukiyat maupun *Solopos* adalah bagian dari kelompok kepentingan yang memiliki akses kepada saluran informasi publik, sehingga berpeluang mengubah perimbangan informasi (Shapiro, 2005:269).

Jokowi menjustifikasi pentingnya mendekati Pihak Ketiga secara aktif sebagai tindakan yang harus dilakukan, karena menurutnya setiap kelompok memiliki

berbagai macam kepentingan yang tidak selamanya dapat terakomodasi dalam dialog formal. Hal tersebut ia ungkapkan sebagai berikut:

“Yang sering kita lakukan kan hanya dialog formal, ya kan? (Bagi kita,) pokoknya sudah (dialog). Padahal bukan itu. Proses dialog kan macam-macam. Kadang-kadang ada pendekatan kelompok. (Apabila kemudian) masih ada yang vokal, (maka) ada pendekatan individu dan pribadi. Itu yang jarang dilakukan oleh pemimpin kita.” (Wawancara Jokowi, 13 Februari 2012)

Tindakan Jokowi yang diamati Peneliti di atas konsisten dengan apa yang diungkapkan oleh ANI, bahwa dengan latar belakang Solo yang memiliki basis radikalisme demikian tinggi, Jokowi kerap berkomunikasi dengan pihak-pihak yang ia anggap dapat memengaruhi opini publik. Tindakan ini menurut “Ani” diadaptasi Jokowi dari salah satu falsafah yang terkandung dalam alfabet Jawa Hanacaraka, yaitu konsep bahwa: *“Huruf yang ‘dipangku’ (diusung/diangkat) akan ‘kepaten’ (menjadi huruf mati).”* Konsep tersebut, apabila diaplikasikan ke dalam tataran hubungan interpersonal, dapat dipahami secara bebas sebagai: *“Orang yang didatangi (dan diajak berdialog) akan dapat dikendalikan.”*

Secara lebih spesifik, Jokowi menyatakan bahwa ia menggunakan metode pendekatan personal untuk mendekati berbagai kelompok Islam fundamentalis di Solo, dengan diajak makan dan berbincang bersama (Wawancara Jokowi, 18 Februari 2012). Dampak dari tindakan Jokowi tersebut diungkapkan oleh “Ani” bahwa melalui kunjungan dan dialog langsung, Jokowi telah dapat memahami dan mengakomodasi hal-hal yang menjadi perhatian kelompok-keleompok tersebut, dan di saat yang sama mampu merendam munculnya aksi *sweeping* dan *razia*

sepihak yang marak terjadi di tempat-tempat lain (Wawancara “Ani,” 10 Februari 2012). Penjabaran ini juga mengindikasikan konsistensi Jokowi untuk menyeimbangkan informasi antara dirinya dan masyarakat Solo selaku prinsipalnya.

5.2.1.4. Mendekati Masalah Tanpa Perantaraan Birokrasi

Shapiro menggaris-bawahi bahwa salah satu hal yang membedakan keagenan politik dengan teori keagenan ekonomi adalah bahwa seorang agen politik dapat mendelegasikan wewenang dan tugasnya kepada pihak lain. Hal ini dilakukan baik untuk menunjukkan kredibilitas mereka, maupun untuk menghindar dari tanggung-jawab dari hal-hal yang tidak diinginkan (2005:271). Dalam ranah pemerintahan lokal, hal ini dapat berarti bahwa seorang pemimpin daerah dapat melimpahkan wewenang mereka kepada jajaran birokrat di pemerintah daerah, antara lain kepada sekretaris daerah dan para kepala dinas. Shapiro lebih lanjut meyakini bahwa hubungan berjenjang semacam ini politik pada akhirnya menjadikan kontrak keagenan politik yang jauh berbeda dan lebih kompleks dibanding kontrak keagenan di ranah ekonomi (2005:271). Pada gilirannya, kompleksitas hubungan ini akan menyebabkan tingginya ongkos keagenan politik yang timbul dan pada akhirnya harus ditanggung oleh prinsipal (2005:272).

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, Peneliti meyakini bahwa Jokowi sangat memahami bahwa perannya sebagai walikota adalah untuk melakukan pemecahan masalah-masalah perkotaan yang sebagian besar berada di lapangan. Hal ini mengakibatkan Jokowi lebih banyak menghabiskan waktu berada di luar kantornya untuk kemudian melakukan interaksi dengan masyarakat melalui

penciptaan panggung depan menurut kajian dramaturgi. Ini terungkap dari pernyataannya sebagai berikut:

“Sekarang yang kita kehilangan itu apa? (Kita kehilangan) pemimpin yang bertindak di lapangan. Yang banyak sekali kan yang (ber-)wacana, (ber-)retorika. Ya pusing... (Seharusnya) tanya (rakyat) masalahnya apa, selesaikan (dengan cara men-)datangi, (lalu me-)rampungkan (masalah tersebut). Yang dibutuhkan rakyat (adalah) itu.” (Wawancara Jokowi, 13 Februari 2012)

Konsisten dengan pernyataan Jokowi, Peneliti mencatat bahwa dalam aktivitas keseharian pada umumnya, Jokowi hanya berada di Kantor Balaikota maupun Loji Gandrung untuk menerima tamu atau menanda-tangani surat-surat. Hal ini koheren dengan pernyataan sekretaris Jokowi di Loji Gandrung kepada Peneliti, yang menyatakan bahwa apabila tidak ada tamu, Jokowi hanya berada di kantor selama 15 sampai 30 menit sekedar untuk mengurus surat-surat (wawancara 9 Februari 2012). Hal serupa juga dicatat oleh Thayrun (2012:152), yang menyebutkan bahwa Jokowi jarang berlama-lama di kantor dan lebih suka berada di lapangan.

Tindakan Jokowi menciptakan panggung dramaturgi di tempat-tempat permasalahan memiliki dampak terhadap hubungan keagenan masyarakat Solo dan Jokowi. Dengan berada di tengah permasalahan secara langsung, Jokowi mengekspos dirinya, sekaligus hal-hal yang menjadi perhatian dirinya, kepada masyarakat Solo secara luas. Hal ini pada gilirannya memberikan kesempatan masyarakat untuk memahami Jokowi, dan membantu mereduksi ketidak-seimbangan informasi (Lupia 2001:4).

Selain itu, dorongan bagi Jokowi untuk menciptakan panggung juga dilandasi keinginan agar dapat melihat pokok permasalahan secara langsung. Dengan kata lain, dengan melakukan interaksi secara langsung, Jokowi dapat mengeliminasi peran perantara, dan melewati batasan-batasan birokrasi. Alasan tersebut tersirat dalam hasil wawancara berikut:

“Pendekatan lapangan... (saat ini) kurang sekali. Saya nggak ngerti, kenapa ya decision itu selalu dari belakang meja. Mestinya, pimpinan apapun, entah daerah, provinsi, (maupun) negara, itu menguasai masalah lapangan. Menguasai problem lapangan. Punya peta lapangan. Kemudian (bisa memiliki) database lapangan komplit. (Setelah itu) baru (bisa) membuat sebuah design policy. (Saat ini) sering kelirunya karena (informasi didapat) hanya (dari) ‘denger-denger.’ Denger-denger dari bawahan, ya kan? Tapi nggak lihat sendiri (ke lapangan). Naah, (begitu) bawahannya ABS [Asal Bapak Senang – Pen.], wah, langsung keliru decision-nya.” (Wawancara Jokowi, 13 Februari 2012)

Selama periode penelitian, Penulis berkesempatan menyaksikan secara langsung bagaimana Jokowi mendapat manfaat dari upaya eliminasi perantara dalam menggali informasi. Hal ini terjadi saat Jokowi melakukan pengecekan ke Gedung Ketoprak Balekambang dan mendapati sebuah pohon tua akan ditebang untuk keperluan renovasi gedung (15 Februari 2012). Tidak setuju akan tindakan penebangan tersebut karena menurutnya pohon yang dimaksud tidak mengganggu proses renovasi, Jokowi seketika menelpon kepala dinas yang bertanggung-jawab atas proyek di area tersebut. Kepala dinas yang ditelpon menyatakan bahwa tidak ada pohon yang akan ditebang dalam proses renovasi gedung, namun Jokowi seketika mematahkan pernyataan itu, karena realita yang disaksikannya di lapangan membuktikan bahwa pohon *sedang akan* ditebang. Peneliti melihat

bahwa andaikata Jokowi hanya mengandalkan informasi dari kepala dinas, maka ia tidak akan mengetahui kebenaran kondisi di lapangan, sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh dalam kualitas keputusan yang ia ambil berdasar informasi tersebut.

Dari analisis di atas, Penulis meyakini bahwa Jokowi memahami resiko untuk memercayakan jaringan informasi sepenuhnya kepada jajaran birokrasi. Ia secara eksplisit mengkhawatirkan adanya distorsi informasi yang dapat terjadi apabila ia menggantungkan sumber informasinya dari birokrasi. Oleh karena itu, Jokowi memilih untuk tidak mendelegasikan tugas pengumpulan informasi kepada birokrasi pihak lain, namun melakukan tinjauan dan keterlibatan secara langsung ke lapangan. Hal ini menurut Shapiro dapat mereduksi kompleksitas hubungan keagenan yang timbul akibat didelegasikannya hal-hal yang seharusnya dijalankan langsung oleh agen, dan pada gilirannya memperkecil ongkos keagenan yang harus ditanggung prinsipal (2005:271).

5.2.2. Tampak Selarasnya Kepentingan Jokowi dengan Kepentingan Masyarakat Solo

5.2.2.1. Berupaya Bebas dari Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan adalah asumsi yang melandasi seluruh hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989:59). Adanya kepentingan agen yang bertolak belakang dengan kepentingan prinsipal merupakan *raison d'être* (“alasan eksistensial”) bagi agen untuk menyembunyikan hal-hal tertentu, yang kemudian menjadi insentif baginya untuk mengabaikan tanggung jawabnya (Lane, 2000:60). Konflik kepentingan semacam ini antara lain terjadi di tingkat pemimpin politik, yang cenderung mengambil kebijakan tidak berlandaskan kepentingan publik sebagai prinsipal

yang mereka wakili, namun lebih termotivasi oleh kepentingan pribadi mereka masing-masing (Fox, 2007:3).

Berdasarkan hasil pengamatan Peneliti, didapati bahwa Jokowi telah mengantisipasi kemungkinan konflik kepentingan ini sejak awal dan berupaya menghindarinya. Hal tersebut dilakukan oleh Jokowi antara lain melalui pengendalian *setting* dan *personal front*-nya, yang ia lakukan untuk mengomunikasikan kepada masyarakat bahwa ia tidak memiliki kepentingan pribadi sebagai walikota. Hal tersebut misalnya ia tunjukkan melalui sikapnya yang tidak pernah mengambil gajinya sebagai walikota. Meskipun Jokowi cenderung tertutup mengenai hal ini karena menganggap hal ini sebagai wilayah pribadinya (Thayrun, 2012:151), namun sikap tersebut telah menjadi daya tarik media yang kemudian memberitakannya pada khalayak luas (antara lain *Kompas* ["Joko," 2011:33] dan *Vivanews* [Kalsum, 2011]). Sikapnya yang tidak mengganti mobil dinas tuanya yang merupakan bekas pejabat pendahulunya dan sudah sering mogok (Zaenuddin, 2012:72) juga Peneliti pandang sebagai salah satu perwujudan *personal front*-nya yang sederhana, sehingga menarik simpati masyarakat Solo.

Untuk menghindari konflik kepentingan antara jabatan dengan diri dan keluarganya, Jokowi selama menjabat selalu menjaga agar kegiatan bisnis utamanya di bidang permebelan tidak bersinggungan dengan hal-hal yang dapat diartikan sebagai benturan kepentingan (Utomo *et al*, 2011:195).⁵ Selain itu,

⁵Meskipun demikian, Peneliti perlu memberi catatan khusus bahwa usaha Jokowi yang nyaris tidak memiliki kepentingan di Solo pada awalnya terjadi sedemikian rupa bukanlah karena kekhawatiran akan konflik kepentingan, namun karena alasan-alasan lain, seperti karena bahan baku mebelnya dari luar kota dan pangsa pasarnya seluruhnya berada di luar negeri.

Jokowi juga menjaga agar keluarganya tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Berdasarkan perbincangan dengan Jokowi (9 Maret 2012), dan divalidasi oleh informasi dari “Hoe” (7 Maret 2012), Peneliti memahami bahwa ia melarang perusahaan *catering* milik anaknya untuk menyuplai *catering* di kegiatan-kegiatan pemerintah kota, serta melarang keluarga besarnya untuk mengambil tender-tender pemerintah, kesemuanya dalam rangka menghindari konflik kepentingan. Berdasarkan hasil diskusi mengenai indikasi-indikasi tersebut, “Hoe” yang mengenal keluarga Jokowi mengatakan kepada Peneliti:

“Kalau kepentingan, masing-masing orang pasti punya kepentingan. Cuma kepentingan itu bisa dikelola dengan sangat wajar. Saya tidak tahu kepentingan Pak Jokowi persisnya apa. Tetapi yang jelas, dalam tataran kepantasan... (Melihat berbagai indikator di atas), terlalu sulit bagi saya mengatakan kepentingan beliau, (karena) jauh sekali kepentingan bisnis dengan kepentingan sebagai walikota.” (Wawancara “Hoe,” 7 Maret 2012).

Satu kejadian yang mendukung pandangan di atas adalah ketika foto Jokowi dan anaknya Gibran Rakabuming secara kebetulan muncul bersamaan di halaman depan *Radar Solo* 9 Maret 2012. Jokowi muncul dalam berita terkait rumor pencalonannya sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta (“Lawan,” 2012:1), sedangkan Gibran muncul terkait dipilihnya ia sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kota Solo (Widodo, 2012:1). Jokowi menyatakan pada Peneliti bahwa ia merasa tidak nyaman foto dia dan anaknya muncul di halaman yang sama pada surat kabar, tanpa menjelaskan lebih lanjut makna pernyataan “tidak nyaman” itu (Wawancara Jokowi, 9 Maret 2012). Namun berbasis analisis

di atas, Peneliti menduga ketidak-nyamanan Jokowi tersebut merupakan refleksi dari kehati-hatiannya menjaga ranah pribadi keluarganya agar tidak terburai dengan ranah jabatan, untuk menjauhi persepsi konflik kepentingan.

5.2.2.2. Menghindari Glorifikasi Diri

Sebagaimana diimplikasikan oleh Fox di atas, konflik kepentingan dalam hubungan keagenan antara lain terjadi pada saat agen menetapkan kebijakan dengan mengedepankan kepentingan pribadinya (2007:3). Peneliti lebih jauh berupaya mendefinisikan pandangan ini dengan mengaplikasikannya pada situasi ketika seorang agen ingin menunjukkan keberhasilan kerjanya kepada prinsipal. Pada keadaan tersebut, agen yang lebih mengedepankan peran dirinya dalam mencapai keberhasilan tersebut dibanding hasil dan manfaat dari pekerjaan itu sendiri, dapat dikatakan sedang mengedepankan kepentingan pribadinya, yang sesuai dengan definisi Fox di atas tentang “konflik kepentingan.” Contoh umum dari situasi ini adalah pada saat pemimpin daerah memosisikan dirinya sebagai pihak inti yang berperan penting dalam suatu aksi atau kebijakan, dan menyatakan hal tersebut melalui media dan sarana informasi publik. Di satu sisi, hal semacam ini dapat dikategorikan sebagai kecenderungan menuju “glorifikasi diri” (Harris, 1989:538). Namun berdasarkan gambaran umum yang ada, Peneliti melihat bahwa perilaku tersebut di Indonesia seringkali telah dianggap wajar untuk dilakukan oleh para pemimpin baik di tingkat pusat maupun daerah, karena menurut Goffman, hal ini merupakan bagian dari usaha pemimpin tersebut untuk mengidealisasikan pertunjukan mereka di panggung depan (Mulyana 2010:116).

Data dan perilaku Jokowi yang Peneliti kumpulkan dan amati selama periode penelitian meyakinkan Peneliti bahwa Jokowi bukanlah orang yang haus publikasi

dan glorifikasi diri. Alih-alih berusaha mendapatkan perhatian seluas-luasnya dalam setiap kegiatan, Peneliti justru melihat kecenderungan Jokowi untuk menghindari dari publikasi semacam itu. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, Peneliti sering mendapati bahwa Jokowi berupaya menjaga *setting*-nya agar tidak terlalu menonjol sebagai walikota, antara lain hadir ke acara dan memilih duduk di kursi yang bukan diperuntukkan bagi walikota (24 Februari dan 11 Maret 2012), serta memilih untuk menumpang kendaraan sederhana yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi walikota (25 dan 26 Februari).

Sikap menghindari dari publikasi juga ditunjukkan oleh Jokowi pada beberapa panggung yang mendapatkan peliputan media dan sesungguhnya menempatkan Jokowi sebagai aktor utama dalam paham dramaturgi. Peneliti mendapati pada saat konferensi pers terkait Mobil Esemka (4 Maret 2012), Jokowi justru menghindari partisipasi terlalu aktif di kegiatan itu. Segera setelah memberikan kata sambutan pendek, Jokowi berpindah dari tempat duduknya di deretan para pembicara ke kursi yang berada di belakang kelompok wartawan, sehingga ia tidak tersorot oleh kamera dan membiarkan wartawan melanjutkan diskusi dengan para ko-aktornya, yaitu para penggerak kegiatan Esemka di lapangan. Hal serupa juga terjadi ketika Jokowi memberikan sambutan di acara-acara formal, seperti di acara pertunjukan wayang kulit dan kolintang di Pelataran Balaikota (17 Februari 2012), serta di acara peresmian Hutan Kota Balekambang (24 Februari 2012). Di acara-acara tersebut, Jokowi umumnya hanya berbicara pendek tanpa teks, yang isinya hanya ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat, lalu mempersilakan acara berlanjut. Perilaku Jokowi di atas kontras dengan apa yang Peneliti saksikan di acara-acara kedinasan di tempat lain, yaitu pada saat pejabat

dalam pidatonya berupaya menunjukkan kepada audiens bahwa dirinya banyak mengetahui dan terlibat sangat aktif di hal yang sedang ia ikuti tersebut, sebagaimana diteorikan sebagai upaya idealisasi seorang aktor (Mulyana 2010:116).

Indikasi lain mengenai keinginan Jokowi untuk menghindari glorifikasi individu semacam ini adalah tidak adanya publikasi pemerintah apapun yang memuat foto dirinya, baik seorang diri maupun sedang beraksi dalam sebuah kegiatan. Selama berada di Solo untuk penelitian tesis ini (13 Februari – 12 Maret 2012), tidak sekalipun Peneliti menemukan spanduk dan baliho Pemerintah Kota yang memunculkan wajah Jokowi. Selain itu, dari 10 buah brosur dan pamflet terkait informasi kota dan pariwisata Solo yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Solo dan dikumpulkan Peneliti selama periode tersebut, tidak terdapat pula foto atau penyebutan apapun tentang Jokowi. Hal ini konsisten dengan apa yang ditemukan Arief, bahwa di Jokowi tidak pernah memanfaatkan ruang publik maupun program kerja Pemerintah sebagai ajang sosialisasi dan kampanye bagi dirinya (2011:131-132).

Sebagai catatan dan indikasi tambahan, di awal-awal periode penelitian, beberapa kali Jokowi secara verbal meminta Peneliti untuk tidak hanya melihat dirinya, namun juga bertanya kepada masyarakat mengenai dampak pemerintahannya di tengah masyarakat (Wawancara Jokowi, 13 dan 14 Februari 2012). Selaras dengan hasil penelitian di atas, Peneliti meyakini bahwa permintaan Jokowi ini memberi sinyal tambahan bahwa ia lebih ingin publik memfokuskan atensi kepada hasil kerjanya, dan bukan pada dirinya, dan hal ini merupakan salah satu

sikap yang dapat mengurangi permasalahan keagenan yang diakibatkan oleh kepentingan pribadi agen (Fox, 2007:4).

5.2.2.3. Terjaganya Kepercayaan yang Telah Diberikan

Sebagaimana telah diungkapkan pada analisis dramaturgi di bab sebelumnya, Jokowi terindikasi memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam memanfaatkan *setting* dan *personal front*-nya, supaya tidak dipersepsi masyarakat sebagai penyalahgunaan kekuasaan walikota untuk kepentingan pribadi. Selain itu, Jokowi juga mengaburkan batas antara *frontstage* dan *backstage*, yang membuatnya tidak lagi tampil sebagai sosok yang mengidealisasikan dirinya dalam panggung depan. Kekaburan batasan antara dua sisi panggung ini juga telah sedikit banyak menjadi indikator bagi masyarakat bahwa Jokowi bersikap konsisten baik di depan maupun di belakang panggung, yang mengisyaratkan tidak adanya kepentingan Jokowi yang berbeda dengan apa yang ia tunjukkan ke masyarakat. Analisis di atas juga menunjukkan Jokowi melakukan pengelolaan impresi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan audiens terhadap dirinya, selaras dengan apa yang diutarakan Goffman (Mulyana, 2010:113).

Upaya pembangunan kepercayaan ini menjadi krusial dalam pembahasan mengenai hubungan keagenan, karena sesungguhnya biaya keagenan dapat diminimalisir antara lain apabila terdapat situasi yang melanggengkan rasa percaya (sebagaimana diungkapkan Donaldson [1990] dan Wright dan Mukherji [1999] dan dikutip oleh Shapiro [2005:270]). Shapiro lebih lanjut berargumen bahwa apabila seorang prinsipal memilih agen yang ia kenal secara pribadi, atau agen dari lingkungan yang ia percayai, maka dampak dari benturan kepentingan dapat dimitigasi. Hal ini karena hubungan yang dekat antara prinsipal dan agen

memungkinkan adanya kepentingan yang sama, atau bahkan sifat yang altruistik (bertindak sebagai agen dengan niat setulusnya untuk kepentingan prinsipal); Selain itu, upaya prinsipal untuk memantau agen menjadi lebih mudah karena telah adanya hubungan yang terjalin antara prinsipal dan agen (2005:277).

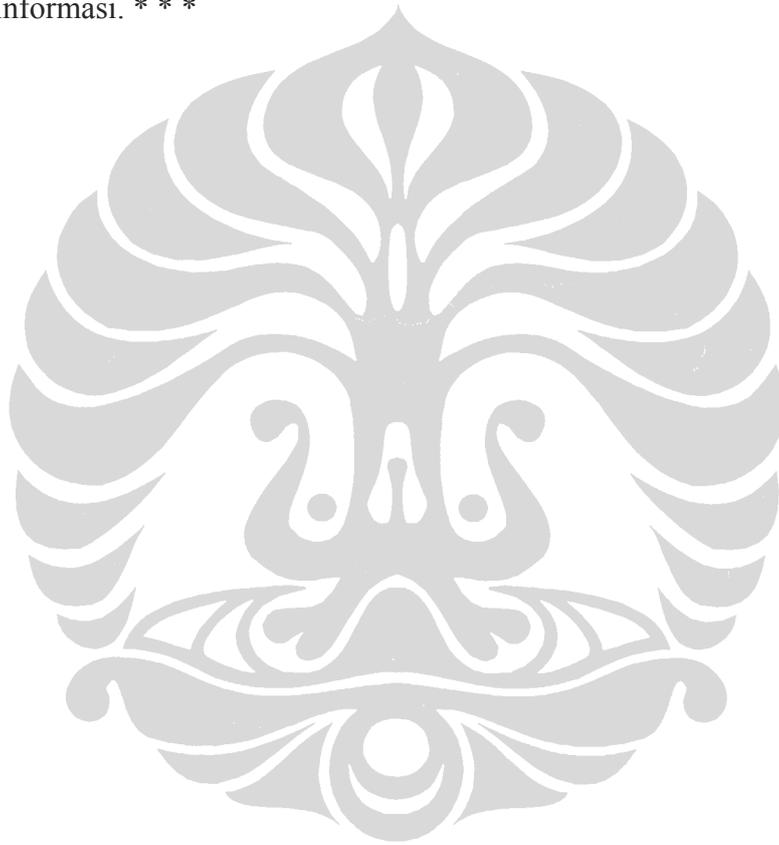
Pandangan di atas selaras dengan tujuan komunikasi Jokowi yang didapat Peneliti melalui wawancara, yaitu adalah untuk membangun rasa percaya dari masyarakat Solo. Berbekal rasa percaya yang telah tumbuh di masyarakat Solo kepadanya dan jajarannya, ia kemudian mampu memitigasi berbagai tantangan keagenan yang pada gilirannya berpengaruh pada pembenahan masalah-masalah perkotaan, seperti meredusir resistensi pedagang kaki-lima saat relokasi dan menghindari konflik antar-kelompok masyarakat (Wawancara Jokowi, 13-14 Februari 2012).

Filosofi Jokowi untuk membangun rasa percaya dari masyarakat ini juga ia tegaskan dalam salah satu bagian tulisannya yang berjudul *“Pemimpin Hasil Proses Belajar, Berlatih, dan Introspeksi Tanpa Henti,”* sebagai berikut:

“Kepemimpinan di dunia politik ditentukan oleh kepercayaan (trust) yang diterima dari rakyat. Bentuk konkretnya adalah rakyat percaya bahwa sang pemimpin benar-benar berpikir tentang nasib mereka. Percaya bahwa hal-hal yang diungkapkan merupakan hal-hal yang dilakukan pemimpinnya... (Dan) percaya bahwa pemimpinnya setiap saat siap melayani kepentingan mereka” (Widodo, 2011:733).

Dengan merujuk pada indikasi-indikasi yang telah dianalisis melalui bingkai pemahaman dramaturgi, Peneliti percaya bahwa Jokowi memiliki kesadaran akan tugas utama ia sebagai walikota, yaitu selaku agen dari masyarakat Solo, yang memiliki wewenang untuk memilihnya dan telah memercayakan posisi ini

kepadanya. Berangkat dari kesadaran ini, maka ia memainkan perannya sebagai aktor sebagaimana digambarkan dalam bingkai dramatugi Goffman, melalui tindakan-tindakan yang selaras dengan nilai-nilai yang membangkitkan rasa percaya dari masyarakat Solo selaku audiens. Tumbuhnya rasa percaya masyarakat Solo Jokowi ini menjadi modal penting bagi berlangsungnya hubungan keagenan antara Jokowi dan masyarakat Solo yang minim ketimpangan informasi. * * *



BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN PENELITIAN

“Politicians are in the business of selling hope to people.”

Kalimat di atas, yang membuka karya ilmiah Cwalina, Falkowski, dan Newman berjudul *“Political Management dan Marketing”* (2009) dengan tepat menggaris-bawahi pentingnya bagi setiap politisi, baik yang telah berada di kekuasaan atau mereka yang berada dalam proses pengambil-alihan kekuasaan secara konstitusional, untuk menyampaikan harapan yang dapat mereka tawarkan kepada pemilih sebagai konstituen mereka.

Pemahaman ini semakin menjadi relevan bagi Indonesia yang telah memasuki era demokratisasi seperti saat ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Dewi Fortuna Anwar, seiring dengan runtuhnya Orde Baru oleh gelombang reformasi, hiduplah kembali *“idealisme demokrasi di Indonesia yang memungkinkan partisipasi politik secara luas melalui sistem pemilihan yang kompetitif dan transparan yang diharapkan dapat menghasilkan... pemimpin yang aspiratif serta pemerintah yang baik, bersih dan akuntabel yang sepenuhnya didedikasikan untuk kepentingan bersama”* (dalam Zuhro *et al.* 2009:xviii).

Pandangan Dewi Fortuna Anwar di atas merupakan ide dasar bagi penulisan tesis ini. Setelah Indonesia bersepakat untuk menerapkan sistem desentralisasi agar mendekatkan proses pengambilan keputusan pada warga masyarakat yang terimbas oleh keputusan itu (Knight dan Johnson, 2011:51), menjadi menarik untuk ditelaah apakah pada kenyataannya proses tersebut telah mampu

menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan idealisme demokrasi dan desentralisasi di atas.

Apabila kondisi terkini pemerintah daerah dipandang secara makro, situasinya cenderung menumbuhkan rasa pesimisme. Astuti (2009:175) menilai bahwa pemberian otonomi daerah secara luas ternyata bukanlah jaminan bahwa kondisi akan membaik dan pemerintah yang bersih dapat terwujud. Ia justru meyakini bahwa bahwa saat ini dinamika politik lokal jadi makin tidak terarah, karena tidak adanya komitmen para elite pemerintahan untuk menjalankan otonomi daerah sebagai amanah yang harus dipertanggung-jawabkan (2009:181). Dwiyanto *et al.* (2003, sebagaimana dikutip Astuti, 2009: 181) lebih lanjut melihat bahwa proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik cenderung berorientasi pada kekuasaan, dan seringkali menggeser kepentingan masyarakat banyak manakala keduanya tidak berjalan seiringan. Hal ini sejalan dengan pandangan Lilleker (2006:15) yang menyatakan bahwa politisi seringkali dianggap haus kekuasaan, hanya berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri, dan terputus dari masyarakat. Di tengah itu semua, politisi justru sibuk berupaya menciptakan citra-diri tentang diri mereka, tapi tetap gagal menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana seorang politisi dapat menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya? (Lilleker, 2006:15-16)

Dalam tesis ini, Peneliti berangkat dengan latar belakang optimisme, dengan meyakini bahwa di tengah sentimen pesimis yang membunyah, masyarakat masih dapat berharap bahwa ada pemimpin-pemimpin daerah yang mampu memegang amanat yang diampukan kepadanya, dan sungguh-sungguh memiliki ikhtiar untuk menjalankan semangat pemerintahan desentralistik-demokratis, yaitu untuk

memajukan daerah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat (*Gatra*, 17 Agustus 2011:8).

Memanfaatkan pisau analisis dramaturgi Erving Goffman, Peneliti melakukan pengamatan berperan-serta terhadap komunikasi politik Walikota Solo Joko Widodo (Jokowi), serta mengumpulkan data-data penunjang melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil dari proses analisis ini kemudian dipetakan dalam kerangka pemikiran hubungan keagenan, untuk melihat bagaimana Jokowi melalui komunikasi politiknya menjawab tantangan dan permasalahan keagenan antara ia dengan masyarakat Solo.

Merujuk kepada asumsi-asumsi penelitian yang telah dipaparkan di awal tesis ini, maka Peneliti menyajikan tujuh kesimpulan penelitian, berupa enam kesimpulan utama dan satu kesimpulan tambahan. **Kesimpulan yang pertama**, di Kota Solo terdapat berbagai permasalahan yang terkait dengan hubungan keagenan antara masyarakat Solo dan pemimpin daerahnya. Permasalahan tersebut terjadi sejak perubahan sistem pemerintahan yang dialami Solo (sebagaimana terjadi di seluruh daerah lainnya di Indonesia), yaitu dari kepemimpinan sentralistik-otoriter menjadi sistem desentralistik-demokratik, sehingga wewenang penentuan pemimpin daerah kini sepenuhnya ada di tangan masyarakat Solo. Dalam proses pemilihan pemimpin dan pengawasan terhadap kinerja pemimpin tersebut sesudah dipilih, masyarakat Solo dihadapkan pada situasi *adverse selection* (tidak mengetahui kompetensi pemimpin yang mereka pilih) dan *moral hazard* (tidak mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan pemimpin mereka). Selain itu, Kota Solo juga memiliki latar belakang historis yang membedakan kota tersebut dengan wilayah lain di Indonesia, yaitu sebagai sebuah kota yang relatif sensitif

terhadap gejolak dan konflik, yang kemudian membuatnya dijadikan sebagai barometer politik nasional. Gejolak tersebut antara lain diakibatkan oleh tertutupnya saluran informasi antara pemimpin dan masyarakatnya, yang akumulasinya lalu berimbas pada ketimpangan pemahaman masyarakat terhadap pemimpinnya dan dapat bermuara kepada hilangnya rasa percaya masyarakat kepada pemimpin.

Potensi konflik yang diakibatkan oleh terhambatnya saluran informasi ini telah dipahami betul oleh Jokowi, sebagaimana pernyataannya berikut:

“Dulu... Balaikota Solo dibakar karena problem-problem seperti ini [permasalahan warga – Pen.] tidak diselesaikan... (Hal ini) karena nggak ada saluran komunikasinya. Apalagi kalau banyak yang dipendam di hati (dan tidak terungkap). Wah, kalau banyak (perasaan yang) dipendam seperti itu, jangka panjangnya (pemimpin akan) repot, karena (hal semacam itu ber-) bahaya.” (Wawancara Jokowi, 16 Februari 2012).

Pendapat di atas memperkuat asumsi awal Peneliti bahwa Jokowi telah secara konseptual memahami adanya permasalahan keagenan dalam hubungannya dengan masyarakat Solo. Kesadaran terhadap kondisi demografis Solo yang merupakan amalgamasi berbagai aliran politik dan sosial-budaya, yang berimplikasi terhadap adanya “faktor Hidra” atau keragaman prinsipal (Adams dalam Shapiro, 2005:267), menjadikan Jokowi meletakkan mitigasi permasalahan keagenan ini prioritas penting dalam kepemimpinannya, antara lain melalui proses komunikasi politik.

Kesimpulan yang kedua, Jokowi dalam menjalankan komunikasi politiknya secara garis besar melakukan apa yang umum dilakukan individu ketika

berhadapan dengan publik, yaitu menjaga kendali diri agar dapat mengekspresikan peran yang ia mainkan sesuai dengan situasi yang diperlukan. Hal ini sebagaimana yang telah dirumuskan Goffman dengan pendekatan dramaturginya. Perilaku Jokowi yang memainkan peran dramaturginya antara lain terpampang ketika bermanuver dalam proses negosiasi dengan masyarakat, sehingga menimbulkan perasaan saling diuntungkan (*win-win solution*), sekaligus membangun reputasi diri di mata lawan negosiasinya. Tindakan ini memberi sinyal peran reseptif Jokowi dalam melakukan pendekatan timbal-balik dengan audiensnya, dan merupakan bagian dari manajemen impresi dramaturgi.

Dalam panggung interaksinya dengan masyarakat Solo, Jokowi memperkenalkan unsur spontanitas, yang merupakan hal baru dalam bagi masyarakat Solo terkait pola komunikasi mereka dengan walikotanya. Melalui injeksi elemen spontanitas dalam panggungnya, Jokowi menciptakan panggung yang tidak terekayasa dan memunculkan perwujudan dirinya dan diri audiens yang seasli mungkin (Barnhart, 1994). Adanya perwujudan yang asli dari audiens pada gilirannya memperkecil peluang terjadinya manipulasi pesan, sehingga bermanfaat bagi Jokowi dalam menjalankan tugasnya selaku walikota, yaitu dalam melakukan manajemen kontrol. Dengan semangat yang sama pula, Jokowi diyakini berupaya memasukkan unsur-unsur spontanitas dalam berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini termasuk dengan melakukan penyebaran informasi yang dikemas sedemikian rupa, sehingga memperkuat nuansa spontanitas tersebut, antara lain dengan memanfaatkan rekanan (*shill*) dalam proses penciptaan panggungnya.

Jokowi juga memanfaatkan *setting* dan *personal front*-nya dalam aktivitas kesehariannya. Wujud dari *setting* dan *personal front* ini antara lain berupa rumah

dinas Loji Gandrung, kendaraan dinas bernomor polisi AD-1, seragam walikotanya, dan tentunya figur Jokowi sendiri yang sudah dikenal masyarakat Solo sebagai walikota.

Kesimpulan yang ketiga adalah bahwa berdasarkan analisis berbingkai konsep dramaturgi pula, Peneliti meyakini Jokowi telah melakukan berbagai manuver dramaturgis yang bermanfaat bagi pola hubungannya dengan masyarakat Solo. Yang pertama, sehubungan dengan mekanisme penciptaan panggung yang spontan, interaksi masyarakat Solo dengan Jokowi dapat diinisiasi oleh masyarakat Solo selaku audiens, bahkan secara spontan sekalipun. Dengan membuka peluang masyarakat untuk menciptakan panggung termasuk dalam situasi spontanitas, Jokowi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melihat citra dirinya yang jujur dan tidak termanipulasi (Barnhart, 1994). Hal ini didukung pula oleh tindakan Jokowi yang sengaja mengaburkan batas antara *frontstage* dan *backstage* dengan memberikan kesempatan audiens untuk melihat perilaku Jokowi di *backstage*, sehingga dapat membandingkan dengan perilakunya di *frontstage*. Dan karena Jokowi selalu menyajikan perilaku yang konsisten, maka meskipun hanya memiliki sebagian sedikit akses ke *backstage*, audiens mampu membangun citra-diri mengenai Jokowi secara utuh (Medlin, 2008:42), yaitu sosok Jokowi yang otentik, jujur, dan tidak menyembunyikan sesuatu.

Kesimpulan yang keempat, citra-diri Jokowi makin dipertegas oleh sikapnya yang secara konsisten menjaga agar citra-diri tersebut tidak tercederai oleh sikap dan perilaku yang umum diasosiasikan kepada seorang figur pemimpin daerah. Peneliti teryakinkan bahwa Jokowi secara konsisten berhati-hati menjaga *setting*

dan *personal front*, dengan meniadakan subkomponen dari *setting* dan *personal front* tersebut yang dianggapnya tidak relevan dengan pelaksanaan tugas pokoknya sebagai walikota. Dengan melakukan hal-hal tersebut, Jokowi mampu mempertahankan figur sebagai sosok pemimpin yang menjadi bagian dari masyarakat dan berpihak pada mereka.

Kesimpulan yang kelima, sikap dan tindakan Jokowi di atas merupakan bagian dari strategi komunikasi politiknya untuk menjaga keseimbangan informasi antara ia dan masyarakat Solo, dengan cara-cara yang konsisten dengan proses pereduksian kesenjangan informasi yang dirumuskan Lupia dan McCubbins (Lupia, 2001:4). Sejak awal, Jokowi telah konsisten menyediakan informasi mengenai diri dan tindakannya, antara lain menciptakan berbagai panggung interaksi publik, melalui metode khas Solo SLJJ (*Sonjo, Layat, Jagong*, dan *Jagongan*). Melalui panggung-panggung semacam inilah Jokowi mengumpulkan informasi tentang masyarakat Solo, Dan sebaliknya, interaksi “Teknik SLJJ” juga memberikan kesempatan pada masyarakat Solo untuk mengumpulkan informasi tentang dirinya (Shapiro, 2005:269). Di saat kepemimpinan Jokowi, selain keempat model panggung informal tadi, terdapat pula panggung formal yaitu *rembug* (musyawarah) di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Di sini, Jokowi membuka panggung interaksi yang amat luas antara dirinya dan publik, dan sekaligus mengajak publik untuk terlibat dalam proses perumusan solusi bagi permasalahan Kota Solo.

Jokowi juga secara khusus aktif menciptakan momen berinteraksi dengan pihak-pihak yang dapat memiliki pengaruh dalam mengubah perimbangan informasi yang ada di masyarakat (Shapiro, 2005:26). Jokowi memahami bahwa setiap

kelompok memiliki berbagai macam kepentingan yang tidak selalu dapat terakomodasi dalam dialog formal (Wawancara Jokowi, 13 Februari 2012), dan ia memilih untuk secara aktif mendekati kelompok-kelompok ini menggunakan proses komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai Jawa, sehingga secara konsisten membuka pintu komunikasi, menjaga keseimbangan informasi yang ada, dan pada beberapa kesempatan mencegah terjadinya konflik.

Kesemua proses komunikasi ini dilakukan secara langsung oleh Jokowi tanpa perantara maupun delegasi kepada pihak lain. Selama periode penelitian, terdapat indikasi bahwa Jokowi melakukan upaya pemotongan jalur birokrasi dalam pengumpulan informasi, dengan tidak begitu saja bergantung kepada informasi yang disediakan oleh jajaran birokrat Pemerintah Kota Solo, namun secara langsung mengumpulkan informasi itu sendiri di lapangan. Hal tersebut terbukti efektif dalam menjaga kualitas informasi yang ia peroleh, sekaligus mereduksi kompleksitas hubungan keagenan yang timbul akibat proses delegasi (Shapiro, 2005: 271).

Kesimpulan yang keenam, selama menjalankan proses komunikasi politik dengan masyarakat Solo, Jokowi secara konsisten menunjukkan citra-dirinya yang memiliki kepentingan selaras dengan kepentingan masyarakat Solo, antara lain citra-diri terbebasnya Jokowi dari kepentingan-kepentingan lain selain kepentingan untuk *“memimpin masyarakat untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita yang menjadi tujuan bersama”* (Widodo, 2011:733). Citra-diri ini antara lain dibangun melalui kemudahan yang diberikan pada masyarakat untuk berinteraksi dengan dirinya, sehingga mereka dapat melihat perwujudan dirinya seasmungkin, yaitu figur pemimpin yang terbebas dari kepentingan pribadi. Jokowi

juga menunjukkan kehati-hatian dalam menjaga *setting* dan *personal front*-nya selaku walikota, serta menghindari berbagai hal yang berpotensi mencampurkan ranah pribadi serta keluarganya dengan ranah jabatan. Selain itu, ia juga menghindari dari glorifikasi yang berlebihan kepada sosok dirinya, dan lebih mengarahkan perhatian media dan publik kepada hasil kerjanya di masyarakat. Hal-hal tersebut membuatnya terlindungi dari persepsi bahwa telah terjadi konflik kepentingan akibat Jokowi mengedepankan kepentingan pribadinya (Fox, 2007:3).

Sebagai kesimpulan tambahan, sebagai hal yang tidak diasumsikan Peneliti sebelumnya namun terungkap selama proses Penelitian, adalah bahwa permasalahan keagenan, khususnya di politik, tidaklah akan sepenuhnya terselesaikan. Peneliti mendukung pandangan Shapiro (2005:278) bahwa meskipun seorang pemimpin mampu menghilangkan kepentingan pribadinya dari hubungan keagenan, tetap akan ada tantangan baginya saat bermanuver untuk melayani kepentingan berbagai prinsipal yang saling berkompetisi dan kadangkala tidak bisa disatukan sama sekali.

Berdasarkan data yang dikumpulkan selama pengamatan berperan-serta, Peneliti berkeyakinan Jokowi memahami betul keterbatasan dari solusi permasalahan keagenan seperti yang dikemukakan di atas. Dari seluruh permasalahan perkotaan yang ada, ia menyatakan bahwa saat ini ia baru menyelesaikan sekitar 60%, dan menyadari bahwa di akhir jabatannya, tidak seluruh masalah akan terselesaikan. Hal ini karena beberapa permasalahan perkotaan terkait dengan elemen-elemen lain yang berada di luar wewenangnya selaku walikota (Wawancara Jokowi, 14 Mei 2012). Namun Peneliti melihat bahwa Jokowi lebih mementingkan proses komunikasi itu sendiri dibanding sekedar hasil dari satu tindakan itu, karena

melalui proses inilah tumbuh modal utama seorang pemimpin, yaitu kepercayaan. Pandangan Peneliti ini konsisten dengan apa yang diungkapkan Jokowi pada Peneliti:

[Merujuk pada sengketa trayek beberapa kelompok sopir di Solo – Pen.]
“(Sengketa semacam) itu artinya mereka berkekurangan. Terjemahannya kan itu... Harusnya pemimpin bisa nangkep (pesan) seperti itu (dan berpikir), ‘Ooh, rakyat saya baru kesulitan, saya harus datang kepadanya. Mungkin saya nggak bisa menyelesaikan masalahnya, tapi paling enggak membantu sedikit, supaya mereka punya harapan.’” (Wawancara Jokowi, 14 Februari 2012).

Pemahaman di atas memberikan aksentuasi terhadap seluruh hasil penelitian dalam tesis ini yang mengarah kepada keyakinan Peneliti, bahwa segala sikap dan tindakan Jokowi melaksanakan komunikasi politik dengan masyarakat Solo bermuara kepada upaya membangun harapan dan kepercayaan masyarakat, yang kemudian ia jadikan modal awal untuk mentransformasi Kota Solo.

Selain itu, Peneliti perlu memberi penegasan, bahwa melalui kesimpulan di atas Peneliti tidak berpretensi untuk menyatakan bahwa Jokowi tidak memiliki kepentingan pribadi, atau bahwa Jokowi tidak memiliki kepentingan lain selain melayani apa yang diinginkan prinsipalnya. Sebagaimana batasan yang diberikan oleh dramaturgi bahwa pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk melihat hasil akhir seperti motivasi subyek penelitian (Mulyana, 2010:136), penjabaran di atas semata-mata menunjukkan keyakinan Peneliti bahwa Jokowi mampu membentuk citra-dirinya seperti yang diinginkan olehnya serta oleh masyarakat Solo selaku pemberi wewenang kepadanya, yang manfaatnya dapat dilihat melalui tereduksinya permasalahan keagenan di Kota Solo.

6.2. IMPLIKASI PENELITIAN

6.2.1. Implikasi Akademis

Melalui penelitian ini, Peneliti mendapati bahwa telah terjadi pengaburan batas antara *frontstage* dan *backstage* Jokowi, yang mengakibatkan audiens dapat merasa memiliki akses – meskipun terbatas – kepada *backstage* Jokowi. Namun ternyata penelitian ini juga menunjukkan bahwa akses audiens ke area *backstage* tidaklah mencederai jalannya pertunjukan sebagaimana dikhawatirkan Goffman (Medlin, 2008:43). Justru dalam studi dramaturgi terhadap Jokowi, kesempatan untuk mengakses *backstage* dimanfaatkan oleh audiens untuk mendapatkan perbandingan antara sikap dan perilaku Jokowi di *frontstage* dan di *backstage*, dan berhasil mendapatkan gambaran Jokowi yang apa adanya serta tidak nampak berupaya menyembunyikan hal-hal tertentu.

Salah satu kemungkinan penjelasan bagi pertentangan antara teori dan fakta dramaturgi tersebut adalah konseptualisasi yang dijelaskan Mulyana (2010:106) mengenai adanya ketegangan antara *diri* yang spontan (yaitu “*I*”), dan kendala-kendala sosial dalam diri tersebut (yaitu “*Me*”). Adanya pertentangan tersebut menggaris-bawahi asumsi yang mendasari pemahaman dramaturgi, bahwa perilaku aktor akanlah selalu berbeda di *frontstage* dan di *backstage*. Namun pandangan yang demikian berarti mengabaikan kemungkinan adanya seorang aktor yang tidak terbebani oleh dirinya yang spontan, sehingga tidak terkendala oleh aspek-aspek sosial seperti digambarkan Goffman. Implikasinya, aktor tersebut tidak keberatan menampilkan spontanitas dirinya itu di *frontstage*, dan juga tidak keberatan audiens menyaksikan spontanitas yang sama di *backstage*.

Perilaku yang tidak selalu berujung pada ketegangan semacam itu sudah terlebih dahulu dijelaskan dalam teori keagenan. Perrow (dalam Shapiro, 2005:268) menolak kondisi yang selalu memastikan adanya dualisme peran dalam hubungan keagenan, karena hasil observasinya menunjukkan bahwa dalam berbagai situasi, manusia dapat memiliki sikap altruisme, menghargai pihak lain, dan tidak tertawan oleh perilaku oportunistik atau konflik kepentingan.

Peneliti melihat peluang penolakan serupa dapat pula diterapkan dalam pendekatan dramaturgi. Sesungguhnya Mulyana telah mengindikasikan bahwa dramaturgi sendiri tidaklah membeda-bedakan hasil akhir, misalnya apakah seseorang sesungguhnya mementingkan diri sendiri atau sepenuhnya altruistik. Baginya, hasil akhir menjadi tidak penting dalam hal ini, karena dramaturgi sekedar berupaya melihat makna ekspresif dan impresif perilaku seseorang (2010:136). Peneliti menyetujui pandangan Mulyana tersebut dan oleh karenanya berargumen bahwa penelitian ini tidak ditujukan untuk melihat hasil akhir, motivasi maupun ambisi sesungguhnya dari Jokowi, namun untuk mengetahui bagaimana kemampuannya dalam menyampaikan makna yang ingin ia bangun.

Berlandaskan argumen tersebut, Peneliti berasumsi apabila seorang aktor secara konsisten menunjukkan perilaku altruistik dan tidak menyembunyikan aspek apapun dalam dirinya, maka ketegangan yang digambarkan Goffman (Mulyana, 2010:106) tidaklah krusial, sehingga kerisauan untuk menegakkan batasan antara *frontstage* dan *backstage* itu tidak perlu ada. Oleh karenanya, Penulis berpandangan bahwa asumsi-asumsi yang melandasi pendekatan dramaturgi Erving Goffman belum dapat secara utuh mengakomodasi bermacam perilaku dan karakteristik aktor, khususnya apabila strategi komunikasi yang dipakai adalah

pendekatan yang cenderung altruistis dan tanpa dibebani sikap menyembunyikan aspek-aspek tertentu tentang dirinya dari audiens.

6.2.2. Implikasi Praktis

Penelitian berperan-serta dengan subyek penelitian Jokowi ini memberi sinyalemen kepada Peneliti, bahwa meskipun Jokowi mampu menjadi walikota karena diusung secara formal oleh partai politik, pada implementasinya hubungan yang terbangun adalah koneksi relasional langsung antara Jokowi dengan masyarakat Solo. Melalui proses interaksi antara Jokowi dan masyarakat, terbangun sebuah hubungan yang memberikan kesempatan bagi Jokowi untuk belajar mengenai masyarakat, dan sebaliknya terbuka pula kesempatan masyarakat untuk memahami sosok Jokowi sebagai personal. Dari hubungan semacam ini, terbangunlah reputasi dan keterkaitan dalam jaringan sosial yang kompleks (Shapiro, 2005:269), dan melewati batas-batas formal kepartaian. Pada akhirnya, Peneliti menilai bahwa dari keberhasilan hubungan semacam ini, partai hanya mendapat keuntungan reputasional, yaitu persepsi publik bahwa bahwa partai tersebut telah mengusung orang yang tepat. Namun penghargaan sesungguhnya diberikan masyarakat kepada figur tokoh itu sendiri, yang mungkin akan terefleksi dalam bentuk dukungan mereka bagi tokoh tersebut di kompetisi politik selanjutnya. Hal ini relevan dengan pandangan Susilo Utomo, bahwa masyarakat saat ini cenderung memilih figur yang baik dan lebih membela kepentingannya, tanpa memedulikan partai pengusung (Rita dan Widi, 2011:5). Pernyataan Ilham, seorang pedagang kaki lima di Solo, yang dikutip *Kompas* menggambarkan situasi ini dengan lugas, yaitu bahwa meskipun ia memilih PDI-P di Pemilu 2009, andaikata PDI-P tidak lagi mengusung Jokowi, ia akan tetap

memilih Jokowi. Ini karena, “*Jokowi lebih memberi manfaat daripada partai. Partai enggak bisa memberi saya pinjaman ketika harus nambah modal dagangan*” (Rita dan Widi, 2011:5).

Analisis Peneliti di atas mengokohkan pandangan yang makin kerap dianjurkan oleh sebagian akademisi dan praktisi politik, bahwa dengan latar belakang sosial politik Indonesia yang desentralistis saat ini, sudah bukan masanya lagi seorang pemimpin maupun calon pemimpin terkurung dalam paradigma transaksional lama yang sekedar berusaha membangun kekuatan politik dengan para elite dalam ranah kepartaian, atau sekedar mengandalkan akses petahana terhadap kekuasaan, jaringan, dan informasi dalam birokrasi. Namun lebih dari itu, adalah imperatif bagi tokoh tersebut untuk lebih mencurahkan energi dan perhatian mereka pada membangun hubungan relasional secara langsung dengan masyarakat.

6.3. KEKURANGAN PENELITIAN

Peneliti mencatat sekurang-kurangnya terdapat tiga hal utama yang dapat memengaruhi kuantitas informasi yang terkumpul, dan oleh karena itu berpotensi berdampak pada kualitas kesimpulan yang diambil dari penelitian ini. Kekurangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat kelemahan pada implementasi metodologi dalam penelitian ini, yang diakibatkan oleh kedekatan jarak antara Peneliti dan subyek penelitian, serta relatif pendeknya durasi penelitian. Hal ini dapat dielaborasi sebagai berikut:
 - a. Salah satu konsekuensi dari pengamatan berperan-serta terhadap individu seperti dalam penelitian ini adalah bahwa jarak fisik antara Peneliti dan Jokowi sebagai subyek penelitian menjadi sangat dekat, dan kehadiran

Peneliti disadari penuh olehnya. Oleh karenanya, muncul peluang bahwa kesadaran akan hadirnya seorang pengamat telah menjadi gangguan dalam rutinitas keseharian subyek penelitian, yang berpotensi mengakibatkan perubahan dari kegiatan dan aktivitas subyek tersebut, antara lain adanya kemungkinan subyek membatasi diri atau menyembunyikan dirinya yang asli (Bachtiar dalam Idrus, 2009:103).

- b. Kedekatan jarak tersebut juga mengakibatkan Peneliti tanpa disadari mempunyai unsur subyektivitas yang tinggi melampaui batas-batas yang dapat diterima secara umum dalam penelitian kualitatif. Sebaik-baiknya Peneliti berupaya untuk mengambil sikap netral dalam proses pengamatan berperan-serta, kedekatan jarak yang demikian erat tetap dapat mencederai “nuansa bebas nilai” Peneliti terhadap subyek penelitiannya, atau setidaknya menimbulkan apa yang disebut Patton sebagai “netralitas empatik” (Idrus, 2009:27).
- c. Lebih jauh lagi, potensi gangguan terhadap subyek penelitian di atas tidak Peneliti kompensasikan dengan memperpanjang durasi penelitian, sebagaimana dianjurkan Guba sebagai salah satu teknik untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data (Idrus, 2009:145). Implikasi yang mungkin terjadi dari hal ini adalah bahwa Peneliti tidak sepenuhnya berhasil menangkap “realitas keseharian” Jokowi sebagaimana disyaratkan oleh Goffman, yang berakibat pada tidak utuhnya rekonstruksi dramaturgi Jokowi dalam tesis ini.

- d. Pendeknya periode penelitian juga menjadi kelemahan tersendiri apabila dikaitkan dengan metode yang digunakan yaitu etnografi, yang umumnya dilaksanakan dalam rentang waktu yang relatif lebih lama. Meskipun Peneliti tidak menemukan rujukan spesifik mengenai periode minimal bagi sebuah penelitian etnografi, namun beberapa penelitian terdahulu dilaksanakan selama sembilan bulan sampai satu tahun (lihat misalnya, penelitian Susan Martin dalam Mulyana, 2010:277-290; dan Arrianie, 2010). Relatif pendeknya durasi penelitian ini mempertinggi kemungkinan bahwa data-data yang dipergunakan dalam tesis ini belum mencapai “titik jenuh” seperti disarankan Bogdan dan Biklen (dalam Idrus, 2009:256), serta berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan pada data yang terkumpul.
2. Penelitian terlaksana pada saat periode yang relatif tenang, sehingga terjadi perbedaan jumlah, keragaman, dan kualitas interaksi antara yang menjadi ekspektasi Peneliti di awal penelitian dengan yang sesungguhnya terjadi pada saat penelitian. Hal ini merupakan konsekuensi dari setidaknya tiga faktor berikut:
 - a. Penelitian dilakukan di awal tahun, yaitu saat Pemerintah Kota Solo masih melakukan persiapan dan pengajuan anggaran, yang berakibat implementasi kegiatan di lapangan belum begitu banyak. Akibatnya, kegiatan Jokowi turun ke lapangan tidaklah seintensif yang umumnya ia lakukan pada waktu-waktu lain ketika berbagai proyek sudah pada tahap implementasi, yaitu pertengahan dan akhir tahun (sebagaimana

diungkapkan Jokowi dalam wawancara 11 Maret 2012), dan hal tersebut berpengaruh pada kuantitas data yang diperoleh Peneliti.

- b. Apabila dibandingkan dengan sepanjang periode masa jabatan Jokowi sejak 2005, masa dilaksanakannya penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai masa stabil dalam hubungan antara Jokowi dan masyarakat Solo. Hal ini karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada Jokowi sudah demikian tinggi, sehingga permasalahan serta hambatan dalam proses komunikasi politik Jokowi tidaklah sebesar permasalahan di periode awal pemerintahannya (sebagaimana diungkapkan Jokowi dalam wawancara 11 Maret 2012). Meskipun demikian, Peneliti berupaya melakukan upaya kompensasi melalui pendalaman analisis pustaka serta wawancara dengan “Ani” dan “Hoe” sebagai dua sosok yang mendampingi Jokowi sejak menjelang Pilkada 2005. Hal ini dilakukan Peneliti untuk mendapatkan perspektif terkait situasi dan perilaku komunikasi politik Jokowi di masa-masa awal kepemimpinannya, sekaligus sebagai salah satu mekanisme untuk menguji validitas dan reliabilitas data yang diperoleh.
- c. Peneliti juga melihat intensitas interaksi Jokowi dengan masyarakat Solo berkurang, karena ia berkonsentrasi pada satu kegiatan besar yang tidak secara langsung melibatkan warga Solo, yaitu proses tarik-ulur pencalonan Jokowi sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta. Hal ini khususnya terjadi pada satu minggu terakhir masa penelitian, ketika Jokowi banyak mengalokasikan waktu dan energinya untuk

berkomunikasi dengan unsur-unsur yang terlibat dalam proses persiapan Pilkada di Jakarta.

3. Sebagai implikasi dari konsistensi terhadap model hubungan keagenan yang sederhana sebagaimana dipaparkan dalam Bab 2, penelitian ini juga tidak menyentuh aspek-aspek lain terkait peran Jokowi sebagai aktor dari hubungan keagenan Solo yang lebih kompleks. Secara lebih spesifik, ada dua komponen penting yang tidak dimunculkan secara mendalam sebagai berikut:

- a. Meskipun melihat beberapa indikasi mengenai peran birokrasi dalam antara Jokowi dan masyarakat Solo, Peneliti tidak secara khusus menganalisis gaya dan kemampuan kontrol serta manajerial Jokowi terhadap birokrasi Kota Solo dan bagaimana pengaruhnya terhadap langkah-langkah pengelolaan hubungan dirinya dengan publik.
- b. Peneliti juga tidak menganalisis bagaimana hubungan keagenan Jokowi dalam sebuah situasi dengan beragam prinsipal, seperti Wakil Walikota dan para anggota dewan dari DPRD Kota Solo. Selama periode Penelitian, interaksi fisik Jokowi dengan Wakil Walikota sangatlah terbatas, dan walaupun ada, interaksi tersebut dilakukan secara tertutup di luar pantauan Peneliti, sehingga menyulitkan Peneliti untuk memperoleh data yang berkualitas tinggi. Sedangkan interaksi Jokowi dengan DPRD Kota Solo sama sekali tidak terjadi selama periode penelitian.

Kedua hal di atas mengakibatkan Peneliti tidak dapat memperoleh gambaran secara utuh mengenai sikap, perilaku dan kemampuan manuver Jokowi dalam

berinteraksi dan melakukan komunikasi politik dengan para aktor-aktor keagenan dan pemangku-kepentingan lain di Kota Solo.

6.4. SARAN-SARAN PENGEMBANGAN PENELITIAN

Berangkat dari pemahaman yang Peneliti peroleh dalam melakukan penelitian ini, Peneliti meyakini masih terbuka peluang untuk mengembangkan kajian dalam tesis ini. Beberapa saran yang Peneliti ajukan antara lain:

1. Untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas penelitian ini, dapat diadakan penelitian dengan teori, metodologi, dan subyek penelitian yang sama, namun dengan memperpanjang durasi penelitian, agar memenuhi praktek terbaik (*best practice*) dalam penelitian etnografi.
2. Selain itu, kemungkinan untuk mengombinasikannya dengan penelitian kuantitatif juga dapat dijajaki untuk menghasilkan gambaran yang lebih menyeluruh. Sebagai contoh, peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan survei untuk mengetahui pengaruh strategi dramaturgi Jokowi terhadap elektibilitas pasangan Jokowi-Rudy yang tinggi pada Pilkada 2010.
3. Menggunakan pemahaman hubungan keagenan, dapat ditelaah interaksi pemimpin daerah dengan aktor-aktor politik lain, seperti wakil walikota, para pemimpin kota yang tergabung dalam Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), serta para anggota dewan di tingkat daerah, dan jajaran birokrasi. Hal ini karena dengan latar belakang desentralisasi saat ini, seseorang tidaklah menjadi agen tunggal dalam hubungan keagenannya dengan prinsipal, namun terdapat beragam agen yang memiliki hubungan dengan

beragam prinsipal, sebagaimana diasumsikan oleh para peneliti keagenan politik (Shapiro, 2005:271).

4. Dengan memanfaatkan pisau analisis dramaturgi, dapat diteliti aspek-aspek lain dari hubungan antara pemimpin daerah dengan masyarakatnya menggunakan elemen-elemen lain dari kajian telaah dramaturgi Erving Goffman. Secara khusus, dalam rangka mempertahankan fokus dan konsistensi tesis, Peneliti dengan sengaja meredusir pembahasan tentang peran tim dan ko-aktor, baik protagonis maupun antagonis. Tim dan ko-aktor ini sesungguhnya memiliki peran esensial dalam proses dramaturgi (Mulyana, 2010:122), dan dalam meneliti komunikasi politik Jokowi, Peneliti mendapati indikasi awal bahwa elemen ini dapat dikaji secara lebih mendalam sebagai satu penelitian tersendiri.
5. Sebagaimana telah diungkapkan di awal penelitian, untuk memberi peluang bagi analisis komparatif, penelitian dapat dilakukan dengan memanfaatkan kerangka konseptual yang sama terhadap subyek penelitian yang berbeda, yaitu kepala-kepala daerah di wilayah lain. Kekayaan informasi semacam ini pada gilirannya diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih akurat mengenai situasi kepemimpinan daerah di Indonesia di era desentralisasi.

* * *

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Alfian, M. Alfian (2009). *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Arrianie, Lely (2010). *Komunikasi Politik: Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Astuti, S.J. Woro (2009). *Meluruskan Demokrasi Lokal, Menggagas Kepemimpinan Daerah yang Ideal di Era Pilkada Langsung*, dalam Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto (ed). *Reformasi Birokrasi Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media, JIAN-UGM, MAP-UGM.
- Banks, Jeffrey dan Rangarajan Sundaram (1993). *Adverse Selection and Moral Hazard in a Repeated Elections Model*, dalam Barnett, William dan Melvin Hinich. *Political Economy: Institutions, Competition, and Representation: Proceedings of the Seventh International Symposium in Economic Theory and Econometrics*. Cambridge University Press.
- Cwalina, Wojciech; Andrzej Falkowski; dan Bruce Newman (2009). *Political Management dan Marketing*, dalam Dennis Johnson (ed). *Routledge Handbook of Political Management*. New York: Routledge.
- Ferejohn, John A. (1986). *Incumbent Performance and Electoral Control*, dalam *Public Choices 50*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
- Goffman, Erving (1956). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Edinburgh: University of Edinburgh.
- Griffin, Em (2000). *A First Look at Communication Theory, 4th ed*. Boston: McGraw-Hill Higher Education.
- Hall, Peter M. (2005). *The Presidency and Impression Management*. dalam Dennis Brissett dan Charles Edgley. *Life as Theater: A Dramaturgical Sourcebook, 2nd ed*. New Jersey: Transaction Publisher.
- Hare, Paul dan Herbert Blumberg (1988). *Dramaturgical Analysis of Social Interaction*. New York: Praeger.
- HM, Zaenuddin (2012). *Jokowi: Dari Jualan Kursi Hingga Dua Kali Mendapatkan Kursi*. Jakarta: Ufuk Press.
- Idrus, Muhammad (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kaloh, J. (2009). *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kartono, Kartini (2010). *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* Jakarta: Rajawali Pers.
- Kivisto, Peter dan Dan Pittman (2007). *Goffman's Dramaturgical Sociology: Personal Sales and Service in a Commodified World*, dalam Peter Kivisto (ed). *Illuminating Social Life: Classical and Contemporary Theory*, 4th ed. Thousand Oaks: Pine Forge Press.
- Knight, Jack dan James Johnson (2011). *The Priority of Democracy: Political Consequences of Pragmatism*. New Jersey: Princeton University Press.
- Kotler, Philip dan Neil Kotler (1999). *Political Marketing: Generating Effective Candidates, Campaigns, and Causes*, dalam Bruce Newman (ed). *The Handbook of Political Marketing*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Kuswarno, Engkus (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi – Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Lane, Jan-Erik (2000). *The Public Sector: Concepts, Models, and Approaches*, 3rd ed. London: SAGE Publications.
- Lilleker, Darren (2006). *Key Concepts in Political Communication*, 1st ed. London: SAGE Publications.
- Lupia, Arthur (2001). *Delegation of Power: Agency Theory*, dalam Neil J. Smelser dan Paul B. Baltes (ed). *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*. Oxford, UK: Elsevier Science.
- Mulyana, Deddy (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- McNair, Brian (2003). *An Introduction to Political Communication*, 3rd ed. London: Routledge.
- Newman, Bruce dan Richard Perloff (2004). *Political Marketing: Theory, Research and Applications*, dalam Lynda Lee Kaid (ed). *Handbook of Political Communication Research*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Nimmo, Dan (1989). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media* (saduran dari *Political Communication and Public Opinion in America*). Bandung: Penerbit Remadja Karya.
- Swanson, David (2004). *Transnational Trends in Political Communication: Conventional Views and New Realities*, dalam Frank Esser dan Barbara Preftsch (ed). *Comparing Political Communication: Theories, Cases and Challenges*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Thayrun, Yon (2012). *Jokowi: Pemimpin Rakyat Berjiwa Rocker*. Jakarta: Mizan.

Utomo, Anif Punto (ed) (2011). *Tokoh Perubahan Republika 2005-2010: Para Penggerak Perubahan*. Jakarta: Harian Republika.

Varoga, Craig dan Mike Rice (1999). *Only the Facts: Professional Research and Message Development*, dalam Bruce Newman (ed). *The Handbook of Political Marketing*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Widodo, Joko (2011). *Pemimpin Hasil Proses Belajar, Berlatih, dan Introspeksi Tanpa Henti*, dalam Jusuf Sutanto (ed). *The Dancing Leader: Hening – Mengalir – Bertindak*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Zuhro, R. Siti *et al* (2009). *Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

JURNAL ILMIAH

Banks, Jeffrey dan Rangarajan Sundaram (1998). *Optimal Retention in Agency Problems*, dalam *Journal of Economics Theory* 82. London: Academic Press.

Bergh, Sylvia (2004). *Democratic Decentralisation and Local Participation: A Review of Recent Research*, dalam *Development in Practice Vol. 14 No. 6*. London: Taylor & Francis.

Eisenhardt, Kathleen (1989). *Agency Theory: An Assessment Review*, dalam *Academy of Management Review, Vol. 14 No. 1*. Wisconsin: Academy of Management.

Fox, Justin (2007). *Government Transparency and Policymaking*, dalam *Public Choice Vol. 131 no 1/2*. New York: Springer.

Harris, Paul (1989). *Moral Progress & Politics: The Theory of T.H. Green*, dalam *Polity Vol. 21 No. 3*. Basingstoke (UK): Palgrave Macmillan.

Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah (2006). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*, dalam *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.

Merelman, Richard M. (1969). *The Dramaturgy of Politics*, dalam *The Sociological Quarterly Vol. 10 No. 2*. Oxford (UK): Blackwell Publishing.

Shapiro, Susan P. (2005). *Agency Theory*, dalam *Annual Review of Sociology Vol. 31 (2005)*. Illinois: Annual Reviews.

Thomas, W. John (2008). *Play It Again Hillary: A Dramaturgical Examination of a Repeat Health Care Plan Performance*. California: Leland Stanford Junior University.

DISERTASI & TESIS

Arief, Hersubeno (2011). *Permanent Campaign: Strategi Marketing Politik, Studi Kemenangan Jokowi pada Pemilukada Kota Surakarta tahun 2010*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.

Ibrahim, Anis (2008). *Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur*. Disertasi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Lemon, Andrew Yuichi (2005). *Reputational Concerns in Political Agency Models*. Disertasi. Connecticut: Yale University.

Medlin, Allison Kay (2008). *Bargain Theater: A Dramaturgical Analysis of a Flea Market*. Tesis. Auburn: Auburn University.

Nurbarani, Myrna (2009). *Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

PUBLIKASI YANG TIDAK DITERBITKAN

Berliant, Marcus dan John Duggan (2008). *Dynamic Political Agency with Adverse Selection and Moral Hazard*. Makalah. Tokyo: The University of Tokyo.

Decentralization and Democratic Local Governance Programming Handbook 2000. Buku panduan. Washington: Center for Democracy and Governance – USAID.

Diamond, Larry (1997). *Is the Third Wave of Democratization Over? – An Empirical Assessment*. Working paper. Indiana: Kellogg Institute.

Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IDRA), 5th Report, 2004. Laporan. Jakarta: The Asia Foundation.

Kedaerahan dan Kebangsaan dalam Demokrasi: Sebuah Perspektif Ekonomi-Politik. Presentasi 20 Maret 2007. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.

Laporan Hasil Survei Opinion Leader Jakarta 2011. Presentasi 5 Desember 2011. Jakarta: Laboratorium Psikologi Politik UI dan The Cyrus Network.

Priatmodjo, Danang (2009). Paper. *Revitalizing Historic Districts of Solo, Central Java*. Jakarta: Universitas Tarumanegara.

Profil Daerah Kota Surakarta 2011. Katalog. Surakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rondinelli, Dennis (1999). *What is Decentralization?* dalam *Decentralization Briefing Note*. Working Paper. Washington DC: The World Bank.

Trinugraha, Hermawan (2011). Resensi. *Solo yang Bergerak (Resensi Buku "Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926")*. Solo: Universitas Sebelas Maret Solo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

SITUS INTERNET

Barnhart, Adam (1994). *Erving Goffman: The Presentation of Self in Everyday Life*. <http://employees.cfmc.com/adamb/writings/goffman.htm>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan. Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional RI. <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

ARTIKEL MEDIA MASSA (CETAK DAN ONLINE)

Budiarti, Rita Triana dan Gandhi Achmad (2011, 17 Agustus). "Gerbang Jawa Barat yang Sehat." *Gatra*, hal. 118-122.

Gunawan (2012, 29 Juni). "Program Prorakyat Memikat: Berbagai Cara Menangi Pilkada." *Kompas*, hal. 1.

"Joko Widodo: Intinya, Memanusiakan Manusia" (2011, 9 Agustus). *Kompas*, hal. 33.

"Joko Widodo: Kalau Tidak Mau Masuk Sistem, Saya Copot!" (2011, 17 Agustus). *Gatra*, hal. 104-105.

"Joko Widodo, Wali Kota Surakarta: Wali Kaki Lima" (2008, 28 Desember). *Tempo*, hal. 54-57.

Kalsum, Umi (2012, 29 Januari). "Walikota Solo Tak Pernah Ambil Gaji." *Vivanews.com*. <http://politik.vivanews.com/news/read/202003-ribut-soal-gaji--sby-tengoklah-walikota-solo>.

Kurniawan, Wahyu (2012, 16 April). "Wah! Foto Foke Acungkan Jari Tengah Heboh di Twitter." *Solopos.com*. <http://www.solopos.com/2012/channel/nasional/wah-foto-foke-acungkan-jari-tengah-heboh-di-twitter-178640>.

"Lawan Jokowi Terlalu Kuat" (2012, 9 Maret). *Radar Solo*, hal. 1.

Lugito, Heddy (2011, 17 Agustus). "Kekuasaan Daerah." *Gatra*, hal. 8

Munawwaroh; Guslina, Ira dan Sufa Aryani Kristanti (2012, 25 April). "Video Porno Coreng Muka DPR." *Tempo.co*. <http://www.tempo.co/read/fokus/2012/04/25/2362/Video-Porno-Coreng-Muka-DPR>.

Pakpahan, Vanroy (2011, 24 November). "KPK Tangkap Tangan Sekda Semarang dan Dua Anggota DPRD." *Tribunnews.com*. <http://www.tribunnews.com/2011/11/24/kpk-tangkap-tangan-sekda-semarang-dan-dua-anggota-dprd>.

Pambudhi, P. Agung (2009, 23 Agustus). "Membangun Optimisme Dari Daerah." *Tempo*, hal. 38-39.

"Peredam Sumbu Pendek" (2009, 23 Agustus). *Tempo*, hal. 34-39.

"Program Prorakyat Memikat: Berbagai Cara Menangi Pilkada" (2010, 29 Juni). *Kompas*, hal. 1.

Rejeki, Sri & Bahana Patria (2010: 18 Februari). "Ulang Tahun Solo: Menuju Pembangunan Karakter." *Kompas*. hal. 9.

Rejeki, Sri & Sonya Hellen Sinombor (2010: 21 Mei). "Pilkada Solo: Kemenangan Fenomenal Jokowi-Rudy." *Kompas.com*. <http://regional.kompas.com/read/2010/05/21/03402631/Kemenangan.Fenomenal.Jokowi-Rudy>

Rita, Susana dan Hendriyo Widi (2011, 26 Mei). "Konsolidasi Demokrasi Jawa Tengah (2): Masihkan Kandang Banteng?" *Kompas*, hal. 5.

Riyadi, M. Agung (2011, 17 Agustus). "Solo Nanti: Kota Dalam Hutan." *Gatra*, hal. 102-106.

Sinombor, Sonya Hellen (2008, 1 Maret). "Sosok: Joko Widodo dan Misi Mengorbankan Wong Cilik." *Kompas*, hal. 16.

Soe'ed, Danie H; Eni W dan Septia Rynanthie (2012, 4 Maret). "Besok Dibongkar Total: Esemka Comot Onderdil Mobil Lain." *Solopos*, hal. 1.

Sudarmadi dan Sigit Nugroho (2012, 2-5 Februari). "Jokowi Jalankan Pakem Sendiri." *Swa*, hal. 40-44.

Suwadha, Dedy (ed.)(2012, 6 Januari). "Survey: 61,25 Persen Ingin Walikota Putera Daerah." *Tribunnews.com*. <http://batam.tribunnews.com/2012/01/06/survey-6125-persen-inginkan-walikota-putera-daerah>.

Widodo, Edy (2012, 9 Maret). "Amanat Baru Gibran Rakabuming Sebagai Ketua DPK APJI Solo: Pertahankan Piring Terbang, Angkat Makanan Khas." *Radarsolo*, hal. 1.

LAIN-LAIN

"Ani" (nama disamarkan sesuai kesepakatan). Wawancara. 10 Februari 2012 dan 9 Maret 2012.

"Hoe" (nama disamarkan sesuai kesepakatan). Wawancara. 7 Maret 2012.

Joko Widodo. Pengamatan berperan-serta. 13 Februari 2012 – 11 Maret 2012.

Joko Widodo. Wawancara 13 Februari 2012, 14 Februari 2012, 15 Februari 2012, 16 Februari 2012, 8 Maret 2012, dan 11 Maret 2012.

* * *

LAMPIRAN 1

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN BERPERAN-SERTA DALAM KEGIATAN HARIAN JOKOWI⁶

Senin, 13 Februari 2012			
No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	15.00	Menyusuri Jalan Slamet Riyadi. Mengunjungi sebuah toko dan meminta pemiliknya untuk mengecat tembok agar menghilangkan <i>grafitti</i> yang mengotori. Meminta tukang parkir setempat untuk turut menjaga kebersihan tembok tersebut. Menjanjikan akan turut meminta Satpol PP untuk menjaganya agar tidak lagi dicoret-coret. Membagikan beras kepada 8 orang yang menyaksikan hal tersebut.	<i>Frontstage</i> Jokowi yang dilakukan dengan Jokowi memiliki misi khusus. Pemilik toko seketika menyanggupi permintaan Jokowi, namun tukang parkir mengkhawatirkan tembok akan dikotori lagi oleh anak-anak sekitar. Jokowi memecahkan suasana dengan berkata “ <i>Ya kan anak-anaknya itu anak buah sampeyan (Anda),</i> ” dan membuat semua tertawa dan langsung menyanggupi kehendak Jokowi.
2	15.20	Ke kawasan pembibitan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, untuk mengecek stok tanaman yang masih ada. Di jalan, menelpon Dinas Pariwisata untuk mengecek bantuan seragam prajurit yang dijanjikan Pemkot kepada Istana. Mendapat laporan bahwa penentuan SKPD belum selesai, dan meminta komitmen batas waktu.	<i>Backstage</i> Jokowi yang melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Ia menyebutkan alasannya: “ <i>Begini ini kalau tidak dikontrol... beda hasilnya (antara yang dilaporkan dan kenyataan).</i> ” Menjadi indikasi bahwa Jokowi tidak sepenuhnya memercayakan penyaluran informasi melalui birokrasi
3	15.40	Kembali ke Rumah Dinas. Selesai.	-

Selasa, 14 Februari 2012			
No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	08.30	Ke Hotel Sunan, menyambut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdiknas dalam rangka Kegiatan Guru Nasional. Setelah selesai mengantarkan Dirjen menuju tempat acara, melakukan	<i>Frontstage</i> dengan masyarakat, termasuk para guru dari luar kota dan provinsi, yang banyak mengajaknya berfoto. Indikasi bahwa nama Jokowi memang sudah dikenal luas saat itu di luar Solo dan Jawa Tengah.

⁶ Seluruh kegiatan selalu dimulai dan diakhiri dari Rumah Dinas Walikota (Loji Gandrung, Jalan Slamet Riyadi 261, Solo), kecuali bila diberi catatan khusus.

		<i>door-stop interview</i> dengan wartawan dan menerima permintaan foto dari berbagai pengunjung.	
2	09.10	<p>Berkeliling. Di perjalanan, menerima telpon yang laporan tentang pohon yang akan ditebang. Mengecek satu pohon di Jalan Veteran yang dimintakan izin untuk ditebang, dengan alasan menghalangi pintu gerbang usaha di sebelahnya.</p> <p>Mengecek penanaman pohon bambu di pinggir jalan Veteran. Secara kebetulan melihat penebangan dahan beberapa pohon di persimpangan jalan Veteran dan Jalan Hanggowongso oleh petugas Dinas Pertamanan. Menelpon Kadis Pertamanan dan meminta agar pohon bambu di Jalan Veteran ditanam lebih rapat lagi dan lebih dekat ke trotoar, serta agar menginstruksikan petugasnya untuk tidak menebang dahan di luar alasan yang valid, seperti mengganggu kabel listrik dsb.</p>	<p><i>Backstage</i> Jokowi yang langsung turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi di lapangan. Indikasi bagi upaya Jokowi untuk menghindari kompleksitas komunikasi. Kehadirannya di lapangan memberikan kesempatan untuk melihat langsung realita situasi di lapangan. Selain itu, dengan menelpon langsung jajaran birokrasinya dan langsung memberi instruksi, Jokowi juga menghindari berbelitnya jalur bikrorasi.</p> <p>Sepanjang dalam perjalanan, beberapa kali terdapat pengendara sepeda motor yang kebetulan beriringan di sebelah mobil dinas Jokowi dan berusaha melihat sosok di balik jendela. Menanggapi hal ini, Jokowi umumnya menurunkan kaca jendelanya sekedar untuk tersenyum dan menganggukkan kepala, atau sambil berkata “Nggiiih...” (“Yaaa...”).</p>
3	09.20	<p>Ke perbatasan Solo. Mengecek proses pembuatan gapura perbatasan. Melihat bahwa hanya ada 3 orang yang bekerja di tempat tersebut. Menyatakan kesangsiannya bahwa gapura tersebut akan selesai tepat waktu dengan jumlah tenaga yang menurutnya minim (namun kemudian menyadari bahwa hari itu masih pagi sehingga belum seluruh petugas hadir).</p>	<p>Indikasi lanjutan keinginan Jokowi untuk mengetahui situasi terkini di lapangan. Kunjungan ini juga menunjukkan bahwa tiap kunjungan ia tidak selalu langsung memberikan instruksi kepada dinas terkait; melainkan kehadirannya saat itu disinyalir sekedar mengumpulkan informasi bagi dirinya sendiri.</p>
4	09.30	Ke kantor <i>Solopos</i> secara spontan. Ditemui oleh	Satu-satunya kejadian kunjungan spontan ke media dalam masa

		<p>Pemimpin Redaksi dan 2 wakilnya. Berdialog tertutup dengan ketiganya dengan topik bebas, meliputi isu penghentian sementara pembangunan mall Paragon karena penyalah-gunaan ijin; Hasil survei terbaru dan kemungkinan Jokowi maju menjadi kandidat gubernur DKI; Dialog peta kekuatan PDI-P di Jawa Tengah; Rencana Jokowi tentang suksesi di Solo. Di akhir pembicaraan, ditegaskan bahwa diskusi adalah <i>off the record</i>.</p>	<p>penelitian. “Perjanjian” dibuat melalui telepon sekitar 10 menit sebelum kehadiran oleh ajudan, untuk mengecek apakah para redaksi ada di di kantor dan dapat ditemui.</p> <p>Mengingat <i>Solopos</i> adalah media yang kerap berseberangan dengan Jokowi, kejadian ini mengindikasikan upaya Jokowi berkomunikasi dengan pihak-pihak ketiga – khususnya yang berbeda pendapat dengannya – dalam <i>frontstage</i> spontan dan oleh karenanya lebih jujur serta tidak terkesan “datang hanya karena butuh.”</p>
5	11.00	<p>Menelpon salah seorang Kepala Dinas, meminta kantor pengurusan KTP di Balaikota yang di lantai 2 dipindahkan ke lantai 1. Berdasar percakapan di telepon, terdengar sedikit ada argumen dari pihak yang ditelepon (sudah tidak ada tempat di lantai 1), namun Jokowi berikan solusi agar pindahkan kantor lain yang tak perlu berada di lantai 1.</p>	<p>Telpon dilakukan setelah menerima laporan dari Devid bahwa ada seorang ibu lanjut usia yang terjatuh saat menaiki tangga. Indikasi awal Jokowi membuka saluran informasi dari berbagai sumber. Juga indikasi kepedulian dan keinginan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ujarnya, “<i>Kalau (pemimpin yang) dulu, (kejadian seperti ini) didiemin aja.</i>”</p>
6	11.10	<p>Ke Balaikota. Sudah ditunggu oleh seorang ibu yang mengaku warga miskin. Ditemui di dalam kantor Balaikota. Mendengarkan keluhan ibu tersebut yang meminta keringanan uang sekolah untuk anaknya yang telah menunggak uang sekolah selama 6 bulan, serta meminta modal usaha. Menjanjikan akan membantu biaya sekolah yang dimintakan dan dana untuk memulai usaha.</p>	<p>Indikasi mudahnya bagi siapapun untuk menemui Jokowi di <i>frontstage</i>. Ibu tersebut hanya memakai celana pendek dan sandal jepit, namun tetap diterima baik oleh protokol Balaikota, dan ditemui Jokowi langsung di kantornya.</p> <p>Berdasarkan informasi yang terkumpul, uang yang diberikan ini diambil dari ‘uang kas,’ yang terkumpul antara lain dari uang gaji bulanan Jokowi selaku walikota yang tidak pernah ia ambil.</p>
7	11.30	<p><i>Door-stop interview.</i></p>	<p>Indikasi pertama di masa</p>

			penelitian yang menunjukkan mudahnya Jokowi didekati wartawan di kantornya tanpa protokoler khusus.
8	12.00	Ke salah satu bantaran sungai. Mengecek proses pembuatan taman di wilayah bantaran sungai. Melihat bahwa penanamannya lebih lambat dari yang diharapkan. Menelpon Kepala Dinas Pertamanan dan menanyakan alasan keterlambatan.	Salah satu kegiatan <i>backstage</i> Jokowi yang mengindikasikan keinginannya menghindari birokratisasi dalam penyaluran informasi, dan membangun pemahaman tentang permasalahan lapangan.
9	12.40	Ke Balai kota. Mengecek kesiapan ruang rapat baru, menemui pegawai pengadaan dan seniman yang sedang menghias ruangan tersebut. Memberikan komentar teknis tentang dekorasi dinding dan menanyakan perkembangan tender <i>soundsystem</i> .	Jokowi bahkan memberikan instruksi pada hal yang kecil, seperti “ <i>Gambar dahan dalam lukisannya terlalu pendek.</i> ” Namun ia juga selalu mengakhiri dengan peluang diskusi, misalnya “ <i>Gimana menurut Njenengan [Anda – Pen.]? Saya nggak berani protes, nanti disangka mengekang jiwa seni, ha ha...</i> ”
10	13.00	Ke Warung Sate Bu Bejo. Menjamu Dirjendas Kemdiknas makan siang.	<i>Frontstage</i> Jokowi yang mengirim citra-diri keberpihakannya pada masyarakat kecil. Dalam perjalanan pulang, Jokowi melakukan penjagaan <i>setting</i> dirinya, yaitu instruksi spontan agar mobilnya tidak melanggar lampu merah. Ini mengindikasikan kesadarannya akan pentingnya menjaga status kewalikotaan yang ia miliki.
11	14.30	Ke Rumah Dinas. Menerima wawancara rombongan siswa SMA 1 Surakarta untuk keperluan majalah sekolah.	<i>Frontstage</i> Jokowi dengan warga Solo.
12	16.00	Menanda-tangani surat dan disposisi.	<i>Backstage</i> Jokowi. Proses yang sangat singkat untuk ukuran walikota (hanya sekitar 15 menit).
13	16.15	Menerima wartawan Vivanews.com untuk <i>interview</i> dalam rangka penulisan buku tentang Jokowi.	<i>Frontstage</i> Jokowi, merupakan kelanjutan dari rangkaian wawancara sebelumnya. Wawancara ini menghasilkan buku karya Thayrun (2012) yang juga dirujuk Peneliti.
14	16.45	Mempresentasikan <i>slideshow</i>	<i>Slideshow</i> ini secara konsisten

		tentang perubahan Solo di masa kepemimpinannya kepada Peneliti dan wartawan Vivanews.com	dipergunakan Jokowi di berbagai kesempatan. Isinya adalah foto-foto situasi di periode awal masa jabatannya, disandingkan dengan foto tempat yang sama di periode sekarang. Terlepas dari motivasi sesungguhnya, presentasi semacam ini berpengaruh pada citra-diri Jokowi, yaitu dengan menunjukkan keberhasilan dirinya dalam memimpin Solo.
	17.15	Selesai.	-

Rabu, 15 Februari 2012			
No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	07.50	Menanda-tangani surat dan disposisi di pintu mobil. Spontan menerima seorang bapak (yang merupakan rekanan Kantor Walikota dalam menyediakan jasa Kereta Kencana Pemkot dan kuda-kudanya) yang menanyakan apakah beliau akan berkuda atau berkereta saat festival wayang.	Pertemuan <i>frontstage</i> yang berada di lokasi <i>backstage</i> ini dilakukan secara mendadak, dengan Jokowi sudah duduk di dalam mobil dan seketika Bapak tersebut menyeruak menemuinya, membuat Jokowi membatalkan keberangkatannya. Ini memberi indikasi mudahnya bagi staf Jokowi siapapun untuk menemui dirinya, baik di <i>frontstage</i> maupun <i>backstage</i> .
2	08.00	Menuju terminal, karena menerima laporan adanya angkutan kota (angkot) non-plat hitam yang berasal dari luar kota dan mangkal di dekat sebuah pasar, membuat perusahaan resmi merugi. Setibanya di lokasi, angkot yang dimaksud tidak ada. Menelpon Kadis Perhubungan untuk mengetahui duduk permasalahan, dan mendapat informasi bahwa keberadaan angkot tersebut justru diinginkan oleh warga pasar. Meminta Kadis untuk mencarikan solusi dan melaporkan perkembangannya kepadanya.	Kejadian ini sekali lagi mengindikasikan relatif rendahnya tingkat kepercayaan Jokowi kepada staf birokrasi. Dengan memberikan instruksi agar ada laporan perkembangan, Jokowi menunjukkan keinginan untuk terlibat dalam setiap langkah penyelesaian masalah di masyarakat. Selain itu, Peneliti menduga keinginan Jokowi untuk melibatkan diri ini adalah adanya potensi hal ini dapat tersulut menjadi konflik yang lebih besar dan membahayakan stabilitas kota. Ini sesuai perkataannya, “... (Kalau) diperkirakan akan jadi problem utama, harus di-handle sendiri.”
3	08.15	Melihat toko yang diprotes	<i>Backstage</i> Jokowi yang selalu

		warga sekitar karena telah membangun lahan parkir terlalu tinggi terhadap jalan utama, sehingga di saat hujan, membuat rumah-rumah di depannya tergenang banjir. Memastikan dengan Ajudannya bahwa surat peringatan resmi kepada toko tersebut telah diberikan.	mengecek situasi di lapangan. Meskipun dalam skala yang lebih kecil dibanding situasi nomor 2 di atas, Peneliti melihat kejadian ini -bila dibiarkan berlarut-larut- dapat sebabkan konflik antar-warga. Karena itu, Peneliti menduga bahwa meski telah ditangani oleh staf terkait, Jokowi tetap ingin terlibat di dalamnya.
4	08.30	Ke salah satu Kantor Kecamatan. Spontan melakukan pengecekan proses pembuatan KTP di tempat tersebut. Bertanya dan melihat surat-surat dari seorang warga yang baru selesai mengurus KTP dan terkena denda. Mempertanyakan mengapa slip denda tidak memiliki bagian terperforasi sebagai tembusan ke Pemda untuk pertanggung-jawaban audit. Menelpon Kadis Kependudukan, dan Kadis yang bersangkutan menjawab telah menyadari hal ini, slip denda baru dengan perforasi sedang dicetak dan akan mulai dipergunakan minggu depan.	Kejadian pengecekan di <i>frontstage</i> ini konsisten dengan keinginan Jokowi, bahwa “ <i>dengan dicek seperti ini, pegawai akan selalu merasa on.</i> ” Peneliti melihat, hal ini menjadi metode Jokowi untuk memastikan semua mekanisme kerja di lapangan berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, ini merupakan <i>frontstage</i> Jokowi untuk berinteraksi dengan warga terkait proses pembuatan KTP, dan di saat yang sama, menunjukkan kepeduliannya pada isu-isu semacam ini di depan warga tersebut.
5	08.50	Ke Gedung Ketoprak Balekambang yang sedang dipugar. Mengecek perkembangan pemugaran, karena menerima laporan bahwa ada pohon yang ditebang. Mendapati satu pohon telah ditebang dan satu pohon masih tersisa. Menelpon Kepala Dinas Perbaikan dan meminta penjelasan alasan penebangan. Pernyataan Kadis bahwa tidak ada pohon yang ditebang langsung dibantah berdasar fakta di lapangan.	Kejadian <i>backstage</i> selama masa penelitian yang paling tegas menunjukkan adanya perbedaan informasi dari Kadis dengan kenyataan yang dilihat Jokowi langsung di lapangan. Hal ini memberikan satu alasan ketidakpercayaan penuh Jokowi kepada birokrasi.
6	09.15	Ke Taman Balekambang. Mengecek kondisi penanaman pohon-pohon baru hasil	Dalam kunjungannya, Jokowi dengan detail menanyakan hal-hal seperti jumlah bebeknya sekarang,

		sumbangan Perhutani, dan menanyakan pertumbuhan jumlah hewan-hewan liar (bebek) yang sengaja dikembangkan di kawasan itu. Setelah pergi, lalu mengecek lagi ke Kepala di Balekambang mengenai akan diadaannya pembangunan tambahan. Diberitahu akan ada perubahan di kolam, dan bertanya hendak diapakan kolamnya, dengan pesan jangan sampai ada pohon yang boleh ditebang.	jumlah pohon yang sudah ditanam, berapa yang masih tersisa dan belum ditanam, dan bagaimana proses pertumbuhannya nanti. Selain untuk benar-benar mendapatkan informasi, ada juga kemungkinan bahwa Jokowi sebenarnya sudah mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun tetap menanyakannya untuk mengetahui pemahaman petugas akan kondisi di lapangan.
7	10.00	Ke Rumah Dinas. Diskusi empat mata dengan Bondan Gunawan (Menteri Sekretaris Negara era Kepresidenan Abdurrahman Wahid)	<i>Frontstage</i> namun sekaligus juga <i>backstage</i> Jokowi karena berbicara secara tertutup.
8	13.30	Menanda-tangani surat dan disposisi. Makan siang.	<i>Backstage</i> Jokowi.
9	13.50	Koordinasi dengan Kadis Pariwisata untuk persiapan festival wayang hari Sabtu.	Memberi masukan langsung, antara lain terkait kostum-kostum yang akan dipakai pejabat.
10	14.20	Selesai (Sore harinya, akan terbang ke Jakarta). (Menurut informasi yang diperoleh Peneliti dari agenda kegiatan walikota, Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Prabowo Subianto dan/atau Hasjim Djojohadikusumo malam itu).	-

Kamis, 16 Februari 2012			
No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	07.45	Mendarat dari Jakarta, menuju Rumah Dinas.	-
2	08.45	Ke Warung Sate Kambing Mbok Galak. Bersama istri menjamu sarapan Menteri Pendidikan Nasional dan Ibu Muhamad Nuh.	Satu <i>frontstage</i> yang memberi peluang Jokowi menjaga citra-dirinya yang berpihak pada pedagang kecil di depan pejabat, warga, dan wartawan.
3	09.05	Mendampingi Mendiknas melakukan wawancara dengan wartawan di salah	

		satu meja warung.	
4	09.50	Berkeliling di Jalan Slamet Riyadi. Mengecek pemasangan janur di sepanjang jalan, sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan Pemda dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Solo. Menerima laporan per telepon mengenai rute demonstrasi mahasiswa menyambut SBY.	Kejadian <i>backstage</i> Jokowi ini salah satu indikasi bahwa Jokowi tidak mempersulit komunikasi. Untuk kegiatan sepeenting penyambutan Presiden di Solo, ia melakukan koordinasi dan menerima laporan via telpon, tanpa perlu rapat khusus sebagaimana banyak dilakukan oleh kepala daerah lain.
5	10.10	Ke Balaikota. Menandatangani surat-surat.	<i>Backstage</i> Jokowi.
	10.20	Turut bergabung rapat antara Kepala Dinas dengan sekelompok pedagang dari Paguyuban Sriwedari yang sedang menyampaikan keluhan terkait perda retribusi yang baru serta permohonan renovasi Pasar Senin Sriwedari. Berjanji untuk mengunjungi hari Rabu (22 Feb). Meninggalkan pertemuan sebelum selesai.	<i>Frontstage</i> Jokowi dalam bermanuver. Masuk ruangan terlambat, dan menunjukkan sikapnya yang relatif lebih cepat menangani masalah dibanding Kadis yang sebelumnya memimpin rapat. Memenuhi hanya sebagian permintaan para warga (agar " <i>prosesnya tidak terlihat terlalu mudah</i> "). Indikasi adanya pengelolaan impresi yang bertujuan untuk memperkokoh kepercayaan publik kepadanya.
6	10.30	Spontan melakukan <i>door-stop interview</i> . Diminta oleh seseorang yang mengaku perwakilan masyarakat untuk hadir ke sebuah acara, dan menyatakan akan melihat dulu undangannya.	Indikasi awal pada <i>frontstage</i> Jokowi, bahwa kemudahan untuk menghentikan Jokowi di jalan tidak hanya dimiliki oleh wartawan atau staf, namun juga warga biasa yang tidak dikenalnya.
7	10.45	Ke Bandara untuk menjemput Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Pangestu. Setibanya di bandara, tidak berhasil menemukan lokasi Menteri, dan menduga Menteri telah pergi dari hotel. Menyusul ke arah hotel. Dalam perjalanan menuju hotel, diketahui melalui komunikasi telepon bahwa Menteri ternyata masih berada di terminal bandara – yang berbeda	Dari berbagai ucapan Jokowi, Peneliti memahami bahwa ia tidak terlalu nyaman menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal yang terlalu kental dengan unsur-unsur protokoler. Di sisi lain, Peneliti melihat Jokowi berusaha memanfaatkan kesempatan semacam itu dengan baik, misalnya dengan mengajak Menteri Mari Pangestu untuk menyaksikan situasi perusahaan rekaman Lokananta, yang saat itu

		dengan lokasi penjemputan semula – karena menunggu kehadiran Presiden. Kemudian membuat perjanjian untuk berkunjung ke Perusahaan Rekaman Lokananta di sore harinya.	sedang dilanda ketidakpastian pengelolaan dan prospek masa depan.
8	13.00	Ke Rumah Dinas. Bertemu dengan kelompok alumni ITB untuk rencana pendirian posyandu modern dan terintegrasi di salah satu kawasan di Solo.	<i>Frontstage</i> formal Jokowi.
9	14.00	Berkomunikasi via telepon dengan Kapolres Solo mengenai situasi demonstrasi FPI Solo terkait pernyataan Presiden SBY sebelumnya di Jakarta.	<i>Backstage</i> Jokowi dengan para pemangku-kepentingan kota.
10	14.10	Menanda-tangani surat dan disposisi. Makan siang.	<i>Backstage</i> Jokowi.
11	15.45	Ke Hotel Diamond. Bersama istri menjemput Menteri Mari Pangestu.	<i>Frontstage</i> Jokowi.
12	16.20	Bersama dengan Menteri Mari ke Lokananta. Melakukan peninjauan arsip dan fasilitas Lokananta serta melakukan dialog dengan pihak manajemen mengenai masa depan perusahaan.	Lihat poin no. 7 Secara spontan, Jokowi berhasil mengarahkan Menteri ke ruang koperasi Lokananta, yang lalu memborong berbagai CD musik di koperasi tersebut.
13	17.10	Mendampingi Menteri Mari melakukan <i>door-stop interview</i> .	<i>Frontstage</i> Jokowi dnegan
14	18.30	Bersama Menteri Mari kembali ke Hotel Diamond.	<i>Frontstage</i> Jokowi.
15	19.15	Selesai.	-

Jumat, 17 Februari 2012			
No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	06.45	Ke Hotel Diamond. Melepas Presiden SBY.	<i>Frontstage</i> Jokowi.
2	08.15	Ke Stadion R. Maladi (Sriwedari). Melakukan <i>door-stop interview</i> . Menjadi inspektur upacara Hari Jadi	<i>Frontstage</i> formal Jokowi. Upacara menjadi unik dan perhatian media, karena dibawakan dalam Bahasa Jawa

		Kota Solo ke-267.	dan seluruh peserta menggunakan busana keprajuritan Keraton. Indikasi kejelian Jokowi bahwa bahkan upacara pun dapat menjadi sarana promosi kota.
3	10.00	Ke Ngarsopuro. Menghadiri Festival Jenang Solo. Bersama Wakil Walikota dan istri masing-masing membagikan jenang kepada pengunjung.	Meskipun merupakan <i>frontstage</i> formal karena sudah dirancang sebelumnya, interaksi Jokowi dengan warga bebas dari kesan kaku dan birokratis.
4	11.40	<i>Door-stop interview</i> .	<i>Frontstage</i> Jokowi dengan wartawan yang tercipta secara spontan.
5	12.00	Ke Rumah Dinas. Solat Jumat.	<i>Backstage</i> yang sesekali menjadi <i>frontstage</i> Jokowi karena perbincangan dengan warga.
6	12.40	Menanda-tangani surat-surat. Makan siang.	<i>Backstage</i> Jokowi.
7	13.00	Menerima Hari Darmawan (pendiri Matahari Putra Prima), memperkenalkan konsep pertokoan yang sesuai dengan kota Solo.	Salah satu <i>frontstage</i> tertutup Jokowi dengan kalangan terbatas. Di sini Peneliti mendapat informasi, Jokowi tidak mau bertemu empat mata dengan pengusaha, namun harus didampingi orang-orang lain
8	15.00	Menerima rombongan Atilah Soeryadjaya yang sedang mempersiapkan acara kolosal Matah Ati di Solo bulan September 2012 (kolaborasi dengan Pemkot Solo).	Aksi <i>frontstage</i> Jokowi dalam memimpin rapat ini memberi kesan pada Peneliti mengenai citra-dirinya yang progresif, cekatan dalam menyelesaikan masalah dan tidak bertele-tele.
9	19.00	Ke Balaikota bersama istri. Menyaksikan pagelaran wayang yang dibuka untuk umum, sekaligus pertunjukan kolintang asuhan Ibu Yusgiantoro (istri Menteri Pertahanan).	Pertama kali Peneliti menyaksikan Jokowi tampil di <i>frontstage</i> dan memberi pidato tanpa teks, dan tidak lebih dari 45 detik. Hal serupa juga terjadi di hampir semua pidato tanpa teks lainnya selama masa penelitian.
10	21.20	<i>Door-stop interview</i> dengan wartawan cilik dari salah satu stasiun televisi lokal.	Salah satu <i>frontstage</i> spontan Jokowi.
11	22.00	Ke Warung Pak Haji Dul. Makan malam.	Salah satu <i>frontstage</i> Jokowi yang menunjukkan kedekatannya dengan kehidupan warga biasa. Jokowi dan istri duduk satu meja dengan ajudan, supir, dan Peneliti.
	22.30	Selesai.	-

Sabtu, 18 Februari 2012			
No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	09.00	Ke Gedung Pertemuan di Jalan Slamet Riyadi, menghadiri peluncuran buku “Etika Bisnis” dan seminar yang melibatkan guru-guru beberapa SMK.	Di <i>frontstage</i> ini Jokowi hadir namun tidak memberi kata sambutan. Dari informasi yang Peneliti peroleh, Jokowi memang tidak terlalu suka memberikan sambutan di acara formal.
2	10.25	Ke Rumah Dinas, wawancara segmen “The Captain” oleh Brava Radio 103.8 FM Jakarta.	Salah satu <i>frontstage</i> dengan Jokowi dengan jurnalis.
3	11.20	Ke pelataran parkir Loji Gandrung. Melihat kesiapan mobil Esemka yang akan dipakai untuk karnaval.	Merupakan <i>frontstage</i> spontan yang memungkinkan Jokowi berfoto dengan warga yang kebetulan sedang ada di situ.
4	11.40	Ke sebuah warung di pinggir rel. Menemui teman-teman SMA untuk mengetahui perkembangan tentang usaha mebel yang dijalani bersama. Makan siang.	<i>Backstage</i> Jokowi yang privat dan yang menurut pemahaman Peneliti tidak dapat dimasuki publik dan masyarakat umum.
5	14.00	Ke Rumah Dinas, bersiap-siap untuk Solo Karnaval dengan menggunakan kostum wayang orang. Melayani permintaan wartawan untuk berfoto dan bergaya dengan kostum.	Di <i>backstage</i> ini, Jokowi mempersilakan wartawan untuk berada di ruang kerja pribadinya di Loji, dan memotretnya ketika sedang dalam proses memakai kostum, menyebabkan kekaburan antara <i>frontstage</i> dan <i>backstage</i>
6	15.20	<p><u>Mengikuti Solo Karnaval Solo Karnaval:</u></p> <p>15.20 – Berangkat dari Plaza Sriwedari menuju Stadion Manahan dengan membonceng salah satu mobil Esemka bak terbuka.</p> <p>15.30 – Parade di atas kuda dari Manahan menyusuri jalan Slamet Riyadi ke arah Balaikota.</p> <p>15.45 – Di tengah perjalanan, turun dari kuda dan berjalan kaki.</p> <p>16.20 – Tiba di Balaikota.</p>	<p>Peneliti mengamati adanya indikasi kedekatan warga dengan Jokowi, yaitu banyak warga yang dengan antusias memanggil-manggil “Pak Jokowi! Pak Jokowi!” saat melihat sosoknya.</p> <p>Selain itu, nampak bahwa Jokowi tidak nyaman berada di atas kuda, kemungkinan karena jarak fisik yang tercipta antara dirinya dengan masyarakat yang umumnya merangsek mendekati dirinya untuk bersalaman atau berfoto. Karena ketidaknyamanan ini, Jokowi lalu memutuskan turun dari kuda. Hal ini</p>

		Menyempatkan untuk <i>door-stop interview</i> .	menimbulkan perbedaan yang signifikan, yaitu dengan bertambahnya waktu (durasi) yang dihabiskan oleh Jokowi untuk tidak hanya bersalaman maupun berfoto, namun sesekali berbincang dengan warga.
7	16.30	Kembali ke Rumah Dinas. Selesai.	-

Minggu-Selasa, 19-21 Februari 2012			
No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
<i>Catatan: Acara di periode ini adalah sebagaimana disampaikan oleh Jokowi dan Ajudan, dan tidak diikuti secara langsung oleh Peneliti.</i>			
1	Sepanjang hari	Berada di Singapura, antara lain untuk menyaksikan konser Judas Priest dan melakukan pertemuan awal dengan promotornya untuk menjajaki kemungkinan mendatangkan grup rock internasional ke Solo.	Kepergian Jokowi ke Singapura untuk menyaksikan konser musik <i>rock</i> ini mendapatkan liputan yang luas di Solo dalam konteks positif, yaitu niatan Jokowi untuk menjajaki kehadiran salah satu grup musik tersebut ke Solo.

Rabu, 22 Februari 2012			
No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	08.15	Ke Taman Sriwedari, mengunjungi para pedagang (tindak lanjut perbincangan dengan mereka tanggal 16 Feb). Meninjau kondisi Pasar Seni. Duduk, berbincang dan mendengarkan keluhan pedagang di warung.	Di <i>frontstage</i> ini, Peneliti memahami antusiasme yang ditunjukkan para pedagang yang dikunjungi Jokowi sebagai antusiasme yang jujur dan secara bersungguh-sungguh menyampaikan harapannya pada Jokowi. Ini bagi Peneliti mengindikasikan tingkat kepercayaan dan harapan yang tinggi pada Jokowi.
2	09.05	Ke Balaikota. Menerima Harta Dinata, salah satu anak jenius dan motivator termuda di Indonesia yang akan mengadakan <i>touring</i> ke beberapa sekolah di Solo.	Pertemuan <i>frontstage</i> terjadwal Jokowi.
3	09.45	Melakukan rekaman (<i>taping</i>) ucapan selamat kepada para pengrajin batik yang akan mengadakan seminar di Solo.	Pertemuan <i>frontstage</i> terjadwal Jokowi, namun teks yang dibaca baru diketahui Jokowi saat itu. Menunjukkan indikasi lain dari

			rendahnya proses birokrasi untuk menemui Jokowi.
4	09.50	Menerima wartawan majalah otomotif yang menanyakan beberapa hal perihal Esemka.	Pertemuan <i>frontstage</i> terjadwal Jokowi.
5	10.00	Menerima perwakilan manajemen Mal Paragon yang dihentikan pembangunannya dan membahas beberapa hal mendasar mengenai alasan penghentian pembangunan (karena Mal Paragon dinilai telah melakukan pembangunan yang menyalahi perijinannya).	Dalam pertemuan <i>frontstage</i> ini, Jokowi menunjukkan sikapnya yang tegas dan tidak kompromistis, namun dengan pembawaannya khasnya yang rileks, saat menunjukkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manajemen Mal Paragon.
6	10.20	Menuju Hotel Novotel. Menghadiri pertemuan bulanan Forum Pelaku Pariwisata Solo. Memberikan sambutan.	Ini adalah pertama kalinya dalam masa penelitian, Jokowi memberikan sambutan dengan durasi dan materi yang substansial di <i>frontstage</i> yang formal dan terjadwal. Hal ini menunjukkan pemahaman Jokowi terhadap isu tersebut, dan/atau menunjukkan perhatian Jokowi yang tinggi terhadap topik pariwisata, yang merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Solo.
7	12.20	Ke Rumah Dinas. Menandatangani surat-surat. Makan siang.	<i>Backstage</i> Jokowi.
8	13.15	Ke Balaikota. Melakukan rapat internal dinas terkait pelanggaran yang telah dilakukan Mal Paragon. Memberikan arahan singkat terkait hal-hal dengan sensitivitas tinggi (khususnya, penggunaan <i>ballroom</i> mal sebagai ruang ibadah, yang tidak dikomunikasikan dengan Pemkot sebelumnya). Meninggalkan rapat sebelum selesai.	Di rapat <i>backstage</i> tersebut, Jokowi memberikan indikasi mengenai adanya kontrol dirinya terhadap informasi, dengan mengidentifikasi hal-hal yang saat itu masih terlalu sensitif untuk diungkapkan kepada media. Hal ini bahkan ditekankan Jokowi secara berulang.
9	13.25	Ke Ruang Rapat baru di Kawasan Balaikota. Memimpin rapat dengan para staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot. Memberi instruksi agar lelang	Merupakan rapat pertama dan satu-satunya Jokowi dengan jajaran birokrasi dalam jumlah besar yang diadakan selama masa penelitian. Sebagaimana pada rapat-rapat lain, Peneliti

		segera dilakukan. Mendiskusikan wacana menghilangkan <i>billboard</i> iklan dari jalan-jalan protokol. Mendiskusikan tata taman yang baru di kawasan Balaikota.	memperhatikan bahwa Jokowi tidak bertele-tele dalam menyampaikan poin-poin yang menjadi perhatiannya, namun singkat dan langsung pada pokok permasalahannya.
9	14.45	Kembali ke rapat pembahasan Mal Paragon yang masih berlanjut. Bertemu dengan perwakilan manajemen Paragon dan mengingatkan beberapa isu sensitif yang harus dihadapi dengan hati-hati. Meninggalkan rapat sebelum selesai. Melakukan <i>door-stop interview</i> .	Konsisten dengan perilaku sebelumnya (lihat poin 5), Jokowi tetap menunjukkan sikapnya yang tegas dan tidak kompromistis.
10	15.20	Menuju Rumah Dinas. Dalam mobil menelpon Kepala Dinas, mengecek pemugaran Gedung PKK di Kawasan Balaikota yang tidak kunjung selesai.	Salah satu <i>backstage</i> Jokowi yang menunjukkan kecepatan dirinya dalam mengecek situasi dan menuntaskan masalah yang ada saat itu juga di <i>backstage</i> .
11	15.30	Acara pribadi sampai selesai	(Tidak diikuti oleh Peneliti).

Kamis, 23 Februari 2012

No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	07.00	Ke Yogyakarta. Bersama Wakil Walikota menghadiri acara Kuliah Umum Kader Utama PDI-P dari Ketua Umum Megawati Sukarnoputri	(Tidak diikuti oleh Peneliti. Informasi didapatkan dari Sekretaris dan agenda kegiatan walikota).
2	20.00	Ke Solo Techno Park. Menghadiri upacara <i>jamasan</i> (upacara tradisional Jawa untuk keselamatan) bagi rombongan Esemka, diikuti dengan doa kesuksesan Esemka.	Peneliti mendapat impresi bahwa kegiatan ini lebih diperuntukkan bagi publisitas yang sengaja dibangun Jokowi untuk terus mengangkat popularitas Esemka, daripada nilai simbolis maupun religinya.
3	20.45	Ke Rumah Dinas. Selesai.	-

Jumat, 24 Februari 2012

No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	06.30	Bersepeda ke Taman Balekambang didampingi manajemen Perhutani.	Salah satu <i>frontstage</i> Jokowi, memberinya sedikit kesempatan untuk menyapa warga di jalan.
2	06.50	Meresmikan hutan kota	Di <i>frontstage</i> ini, Jokowi

		bantuan dari Perhutani dengan menanda-tangani plakat peresmian. Sarapan sambil mendengarkan hiburan.	terindikasi menghindari dari <i>setting</i> bagi walikota, dengan tidak duduk di kursi yang telah disiapkan untuknya, namun duduk di kursi taman di sisi panggung.
3	07.20	Melakukan seremonial penanaman pohon.	<i>Frontstage</i> formal Jokowi.
4	07.30	Meninjau sekeliling untuk melihat situasi Balekambang, di luar rute yang telah diatur protokol.	Kegiatan spontan yang dimasukkan Jokowi dalam kegiatan terjadwalnya.
5	07.50	<i>Door-stop interview</i> (menerima wartawan di atas sepeda).	Sebuah <i>frontstage</i> spontan dengan wartawan.
6	08.00	Ke Rumah Dinas. Menerima rombongan Iwan Piliang, yang menunjukkan buku terbarunya yang memuat kutipan Jokowi.	<i>Frontstage</i> Jokowi di luar masyarakat Solo.
7	08.55	Ke Solo Techno Park. <i>Door-stop interview</i> .	<i>Frontstage</i> Jokowi dengan wartawan.
8	09.20	Melepas keberangkatan rombongan Esemka yang dipimpin oleh Wakil Walikota.	Meskipun Jokowi adalah walikota, namun Peneliti melihat bahwa di sini Jokowi tidak berupaya mencuri perhatian dengan memilih berbaur dengan masyarakat dan membiarkan perhatian publik diarahkan kepada Esemka.
<p><i>Catatan:</i> Peneliti kemudian mengikuti rombongan Esemka menuju Jakarta, dan berpisah dengan Jokowi yang mendadak batal memimpin rombongan karena sakit. Menurut catatan agenda kegiatan walikota, sore tersebut Jokowi antara lain bertemu dengan Sukiyat – salah satu pengusaha di belakang Esemka, dan juga melakukan pengecekan kesehatan ke dokter.</p>			

Sabtu, 25 Februari 2012			
No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	07.55	Tiba di Jakarta menggunakan pesawat beserta istri. Menuju tempat menginap dan menyusul rombongan Esemka (yang telah tiba terlebih dulu di Jakarta pukul 03.55).	Sepanjang perjalanan di Jakarta, Jokowi dan istri terlihat menghindari <i>setting</i> walikota dengan memilih duduk bersama-sama sebagian rombongan dalam bis wartawan.
2	08.45	Ke Komunitas Ayo Selamatkan Indonesia (KASI), didampingi Wakil Walikota dan rombongan, menceritakan latar belakang Esemka. Menerima dukungan simbolik	<i>Frontstage</i> Jokowi di Jakarta dengan tujuan mendorong publisitas Esemka.

		dari KASI.	
3	09.40	<i>Door-stop interview.</i>	<i>Frontstage</i> Jokowi di Jakarta dengan tujuan mendorong publisitas Esemka.
4	10.20	Ke kantor <i>Metro TV/Media Indonesia</i> dan menemui redaksi didampingi Wakil Walikota dan rombongan, menceritakan latar belakang Esemka.	<i>Frontstage</i> Jokowi di Jakarta dengan tujuan mendorong publisitas Esemka.
5	11.45	Ke kantor tabloid <i>The Politic</i> dan menemui redaksi didampingi Wakil Walikota dan rombongan, menceritakan latar belakang Esemka.	<i>Frontstage</i> Jokowi di Jakarta dengan tujuan mendorong publisitas Esemka.
6	12.40	Makan siang bersama rombongan.	<i>Backstage</i> Jokowi beserta tim.
7	13.30	Ke kantor <i>MNC Group</i> dan menemui redaksi didampingi Wakil Walikota dan rombongan, menceritakan latar belakang Esemka.	<i>Frontstage</i> Jokowi di Jakarta dengan tujuan mendorong publisitas Esemka.
8	14.40	Hadir dalam acara <i>Sindoradio</i> . Menerima anugerah Duta Indonesia Bersaing 2012. <i>Door-stop interview.</i>	<i>Frontstage</i> Jokowi di Jakarta dengan tujuan mendorong publisitas Esemka.
9	16.30	Ke kantor <i>LKBN Antara</i> , didampingi Wakil Walikota dan rombongan, menceritakan latar belakang Esemka.	<i>Frontstage</i> Jokowi di Jakarta dengan tujuan mendorong publisitas Esemka.
12	18.40	Kembali ke tempat menginap. Selesai.	-

Minggu, 26 Februari 2012			
No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	11.00	Dari tempat menginap, menuju kantor <i>Warta Kota</i> dan menemui redaksi didampingi Wakil Walikota dan rombongan, menceritakan latar belakang Esemka.	<i>Frontstage</i> Jokowi di Jakarta dengan tujuan mendorong publisitas Esemka.
2	12.15	Wawancara dengan wartawan <i>Jakarta Post</i> .	<i>Frontstage</i> Jokowi di Jakarta dengan tujuan mendorong publisitas Esemka.
2	12.25	Di pelataran kantor <i>Warta Kota</i> , melakukan <i>door-stop</i>	<i>Frontstage</i> Jokowi di Jakarta dengan tujuan mendorong

		<i>interview</i> dan sesi pemotretan dengan Esemka di depan rombongan wartawan, didampingi Wakil Walikota.	publisitas Esemka.
3	13.20	Menuju kantor <i>Detikcom</i> dan menemui redaksi didampingi Wakil Walikota dan rombongan, menceritakan latar belakang Esemka.	<i>Frontstage</i> Jokowi di Jakarta dengan tujuan mendorong publisitas Esemka.
4	15.00	Makan siang bersama rombongan.	<i>Backstage</i> Jokowi beserta tim.
5	16.30	Selesai.	-

Senin, 27 Februari 2012			
No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	06.30	Ke studio <i>Indosiar</i> untuk siaran langsung terkait berita Esemka.	<i>Frontstage</i> Jokowi di Jakarta dengan tujuan mendorong publisitas Esemka.
2	11.00	Menuju Puspitek Tangerang (lokasi tempat uji emisi Esemka akan dilakukan), menyusul rombongan Esemka.	-
3	11.40	Melakukan <i>door-stop interview</i> .	<i>Frontstage</i> Jokowi di Jakarta dengan tujuan mendorong publisitas Esemka.
4	12.15	Hadir dalam rapat tertutup antara tim Esemka dan pihak pemerintah.	<i>Backstage</i> Jokowi, yang memberikan indikasi akan dukungan yang tidak bulat dari pejabat pemerintah yang ada terkait pelolosan uji emisi Esemka.
5	13.05	Melakukan <i>door-stop interview</i> dengan <i>TVOne</i> .	<i>Frontstage</i> Jokowi di Jakarta dengan tujuan mendorong publisitas Esemka.
6	13.20	Menyaksikan langsung uji emisi Esemka.	<i>Frontstage</i> Jokowi, karena kegiatan ini diliput besar-besaran oleh media.
7	13.45	Melakukan konferensi pers terkait uji emisi Esemka (bersama dengan Wakil Walikota, pejabat Kementerian Riset dan Teknologi, pejabat Kementerian Perhubungan, dan dua anggota DPR).	<i>Frontstage</i> Jokowi. Dari jumlah pertanyaan yang lebih banyak diajukan ke Jokowi, nampak bahwa perhatian media sangat tinggi terhadapnya dan menjadi indikasi popularitasnya.
8	15.00	Kembali menuju Jakarta. Makan siang di Bumi Serpong Damai.	<i>Backstage</i> Jokowi.
9	17.00	Ke Hotel Atlit Senayan.	<i>Frontstage</i> Jokowi di Jakarta

		Melakukan wawancara untuk siaran berita <i>live</i> di <i>TVOne</i> .	dengan tujuan mendorong publisitas Esemka.
10	18.30	Acara pribadi (<i>Tidak diikuti oleh Peneliti. Menurut Ajudan, Jokowi antara lain bertemu dengan beberapa investor potensial untuk Esemka</i>).	-

Selasa, 28 Februari 2012			
No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
<i>Catatan: Acara di hari ini sebagaimana diceritakan oleh Jokowi dan Ajudan, dan tidak diikuti secara langsung oleh Peneliti karena beberapa acara berlangsung tertutup/terbatas.</i>			
1	09.00	Ke kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal, bertemu pejabat terkait dan memperoleh dukungan untuk Esemka.	<i>Frontstage</i> Jokowi.
2	12.00	Menemui beberapa investor potensial untuk Esemka.	<i>Frontstage</i> yang dapat juga menjadi <i>backstage</i> Jokowi.
3	19.00	Hadir dalam penganugerahan <i>Charta Politika Award</i> dan memperoleh penghargaan selaku “Tokoh Pemerintah yang Mampu Membentuk Opini Publik.”	Berdasarkan informasi, di sini Jokowi mengalahkan tiga Gubernur sebagai kandidat lain. Peneliti melihat kategori penghargaan, reputasi pemberi penghargaan, serta jabatan para kandidat yang dikalahkan Jokowi tersebut, menjadi publisitas sendiri bagi citra-diri dan pengaruh Jokowi.
4	21.00	Selesai.	-

Rabu, 29 Februari 2012			
No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	06.00	Menuju Semarang.	-
2	09.30	Ke Gedung Marhaen Semarang. Menjadi salah satu panelis di acara bedah buku “ <i>Negara Paripurna</i> ” karya Yudi Latif. Panelis lainnya adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Pada sesinya, mempresentasikan <i>slideshow</i> tentang perubahan Solo di masa kepemimpinannya.	<i>Frontstage</i> Jokowi. Meskipun berada di luar cakupan tesis ini, perlu dicatat bahwa di saat ini Peneliti mendapati pentingnya peran aktor antagonis, khususnya dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah, dalam membangun citra-diri Jokowi sebagai figur yang berpihak dengan rakyat.

3	12.10	<i>Door-stop interview.</i>	<i>Frontstage</i> Jokowi dengan wartawan.
4	12.30	Diskusi tertutup dengan PDI-P Jawa Tengah (<i>tidak disaksikan langsung oleh Peneliti</i>).	<i>Backstage</i> Jokowi dengan timnya, dalam hal ini partai.
5	14.30	Kembali menuju Solo. Makan siang di Salatiga.	<i>Backstage</i> Jokowi.
6	19.00	Ke Hotel Diamond. Menjamu makan malam delegasi perdagangan Suriname dan beberapa anggota DPR-RI.	<i>Frontstage</i> formal dan terjadwal Jokowi.
	20.30	Selesai.	-

Kamis, 1 Maret 2012			
No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	07.45	Menuju Balaikota. Dalam perjalanan menelpon Kepala Dinas terkait, memintanya untuk mengecek beberapa bagian di Balaikota yang terlihat kusam.	Salah satu <i>backstage</i> Jokowi yang menunjukkan kecepatan dirinya dalam mengecek situasi dan menuntaskan masalah yang ada saat itu juga di <i>backstage</i> .
2	08.10	Spontan meninjau kios layanan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) di kawasan Balaikota. Bertanya pada masyarakat dan petugas mengenai durasi pelayanan, apakah di bawah 10 menit seperti yang dijanjikan, atau lebih.	Interaksi <i>frontstage</i> spontan Jokowi, yang membuatnya tetap paham terhadap situasi pelayanan publik, sekaligus berkontribusi dalam pembentukan citra-dirinya yang positif dengan terlibat dalam kegiatan keseharian.
3	08.20	<i>Door-stop interview.</i>	<i>Frontstage</i> Jokowi dengan wartawan.
4	08.30	Ke Rumah Dinas. Menerima rombongan penyelenggara acara sarasehan bertema Ronggowarsito, yang dipimpin oleh Paundrakarna Sukmaputra.	Meskipun secara diadakan pagi itu di Pendopo Rumah Dinas, namun tidak diikuti oleh Jokowi. Menimbulkan dugaan Peneliti bahwa Jokowi sebisa mungkin tidak ingin tampil dalam kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial.
5	08.40	Melihat persiapan sarasehan Ronggowarsito. Melakukan <i>door-stop interview.</i>	
6	09.10	Ke Balaikota. Menerima perwakilan Kemlu yang melaporkan acara Kemlu di Solo bulan Juli 2012. Memberikan masukan terkait tempat, dan langsung	Pertemuan <i>frontstage</i> terjadwal Jokowi.

		menginstruksikan agar diadakan rapat gabungan bersama Kepala Dinas terkait.	
7	10.25	Ke Jalan Slamet Riyadi. Membuka cabang pertama Bank Jabar di Solo.	Pertemuan <i>frontstage</i> terjadwal Jokowi di depan para pemangku-kepentingan sektor keuangan Solo.
8	10.45	Ke Balaikota. Menerima pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang melaporkan akan diadakan rapat kerja nasional di Solo pada bulan April 2012. Langsung mengoordinasikan agar diadakan rapat gabungan bersama Kepala Dinas terkait.	<i>Frontstage</i> Jokowi dengan tamu terbatas.
9	11.10	Menerima pengurus Ikatan Dokter Ginekolog Indonesia. Melakukan <i>taping</i> ucapan selamat untuk acara IDGI yang akan diselenggarakan di Solo.	Pertemuan <i>frontstage</i> terjadwal Jokowi.
10	11.20	Menerima manajemen Fave Hotel (butik hotel baru di Solo) yang memperkenalkan hotel tersebut.	Pertemuan <i>frontstage</i> terjadwal Jokowi.
11	11.50	Rapat dengan direksi dan komisaris Bank Solo. Memberikan arahan untuk Bank Solo makin memfokuskan diri pada usaha kecil.	Pertemuan <i>frontstage</i> terjadwal Jokowi.
11	12.10	Rapat dengan direksi dan komisaris PDAM Solo. Memberikan arahan tegas untuk berkonsentrasi mengurangi kebocoran yang saat ini mencapai 35%, dan agar kolam renang (yang saat ini berada di bawah pengelolaan PDAM namun selalu merugi) agar jangan sampai ditutup.	Interaksi <i>backstage</i> Jokowi dengan birokrasi. Di sini sekali lagi nampak ketegasan Jokowi dalam berinteraksi dengan birokrasi, yaitu sosok yang tegas dan mengutamakan efisiensi serta efektivitas.
12	12.30	<i>Door-stop interview.</i>	<i>Frontstage</i> Jokowi dengan wartawan.
13	12.50	Berbicara enam mata dengan Sukiyat dan Wakil Walikota terkait pemberitaan negatif Esemka yang dipicu oleh Sukiyat (<i>tidak diikuti langsung</i>	<i>Menurut informasi yang didapat Peneliti, beliau berdua adalah sahabat pribadi Jokowi yang dikenal dan membantunya sejak Pilkada Solo 2005</i>

		<i>oleh Peneliti).</i>	
14	14.00	Ke Rumah Dinas. Di tengah jalan, menerima kabar bahwa uji emisi Esemka tidak lolos. Mengungkap pada Peneliti bahwa ia sebenarnya sudah mendengar berita ini sejak sehari sebelumnya.	Dalam situasi <i>backstage</i> Jokowi ini, Peneliti menangkap aura kekecewaannya. Namun, Peneliti memperhatikan bahwa Jokowi tidak menutup-tutupi perasaan ini saat berada di <i>frontstage</i> di kemudian hari.
15	16.10	<i>Door-stop interview.</i>	<i>Frontstage</i> Jokowi dengan wartawan.
16	16.35	Ke rumah ibunda Jokowi.	<i>Backstage</i> Jokowi yang sangat personal.
17	17.05	Ke Solo Techno Park. Bertemu dengan Deputi Bank Indonesia yang menyatakan akan memberikan dukungan bagi Esemka, dan siap membeli 2 unit Esemka untuk mobil kas keliling. Mendampingi Deputi BI menerima <i>interview</i> wartawan, dan menyaksikan presentasi tentang Solo Techno Park.	<i>Frontstage</i> Jokowi. Peneliti melihat bahwa momen ini ia pergunakan untuk menunjukkan bahwa dukungan terhadap Esemka masih tetap kuat.
	18.15	Selesai.	-

Jumat, 2 Maret 2012			
No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	08.15	Ke SMK 2 Solo. Bertatap muka langsung dengan sekitar 30 orang perwakilan pelajar SMK dan guru-guru, untuk memberitahukan bahwa Esemka tidak lolos uji emisi, dan mendorong agar para pelajar tidak patah semangat (dengan liputan media).	Peneliti tertarik mengamati kehadiran media di rangkaian <i>frontstage</i> ini, karena acara ini tidak pernah secara formal diumumkan. Ada kemungkinan Jokowi menggunakan apa yang disebut oleh Goffman sebagai rekanan (<i>shill</i>) untuk menyebarkan informasi secara diam-diam agar terlihat spontan, khususnya karena hal ini menyangkut aspek emosional yang ingin ditekankan dalam adegan <i>frontstage</i> tersebut.
2	08.20	<i>Door-stop interview.</i>	
3	08.40	Memberikan wawancara <i>live</i> untuk Metro TV di depan gedung SMK 2 Solo.	
4	08.50	<i>Door-stop interview.</i>	
5	09.15	Dalam perjalanan ke Balaikota, mendapat kabar via ajudan bahwa terhadai pemogokan	Indikasi Jokowi melihat masalah ini sebagai masalah yang berpotensi meluas menjadi konflik besar,

		supir bis “Atmo” karena kemungkinan kenaikan harga BBM. Menelpon Kepala Dishub, memintanya untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan menghubungi Jokowi bila ada perkembangan.	sehingga mendorong keinginannya Jokowi untuk terlibat dalam setiap langkah penyelesaian masalah di masyarakat.
	9.20	Ke Balaikota. Menerima perwakilan Kementerian Luar Negeri yang menginformasikan perkembangan terbaru terkait proses untuk melakukan perjanjian kerja-sama dengan kota lain di mancanegara.	<i>Frontstage</i> terjadwal Jokowi.
6	10.55	Kembali ke Rumah Dinas. Menanda-tangani surat-surat.	<i>Backstage</i> Jokowi.
7	12.00	Solat Jumat.	<i>Backstage</i> Jokowi yang sesekali menjadi <i>frontstage</i> karena ia berbincang dengan warga.
8	13.00	Ke Bandara. Berangkat ke Surabaya.	-
9	18.30	Menjadi pembicara <i>Business Talk Show</i> di Surabaya dengan tema “Strategi Pengembangan Usaha Berbasis <i>Good Corporate Governance</i> ”	<i>Frontstage</i> terjadwal Jokowi. Tidak diikuti Peneliti.

Sabtu, 3 Maret 2012

No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
<i>Catatan: Acara di hari ini sebagaimana diceritakan oleh Jokowi dan Ajudan, dan tidak diikuti secara langsung oleh Peneliti.</i>			
1	Sepanjang hari	Berada di Surabaya, antara lain untuk berbicara di Forum Kepemimpinan di Universitas Airlangga. Kembali ke Solo pada malam harinya.	<i>Frontstage</i> terjadwal Jokowi. Tidak diikuti Peneliti.

Minggu, 4 Maret 2012

No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	06.25	Bersepeda dan berkeliling di sepanjang Car-Free Day. Mengikuti acara senam bersama bersama istri, diikuti oleh pembukaan <i>garage sale</i> yang diadakan Rotary Club	Merupakan salah satu <i>frontstage</i> Jokowi yang relatif paling terbuka, karena audiens bisa siapa saja, muncul dari mana saja, dan dapat membawa permasalahan apa saja. Peneliti melihat bahwa Jokowi

		Solo. Berdialog dan menerima permintaan berfoto bersama masyarakat. Menerima permintaan dari seorang musisi jalanan untuk diundang menghibur di acara-acara Walikota (kemudian meminta Ajudan mencatat nomor telepon si musisi jalanan). Menjenguk stan mobil dari perusahaan katering milik putranya yang sedang berpromosi membagikan sarapan gratis kepada warga. Menerima permintaan <i>interview</i> wartawan.	melayani setiap permintaan dari siapapun, termasuk permintaan berfoto yang demikian banyak dan termasuk tidak lazim untuk ukuran seseorang walikota. Selain itu, di momen ini Peneliti menyaksikan betapa terbukanya Jokowi untuk didekati dan diajak berbicara oleh siapapun, sehingga memberikan akses publik yang luar biasa kepada dirinya (sebagai salah satu unsur yang mengurangi kesenjangan informasi dalam teori keagenan).
2	07.30	Ke Rumah Dinas. Mendapat kabar dan membaca liputan <i>Solopos</i> mengenai pernyataan Sukiyat tentang komponen Esemka yang ia klaim “mencomot” dari berbagai mobil yang sudah ada dan bukan membuat sendiri sebagaimana diketahui publik selama ini.	Kejadian ini memberikan indikasi bahwa pendekatan yang dilakukan Jokowi dengan pihak ketiga (1 Maret) tidaklah selalu seketika berakhir pada selarasnya kepentingan pihak ketiga tersebut dengan Jokowi.
3	08.10	Kembali keluar ke Jalan Slamet Riyadi. Menemui sekelompok warga, di antaranya anak-anak, yang memberikan dukungan terhadap Esemka, sambil membawa spanduk dan plakat bertuliskan dukungan. Duduk di pinggir jalan dan berbincang dengan mereka.	Meskipun ini adalah demonstrasi pertama dan satu-satunya yang disaksikan Peneliti selama periode penelitian, kegiatan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang pro-Esemka dan pro-Jokowi, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan dalam dialog <i>frontstage</i> . Namun dari sisi Jokowi, dalam hal ini ia sekali lagi menunjukkan citra-dirinya yang terbuka, siap menerima dan mendengarkan masyarakat.
4	08.25	<i>Door-stop interview</i> .	<i>Frontstage</i> Jokowi dengan wartawan.
5	08.30	Mendengarkan pengaduan beberapa warga, di antaranya mengenai salah satu jalan protokol yang berlubang. Memberi penjelasan bahwa jalan itu adalah milik propinsi, dan Pemkot telah terus menyurati pihak terkait di	<i>Frontstage</i> Jokowi dengan warga Solo. Melalui dialog, Jokowi mengedukasi warga mengenai apa yang menjadi wewenang Pemkot Solo, dan apa yang bukan, sehingga menimbulkan pemahaman kolektif, sekaligus membuka akses informasi bagi masyarakat.

		propinsi agar segera memperbaikinya.	
6	08.45	Kembali ke dalam Rumah Dinas. Menerima wartawan Vivanews.com dan fotografer untuk pemotretan foto-foto dalam rangka penulisan buku tentang Jokowi.	<i>Frontstage</i> Jokowi yang dilakukannya di lingkup <i>backstage</i> , mengaburkan batas antara keduanya.
7	09.30	Berganti busana memakai kaos bergambar musik metal. Melakukan beberapa pose untuk pemotretan sesuai dengan permintaan penulis di atas.	<i>Frontstage</i> Jokowi yang terlihat sebagai <i>backstage</i> Jokowi, karena ia melakukan hal yang santai dan tidak terbatas protokoler apapun.
8	09.45	Duduk di teras Rumah Dinas dan menerima <i>interview</i> beberapa wartawan.	<i>Frontstage</i> Jokowi dengan wartawan. Perpindahan dari lokasi <i>backstage</i> (lihat poin 6) ke <i>frontstage</i> dilakukan secara natural tanpa ada arahan dari protokol atau pihak-pihak lain.
9	11.30	Melakukan rapat internal dengan Wakil Walikota, mantan Dirjen SMK Kemdiknas, dan Direktur serta penasihat teknis PT Solo Manufaktur Kreasi (unit bisnis Esemka).	<i>Backstage</i> Jokowi dengan timnya.
10	13.00	Melakukan konferensi pers yang bertempat di ruang rapat Rumah Dinas, untuk membantah pemberitaan yang dikabarkan oleh <i>Solopos</i> , disertai presentasi dan bukti-bukti bahwa 80% komponen Esemka adalah benar-benar dibuat sendiri oleh unit-unit UKM dan dirakit oleh pelajar SMK. (Setelah menyampaikan kata pembukaan singkat, Jokowi tidak turut melakukan konferensi pers, namun memilih untuk duduk di kursi yang terletak di belakang ruangan; Konferensi pers terutama diisi oleh pernyataan dari PT Solo Manufaktur Kreasi).	<i>Frontstage</i> Jokowi dan tim dengan wartawan. Setelah menyampaikan kata pembukaan singkat, Jokowi tidak turut melakukan konferensi pers, namun memilih untuk duduk di kursi yang terletak di belakang ruangan yang tidak terliput kamera; Konferensi pers terutama diisi oleh pernyataan dari PT Solo Manufaktur Kreasi. Bagi Peneliti, hal ini sekali lagi mengindikasikan upayanya untuk meredusir sosok dirinya yang terbungkus <i>setting</i> walikota dan membatasi dirinya untuk menggunakan hal-hal tersebut di kala perlu. Dengan ini ia melakukan kontrol informasi, sekaligus membagi “panggung” dengan pihak-pihak lain.

11	13.30	Menjamu wartawan makan siang di Rumah Dinas.	
12	14.30	Melanjutkan rapat internal dengan Wakil Walikota, mantan Dirjen SMK Kemdiknas, dan Direktur serta penasihat teknis PT Solo Manufaktur Kreasi.	<i>Backstage</i> Jokowi dengan timnya.
13	19.30	Sedianya menghadiri Perayaan Hari Jadi Kerajaan Pajang, namun di saat-saat akan berangkat dibatalkan, karena Jokowi kelelahan.	-
14	19.45	Selesai.	-

Senin, 5 Maret 2012			
No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	07.30	Ke Balaikota. Mengecek surat-surat yang perlu ditandatangani.	<i>Backstage</i> Jokowi
2	07.50	Menuju ke sebuah Sekolah Dasar, mengecek perkembangan pembangunan pagar sekolah.	<i>Frontstage</i> Jokowi untuk mendapatkan informasi aktual di lapangan serta indikasi keinginannya untuk memotong birokratisasi komunikasi dengan melihat langsung.
3	07.55	Menuju Kelurahan Tegalrejo. Mengecek perkembangan pemugaran balai pertemuan di halaman depan kelurahan.	
4	08.10	Ke Rumah Dinas. Bertemu perwakilan Lembaga Kajian Opini Publik, yang meminta Jokowi untuk menulis satu halaman tentang revitalisasi pasar. Mempresentasikan <i>slideshow</i> tentang perubahan Solo di masa kepemimpinannya, dengan menekankan pada bagian perubahan yang terjadi pada pasar.	<i>Frontstage</i> Jokowi di tingkat nasional, karena berbicara dengan masyarakat di luar Solo.
5	09.30	Ke Universitas Sebelas Maret (UNS). Menyaksikan babak final Lomba Pemahaman Pancasila se-Kelurahan Solo, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi dan MetroTV. Turut menyerahkan	Di acara ini, Jokowi ditawarkan untuk memberikan kata sambutan, tapi ia menolak. Sedangkan pejabat lain yang hadir bersedia memberi kata sambutan. Penolakan Jokowi tersebut sekali lagi menjadi indikasi kemampuannya menjaga <i>setting</i>

		hadiah bagi para pemenang. <i>(Turut hadir di acara ini, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Awalnya Jokowi direncanakan bertemu empat mata dengan Mahfud MD sebelum acara ini berlangsung, namun karena kepadatan jadwal beliau, pertemuan dibatalkan.)</i>	walikota dan tidak tampil bilamana tidak perlu, meskipun itu berpeluang memberinya eksposur media. Selain itu, dari hal-hal semacam ini, diduga Jokowi memang tidak terlalu nyaman untuk harus berada di panggung, apabila tidak benar-benar menguasai substansi masalah.
6	11.40	<i>Door-stop interview.</i> Menerima permintaan foto informal dari mahasiswa.	<i>Frontstage</i> Jokowi yang menunjukkan dirinya mudah didekati siapapun.
7	12.20	Ke Balaikota. Menerima perwakilan Kementerian Luar Negeri, yang mengabarkan bahwa Solo kemungkinan akan menjadi salah satu kota yang akan diambil sebagai contoh bagi salah satu lembaga <i>rating</i> internasional.	<i>Frontstage</i> Jokowi yang terjadwal.
8	13.30	Hadir ke rapat umum direksi dan komisaris BUMD PPK Pedaringan (perusahaan pergudangan). Tidak memimpin rapat (rapat dipimpin oleh Kepala Dinas terkait). Memberikan satu masukan, agar Pedaringan turut mengawal anggaran pembangunan yang telah diajukan ke DPRD namun sampai saat rapat terselenggara masih belum disetujui juga.	<i>Backstage</i> Jokowi dengan jajaran birokrasi. Sekali lagi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam memimpin rapat, yang dilakukan dengan ia memberikan arahan secara singkat, cepat, dan langsung pada pokok permasalahan. Dalam kedua rapat semacam ini, ia tidak memimpin rapat, namun membiarkan Kadis terkait melakukan hal tersebut.
9	14.25	Rapat berlanjut menjadi rapat umum direksi dan komisaris BUMD Taman Satwa Jurug (kebun binatang dan tempat hiburan). Tidak memimpin rapat (rapat dipimpin oleh Kepala Dinas terkait). Tidak memberikan masukan.	
10	15.30	<i>Door-stop interview.</i>	<i>Frontstage</i> Jokowi dengan wartawan.
11	15.45	Kembali ke Rumah Dinas. Menanda-tangani surat-surat. Banyak menerima telepon dari berbagai tokoh nasional terkait	<i>Backstage</i> Jokowi.

		kemungkinan majunya Jokowi untuk calon Gubernur DKI Jakarta.	
12	19.00	Ke Balaikota. Hadir dalam acara serah-terima jabatan staf di Pemerintah Kota. Tidak memimpin acara, namun dipimpin oleh Sekretaris Daerah.	<i>Frontstage</i> Jokowi yang menunjukkan bahwa wewenang pelaksanaan administrasi kota Solo secara sehari-hari telah ia limpahkan kepada Sekretaris Daerah.
13	19.20	Selesai.	-

Selasa-Rabu, 6-7 Maret 2012

No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
<i>Catatan: Acara di periode ini sebagaimana diceritakan oleh Jokowi dan Ajudan, dan tidak diikuti secara langsung oleh Peneliti.</i>			
1	Sepanjang hari	Pada pagi hari terbang ke Jakarta. Berada di Jakarta antara lain untuk mengikuti <i>fit-and-proper test</i> di Kantor Pusat PDI-P selaku salah satu kandidat calon Gubernur dari PDI-P; Menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara UI Depok; Dan menjadi pembicara dalam acara <i>Leadership Networking</i> yang diadakan Pertamina.	Kesempatannya di Jakarta kali ini dipenuhi dengan kegiatan <i>frontstage</i> karena tingginya minat media dan audiens nasional saat itu untuk meliput sosok Jokowi dan mengetahui keikut-sertaannya di Pilkada DKI Jakarta 2012. Hal ini dinyatakan langsung oleh wartawan pada Jokowi sebagaimana disampaikan pada Peneliti, bahwa Jokowi kerap diburu oleh media karena terbukti <i>rating</i> -nya yang demikian tinggi.

Kamis, 8 Maret 2012

No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	07.00	Mendarat di Solo, dan ke Rumah Dinas.	-
2	08.30	Ke Balaikota. Mengecek surat-surat yang perlu ditandatangani.	<i>Backstage</i> Jokowi.
3	08.55	Berkeliling di kawasan Balaikota. Menuju bagian tempat pengurusan ijin. Berbincang dengan masyarakat yang sedang mengantri, khususnya menanyakan apakah ada hambatan dan keterlambatan	Kejadian pengecekan di <i>frontstage</i> yang konsisten dengan keinginan Jokowi untuk memastikan semua mekanisme kerja di lapangan berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, ini merupakan <i>frontstage</i> Jokowi untuk berinteraksi dengan warga terkait proses pembuatan

		dalam pengurusan dokumen dan perijinan, sambil melihat dokumen dan surat-surat yang dipegang pengantri. Ikut duduk di antara pengantri. Membagi-bagikan beras.	perijinan, dan di saat yang sama, menunjukkan kepeduliannya pada isu-isu semacam ini di depan warga tersebut.
4	09.25	Kembali ke Kantor Walikota. Menerima Kepala Dinas Pertamanan, yang melaporkan perkembangan kerjasama dengan Bank BNI untuk pembuatan Hutan Solo, dan adanya perbedaan persepsi antara Pemkot dan pihak BNI terkait pemasangan iklan BNI di Hutan Solo. Memberi instruksi agar Pemkot untuk tetap tegas berada dalam koridor peraturan CSR yang ada dalam menyikapi perbedaan tersebut, agar terhindar dari kemungkinan tuduhan korupsi di kemudian hari.	<i>Backstage</i> Jokowi dengan stafnya. Peneliti mendapati indikasi bahwa meskipun terkadang terlihat melakukan manajemen yang sangat mikro, Jokowi tetap memberikan ruang keleluasaan pada bawahannya untuk berkreasi serta memberinya masukan.
5	09.35	Dalam perjalanan ke Rumah Dinas, menelpon Wakil Walikota dan membagi-bagi peran dan tugas hari itu. Setiba di Rumah Dinas, masih banyak menerima telpon.	<i>Backstage</i> Jokowi.
6	10.30	Menanda-tangani surat.	<i>Backstage</i> Jokowi.
7	10.45	Menerima rombongan Paguyuban LSM Bogor di bawah pimpinan Bima Arya Sugiarto. Mempresentasikan <i>slideshow</i> tentang perubahan Solo di masa kepemimpinannya, dengan fokus diskusi pada upaya menertibkan anggaran Kota Solo.	<i>Frontstage</i> Jokowi di tingkat nasional, karena berbicara dengan masyarakat di luar Solo.
8	12.20	Menerima rombongan mahasiswa perwakilan penyelenggara acara investasi di Belanda, yang siap membantu menghubungkan Solo dengan pihak investor di Belanda. Menyatakan bahwa	<i>Frontstage</i> Jokowi di tingkat nasional, karena berbicara dengan masyarakat di luar Solo.

		sebaiknya mahasiswa tersebut datang dengan hal yang lebih konkrit, kemudian menawarkannya kepada pihak Solo.	
9	12.40	<i>Door-stop interview.</i>	<i>Frontstage</i> Jokowi dengan wartawan.

Jumat, 9 Maret 2012			
No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	06.45	Ke Pelataran Stadion Manahan. Berkeliling stadion untuk melihat pertumbuhan beberapa pohon. Berdiskusi dengan beberapa warga yang sedang berolah-raga pagi.	<i>Frontstage</i> Jokowi yang terjadwal, namun ia memasukkan unsur spontanitas di dalamnya.
2	07.40	Hadir di apel kerja bakti staf Pemkot di Pelataran Stadion Manahan. Tidak memimpin apel, tapi diserahkan kepada Sekretaris Daerah.	<i>Frontstage</i> Jokowi yang juga mengindikasikan bahwa wewenang pelaksanaan administrasi kota Solo telah ia limpahkan kepada Sekretaris Daerah.
3	07.50	Masuk ke dalam Stadion. Menyaksikan pertandingan sepakbola persahabatan antara tim sepakbola Pemkot melawan tim Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Solo (di tim Pemkot, turut bermain Wakil Walikota). Sarapan bersama staf di pinggir Stadion.	<i>Frontstage</i> sekaligus <i>Backstage</i> santai Jokowi, karena meskipun di sini terdapat wartawan, ia juga dapat bersantai dan berkomunikasi baik dengan staf maupun wartawan secara terbuka. Indikasi pengaburan antara <i>frontstage</i> dan <i>backstage</i> .
4	08.40	Ke Rumah Dinas, berganti busana.	<i>Backstage</i> Jokowi.
5	09.10	Ke Balaikota. Menerima direktur eksekutif perusahaan Element dari Padang, yang memberikan dukungan dan berkomitmen untuk membeli mobil Esemka untuk perusahaannya, serta mengundang untuk hadir ke Padang dan berbicara pada pelajar SMK. Memanggil ajudan untuk langsung mengatur jadwalnya.	<i>Frontstage</i> Jokowi di tingkat nasional, karena berbicara dengan masyarakat di luar Solo. Peneliti mengamati bahwa dukungan dari berbagai kalangan lintas provinsi kepada Esemka semakin banyak, memberikan sinyalemen keberhasilan strategi pemasaran Jokowi dan Pemkot Solo terhadap produk tersebut.
6	09.35	Menerima perwakilan Kantor Pelayanan Pajak Solo, yang	<i>Frontstage</i> Jokowi sekaligus <i>backstage</i> karena merupakan

		meminta Jokowi untuk menyerahkan SPT beliau secara simbolis dan melakukan konferensi pers di Kantor Pajak Solo pada hari Senin, 12 Maret (<i>Penulis mengetahui bahwa undangan formal telah diterima Jokowi sebelum pertemuan ini</i>).	persiapan bagi kegiatan <i>frontstage</i> lainnya.
7	09.45	Menerima perwakilan siswa Pesantren As-salam Putri, yang meminta Jokowi untuk hadir di pesantren mereka dan memberikan motivasi kepada para siswa. Memanggil ajudan untuk langsung mengatur jadwalnya, dan menginstruksikan agar juga menyiapkan prototipe Esemka untuk dibawa ke Pesantren.	<i>Frontstage</i> Jokowi dengan masyarakat Solo. Indikasi bahwa Jokowi melayani seluruh permintaan bertemu dengannya, termasuk permintaan yang kecil-kecil semacam ini, yang menurut hemat Peneliti sebenarnya tidak perlu ke walikota namun cukup kepada Sekda ataupun Kadis terkait. Di sisi lain, ini merupakan bentuk pemotongan jalur birokrasi yang dilakukan Jokowi.
8	10.00	<i>Door-stop interview</i> .	<i>Frontstage</i> Jokowi dengan wartawan.
9	10.45	Ke Rumah Dinas. Menerima perwakilan dari <i>Jakarta Post</i> , yang memperkenalkan sekaligus mengajukan tawaran kerjasama dengan Pemkot Solo untuk menyelenggarakan program membaca koran bahasa Inggris di sekolah dasar di Solo. Menyetujui secara lisan, dan meminta agar <i>Jakarta Post</i> datang lagi ke Solo minggu depan agar dapat langsung dipertemukan dengan Kepala Dinas Pendidikan.	<i>Frontstage</i> Jokowi di tingkat nasional, karena berbicara dengan masyarakat di luar Solo. Peneliti mengamati bahwa selain dukungan Esemka, banyak pula ketertarikan unsur-unsur nasional untuk melakukan berbagai aktivitas atau kerjasama, atau menjadikan Solo sebagai tempat percontohan dan sebagainya. Hal ini memberi indikasi keberhasilan strategi pemasaran kota Solo.
10	12.15	Solat Jumat.	<i>Backstage</i> Jokowi yang sesekali menjadi <i>frontstage</i> karena ia berbincang dengan warga.
11	12.35	Menerima dan berdiskusi informal kehadiran seorang perawat kuda milik Pemkot Solo.	Diskusi dilakukan di <i>backstage</i> Jokowi.
12	13.10	Menerima perwakilan TransTV, yang hendak melakukan wawancara tentang	<i>Frontstage</i> JoKowi dengan wartawan. Peneliti melihat Jokowi sangat fleksibel dan debirokratis

		<p><i>sister city</i>. Memberitahukan bahwa Solo telah mundur dari program <i>sister city</i> (dan menjadi kota pertama yang melakukannya), karena tidak dapat merasakan manfaatnya. TransTV kemudian melakukan wawancara tanya-jawab untuk hal-hal yang ringan, untuk dimasukkan di salah satu acara <i>infotainment</i> TransTV (antara lain, mengenai historis kelahiran kota Solo, kelahiran grup lawak Srimulat di Solo, dan mobil pertama di Indonesia yang dimiliki oleh salah seorang raja Keraton Surakarta).</p>	<p>dalam menghadapi jurnalis, karena wartawan dapat dengan bebas memintanya melakukan apa saja tanpa perlu terhambat protokol.</p>
13	15.15	<p>Menerima kehadiran Dubes Jerman, yang menindak-lanjuti tawaran kerjasama Pemerintah Jerman untuk proyek Esemka, serta mengundang Jokowi untuk hadir sebagai pembicara di Jerman.</p>	<p><i>Frontstage</i> Jokowi di tingkat nasional, karena berbicara dengan masyarakat di luar Solo.</p>
14	16.30	<p>Dialog informal tertutup dengan jurnalis senior Jawa Pos (<i>Tidak diikuti oleh Peneliti</i>).</p>	<p><i>Frontstage</i> yang telah terkaburkan dengan <i>backstage</i> Jokowi.</p>
15	19.30	<p>Dialog informal dengan Bapak X dan Bapak Y (<i>nama disamarkan karena sensitivitas isu saat tesis ini sedang dituliskan</i>).</p>	<p>Backstage Jokowi. Menurut informasi yang didapat Peneliti, kedua figut tersebut adalah adalah sahabat pribadi Jokowi yang dikenal dan membantunya sejak Pilkada Solo 2005. Peneliti mendapati indikasi bahwa mereka berdua seringkali bertindak sebagai rekanan (<i>shill</i>) yang menyebarkan informasi tentang Jokowi kepada publik secara informal, agar kegiatan-kegiatan Jokowi dapat diantisipasi (misalnya oleh wartawan) namun tetap terasakan unsur spontanitasnya.</p>
16	10.45	<p>Selesai.</p>	

Sabtu, 10 Maret 2012			
No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	08.00	Menerima direktur PT Solo Manufaktur Kreasi dan beberapa ahli otomotif. Bertukar pikiran mengenai aspek dan tahapan pembangunan industri otomotif yang baik.	<i>Backstage</i> Jokowi.
2	10.00	Menerima perwakilan TransTV, yang melaporkan persiapan acara Opera van Java live yang akan diadakan di Stadion Sriwedari Solo. Mengutarakan kekhawatiran mengenai jumlah penonton yang membengkak, melebihi kapasitas stadion. Mengusulkan kemungkinan dibagikannya tanda masuk secara gratis, namun menyerahkan keputusan akhir dan teknisnya kepada pihak TransTV. Menyatakan tidak akan ikut main di Panggung, namun bersedia dihampiri kamera dan diwawancara secara <i>impromptu</i> saat sedang berkeliling di tengah masyarakat.	<i>Frontstage</i> Jokowi yang sekaligus merupakan <i>backstage</i> karena persiapan dari acara lain. Nampak indikasi bahwa Jokowi memberi perhatian bahkan terhadap hal-hal teknis mengenai jalannya acara. Selain itu ia juga menolak untuk tampil dalam OVJ meskipun ditawarkan, dan juga menolak untuk duduk permanen di bangku VIP. Namun akhirnya ia sepekat untuk dapat ditampilkan, saat ia sedang berada di tengah kerumunan masyarakat. Hal ini dilihat Peneliti sebagai salah satu bentuk kontrol informasi yang dilakukan Jokowi.
3	11.00	Ke Yogyakarta (<i>Acara pribadi, yaitu menjemput anak yang baru tiba dari Singapura, tidak diikuti langsung oleh Peneliti</i>).	<i>Backstage</i> Jokowi.
4	12.45	Secara spontan (dalam perjalanan pulang dari Yogyakarta) mengunjungi rumah Sukiyat (<i>sebagaimana diceritakan oleh Ajudan kepada Peneliti</i>).	Ini menjadi upaya lanjutan Jokowi (setelah pertemuan terakhir 1 Maret) untuk terus menjalin hubungan dengan pihak-pihak ketiga yang berseberangan dengan dirinya.
5	15.50	Ke Rumah Dinas. Wawancara rekaman untuk MetroTV mengenai kemungkinan Jokowi maju di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.	<i>Frontstage</i> Jokowi dengan wartawan.
6	16.10	Diskusi informal <i>off-the-record</i> dengan wartawan	Jokowi berbincang dengan wartawan dengan sangat santai,

		Metro TV.	sambil mengangkat kaki, dan menyebabkan terkaburnya batasan antara <i>frontstage</i> dan <i>backstage</i> Jokowi.
7	16.30	Wawancara dengan koran <i>Sindo</i> dan portal berita <i>Okezone</i> , khususnya terkait pernyataan Gubernur DKI Fauzi Bowo tentang “Orang daerah sebaiknya tidak usah ke Jakarta.” Setelah meminta waktu untuk memikirkan jawabannya, kemudian menyatakan bahwa “Janganlah merendahkan orang daerah. Jakarta juga milik rakyat Indonesia.”	Kekaburan antara <i>frontstage</i> dan <i>backstage</i> Jokowi masih berlanjut hingga saat ini. Dengan mengaburkan batasan antara keduanya, Jokowi memberikan indikasi bahwa sosok yang dilihat publik dan media di <i>frontstage</i> adalah sosok yang sama dengan yang berada di belakang <i>backstage</i> , sehingga membangun citra-diri yang konsisten, dan oleh karenanya berpotensi untuk membangkitkan kepercayaan publik pada dirinya.
8	17.00	Diskusi informal <i>off-the-record</i> dengan wartawan <i>Sindo</i> dan <i>Okezone</i> .	
9	18.00	Istirahat dan makan malam.	<i>Backstage</i> Jokowi.
10	22.00	Menerima beberapa tamu secara empat mata, antara lain politisi PDIP Aria Bima (<i>tidak diikuti langsung oleh Peneliti, namun sebagaimana diceritakan oleh Ajudan</i>).	<i>Frontstage</i> sekaligus <i>backstage</i> bagi Jokowi.
11	01.00	Selesai.	-

Minggu, 11 Maret 2012			
No	Waktu	Kegiatan	Catatan dan Analisis Peneliti
1	07.00	Berkeliling dengan sepeda di Car-Free Day. Meluncurkan mobil donor darah sumbangan PMI Pusat kepada PMI Solo. Berfoto bersama simpatisan kampanye “2012 Earth Hour.” Ikut menanda-tangani spanduk besar “Ke mana sebaiknya Pak Jokowi berlabuh” yang menunjukkan bahwa sebagian besar penanda-tangan, termasuk Jokowi sendiri, menginginkan ia tetap memimpin Solo. Berbincang dan berfoto bersama masyarakat. Melakukan <i>door-</i>	Masih tetap konsisten dengan kegiatan Car-Free Day sebelumnya, ini merupakan salah satu <i>frontstage</i> Jokowi yang relatif paling terbuka, karena audiens bisa siapa saja, muncul dari mana saja, dan dapat membawa permasalahan apa saja. Peneliti melihat bahwa Jokowi melayani setiap permintaan dari siapapun, termasuk permintaan berfoto yang demikian banyak dan termasuk tidak lazim untuk ukuran seorang walikota. Selain itu, di momen ini Peneliti menyaksikan betapa terbukanya Jokowi untuk didekati dan diajak berbicara oleh

		<i>stop interview</i> dengan beberapa wartawan.	siapapun, sehingga memberikan akses publik yang luar biasa kepada dirinya (sebagai salah satu unsur yang mengurangi kesenjangan informasi dalam teori keagenan).
2	08.55	Kembali ke Rumah Dinas, kemudian keluar lagi ke Jalan Slamet Riyadi di depan Rumah Dinas untuk berbincang dengan masyarakat yang sedang ramai di Car-Free Day, termasuk dengan Kepala Dinas Perhubungan yang kebetulan sedang melintas di halaman.	
3	09.05	Melakukan <i>door-stop interview</i> dengan beberapa wartawan.	<i>Frontstage</i> Jokowi dengan wartawan.
4	09.15	Menerima rombongan yang dipimpin oleh Mooryati Soedibyo terkait proses rekonsiliasi dua kubu raja di Keraton Surakarta. Menyatakan bahwa Pemkot sudah berupaya sebisa mungkin dan akan terus membantu, namun perlu peran aktif dari kedua pihak yang berselisih di Keraton Surakarta.	<i>Frontstage</i> Jokowi yang merangkap menjadi <i>backstage</i> karena di sini Jokowi melakukan negosiasi dengan Mooryati, namun juga berstrategi untuk menghadapi berbagai tekanan yang mungkin muncul saat proses pendamaian dua raja.
5	12.00	Menghadiri acara arisan keluarga besar istri Jokowi.	<i>Backstage</i> Jokowi.
6	15.00	Ke Rumah Dinas. Beristirahat.	<i>Backstage</i> Jokowi.
7	16.00	Menerima Iwan Piliang dan seorang kader senior PDI-P, yang menawarkan bantuan untuk mendorong proyek Esemka di tingkat Kementerian. Menerima bantuan kader senior tersebut. Berdiskusi mengenai peluang Jokowi sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. <i>(Di tengah diskusi, direktur PT Solo Manufaktur Kreasi turut bergabung).</i> <i>(Beberapa kali Jokowi harus keluar dari ruangan untuk menerima telepon yang disinyalir terkait tarik-ulur pencalonan dirinya sebagai calon gubernur DKI Jakarta</i>	<i>Frontstage</i> dan sekaligus <i>backstage</i> Jokowi, karena di sini ia juga berbincang mengenai berbagai peluang strategi pemenangan apabila memang benar akan maju ke Pilkada DKI Jakarta 2012.

		<i>dari PDI-P).</i>	
8	20.30	Ke Taman Balekambang (bersama dengan tamu-tamu di atas). Menyaksikan pagelaran wayang orang perdana di <i>outdoor amphiteater</i> Balekambang yang gratis dan dibuka untuk umum. Duduk di bagian belakang amphiteater. Selesai acara, memberikan masukan secara langsung kepada Kepala Dinas Pariwisata mengenai hal-hal yang dapat dibenahi terkait penyelenggaraan pagelaran wayang orang tersebut, termasuk promosi yang lebih gencar.	Jokowi memilih untuk tidak duduk di bagian depan tengah, yaitu di area yang telah dipersiapkan untuknya dengan minuman dan makanan ringan. Namun ia memilih untuk berkeliling, dimulai dengan duduk di samping, lalu duduk di belakang. Peneliti menangkap sinyalemen ini sebagai indikasi figur Jokowi yang tidak terlalu suka dengan posisi formal dan <i>setting</i> kewalikotaan yang dianggapnya tidak perlu.
9	21.10	Dalam perjalanan ke mobil, singgah di warung makanan di sebelah <i>amphiteater</i> . Bertanya mengenai jumlah pengunjung warung.	<i>Frontstage</i> Jokowi secara spontan dengan warga.
10	21.20	Ke Warung Pak Doel (bersama tamu-tamu di atas) untuk makan malam.	<i>Frontstage</i> Jokowi yang menunjukkan sinyalemen keberpihakan Jokowi kepada masyarakat dan pedagang kecil.
11	22.45	Kembali ke Rumah Dinas. Selesai.	-

* * *

LAMPIRAN 2**TRANSKRIP WAWANCARA JOKOWI**

Catatan: Transkrip ini ditulis berdasarkan wawancara yang tidak berstruktur, atau wawancara tak berencana namun selalu terpusat pada satu pokok masalah tertentu (Idrus, 2009:104). Oleh karena itu, transkrip disusun dengan diberikan indikasi-indikasi sebagai berikut:

Indikasi	Penjelasan
Ditebalkan dan digaris bawah	<i>Menandakan waktu terjadinya wawancara</i>
Ditebalkan	<i>Menandakan pertanyaan Peneliti kepada Jokowi</i>
Ditebalkan dan dimiringkan	<i>Menandakan tema dari pernyataan Jokowi sebagai bagian dari perbincangannya dengan Peneliti; Indikasi diberikan untuk menghadirkan konteks perbincangan yang tidak terungkap secara verbal.</i>
Normal	<i>Menandakan jawaban Jokowi.</i>
(Normal dalam kurung)	<i>Menandakan kata atau frase tambahan dari Peneliti untuk mempermudah pemahaman terhadap pernyataan Jokowi dan menghilangkan ambiguitas.</i>
[Normal dalam kurung siku]	<i>Menandakan penjelasan Peneliti terhadap situasi, kata atau kalimat yang dipaparkan Jokowi, untuk menghilangkan ambiguitas.</i>

13 Februari 2012

Ke mana kita ini Pak?

Dolan-dolan [main-main – Pen.] aja, hehehe... . Saya di kantor paling setengah (sampai) satu jam... paling lama. Kalau nggak ada hal-hal yang sangat penting, (seperti) rapat (atau) apa...

Yang memutuskan hari ini Bapak ke mana siapa?

Jadwal saya ada di sini [menunjukkan komputer tabletnya – Pen]. Tapi setelah dijadwal, kalau kira-kira (saya) ada agenda lain, bisa saya delegasikan. Karena yang saya butuhkan adalah mendekati persoalan, mendekati *problem*, mendekati masalah yang ada di masyarakat. Kalau masalah administrasi, sudah saya delegasikan ke kepala dinas, ke Sekda.

Pengetahuan sebelumnya terhadap ada masalah

Saya sudah lihat, itu tembok *dioret-oret*, mau saya minta untuk dicat. Terus nanti dibantu jaga Satpol supaya nggak dicoret-coret.

Strategi menyelesaikan masalah

Dialog lapangan untuk menyelesaikan masalah. Kontinuitas dialog terhadap sebuah problem itu penting sekali untuk mendapatkan sebuah kesepakatan. Dan kesepakatan yang kita hasilkan harus *win-win*: kotanya jadi lebih baik, tapi mereka juga nggak merasa dirugikan. Itu yang penting.

Yang sering kita lakukan kan hanya dialog formal, ya kan? (Bagi kita,) pokoknya sudah (dialog). Padahal bukan itu. Proses dialog kan macam-macam. Kadang-kadang ada pendekatan kelompok. (Apabila kemudian) masih ada yang vokal, (maka) ada pendekatan individu dan pribadi. Itu yang jarang dilakukan oleh pemimpin kita.

Kadang denger (ada masalah) dari SMS atau dari Twitter, ya langsung (saya) cek (ke) lapangan, (atau misalnya) telpon Kepala PU [Pekerjaan Umum – Pen.], ‘Coba sini dirampungin.’ Nah masyarakat mengerti bahwa kita merespon. Kita datang saja mereka sudah seneng, meskipun masalahnya belum diselesaikan, he... he...

Sekarang yang kita kehilangan itu apa? (Kita kehilangan) pemimpin yang bertindak di lapangan. Yang banyak sekali kan yang (ber-)wacana, (ber-)retorika. Ya pusing... (Seharusnya) tanya (rakyat) masalahnya apa, selesaikan (dengan cara men-)datangi, (lalu me-)rampungkan. Yang dibutuhkan rakyat (adalah) itu.

“Kepala daerah itu (kalau berpergian) ke mana-mana, di depan (mobilnya) pasti ada Patwal [motor patroli pengawalan – Pen.], di belakangnya ada kepala dinas ikut (mengiringi dengan) 20 mobil... Saya tujuh tahun jadi walikota nggak pernah (melakukan hal) kayak gitu. Semau saya aja, kalau pas ada hal yang penting, (dan) perlu protokol, ya oke. Tapi kalau enggak (perlu), ya enggak (pakai protokol), ngapain.”

Pendekatan lapangan itu yang (saat ini) kurang sekali. Saya nggak ngerti, kenapa ya *decision* itu selalu di belakang meja. Mestinya, pimpinan apapun, entah daerah, provinsi, negara, itu menguasai masalah lapangan. Menguasai problem lapangan. Punya peta lapangan. Kemudian, database lapangan komplit. (Setelah) itu baru membuat sebuah design policy.

(Saat ini) sering kelirunya karena (informasi didapat) hanya (dari) ‘denger-denger...’ Denger-denger dari bawahan, ya kan? Tapi nggak lihat sendiri (ke lapangan). Naah, (begitu) bawahannya ABS [Asal Bapak Senang – Pen.], wah, langsung keliru *decision*-nya...

Bagaimana mengubah sistem yang begitu kompleks?

Ya satu persatu Mas. Sistem itu disiapkan, dimasukkan ke Balaikota, paksa. Dinas kita paksa ikuti, kalau enggak, copot dan ganti, gitu aja. Simpel-simpel aja.

Komentar tentang situasi pemerintahan saat ini

Kebanyakan rapat aja itu di Jakarta... *ropat* rapat *ropat* rapat, gitu aja... Lapangannya nggak terkuasai, keliatan kok.

Bapak rapat berapa kali seminggu?

Nggak pernah. Saya kalau nggak ada yang sangat penting, nggak saya kumpulin. Nggak mau saya. Sehingga omongan kita diperhatikan, karena memang kita nggak (terjebak) rutinitas, masalah-masalah kecil dirapatkan... Nggak perlu. Telpon aja, you selesaikan ini, ada masalah ini, di kampung ini, di jalan ini. Sudah. Rapat itu kalau ada problem besar, perlu ada koordinasi dengan sekian orang dinas, baru dirapatkan.

Nggak kayak yang sekarang, kita punya pimpinan, kok rapaaat aja. Jadi kebanyakan perintah. Kalau kebanyakan perintah, lha rapat yang dua hari yang lalu aja belum dikerjakan, sudah rapat lagi dan perintah lagi. Dalam ilmu manajemen, nggak bener seperti itu.

Komunikasi dengan masyarakat. Problemnya kan sederhana: komunikasi. Kalau ada persoalan, mereka pasti ngomong sama saya, Pak di kampung ada begini, anak saya begini... Itu kalau ada masalah. Kalau tidak, terima beras jadi seneng, hehehe... Artinya kalau ketemu saya pasti seneng, karena bisa menyelesaikan masalah, dan yang kedua, ada beras, hehehe... Tugas kita memang itu, nyenengin rakyat.

Di dalam mobil, Devid melapor tentang lokasi Kantor Pelayanan KTP dan Akte di Balaikota yang terdapat di Lantai 2, dan ternyata memakan korban: seorang ibu lanjut usia terjatuh ketika menaiki tangga. Devid mengusulkan agar lokasinya dipindahkan ke Lantai 1.

Iya, iya, iya. Setuju saya. Telpon Pak Sekda sekarang. Saya dulu sudah tidak (setuju). Pelayanan di lantai 2 itu gimana. Yang muda-muda nggak apa-apa, kalau yang tua-tua gimana. Meskipun nggak tinggi, tapi kalau *sepuh* [tua – Pen.] kan repot.

Pernah menerima resistensi dari bawahan?

Dulu waktu awal-awal, tahun-tahun pertama. Dulu waktu KTP dari 2-3 minggu ke 1 jam. Dulu ijin-ijin yang dari 6-8 bulan jadi 6 hari. Ya tahun pertama, biasa. Saya di PTUN-kan tujuh kali, karena orang-orang saya copot, ya nggak papa. Menang terus, hehehe... Resiko sebuah keputusan mesti ada.

Tapi ketika alasan keterlambatan karena ‘obyekan’ ?

Iya, yang dulu itu karena orang akan ngamplopin kan. Yang ngamplopin banyak ya seminggu, yang sedang 2 minggu, yang sedikit 3 minggu. Kalau dibuat 1 jam, kan jadi nggak ada amplopnnya. Itu yang namanya memperbaiki sistem, sehingga yang namanya pungutan jadi hilang. Sekarang ijin-ijin, kalau dulu 6 bulan, 8 bulan, sekarang hanya 6 hari jadi. Untuk apa harus bayar sampai jutaan? Ya kan? Ya sudah, rampung. Nha tapi kan mesti ada yang ‘kehilangan kue’ kan, resistensi mestinya ada di situ, (yang) ruwet-ruwet... (tinggal) dicopot, ganti, ya sudah gitu aja.

Tapi setelah tahun kedua, birokrasi ndukung semua. Birokrasi kita itu pinter-pinter, dan sebetulnya kalau manajemen organisasi yang kita bangun itu baik,

mereka juga mau kok, dan mereka juga bisa melakukan dengan kecepatan berapapun. Bisa. Saya optimis, pasti mereka bisa.

Jadi selama ini, sistemnya tidak baik, kemudian manajemen organisasi di dalam kepemimpinan itu tidak bagus. Hanya itu saja. Nah, yang disalahkan PNS-nya, padahal *endak*.

Dulu bank-bank pemerintah tahun 80-an, kalau pulang jam 1, jam 2. Sekarang, sampai malam, dan nggak kalah sama yang swasta kan? Malah bisa lebih bagus, untungnya lebih bagus, kerjanya lebih bagus, pelayanannya lebih bagus. *Wong pinter-pinter*.

Birokrasi kan sama. Kasusnya kan sama. Dulu sistemnya di bank pemerintah kan dirombak total, dan bisa. Itu yang saya jadikan (acuan), di situ. Semua, sistem diperbaiki, tingkat kesejahteraan, meskipun tidak harus maksimal. Ada insentif-insentif, kemudian manajemen organisasinya dibenahi total. Bisa.

Sekarang juga sudah bisa dibenahi, dengan e-Gov. Tapi kenapa orang nggak mau masuk e-Gov, karena masalah kue. Kalau orang masuk e-Gov, kuenya hilang semua. (Padahal) itu memperbaiki sistem, dan cara menghilangkan kue adalah dengan itu. Mudah, asal sabar aja.

Bagaimana memastikan sistem itu langgeng?

Sistem itu harus dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Kemudian masyarakat pegang sistem itu. Misalnya kayak kesehatan, masyarakat pegang kartunya. Kemudian kayak KTP 1 jam, nggak mungkin nanti dikembalikan lagi ke sebelumnya. Kalau lebih cepat iya.. kalau lebih lambat, wah, masyarakat bisa geger. Jadi mau tidak mau harus ditingkatkan, kalau tidak dihajar masyarakat, hehe... . Sehingga standar kualitas sebuah pelayanan harus dihadirkan. (Inilah) kenapa Puskesmas sekarang kita (standar) ISO semua, karena itulah standar pelayanan. Dari 17 Puskesmas, sudah 13 yang punya ISO. Bandingin saja dengan Puskesmas di kota lain, terlihat. Pelayanan publiknya, kan sudah di-cek TII kemaren, kita juaranya kan, walaupun nilainya hanya 6,08. (Itupun) sudah juara! Lainnya nilainya 2, 1, haduuh, hehehe... Bank Dunia kita juga juara untuk memulai bisnis. Itu lembaga kredibel dan independen lah. Kalau pemerintah pusat saja sudah tiap hari kita, tapi nggak bisa dijadikan (ukuran) lah. Kan pelayanan itu tidak hanya KTP dan ijin, (tapi juga) pelayanan kepada PKL, pelayanan kepada pedagang di pasar, itu pelayanan juga. Pendidikan juga pelayanan.

Ini contohnya, Pasar Burung. Rencananya akan dirombak, jadi pasar sekaligus menjadi taman. Sudah berapa tahun ini... Empat puluh tahun didiemin aja. Saya makanya senengnya kontrol semacam ini, karena kalau ada masalah, langsung kelihatan. Tempat barunya gratis, semua pasar di sini gratis, makanya nggak pernah rame di sini. Di tempat lain disuruh mbayar, lha gimana, orang sedang *enak-enak* jualan disuruh *mbayar*, gimana nggak ngamuk?

Mengecek tempat pembibitan taman Solo

Begini ini kalau kita tidak kontrol, tiap tiga hari, seminggu, beda hasilnya. PNS itu kan semuanya harus merasa *on*. Pagi-pagi didatengi ke kelurahan, harus

merasa *on* dan tidak berani *off* karena akan dicek, dan pada titik yang tidak diketahui.

Fungsi saya di sini adalah manajemen kontroling. Setelah perencanaan rampung, fungsi saya adalah manajemen kontrol, termasuk (kontrol) kepala dinasnya dan bawahannya.

Tadinya tempat ini hutan kota. Dijadikan hunian liar selama 40 tahun. Padahal ini sumbernya premanismelah, prostitusilah. Maka saya ajak ngomong: ketemu, ngomong, ketemu, ngomong. Saya pindahkan ke Solo Utara. Di sana dibangun rumah, yaa, tanah 60 meterlah, rumahnya tipe 29. Tanah itu jadi hak milik mereka, (itu namanya) diberi solusi. Mereka mau pindah karena ada solusi, ada negosiasi dan kompromi. Kalo enggak cuma digusur aja, berantem, geger sudah, *wong* berpuluh-puluh tahun di sini.

Komunikasi semacam itu yang dibangun: komunikasi lapangan. Dialog lapangan. Bukan mereka disuruh ke Balaikota, terus diberi pengarahan, waah, enggak bisa. Harus yang *equal* aja. Kita harus mendudukan diri kita.

Berarti Pemda rugi tanah dong, karena tanahnya diberikan ke masyarakat?

Ya enggak papa, he he he... Tugasnya pemerintah itu... Kalau ada tanah di Solo ini, kalau masih dan fungsinya tidak jelas, saya berikan ke rakyat saya, kenapa tidak? Fungsi Pemerintah itu dalam Undang-undang 45, yang ketiga itu kesejahteraan umum... untuk masyarakat. Lha fungsi kita itu. Mestinya negara kan bisa me-reform agraria ini. Lha *wong* negara sekaya raya ini kok masih ada yang miskin. Berikan kalau masih punya.

(Kepada wartawan di kesempatan lain: Yang namanya pemerintah itu enggak ada untung dan rugi. Semakin untuk pelayanan ke masyarakat lebih baik, silakan. Orientasinya ke sana.)

Di Jakarta pernah ada program rumah susun...

Lha tapi kalau tempatnya enggak bener? Gimana itu di Jakarta, banyak yang *mangkrak* [terbengkalai – Pen.]. Karena apa? Rakyat enggak ditanya, ‘mau pindah di mana?’ Kalau di sini, (dibangun) rusun pasti antri, karena sudah saya tanya dulu (sebelumnya). ‘Ayo pindah, di sini mau kita hijaukan, pindah ke rusun?’ ‘Di mana Pak?’ ‘Di sana.’ ‘Wah jangan di sana Pak, di sini aja.’ ‘Ooo jangan, di situ aja kalau gitu.’ Naah, ketemu kompromi di situ. Ada kompromi dan sepakat, sepakat yang win-win.

Ini karena realitas usaha masyarakat kan ada yang di kayak-kayak gini [sambil menunjuk orang-orang di pasar burung – Pen.], tapi enggak pernah diperhatikan. Iya enggak? Usaha rakyat itu ada di sini, rakyat kecil. Coba diperbaiki, yang bersih, yang bagus, nanti kan usahanya lebih bagus. Tapi hampir semua pasar seperti ini. Di sini enggak cukup, akhirnya bertebaran ke jalan, nah itu kan mulainya PKL itu di situ. Lha usaha kecil itu mulainya di mana, kalau ruangnya tidak kita beri? Solusinya ya dari pemerintah. Kalau pemerintah tidak punya tanah, ya beli, lalu berikan pada mereka. Jangan ada alasan tidak punya tanah, hehehe... Punya APBD, punya APBN.

Saya itu selalu diberi persoalan-persoalan seperti ini, warisan-warisan nggak jelas. Nih coba lihat kayak gini [menunjuk para pedagang pinggir jalan yang berada tepat di depan sebuah sekolah dasar – Pen.]. Padahal faktanya usaha rakyat ada di sini, tidak di mall, tidak di hypermart. Ini fakta. Ya mestinya anggaran-anggaran kita itu masuknya ke yang kayak gini. Kadang-kadang kita ini ‘ketinggian,’ teoritis.

Komunikasi-komunikasi publik seperti itu yang terus terang saya kuasai. PKL dipindahin, rumah liar dipindahin, rumah kumuh kita pindahin, pasar tidak pernah ada masalah, karena apa? Lewat sebuah proses dialog, proses negosiasi, setelah sepakat baru (dipindahkan).

Resistensi dari orang-orang yang mengambil keuntungan dari *status quo*?

Lha itu nyatanya bisa. Nyatanya mau dan pindah. Saat pindah pasar, itu kita pindah pedagang dan premannya. Premannya dijadikan *security*.

Proses mendidik PKL

Tapi mendidik PKL untuk rapih dan bersih itu tidak gampang, hahaha.. Tapi ya harus terus, mengedukasi mereka harus terus. Tapi dari yang dulu [kondisi sebelumnya – Pen.], waduh waduh, sudah nangis sepertinya. Ada 23 lokasi PKL yang kita pindahkan, pasar ada 17, sekitar 60% lebih sedikit. Kalau hunian liar sudah hampir 6000-an yang dipindahkan.

Proses pembenahan Stadion Manahan dari PKL

Tadi PKL mengelilingi Stadion ini, penuh. Sampai ujung sana. Ini dulu tamannya ancur-ancuran. Coba, kota yang sebegini bagusnya, dulu hancur. Kita juga biarin beberapa aja, biar orang bisa tahu, *before* dan *after*-nya. Ada juga yang sampai ditembok, permanen. Ada juga parkir mobil. Juga buat tidur, bukan buat jualan saja. Sekarang jadi taman. Caranya mindah gimana? Ya itu, komunikasi publiknya kalau sudah ketemu, gampang.

Ada 40-an yang belum bisa dipindahkan. Nunggu anggaran, tapi sudah (disetujui), sudah komunikasi sejak 2 tahun yang lalu. Kalau duitnya ada ya setahun *rampung*. Duit-duit yang nggak pakai APBD juga ada [Catatan Peneliti: antara lain, melalui kerjasama pihak swasta untuk memasang iklan].

Premannya apa nggak protes itu?

Iya, pasti protes. Tapi kita taklukkan mereka.

Dengan cara?

Diajak omong. [Preman-preman itu – Pen.] diomongi, (diberitahu tindakan) dia itu keliru. Kan kesadaran kolektif dibangun dari dialog-dialog semacam itu. (Kita) beritahu dia, bahwa dia itu keliru. ‘Sadar tidak?’ ‘Iya Pak...’ Tapi ya bukan cuma sekali dua kali dialog, tapi berpuluh kali, sampai 54 kali (dialog) seperti yang pertama dulu itu [saat pemindahan pedagang di kawasan Banjarsari – Pen.]. (Semua itu tujuannya) untuk mendapatkan *trust* dan kepercayaan. (Awalnya

susah,) tapi sesudah dapet, gampang sekali mindahin ini dan itu, tiga – empat kali (diajak bicara) sudah ketemu (solusinya).

Mengatur waktu jualan para PKL

Sekarang jualan diatur sore saja. Tapi malam nanti bersih, pagi hilang.

Ya apapun mereka, harus diberi ruang. Tapi jangan sampai menjadikan kota kumuh. Kalau yang kecil-kecil ini tidak diberi ruang, masak cuma mall saja, *hypermarket* saja. Mereka (yang kecil-kecil ini) punya hak juga. Nggak papa, kita juga nggak melarang kok. Tapi diberitahu, pagi (hari tempat itu) harus bersih (karena tempat pejalan kaki). Nyatanya bisa.

Berarti Satpol PP kerjanya enak?

Satpol PP di Solo 7 tahun enak. Karena wibawanya sudah ada. Sudah dipercaya. Nggak usah pake pentungan, nggak usah beli pistol, he he... Satpol itu kalau wibawanya sudah ada, (orang-orang itu) diajak ngomong saja sudah pergi. Itu dia, trust dan wibawa sudah ada.

Yang kita bangun kan kesadaran kolektif seperti itu. Bukan represif, enggak.

Jadi pemerintah itu punya wibawa, kalau dipercaya. Ke yang besar tegas, ke yang kecil juga tegas, adil.

14 Februari 2012

Tentang desain pembangunan

Ada kesalahan desain pembangunan. Semestinya uang itu banyak digelontorkan di desa, sehingga perputaran uang semakin banyak di sana. Kalau uang sudah berputar di desa semakin besar, kegiatan di desa akan semakin banyak, sehingga orang tidak berbondong menuju kota. *Digelontorin* sebanyak-banyaknya. Sekarang, 75% uang beredar di Jakarta. Di daerah pun hanya ada di pusat-pusat kota, di desa enggak ada. *Nha*, desain semacam itu yang harus dirombak total.

Kuncinya kan cuma perputaran uang. Dan nggak banyak, kalau 1 desa 1 milyar, seluruh desa di Indonesia cuma 68 trilyun. Nggak banyak. Ini masalah *political will* saja. Tapi (uang 1 milyar) itu sudah besar sekali buat desa. Desanya sudah makmur sekali.

Dulu alasannya selalu karena desa belum siap, nanti dikorup. Padahal daripada dikorup di Jakarta, lebih baik dikorup di desa, karena perputarannya di desa itu juga. Ya harus ada pendampingan *dong*, bukan pendampingan kayak PNPM ini. Untuk konsultannya 80%, 20% untuk rakyat, habis di pendamping. Saya itu *ngenes* liat kondisi didesa. Makan *aja* sulit. Nggak usah jauh-jauh, di dekat Solo banyak sekali.

Yang penting dikonsep, direncanakan dengan baik. Asal ada pertanggungjawabannya. Dulu sebelum saya hanya 3 milyar. Sekarang saya keluarin 10 milyar.

Kita bikin infrastruktur, bikin untuk yang kaya. Mestinya yang di desa dong yang diperkuat, sehingga distribusi barang dan pertanian lebih cepat lagi. Orang punya akses untuk bawa barang ke kota. Lha yang dibuat cuma antar-kota, yang menikmati ya orang kota lagi. Jadi desainnya harus dirombak total. Pertanian, Kelautan, dikasih uang sebanyak-banyaknya. Industri dikurangi. Karena industri bisa hidup sendiri kok, asal diback-up policy, tapi duitnya nggak usah.

Mengenai demo

Tahun pertama, yang demo banyak sekali. Tahun kedua, yang demo sudah jauh berkurang, tinggal 20 sampai 30 persen. Demyanya juga macam-macam, ada yang demo sertifikat tanah, demo angkot, demo supir becak, demo PKL, demo pasar. Saya juga kaget dulu, pertama-tama ibu-ibu pasar datang ke Balaikota nangis-nangis. Kaget saya, dan *ngérés* (terenyuh). Dulu kan (pasar) itu pakai investor, mereka disuruh bayar 140an juta, padahal omzet mereka cuma berapa seorang, ya gulung tikar. Saya juga bingung, saya apain ya. Ya udah, saya minta diberi waktu, tapi kalau 140 juta ya pasti enggak deh, saya usahakan gratis. Nyatanya bisa gratis, (ditanggung) APBD semua. Sekarang kita sudah bangun 17 pasar, semuanya (ditanggung) APBD, bisa. Ini masalah manajemen keuangan saja.

Jadi mereka pakai pola lama: walikotanyamasih bisa diteken, walikotanya main-main, nanti mindah kita karena tanahnya mau dibuat mall... Jadi belum ada trust, belum ada kepercayaan. Tapi begitu saya bikin ijin cepet, sudah, pada kaget, dan mulai terbangun kepercayaan, nah ini ada perbaikan.

Sekarang nggak ada demo. Kalau jarang masih ada, *wong* ndak ada sekarang. Meskipun sebenarnya bagus, sebagai manajemen kontrol dari sebuah pemerintahan, untuk cek dan balans. Sekarang nggak ada demo, adanya rembug kota, rembug kecamatan, rembug warga. Nggak ada demo memang, tapi orang datang nggrudukan ke Balaikota. Tapi untuk dialog, dalam forum intelek. Forum-forum semacam itu yang saya kira menyelesaikan masalah, forum mencari kesepakatan, diskusi untuk yang *win-win*.

Paling terakhir saya didemo 3.500 orang. Saya masuk balaikota saja nggak cukup. Kira-kira 6 tahun yang lalu. Wah itu polisi dan satpol banyak sekali. Saya malah siapin *snack*, dan bilang, sudah nggak usah ada polisi. Saya terima saja dengan wakil walikota.

[Menunjukkan foto mahasiswa diterima di Balaikota – Pen.] Kalau ada demo, saya terima begini. Termasuk mahasiswa, ini saya ajak masuk Saya tanya, maumu apa, kamu tidak setuju apa, konsepmu apa. (Malah) pada bingung, nggak ada yang siap, he he he..

[Menunjukkan orang teriak-teriak di sebuah forum rembug – Pen.] Nah, forum seperti rembug kota semacam ini yang penting. Kerja kita setahun dievaluasi di sini.

Tahun pertama saya rembug kota, isinya orang-orang melotot semua, teriak-teriak. Maunya memarahi walikota yang dulu, tapi yang kena saya.

Saya suka menunjukkan *before and after* di foto-foto. Supaya orang bisa tahu, soalnya kalau lihat sekarang, sudah bagus semua. Kalau lihat ini, bisa tahu, dulu seperti kandang ayam, sekarang seperti bank. Ini kan mentransformasi, budaya tertib, budaya antri.

Ini tempat perijinan. Daridulu saya masih cari ijin ya sudah kayak gitu, berpuluh-puluh tahun. Gimana investor mau yakin? Nah, sekarang seperti bank, ada *counter*-nya, ada *touchscreen* (untuk informasi), orang-orang pakai dasi, ada syarat-syaratnya jelas, transparansi.

Ini kartu kesehatan, awalnya saya didatangi tiap hari, oleh 30, 40 orang yagn sakit nggak bisa ke rumah sakit, sudah di rumah sakit nggak bisa pulang. Kalau tidak diatur, nanti kita kerjanya ngurus orang sakit (saja) dong? Ya memang tugas kita, tapi menjadi strategi kota, strategi pemerintahan agar yang seperti ini bisa terselesaikan. Jadi artinya tersistem. Kalau di daerah-daerah kebanyakan hanya menganggarkan, duitnya dipakai apa tidak jelas, manajemennya kontrolnya tidak jelas. Seperti di Solo, dulu anggaran 1,4 milyar untuk kesehatan, untuk apa? Siapa yang diberi? Nggak jelas. Sekarang sudah ada (datanya), *by name, by address*.

Jadi menurut saya daftar itu penting. Sistem itu penting sekali. Baru carikan duitnya. Sekarang untuk kesehatan 19 milyar. Beasiswa pendidikan dulu 3,4 milyar, sekarang 23 milyar.

Kenapa Bapak di awal memilih KTP?

Itu yang paling mudah yang bisa saya selesaikan, dan paling banyak keluhan. Paling banyak keluhan itu, selain KTP adalah ijin. Saya buat sistem KTP 1 jam itu hanya (dalam) 3 bulan. (Untuk) ijin, (sistemnya saya buat) 6 bulan. Begitu dikeluarkan, lewat SK Walikota, *rampung*.

Bapak melihatnya sebagai program 100 hari?

Iya. Itu penting, ditunjukkan bahwa kita bisa bekerja, nggak omong doang.

Bapak rutin mengadakan survei kepuasan publik?

Iya, ada. Indeks *government service* saya, sangat puas terus. Yang mengadakan lembaga (lain), bukan kita, meskipun dibiayai. Yang puas hanya satu, yang lain sangat puas. Yang puas itu pariwisata, yang lain sangat puas.

Padahal kita maunya ada *feedback*, untuk memperbaiki. Tapi kalau nilainya tinggi terus, jadi bingung juga kita, he he he... Ya membuat yang baru, he he he...

Sebenarnya aspek mikromanajemen, adalah hal-hal yang pemimpin harus turun langsung.

Untuk *main problem*, harus datengi sendiri, hadapi sendiri, dekati sendiri. Atau yang diperkirakan akan jadi problem utama, nah itu harus di-*handle* sendiri. Dulu saya *handle* semuanya Mas, sampai pawai-pawai itu saya *handle* sendiri, rapat saya pimpin, saya yang nentukan. Masak setiap tahun isinya pawai pembangunan, judulnya nggak pernah berubah. Begitu saya, saya ubah, ada *workshop*-nya, judul

berubah, tema berubah, kostum berubah, diperbaharui, dikoreksi terus. Sehingga waktu muncul, sudah mateng. Dulu cuma ada 6 karnaval, sekarang 46 karnaval. Awal-awal harus dikontrol sendiri, sekarang (jalan sendiri karena) standarnya sudah ada.

(Melalui slideshow ini) saya pengen cerita, bagaimana sebuah komunikasi publik itu terjalin, bagaimana Satpol PP saya ganti dari yang tinggi besar jadi wanita. Itu memberikan sebuah efek komunikasi, karena komunikasi ke PKL-nya jadi lebih baik.

Mengenai komunikasi dengan PKL

Dimulainya dari forum-forum diskusi. Awalnya dikumpulkan sedikit dulu, ketua dulu, lalu ketua dan sekretaris, lalu anggota dikit-dikit, lama-lama banyak, sampai 1000 orang, ya di sini, di ruangan ini. Apa ada, perpindahan PKL (di tempat lain) yang kita cuma nyiapin truk, mereka membongkar sendiri? Yang pakai baju daerah seperti ini? Yang PKL-nya membawa tumpeng satu-satu seperti ini? Yang paling penting, memindahkan mereka dengan komunikasi, dengan dialog. Di mana-mana ya sama, isinya ini-ini terus, sampai bosan, nggak papa, karena memang ini yang saya konsentrasikan sampai sekarang.

Sekarang training-training untuk PKL ini sudah rapih. Dulu tidak ter-*manage* dengan baik kan, sekarang sudah baik.

Kekuatan Bapak mungkin adalah sangat mendetil?

Iya, saya kerja itu dulu membuat kursi, sampai ukuran dan sebagainya saya cek sendiri. Saya mbuat bisa, finishing bisa, naruh kontainer juga bisa. Kebiasaan teknis, saya nggak berangkat dari makro. Saya pengennya seperti ini lho, yang membuat itu konsultan, saya mendetilkkan kurang ini dan itu. Maunya, konsep dari saya, bikinkan teknisnya, saya pertajam dan melaksanakan. Dan saya seneng, menikmati.

Itu yang tidak dipunyai negara kita saat ini. Terlalu makro sekali. Banyak sekali desain kebijakan kita, yang tidak mateng, dan tidak didesain dengan turun ke lapangan. Meskipun Menteri pengusaha, juga beda, ada yang (ter-)lahir dengan level beda, lain dengan saya.

Sekarang yang ditunggu dari Pemerintah itu tindakan lapangan. (Sebaiknya pemerintah) tahu-tahu sudah (hadir) di desa mana, tidur di tempat (terjadinya) masalah, (tapi) nggak usah ngomong (ke siapapun). Nanti yang memberitakan kan media. Kadang-kadang saya juga pakai orang ketiga untuk menghubungi media, (untuk memberitahu mereka bahwa) nanti nanti malam saya mau tidur di pasar, atau jam 3 ada di bantaran (sungai). Saya ke saya ngecek sendiri betulan, (tapi) waktu di sana ketemu media kan alami jadinya, he he he... . Media juga diuntungkan. Asal jangan ditunjukkan dengan detil, biar dicari sendiri. Itu yang tidak dikerjakan oleh Pemimpin kita sekarang, yaitu memanfaatkan media dengan cara yang tidak kasar.

Jadi turun ke lapangan itu penting sekali. (Jangan) terlalu banyak teori di atas. Masak sih mereka [pemimpin-pemimpin itu – Pen.] nggak ngerti.

Selepas menghadiri acara guru nasional

Kalau acara guru seperti itu, panitia dan biayanya dari mana?

Biaya sendiri-sendiri. Panitianya kita, tapi penyelenggaranya pusat. Kita ini sering narik acara-acara seperti ini, karena efek ekonominya gede sekali. Bayangkan satu orang belanja 1 juta, 2 juta, dikali 3.000 orang, bisa berapa kan. Bukan main-main, efek acara semacam ini.

Kenapa Solo dipilih?

Ya karena murah. Hotel murah, makanan murah. Dan promosi kita gencar di setiap departemen.

Mengenai tempat pemilihan makan para pejabat

Ketemu dirjen, ketemu menteri, ya ngajaknya makan di soto, di sate, kelas-kelas PKL. Nggak pernah kita ajak ke restoran. Karena kita ingin menyampaikan kesan, keberpihakan kita ke mana. Ini harus tersampaikan dalam tindakan-tindakan seperti itu. Bu Mega [Megawati Soekarnoputri – Pen.] pun saya ajak ke tempat-tempat seperti itu. (Menko Kesra) Aburizal Bakrie juga pernah (saya ajak ke warung). Dia nanya ‘Tempatnya bersih nggak Mas?’ ya gimana, *wong* kelas PKL, ya seperti itu. Awalnya (beliau) nggak mau ikut. Tapi saya bujuk untuk lihat dulu, kalo nggak cocok, nanti tinggal diajak ke tempat yang bersih. Eh, (ketika sudah makan di tempat itu, tamu) yang lain habis 2 piring, dia habis 5 piring. (Kata beliau,) ‘Enak, enak...’ Ha ha ha... .

Iya, (orang dari) provinsi (dan) pusat itu sering mau ngajak pindah ke restoran, katanya nggak menghargai, (padahal) *mindset*-nya itu yang perlu dibenahi. Lha wong orang yang punya restoran sudah kaya-kaya, mau dibikin kaya terus! Kapan yang kecil-kecil jadi kaya, jadi sejahtera. Pola pikir dan sikap seperti itu harus diubah. Tunjukkan pada menteri, pada pejabat, bahwa banyak yang mesti disuntik [diberi dukungan – Pen.] agar mereka bisa lebih baik. Beri kesempatan, beri ruang untuk mereka.

Ya nggak papa, menteri itu kalau diajak ke (warung) soto itu, komentarnya langsung ‘Waaah, enak enak,’ nggak pernah protes kotornya. Nanti siang diajak ke sate. Yang penting saya juga ngirit, ha ha ha...

Mengenai penebangan pohon tanpa ijinnya

Pokoknya kalau ada pohon mau ditebang itu, kalau tidak ijin saya, akan saya polisikan, biar takut.

Lho memang harusnya bagaimana?

Harusnya ya ijin Perda saja, ijin Kepala Dinas saja cukup, ha ha ha... Tapi kalau di sini enggak, harus ijin saya dulu, biar sulit, ha ha ha... Lha wong kita nebangnya 15-20 tahun, enak aja nebangnya. Nebang satu, nanam dua puluh, he he he... .

Mengenai banyaknya warga dari daerah sekitar

Yang pusing adalah hidup di kota sini. Gulanya banyak, ya semutnya banyak. Semuanya dari luar kota: yang ngemis, yang ngamen, 99% dari luar kota semua. Makanya kalau kita ngurusi orang kita sendiri, ya sudah beres. Pergerakan ekonomi naik, perputaran uang naik, ya semakin banyak orang datang. Perubahan yang sering melanda kota ya itu.

Mengenai kunjungan spontan ke Solopos

Saya senengnya *dolan-dolan* [main-main – Pen.] begini, nggak pernah di kantor. Kalau nggak ada acara formal ya *dolan*, he he he...

(Setelah kunjungan)

Ya begini ini, kita ke media, jangan datang pas sedang perlu aja, kayak gini ini kita sedang nggak (ada) perlu, itu mereka lebih menghargai. Kalau kita datang hanya saat kita perlu, nah itu nggak baik. Itu (namanya) komunikasi, hehehe...

Tadi bapak menjawab pertanyaan dengan lugas. Ada persiapan khusus?

Saya ngomong apa adanya kok. Saya biasa ceplas-ceplos. Saya ke situ juga mendadak, *wong* tadi kebetulan jadwal saya kosong, jadi nggak ada perencanaan.

Tadi bapak bilang ada yang off the record. Yakin nggak akan ditulis?

Kalau dia menghargai omongan saya, ya silakan, tapi kalau tidak menghargai dan mereka tulis, dan nggak papa juga, he he...

Kan sebenarnya ada isu-isu sensitif seperti regenerasi...

Ya nggak papa (isu-isu sensitif dibicarakan), biar mereka [masyarakat – Pen.] tau. Itu biar menjadi isu di masyarakat, tapi isu di bawah meja. Nanti kalau ketemu orangnya (yang tadi dibicarakan), juga akan saya omongin kok.

Saya biasa terbuka, Mas. Saya ya orangnya seperti itu, yang pengen saya omong ya saya omongkan.

Tapi tadi kan ruangnya adalah ruang *dolan*. Meskipun saya di ruang formal, saya juga ngomongnya seperti itu. Hanya ada yang saya keluarkan, ada yang tidak.

Publik harus diajak untuk tahu bahwa ada problem, masalah, ya kan, ada persiapan untuk kaderisasi, regenerasi, ya diajak (diskusi). Saya selalu mewacanakan seperti itu, (seperti isu) TransStudio, ya kan? Orang akan memandang saya (menutupi). (Padahal sebenarnya) enggak. (Dengan cara) saya lempar langsung (, saya jadi tahu apakah) ada penolakan tidak. Kalau ada penolakan, jauh-jauh hari saya harus nyiapin dulu, apakah saya perlu komunikasi dengan orang-orang yang di lokasi sana (kawasan TransStudio akan dibangun), dengan masyarakat. Kalo ada (penolakan semakin keras), ya sudah, nggak jadi. Jadi Trans juga tidak dirugikan (karena) Saya (sudah) ngomong jauh-jauh hari sebelumnya [Apabila disetujui, Trans berencana akan mulai dibangun tahun 2013 – Pen.].

Jadi lebih bagus sebuah program itu diwacanakan dulu, diukur penerimaan masyarakat seperti apa, sesuai dengan kultur kita atau tidak... Jangan pemimpin itu senengnya semau gue, (misalnya) saya seneng Trans, langsung didatengin, rakyatnya teriak-teriak (didiemin aja) mana urus.... (Apalagi kalau ada *mindset*) yang penting saya dapat uang, wah repot lagi...

Jadi informasi yang tadi Bapak berikan ke mereka, itu bukan informasi rahasia, namun informasi publik yang belum semua terungkap.

Iya, betul. Semuanya di bawah meja, dan informasi semacam ini juga perlu.

Tadi Bapak ditanya apakah akan mencalonkan di DKI, dijawab dengan hati-hati. Tapi kenapa tidak dibilang tegas dengan “tidak”?

Ya saya bilang saya memang tidak mencalonkan, tapi kalau diajukan siap. Info ini dipakainya terserah, bisa di DKI, bisa di Solo, di manapun, hehehe... Tapi kan panggungnya diberikan ke saya, kenapa saya harus bilang enggak, enggak, iya kan? Tanya DKI kan nggak perlu jawabnya harus DKI kan?

Jadi Bapak memanfaatkan panggung selagi ada?

Iya, *wong* (ada) media kok, hehehe...

Ketika sedang berada di panggung, gimana Bapak mengantisipasi kesalahan ucap?

Ya nggak papa, kalau (saya) salah ucap, ya (saya meralatnya dengan) bilang, ‘wah salah ucap, gitu aja,’ ha ha ha... Nggak usahlah kita terlalu kaku. Kalau kita (melakukan hal yang) salah, ya ngaku aja kita salah, minta maaf. Kalau kemarin (saya) salah ucap, ya bilang saja, ‘salah ucap, ralat lho ya?’ Gitu aja.

Nggak usah ada beban, nggak usah serius-serius. Kalau kita kebebanan [terbebani –Pen.], jadi repot, (melakukan) apa-apa (jadi) salah. (Lebih baik) santai aja.

Kalau kita berkomunikasi dengan siapapun, jangan ada beban di sini [menunjuk dadanya – Pen.]. Jadi kita nggak *loss*. Dan orang melihat itu, ‘ooo ini nggak tulus, ooo ini ada kepentingan,’ orang akan melihat itu. Wartawan kayak tadi juga mesti melihat kita, ‘Ooo, ini bohong aja ini, ini hanya basa-basi.’ Orang akan melihat itu, dan itu tercermin dalam face dan ucapan kita. Masyarakat juga akan melihat, ‘Wah, kepentingan ini, pencitraan ini, pilkada ini...’ jangan dibaca itu.

Tapi kan tidak dipungkiri bahwa Bapak juga ada kepentingan?

Iya dong. Tapi jangan kepentingan asal kepentingan. Apa yang mau kita bangun? Kepentingan pribadi? Kepentingan partai? Atau kepentingan mereka? Itu kan yang harus diarahkan. (Jangan sampai kita dipersepsi) ‘Ooo ini hanya untuk memperkaya diri aja,’ jangan.

Ketika ada pertentangan kepentingan, misalnya antara partai dan publik?

Ooo enggak, karena saya ke partai juga apa adanya. Ya mohon maaf, ada yang bisa bersikap positif ke partai, ada juga yang tidak. Tapi kita ngomong apa adanya. Dan partai juga memaklumi (bahwa) itu adalah wilayah yang lain.

Kita itu ingin memberi (contoh) ke masyarakat, jangan kita ngajak ‘halamanmu kamu hijaukan,’ tapi kantor kita sendiri belum (hijau). Beri contoh aja. Kalau sudah ada contoh gitu, ngomongnya kita enak.

Mengenai masalah penebangan pohon kota secara liar

Kita harus selalu cek di lapangan, di pelayanan, karena masalah-masalah seperti ini. Harus diurus (yang seperti ini). Karena yang begini ini pesanan (orang yang berkepentingan). Karena takut nebang sendiri, bayar (ke oknum) di pertamanan. Gitu, di semua kota juga gitu.

Belum ada upaya pencegahan?

Sebenarnya sudah ada kepala dinas, kepala seksi. Tapi problemnya adalah di sini selalu ada kepentingan-kepentingan. Nah kalau saya, manajemen kontrolnya ada di kita.

Mengenai pemindahan kantor layanan pembuatan KTP di Balaikota

Urusan kecil-kecil, ada yang jatuh lalu memindahkan kantor, harus diurus! Kantornya pindah kalau perlu... Bukan kalau perlu, langsung pindah! Kalau dulu didiemin aja, mau jatuh kek, mau terlentang kek, he he he...

Bapak tidak khawatir melakukan micro-manage?

Oo enggak, enggak. Saya hanya menyisir tempat-tempat yang terlewat. Secara pengelolaan mikro tetap di dinas-dinas. Tapi ada yang seperti itu [kasuistik – Pen.] itu tugas kita. Jangan kita harus makro-makro, endak. Ya harus makro-mikro, tapi mikro yang terlewat, itu yang harus kita sisir. Kalo endak, ya lepas.

Mentang-mentang di atas, hanya makro? Endak, keliru itu. Sekarang ini di level negara begitu kan, terlalu makro, sehingga yang mikro kedodoran. Karena mereka nggak pernah membuat *policy* untuk mikro, karena nggak mengerti mikro.

Boleh pemimpin makro, tapi mikronya tetap harus digarap. Tidak harus kita ngurusin semuanya sampai ke mikronya, juga enggak. Tapi kita harus ngerti, dan tahu cara mendesainnya. Toh nggak ganggu juga, cara begini, memberi perintah seperti tadi juga nggak ganggu kebijakan makronya, tapi dirasakan dampaknya oleh masyarakat, ya tho?

Kalau yang lain mana ada urus, ha ha ha... Kalau saya, saya urus, sampai sedetil itu. Saya nggak ada kerjaan kok, ya harus saya sisir dong. Persoalan-persoalan kota yang bisa saya ingatkan, saya ingatkan.

Kebanyakan masukan saya catat di memo saya. Waktu rapat staf, saya beri tahu ‘Ini, ini, ini...’

Tugas pemimpin itu iya, harus makro. Tapi harusnya tidak hanya itu. Kebijakan makro itu, didesain dari mikro-mikro yang kita lihat, desain mikro yang kita kuasai secara detil, harus menghasilkan kebijakan makro. Harus seperti itu, bukan dibalik-balik. Desain makronya (harus) menginjak tanah.

Kalau ngecek seperti ini, yang bertanggung jawab pada pengelolaan mikro pun merasa diawasi. Jangan global-globalnya saja. Kalau saya dua-duanya, kerjain, he he he... Sudah gitu(pun) aja waktu saya masih longgar, he he he....

Pascapertemuan dengan seorang ibu tidak mampu yang meminta bantuan Jokowi untuk uang sekolah anaknya dan meminta modal usaha

Nah tho, yang kayak begini-begitu ini... . Anaknya dimasukkan ke swasta, disangkanya lebih murah. Padahal kitakan ndak punya akses ke swasta. Kalau masuk negeri, detik ini juga, saya beresin, telpon Kepala Dinas, bebas(kan biaya)! He he he... Tapi yang begitu-begitu saya urus.

Kalau kesehatan dulu ya, tujuh tahun yang lalu, 30-40 orang di depan (Balaikota) ngantri! Itu saya temui satu persatu. Itu problem kota kok, problem masyarakat. Ada anak sakit anaknya nggak bisa masuk rumah sakit, ada yang sudah masuk rumah sakit nggak bisa keluar (karena nggak bisa membayar). Tiap hari, tiap hari! Sekarang kita sudah punya kartu (miskin), beres! Kita membangun sistem, dan sistemnya jalan. Tahu jalan dari mana? Ya sudah nggak ada orang ke sini (Balaikota), ya berarti jalan, he he he...

Bagaimana Bapak menghadapi permintaan di luar sistem?

Ya, beri dari uang gaji bisa, dari uang honor bisa. *Wong* mereka itu mintanya nggak tinggi-tinggi, paling mintanya berapa, 100 ribu, 200 ribu. Itu fakta lapangan, Mas. Nggak usah ditutup-tutupi.

Kalau masalah administrasi, ngapain kita ngurus-ngurus? Toh ada Dinas, ada Sekda. Kenapa walikota atau gubernur lain malah ngurus perijinan? Karena di situ banyak kuenya [banyak uangnya – Pen.]. Jadi bukannya ke lapangan menyelesaikan masalah, tapi malah ngurusin ijin. Karena tanda tangannya ada duitnya, enak, he he he....

Apa yang memotivasi Bapak jadi walikota? Apa karena melihat orang-orang yang seperti barusan?

Saya dulu nggak kepikiran seperti itu. (Cuma) saya melihat kota ini kok semakin jelek, semakin jelek. Gitu aja. Tapi setelah masuk, ternyata kebanyakan ya persoalan gini-gini ini. Dan ini baru saya temukan setelah masuk. Wah, pusing saya, masalah-masalah gini. Bagaimana membuat desain *policy* sehingga yang seperti ini tertangani. Nggak mudah. Karena kadang-kadang menyangkut produksi (yang ingin dilakukan masyarakat sendiri). Misalnya, mau ngajari (Ibu tadi) menjahit, dia nggak bisa jahit, ya tho. Ngajari dulu, lama. Kalau sudah bisa jahit, siapa yang mau beli di tempat dia? Problem lagi. Tapi kalau ini tadi, idenya dari dia. Dia sudah melihat peluang, 'Pak mau jualan gorengan.' Jangan ditanya (modalnya) berapa, langsung aja '100 (ribu) ya?' Nanti kan dia bilang [menawar – Pen.], '200 (ribu) Pak,' ya dikasih.

Ini fakta (yang terjadi). Fakta sejelek apapun harus kita ungkapkan. Supaya bisa kita carikan solusi. Ya tho?

Kadang-kadang masyarakat yang bertemu Bapak, harapannya demikian tinggi, ingin Bapak memecahkan masalah saat itu juga. Padahal Bapak kan tidak sesakti itu...

Iya... tapi kita harus menunjukkan kalau kita sakti, entah bagaimana caranya, ha ha ha... Sudah dipercaya sakti kok nggak bisa memberi kesaktian, ha ha ha... Cek aja ke sana-sini, itu sudah selesai belum, sudah beres belum... Besoknya dicek, sudah belum... .

Pernah ada yang tidak selesai? Bukan karena sistem tapi memang tidak memungkinkan...

Ooo (pasti) selesai, kalau masalah-masalah gitu pasti rampung, karena kecil-kecil. Dan jangan berpikiran seperti orang (kaya) yang minta bermilyar-milyar. (Ini cuma) jualan gorengan, 200 ribu, coba, apa kita nggak *ngenes*? Kalau saya sih *ngenes*.

Itulah yang tidak dilakukan (kebanyakan pemimpin lain). Kenapa saya bisa (mendapat suara hampir) 91 persen, ya karena yang gini-gini ini. Nggak perlu BPS, langsung liat sendiri. Data BPS sama data saya, lebih akurat data saya, ha ha ha...

Apa ada yang langsung mencari Bapak, padahal harusnya datang ke dinas-dinas terkait?

Lho kalau ketemu saya, mereka tau, kalau belum ketemu saya mereka nggak pulang (atau) besok datang lagi.

Kalau di Solo ini menganggap kita kayak dewa. Saya kadang-kadang juga ngeliat nggak bener ini.

Nggak khawatir kultus individu?

Bukan masalah kultus. Persoalan-persoalan ini akan terjawab oleh sistem, bukan oleh individu. Dulu kan gitu juga, duit kita habis untuk hal-hal tanpa program.

Sekarang juga pendidikan misalnya, belum beres 100%. Tapi nantinya semua ada sistem, ya kan? Sistem penganggaran, sistem pelaksanaan di lapangannya akan ketemu. Sama semuanya. Ketemu dengan dialog, ketemu dengan komunikasi.

[Merujuk pada kejadian ibu kurang mampu yang sebelumnya datang meminta modal untuk menjual gorengan – Pen.] (Ada orang) datang, (ngomong tentang) gorengan. Lho datang (orang lain) lagi, kok (ngomong) gorengan lagi? *Ooh*, (berarti) kuncinya di gorengan, he he he... Misalnya begitu.

Bapak mendorong Kadis untuk turun juga, melakukan hal yang sama?

Memang harus begitu. Hal itu yang saya (dorong) ke dinas-dinas semuanya. PU, Dishub, itu orang lapangan, itu harus orang-orang lapangan! Harus menguasai lapangan!

Menanggapi masyarakat yang mau pindah tanpa dipaksa.

Masyarakat itu kalau kita turun itu ya mau (nurut). Kita datang nggak nakut-nakutin kok, kita datang sebagai teman. (Saya bilang) ‘Perbaiki laaah,’ (masyarakat bereaksi dengan) ‘*Inggih Pak, inggih Pak.*’ Tapi ya itu, harus turun. Turun, beritahu, cek. Udah kerjain belum. Kalau udah, ya udah. Kalau belum, beritahu lagi, he he...

(Dialog langsung) memang mikro sekali, tapi ya harus kita kerjakan, gimana kalau tidak. Tapi (turun langsung) seperti itu suaranya (menyebarkan) ke mana-mana. (Masyarakat berkata) ‘Wah kemaren ditegur sama Pak Walikota.’ Itu suaranya ke mana-mana, jangan main-main... Yang lain juga jadi berpikir, ‘Wah, nanti saya (berarti ada kesempatan) ditegur, didatengi. Masyarakatnya (merasa) *on*, karyawan juga (merasa) *on*. Ya (dari) masalah sepele-sepele (seperti) itu.

Nggak usah pake marah-marah, nggak usah.

Yang *ndablek* [keras kepala – Pen.] pasti ada juga tho Pak?

Oo ndak, ndak, selama pengalaman saya itu ndak ada.

Menanggapi bagaimana pemimpin harus bersikap.

Keseharian, gestur tubuh masyarakat harus dibaca. Ooo, itu rakyat saya baru sakit, baru sedih semuanya. Itu harus dibaca. Pemimpin sekarang itu sangat kedodoran itu di situ. Sehingga berbuat apapun itu keliru, karena persepsinya terlanjur nggak bener. Jadi kesulitan, semua salah.

Kalau berani bebas seperti saya, bikin rembug kota, itu baru diacungi jempol. Itu di Porto Alegre berani ngundang (untuk rembug kota) 10 ribu. Saya pengennya ngundang 100 ribu, tapi kita sekarang ini baru 3500. Suatu saat saya mau ngundang 100 ribu, mau memecah rekor. Saya undang masyarakat, mau apa(pun), (tinggal) ngomong.

Saya tiap tahun ada rembug kota, setahun sekali. Di kecamatan ada rembug warga. Bebas mau ngomong apa saja, 800 orang (boleh ngomong apa saja) sama saya, setahun sekali juga. Jangan sampai ada yang *buntet* [tersumbat – Pen.], harus semuanya lancar.

Mengenai perhatian pemimpin ekonomi rakyat

Pemimpin itu kalau membuka kok selalu yang pabrik-pabrik besar, ke tempat itu. Itu memberi persepsi bahwa pemimpin pro sama yang gede-gede, pro pada kapitalis, bukan pro pada yang menderita. Kalau saya, tidur aja di sawah kalau perlu.

Karena kita mau memberi dan nggak ada beban apa saja. Datang malam jam 12, liat becak, liat orang bongkar muatan. Komunikasi yang tidak usah terucapkan, tapi mereka nangkap apa yang mau dikomunikasikan Jokowi ke mereka.

Saya lebih seneng nyapa tukang becak, tukang parkir. Lebih seneng daripada nyapa bos-bos... (Itu) kalau saya. Ada yang manggil ‘Om, Om...’ (Saya jawab) ‘Om-mu itu!’ Ha ha ha.... Gara-gara (kalau keliling) malem-malem (cuma) pake kaos (oblong).

Menanggapi kasus perebutan wilayah jatah trayek oleh para supir angkot

Itu artinya mereka berkekurangan. Terjemahannya kan itu. Serem Mas kalau lihat yang seperti itu. Harusnya pemimpin bisa nangkap seperti itu, ‘Oo rakyat saya baru kesulitan, saya harus datang kepadanya. Mungkin saya nggak bisa menyelesaikan masalahnya, tapi paling enggak membantu sedikit, supaya mereka punya harapan.’ Bahasa-bahasa (dukungan) semacam itu yang semestinya (disampaikan). Jadi kalau Dahlan (Iskan) ngomong, ‘Ada *hope!*’ Nah, he he he...

Bapak itu di media sering disandingkan dengan Dahlan...

Tahu juga tho, he he he... Terutama di Twitter, he he he...

15 Februari 2012

Berbicara peran pemimpin dari awal dalam konteks panen raya

Seharusnya berperan dari awal. Misalnya ada varietas baru. Naah, nanti tiga bulan lagi, (panen pasti) naik tiga kali (lipat), saya sendiri nanem, nanti saya yang manen. Naah, dia berperan dari awal. (Bukan) kayak gini, dateng-dateng manen, padahal yang nanem juga petani.

Peran itu ya di situ sebetulnya. Ya tho? Ya ndak? Peran itu di situ.

Gaya kepemimpinan kita nggak berubah. Daridulu: seremonial. Tidak mendesain bagaimana strateginya. (Padahal) semestinya seperti itu kan. Konsentrasi di beras, atau di buah-buahan, misalnya. Pembagian diatur, supaya tidak jalan sendiri-sendiri. Sekarang kan jalan sendiri-sendiri. Bener itu kalau ada yang ngomong (negara) *autopilot*. (karena) strategi produksi tidak dibangun, (industri dan) infrastruktur diatur. Kalau seperti sekarang ini, campur-campur, nggak efisien.

Kalau (menurut) saya sih harus tau desain. Kalau angka teknis sih enggak, tapi kalau desain, ya harus tau.

Mengenai alasan berkeliling

Kalau kita berjalan dan keliling, itu akan kelihatan, kalau yang main-main [pungutan liar dan korupsi – Pen.] di sana berkurang. Lama-lama jadi kebiasaan. Dan ternyata (setelah biasa), *fine-fine* aja mereka.

Mengenai perumahan kumuh yang saat itu baru saja Jokowi dan Peneliti lewati

Total waktu yang diperlukan untuk mengubah dari kumuh sampai bersih berapa lama?

Enam bulan. Diskusi enam bulan, pindah, langsung dihijaukan. Tata ruangnya awalnya bagus sekali. Tapi terus banyak yang berubah. Yang tempat ini jadi hunian, di Sriwedari juga begitu. Padahal aslinya taman, taman raja, taman kota. Jaman dulu Mangkunegoro sudah bikin, kok dirusak, padahal bagusya seperti ini. Nah, dalam perjalanannya, ini kita perbaiki lagi. Saya berikan kera, rusa, bebek.

Sekarang kalau siang ini, yang datang masyarakat, kadang-kadang ngadu-ngadu. Ya ruang komunikasi itu di tempat-tempat seperti begini. Tapi sekarang udah nggak banyak. Tahun ketiga, keempat itu masih banyak, tapi sekarang sudah nggak ada.

Terkait persetujuan dengan Gubernur, membicarakan satu wilayah provinsi yang tidak diutilisasi.

Mau saya perbaiki, nanti *gelut* [berkelahi] lagi, he he he... Dulu tempat ini kita minta untuk kita pakai (menjadi) hutan kota. Delman (tadinya berantakan) seperti itu, harus kita atur. Kita biarkan hidup, tapi harus ikut aturan.

Kalau yang masalah-masalah pribadi datang ke Bapak?

Orang kesurupan saja, minta disembuhin sama Jokowi, saking saktinya, he he he... Tak sembuhkan ya sembuh. *Wong* sakti kok.

Kalau anak-anak sakit, *anget* [suhu badannya tinggi – Pen.], sering itu ke tempat saya. Saya ambil es, saya tempel di kepalanya, bilang, sembuh... (Begitu) pulang, (langsung) sembuh, he he he... Ada aja... Orang sakit, orang kesurupan... Orang curhat (sih) tiap hari. Komplit.

Sepertinya orang sudah melihat (seperti apa ya), nggak tau ya... Tapi anak-anak itu ya gimana ya, sudah di-opnam, tapi kok malah pengen ketemu (saya). Saya 'sembuhin,' saya bilang kalau belum sembuh ke sini lagi. Eh, (ternyata) nggak ke sini lagi, berarti sudah sembuh, he he he...

16 Februari 2012

Mengenai kebijakan baru untuk PNS Pemkot mengenakan pakaian beskap tiap hari Kamis

(Sekarang yang pakai beskap) pegawai dulu, 11 ribu. Nanti sekolah 200-an ribu anak-anak. (Tapi) semester depan. Nanti penjahitnya kebanjiran order, bingung, gantung diri, he he he...

Pascadialog dengan perwakilan pedagang Sriwedari yang mengajukan empat permintaan

Bapak sudah tau ada isu itu?

Oo ya sudah. Saya itu begitu-begitu itu tau dulu. Jadi mereka datang, saya sudah bawa jawaban. Tapi ya jangan semuanya langsung diputusin. Biar nggak keliatan mudah gitu lho. Itu teknik bernegosiasi, *bargaining*, untuk mencapai sebuah kesepakatan, supaya (mereka merasa) ‘Oh, kita menang.’ Padahal yang memang sudah kita rancang.

Jadi sebelum Bapak masuk ruangan, Bapak sudah tahu apa yang akan mereka minta?

Sudah. Sejak sebelum pertemuan sudah tahu beberapa, tapi ada yang baru tahu tadi. Artinya apa? Standar keinginan mereka makin naik. Nggak apa-apa, masyarakat memang harus diajari seperti itu.

Bapak tahunya dari mana?

Ya dari mereka. Entah ketemu di mana. Tapi satu orang yang ngomong. (Dari situ kita tahu) ‘Oh ada permasalahan.’ Lalu cek ke Dinas, (dan mereka menyatakan) ‘Oh iya Pak ada (masalah) ini dan itu.’

Permasalahan kita kuasai karena komunikasi-komunikasi langsung seperti itu. Dan tadi mereka datang sendiri, mendadak. Tapi yang seperti itu harus ditemui, jangan sampai pemimpin ada masalah (justru) menghindar. Meskipun bertemu (cuma) lima menit, sepuluh menit, (tetap) temui. Masalah (yang) belum selesai, nanti bisa diselesaikan di lapangan. (Dengan ditemui seperti itu) sudah senang mereka, apalagi (ditemui) di lapangan.

Yang banyak kan pimpinan kita kalau didemo malah (menghindar) lewat pintu belakang. Kalau pas di luar, (malah) bilang, ‘Oh saya baru di luar.’ Kalau saya, (justru) saya datangi. (Kalau mereka) ke kantor, datangi (dan ditanya) apa sih maunya. (Hal ini) supaya tidak menjadi besar. (Masalah) seperti ini, kalau ada orang memprovokasi, gampang menjadi sebuah letupan besar. Padahal isunya mudah diselesaikan sebetulnya, kalau kita hadapi.

(Kejadian pembakaran kantor Bupati) Bima itu sebenarnya masalah kecil. Nggak (perlu) sampai membakar (kantor) kabupaten. Dulu sebelum (demonstran) digebuki polisi, bupatinya harusnya datang (dan tanyakan) apa masalahnya, wah (kalau) berat, maka dicabut saja (ijin pertambangan yang membuat masalah itu). Daripada sekarang, kantornya dibakar, banyak yang mati, terakhir ijin tambangnya (tetap) dicabut. Yaah, bodoh aja kayak gitu. Kalau dicabut dulu-dulu, kan bisa diukur, nggak sampai akan ada yang mati. Jadi itu keputusan yang terlambat. Karena apa? Nggak menguasai lapangan! Kenapa nggak menguasai lapangan? Nggak pernah ke lapangan, nggak pernah turun ke bawah! Jadi ada masalah tidak didekati, malah dijauhi.

Solo dulu gitu kan. Balaikota Solo dibakar karena problem-problem seperti ini [permasalahan warga – Pen.] tidak diselesaikan. Jadi begitu ada kesempatan,

(bangunan pemerintahan) dibakar. (Hal ini) karena nggak ada saluran komunikasinya.

Apalagi kalau banyak yang dipendam di hati (dan tidak terungkap). Wah kalau banyak (perasaan) dipendam seperti itu, jangka panjangnya (pemimpin akan) repot karena (hal semacam itu ber-)bahaya.

Mengenai prosesi pertemuan dengan pedagang Sriwedari

Coba (lihat), kalau yang menemui kepala dinas tadi, serius sekali kan?

Dan Bapak sengaja masuk belakangan?

Sengaja dong, he he he... Supaya nggak terlalu serius.

Mengenai demo

Sekali-sekali coba datengi orang yang mau demo, (orang yang baru) siap-siap sedang demo, tahu-tahu didatangi. (Yang) sedang siap-siap, (mendadak) jadi nggak siap kan? Hehehe... Dampaknya (akan) luar biasa, kemudian media akan membaca (dan) rakyat akan membaca sangat positif.

Coba lihat di koran waktu Pak Bibit itu (berbicara hal-hal negatif tentang saya), orang-orang itu *misuh-misuh* (memarahi) Pak Bibit (selama) tiga minggu, hehehe... Tiap hari (ada) demo, tiga-empat lima-enam grup. Kalau nggak kita dinginkan, bisa (bahaya). Demo (pada) Pak Bibit, tapi (tempatnya) di Solo.

Mengenai Laporan Hasil Survei Opinion Leader Jakarta 2011 dari Cyrus

Survei pakar itu kan tidak memilih popularitas. Tapi pengen menyodorkan orang-orang yang punya kapasitas, kapabilitas, *leadership* dan lain-lainnya. Disodorkan ke masyarakat, ke partai. Karena populer itu belum tentu bisa mengatasi masalah kalau sudah jadi (pemimpin). Dan kalau sudah bagus, itu mestinya tugas konsultan (yang berpikir) '*Oh, ini ada orang bagus, tapi belum populer.*' Jadi itu tugasnya konsultan menaikkan popularitasnya. Tapi yang banyak sekarang itu popularitas. Padahal orang yang populer belum tentu bisa manajemen.

Memang itu bukan indikator popularitas dan elektabilitas, tapi kualitas.

8 Maret 2012

Mengenai media yang gemar meliput dirinya

Saya itu nggak pernah mikir. Masak media saya tolak, kan nggak mungkin. Lha wong yang lain-lain, gubernur, bupati itu untuk diliput media pada mau mbayar kok, 300 juta aja dibayar, untuk masuk media. Kan nggak murah kan. Lha kalau saya malah dicari kok.

Bapak sendiri punya konsultan komunikasi nggak sih?

Ya temen-temen aja. Temen-temen informal. Yang formal-formal malah nggak pernah. Kalau yang lain kan punya konsultan-konsultan pribadi banyak sekali. Ngalir aja. Pokoknya orang itu nggak punya beban itu enak Mas. Pengen ngomong kayak tadi ya ngomong aja. Kita rancang-rancang nggak tau, sudah ngomong aja.

Bapak itu saya perhatikan pesannya selalu sama...

Harusnya, pengennya kalau saya ada yang diperbarui terus. Ada juga yang *complaint* ke saya lho, Pak Wali kalau diwawancara kok ngomongnya itu terus, bosan, he he he...

Lebih baik sebenarnya kalau ada yang ngerancang, ada konsultan, (paling enggak) *angle* yang berbeda lah, sudut yang berbeda. Kalau wawancara kayak tadi kan, tau-tau ada wawancara, lho... Mungkin kalau dirancang, gaya bicaranya akan lebih runut... Kalau tadi kan spontan-spontan semua, meskipun memang saya suka yang spontan. Tapi kalau diberi *pointers*, diberi *guidance* yang pendek, saya lebih lincah sebenarnya. Sekarang kan nggak ada. He he...

Ada yang menasehati saya, Pak, nanti kalau kita siapkan, runtut, jadi nggak menarik. Itu memang kekuatan Bapak, spontan, ceplas-ceplos itu. Tapi saya *pointers* itu bukan untuk runtutnya, tapi biar poin-poin penting yang harus saya sampaikan itu, semuanya kena.

Bagaimana sih strategi Bapak mendekati kelompok garis keras? Kalau di Jakarta itu kok seperti nggak bisa...

Jangan masuk ke materi! Kita itu kan sekarang senengnya manggil (mereka) kalau ada masalah kan? Langsung masuk ke materi kan? Ya jangan... Makan ya makan aja, setelah itu nggak ada ngomong apa-apa. Jangan keliatan kita ngundang dia karena butuh (sesuatu). Itu yang keliru kan di situ. Kita sering terjebak di situ. Undang sebagai temen aja. Undang makan-makan, dah, selesai, ngobrol-ngobrol yang nggak karuan aja, nggak ada isinya. Nanti (pertemuan) kedua dan ketiga baru menyentuh topik, tapi di pertemuan berikut.

Jangan keliatan sekali kita ini butuh mereka untuk menyelesaikan masalah kita. Jangan. (Mudah) dibaca itu, terlalu keliatan.

11 Maret 2012

Saya lihat kok Bapak tidak sesibuk bayangan saya.

Ya karena sekarang sudah nggak kayak dulu-dulu. Persoalan-persoalan sudah nggak bertubi-tubi, sudah mulai berkurang. Dulu saya masuk ke Car-Free Day atau Night Market itu ya, orang-orang sudah bilang, 'Pak, anu anu anu... .' Sekarang kalau di Car-Free Day apa coba, hanya orang minta foto... atau (saya diminta) membuka apa gitu. Dulu sih betul seperti itu [banyak kesibukan – Pen.].

Sekarang di sini tantangannya sudah nggak kayak dulu. Ini kan hanya kecil-kecil. (Taman Wisata) Jurug yang belum beres (teknis pengelolaannya), nanti dilelang juga sudah beres. Tantangan-tantangan beratnya sudah selesai.

Kalau terlalu dekat, khawatir nggak tanggapan publik, “Ah, gantinya tidak seperti Jokowi...”

Enggak kok. Saya siapkan orangnya saja, beritahu bahwa masyarakat perlu yang seperti itu. Nanti orangnya ada kok, saya lihat ada orang-orang yang senang melihat permasalahan rakyat, menyelesaikan permasalahan rakyat.

Bapak mudah tertantang?

Orang bisnis memang senang tantangan. Dan tantangan itu pasti ada resikonya. Tapi di bisnis, semakin besar tantangan, keuntungan itu juga besar. Di politik juga sama, seperti itu. Hanya profitnya diganti, kalau saya adalah nilai, *value*.

Itu bagian pekerjaan saya, mendesain. Saya senang yang begitu-begitu.

Memikirkan ke depannya apa?

Saya nggak pernah berfikir *next step*-nya apa Mas. Saya hanya berpikir bekerja. Kalau waktu memakai saya, saya akan dipakai. Kalau enggak, ya sudah enggak usah. Nanti waktu yang akan memanggil. Jangan berpikir jabatan ke atas. Kita kerja saja yang baik. Itu akan ada yang menilai, yang menilai itu waktu.

Kita bekerja saja dengan baik. Kalau ada hasilnya, itu salah hasilnya yang muncul. Jangan kita yang mengharap hasilnya, jangan.

Dan saya nggak pernah menikmati hasilnya. Mobil saya tidak pernah birahi. Rumah saya tidak pernah birahi. Kebetulan anak istri saya juga enggak, jadi saya enak juga. Kalau mau ya bisa saja dibelikan mobil satu-satu. Tapi ya buat apa? Mendidik apa?

Beda hubungan pemimpin dan rakyat dulu dan sekarang, setelah desentralisasi?

Ya harusnya sama. Artinya apa? Ada komunikasi, ada dialog dan pendekatan dengan rakyatnya, selalu mendengar apa yang menjadi keluhan rakyatnya. Dan selalu ada di tengah-tengah masyarakat yang terkena masalah dan di tempat yang ada problem. Dulu dan sekarang harusnya sama saja. Tapi mungkin caranya yang berbeda: kalau dulu mendengar bisa saja langsung, sekarang mendengar lewat Twitter dan SMS sama saja.

Dan itu harus. Harus merasakan rakyatnya itu berada di posisi apa. Lha sekarang ini, seperti tadi, kan tidak sambung antara yang di atas dengan yang di bawah. Saya nggak ngerti, karena mereka hanya melihat di permukaannya saja, atau mereka tahu tapi nggak ngurus.

Apa sekarang rakyat lebih berkuasa?

Iya. Dan itu kok ya nggak disadari, gitu lho, bahwa suara mereka diperlukan, apalagi dalam proses demokrasi sekarang ini. Kenapa nggak ada yang turun ke bawah, kenapa nggak ada yang di dekat rakyat, kenapa kok selalu menunggu untuk mendengar mereka. Saya heran gitu lho, ini yang bodo siapa. Iya dong.. ini kan pilihan langsung. Rakyat kan lama-lama kan pintar. Nanti lama-lama banyak pemimpin yang dibohongi rakyat. Bukan seperti sekarang. Nanti suatu saat pemimpin akan bingung, 'kelihatannya saya ganteng, kok nggak ada yang milih?' Nah, kapok, ternyata kalah. Sudah memberi uang di mana-mana, ternyata kalah. Nanti akan kejadian seperti itu, kalau nggak memperhatikan rakyat dengan benar.

Terakhir, apa kata kunci sukses Bapak sebagai walikota?

Sebanyak mungkin dialog. Sebanyak mungkin berada di tengah-tengah mereka yang berbicara, terutama di tempat-tempat yang rakyatnya menderita, bukan di tengah orang yang senang-senang, nggak *make sense* itu. * * *

